

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

RKPD

TAHUN 2023



**PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 31 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KOTA MADIUN TAHUN 2023**





WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2023

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan bahan pembahasan lebih lanjut Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun dan Badan Anggaran DPRD Kota Madiun untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 yang dilaksanakan bersama *stakeholders*.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 4 Juli 2022

WALIKOTA MADIUN,

Ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di M A D I U N
pada tanggal 4 Juli 2022

**a.n WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH**

Ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 31/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19750117 199602 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	- 1 -
1.1 Latar Belakang.....	- 1 -
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	- 5 -
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	- 8 -
1.4 Maksud dan Tujuan.....	- 9 -
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	- 10 -
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	- 12 -
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	- 12 -
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	- 13 -
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	- 20 -
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	- 38 -
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	- 104 -
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD.....	- 115 -
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	- 266 -
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	- 266 -
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	- 270 -
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	- 293 -
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	- 293 -
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 – 2021.....	- 298 -
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Madiun Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	- 301 -
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2023.....	- 304 -
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	- 306 -
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	- 307 -
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	- 320 -
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	- 335 -
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	- 335 -
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	- 337 -
4.2.1 Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	- 338 -
4.2.2 Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	- 344 -
4.2.3 Prioritas dan Tema Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023.....	- 349 -
4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023....	- 361 -
4.2.5 Inovasi Daerah dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023.....	- 364 -
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	- 366 -
5.1 Program Prioritas Daerah.....	- 366 -
5.2 Rencana Pendanaan Daerah.....	- 697 -
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	- 699 -
6.1 Indikator Kinerja Utama.....	- 699 -
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	- 701 -
BAB VII PENUTUP.....	- 768 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun	12 -
Tabel 2. 2 Kondisi Iklim di Kota Madiun Tahun 2021	15 -
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021	17 -
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 s/d 2021	18 -
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2021- 19 -	
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2021	20 -
Tabel 2. 7 Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2017 s/d 2021 (Rp. Milyar)	20 -
Tabel 2. 8 Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus Kota Madiun Tahun 2017-2021-	21-
Tabel 2. 9 Jumlah PMKS dan Persentase PMKS Kota Madiun Tahun 2017 – 2021	23 -
Tabel 2. 10 Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2017 – 2021	24 -
Tabel 2. 11 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2017 sampai dengan 2021	25 -
Tabel 2. 12 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2017 sampai dengan 2021	26 -
Tabel 2. 13 Indikator Kinerja Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 – 2021 -	26 -
Tabel 2. 14 Angka Kematian Ibu Di Kota Madiun Tahun 2017 – 2021	29 -
Tabel 2. 15 Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun Tahun 2017-2021	31 -
Tabel 2. 16 Balita Gizi Buruk Di Kota Madiun Tahun 2017-2021	33 -
Tabel 2. 17 Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2017 – 2021	35 -
Tabel 2. 18 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan, Tahun 2021	38 -
Tabel 2. 19 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2021	39 -
Tabel 2. 20 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2018 – 2021	40 -
Tabel 2. 21 Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	45 -
Tabel 2. 22 Bidang Pendidikan Kota Madiun, 2021.....	46 -
Tabel 2. 23 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2021	47 -
Tabel 2. 24 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2017-2021.....	48 -
Tabel 2. 25 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2017-2021	49 -
Tabel 2. 26 Jumlah Kasus KLB Di Kota Madiun Tahun 2021	50 -
Tabel 2. 27 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Di Kota Madiun Tahun 2017 - Tahun 2021	50 -
Tabel 2. 28 Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri Di Kota Madiun Tahun 2017-2021 ..	52 -
Tabel 2. 29 Puskesmas Dan Pustu Di Kota Madiun Tahun 2018 – 2021	53 -
Tabel 2. 30 Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta Di Kota Madiun Tahun 2017 - 2021	54 -
Tabel 2. 31 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan Tahun 2018-2021.....	54 -
Tabel 2. 32 Bidang Kesehatan Kota Madiun, 2021	62 -
Tabel 2. 33 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun, Tahun 2017-2021 -	63-
Tabel 2. 34 Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun, 2021	63 -
Tabel 2. 35 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2021	64 -
Tabel 2. 36 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2021	65 -
Tabel 2. 37 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	67 -
Tabel 2. 38 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2018- 2021	68 -
Tabel 2. 39 Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2021	70 -
Tabel 2. 40 Bidang Sosial Kota Madiun, 2021.....	71 -

Tabel 2. 41 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017 -2021	- 72 -
Tabel 2. 42 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun Tahun 2017 – 2021	- 77 -
Tabel 2. 43 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2017-2021	- 81 -
Tabel 2. 44 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2017-2021	- 83 -
Tabel 2. 45 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Madiun, Tahun 2017-2021.....	- 83 -
Tabel 2. 46 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2017 – 2021	- 84 -
Tabel 2. 47 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota Madiun Tahun 2020 – 2021	- 85 -
Tabel 2. 48 persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun, 2017-2021.....	- 86 -
Tabel 2. 49 Jumlah UMKM Non BPR/LKM dan Usaha Kecil Mikro di Kota Madiun, Tahun 2017-2021	- 87 -
Tabel 2. 50 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2021	- 87 -
Tabel 2. 51 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun.....	- 89 -
Tabel 2. 52 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2021	- 91 -
Tabel 2. 53 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2017-2021.....	- 93 -
Tabel 2. 54 Data Urusan Kearsipan di Kota Madiun Tahun 2017-2021	- 93 -
Tabel 2. 55 Data Perkembangan Perikanan di Kota Madiun, Tahun 2017-2021	- 94 -
Tabel 2. 56 Data dan Informasi Urusan Pariwisata di Kota Madiun, Tahun 2017-2021.....	- 95 -
Tabel 2. 57 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian di Kota Madiun, Tahun 2017-2021.....	- 95 -
Tabel 2. 58 Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, 2017-2021.....	- 96 -
Tabel 2. 59 Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2018 – 2021	- 96 -
Tabel 2. 60 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan di Kota Madiun, Tahun 2017-2021	- 98 -
Tabel 2. 61 Jumlah Pelanggaran Pegawai dan Hukuman yang Dikenakan, Tahun 2017-2021-99-	
Tabel 2. 62 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan di Kota Madiun Tahun 2017-2021-99-	
Tabel 2. 63 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kota Madiun Tahun 2017-2021	- 100 -
Tabel 2. 64 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan di Kota Madiun Tahun 2017-2021	- 101 -
Tabel 2. 65 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kota Madiun, 2017-2021.....	- 102 -
Tabel 2. 66 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kota Madiun Tahun 2020 dan 2021	- 103 -
Tabel 2. 67 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2017 s/d 2021 (%)	- 105 -
Tabel 2. 68 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015 s/d 2021-106 -	
Tabel 2. 69 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s/d 2021 (Milyar Rupiah)	- 107 -
Tabel 2. 70 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 s/d 2021 (Milyar Rupiah).....	- 108 -
Tabel 2. 71 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s/d 2021 (%)	- 109 -
Tabel 2. 72 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2017 s/d 2021 .-	- 110 -
Tabel 2. 73 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2017-2021	- 111 -
Tabel 2. 74 Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2017 s/d 2021.....	- 114 -
Tabel 2. 75 Perkembangan IPM Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 s/d 2021	- 115 -

Tabel 2. 76 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Per Urusan Tahun 2021 Kota Madiun	- 116 -
Tabel 2. 77 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2021	- 266 -
Tabel 2. 78 Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun 2021.....	- 268 -
Tabel 2. 79 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	- 270 -
Tabel 2. 80 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	- 272 -
Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2023.....	- 294 -
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2022-2023	- 295 -
Tabel 3.3 Asumsi Makro RKPD Kota Madiun 2023	- 307 -
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2018 s.d Tahun 2023	- 312 -
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2018 s.d Tahun 2022.....	- 317 -
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2022	- 319 -
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Pembiayaan Pembangunan melalui CSR Kota Madiun 2019-2021	- 327 -
Tabel 4. 1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD 2019-2024	- 336 -
Tabel 4. 2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024	- 349 -
Tabel 4. 3 Beberapa Usulan Anggota Dewan Berdasarkan Serap Aspirasi Masyarakat Per Daerah Pemilihan (Dapil).....	- 351 -
Tabel 4. 4 Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023	- 352 -
Tabel 4. 5 Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023	- 357 -
Tabel 4. 6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2023	- 359 -
Tabel 4. 7 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023	- 362 -
Tabel 4. 8 Inovasi Daerah dalam rangka Mempercepat Pencapaian Target Kinerja.....	- 365 -
Tabel 5.1 Kerangka Pendanaan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Beserta Program Dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	- 368 -
Tabel 5.2 Pagu Indikatif Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah tahun 2023.....	-697-
Tabel 6. 1 Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama Kota Madiun.....	- 700 -
Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	- 702 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD.....	3 -
Gambar 1.2 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	9 -
Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kota Madiun	13 -
Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan	17 -
Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017 s/d 2021	18 -
Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2021	19 -
Gambar 2. 5 Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2017 s/d 2021 (Rp. Milyar)	20 -
Gambar 2. 6 Persentase PMKS Kota Madiun Tahun 2017 – 2021	23 -
Gambar 2. 7 Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2017 – 2021	24 -
Gambar 2. 8 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2017 sampai dengan 2021.....	25 -
Gambar 2. 9 Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun Tahun 2017 –2021	30 -
Gambar 2. 10 Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun Tahun 2017-2021	32 -
Gambar 2. 11 Balita Gizi Buruk Di Kota Madiun Tahun 2016-2021	33 -
Gambar 2. 12 Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2017 – 2021	35 -
Gambar 2. 13 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2017-2021	39 -
Gambar 2. 14 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2017-2021	47 -
Gambar 2. 15 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2021.....	48 -
Gambar 2. 16 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun 2015-2021 (tahun)....	49 -
Gambar 2. 17 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Di Kota Madiun Tahun 2017 - 2021	51 -
Gambar 2. 18 Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri Di Kota Madiun Tahun 2017 - Tahun 2021	52 -
Gambar 2. 19 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2017-2021..	66 -
Gambar 2. 20 Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2017-2021 ...	67 -
Gambar 2. 21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2017 s/d 2021 (%)	105 -
Gambar 2. 22 Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2017 s/d 2021 (%)	111 -
Gambar 2. 23 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2017-2021	112 -
Gambar 2. 24 Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2015 – 2021	113 -
Gambar 2. 25 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2015 – 2021.....	114 -
Gambar 2. 26 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Madiun tahun 2021	266 -
Gambar 3.1 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2021 – 2023.....	294 -
Gambar 3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia 2023.....	296 -
Gambar 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur 2023.....	297 -
Gambar 3.4 Arah Kebijakan Ekonomi Dalam RPJMD Kota Madiun.....	298 -
Gambar 3.5 Arah Kebijakan Penanganan Covid-19 Kota Madiun.....	305 -
Gambar 3.6 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023.....	305 -
Gambar 4. 1 Keterkaitan Visi antar Level Pemerintahan	335 -
Gambar 4. 2 Hubungan antara Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024	336 -
Gambar 4. 3 Hubungan antara Visi, Misi, Arah Presiden dan 7 agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	338 -
Gambar 4. 4 Tema, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	341 -
Gambar 4. 5 Major Project dalam RKP Tahun 2023	343 -
Gambar 4. 6 Hubungan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019–2024.....	344 -

Gambar 4. 7 Keselarasan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Jawa Timur.....	- 345 -
Gambar 4. 8 Keselarasan Tema dan Arah Kebijakan Nasional dan Jawa Timur	- 345 -
Gambar 4. 9 Pembagian Kawasan percepatan Pembangunan di Jawa Timur	- 346 -
Gambar 4. 10 Pembagian Klaster Wilayah Pembangunan Jawa Timur	- 347 -
Gambar 4. 11 Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2023-	352 -
Gambar 4. 12 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023	- 358 -
Gambar 4. 13 Perkembangan Tema Pembangunan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2018-	2023
	- 361 -
Gambar 4. 14 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Kota Madiun, Provinsi Tahun	2023
	- 362 -
Gambar 4. 15 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023	- 362 -
Gambar 4. 16 Kerangka Inovasi Daerah Kota Madiun Tahun 2023.....	- 364 -
Gambar 5. 1 Belanja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	- 367 -

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2021	- 299 -
Grafik 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional	- 300 -
Grafik 3.3 Gini Rasio Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2020	- 300 -
Grafik 3.4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2023	- 301 -
Grafik 3.5 Proyeksi Inflasi Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024	- 302 -
Grafik 3.6 Proyeksi TPT Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024	- 303 -
Grafik 3.7 Proyeksi Ketimpangan pendapatan Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024	- 303 -
Grafik 3.8 Proyeksi Tingkat kemiskinan Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.. ..	- 304 -
Grafik 3.9 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2018–2023.....	- 308 -
Grafik 3.10 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2018–2023	- 308 -
Grafik 3.11 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2018–2023	- 309 -
Grafik 3.12 Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2018–2023	- 310 -
Grafik 3.13 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2018–2023	- 310 -
Grafik 3.14 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2018–2023.....	- 313 -
Grafik 3.15 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2018–2023	- 313 -
Grafik 3.16 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2018–2023	- 314 -
Grafik 3. 17 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2018–2023.....	- 314 -
Grafik 3. 18 Perkembangan Belanja modal Kota Madiun Tahun 2018–2023	- 315 -
Grafik 3. 19 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2018–2023	- 315 -
Grafik 3. 20 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun Tahun 2018–2023.....	- 316 -
Grafik 3.21 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2018–2023 (Milyar Rupiah)	- 318 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dan penting dalam proses pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan yang baik merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipenuhi dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan merupakan acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tersedianya dokumen perencanaan pemerintah daerah merupakan kewajiban bagi daerah dan bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) untuk 20 tahun, rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJMD) untuk 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) atau tahunan.

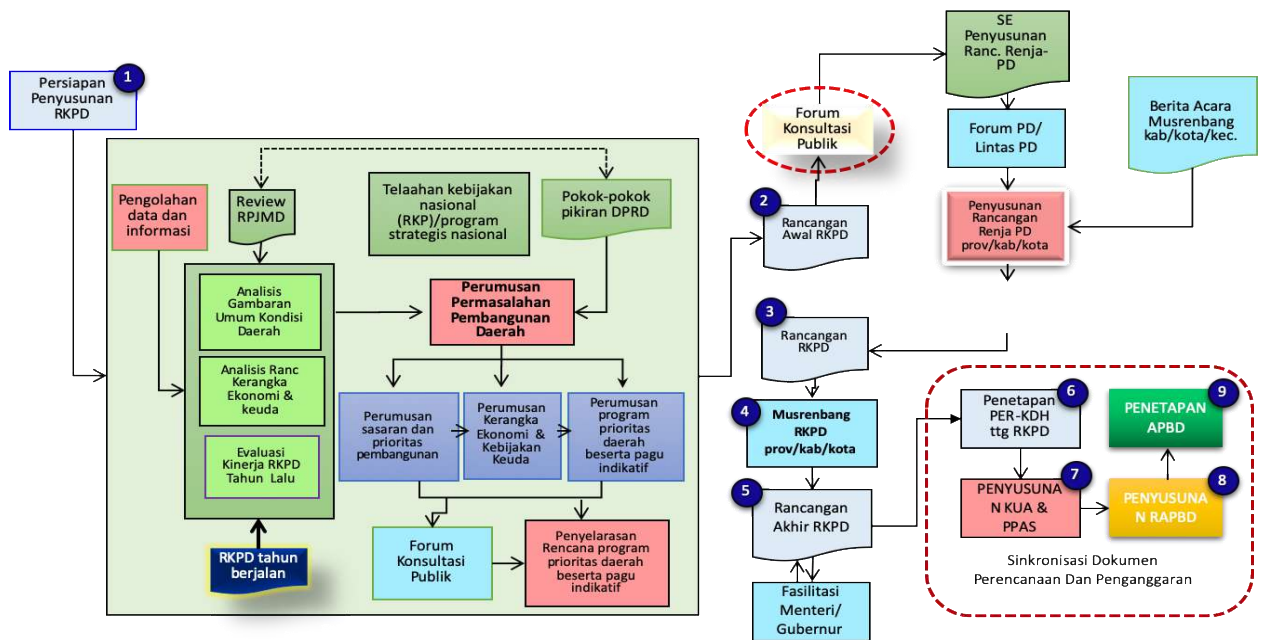
RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: 1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (R-APBD); 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan 4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2023 disusun melalui lima tahapan utama sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan RKPD meliputi :

- (1) persiapan penyusunan RKPD,
- (2) penyusunan rancangan awal RKPD,
- (3) Penyusunan rancangan RKPD,
- (4) pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota,
- (5) perumusan rancangan akhir RKPD dan
- (6) penetapan RKPD.



Penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 mengacu pada RKP pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur tahun yang sama. Berbagai isu dan tantangan strategis dalam RKP tersebut diantaranya adalah pemulihan dampak pandemi COVID19 yang sudah terjadi dari awal tahun 2020. Covid19 ini tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan saja, namun juga pada sisi ekonomi, sosial serta keuangan negara dan daerah. Oleh karena itu, kebijakan daerah Kota Madiun Tahun 2023 di arahkan dan di fokuskan pada sinergitas dengan kebijakan pemerintah di atasnya untuk melanjutkan kebijakan di tahun 2021 mengenai percepatan pemulihan ekonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari tema pembangunan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Madiun 2023.

Dalam menyusun RKPD Kota Madiun Tahun 2023 telah melibatkan para pemangku kepentingan dan dilakukan berbasis SIPD. Para pemangku kepentingan turut berperan serta melalui Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan guna untuk menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun, rancangan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dan pemangku kepentingan yang relevan sebagai penerima manfaat. Selain Forum Konsultasi Publik keterlibatan *stakeholder* juga dilakukan pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari Musrenbang RKPD di kelurahan Kecamatan yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan, forum PD dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD di Kota. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk pengumpulan usulan masyarakat dan pemerintahan paling dasar (Kelurahan) berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah masyarakat. Berdasar dari usulan-usulan tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat di level dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan antara rencana kerja PD dan kebutuhan masyarakat.

Dalam menyusun RKPD Kota Madiun Tahun 2023 telah berpedoman pada perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019 – 2024. RKPD Tahun 2023 secara praktis merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Kota Madiun periode 2019–2024. Selain itu, penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta RPJPD Kota Madiun 2005-2025. Dalam perumusan dan penyusunan perencanaan tahunan ini, Pemerintah Kota Madiun melibatkan semua *stake holders* (pemangku kepentingan), mulai dari masyarakat pada tingkat desa, seluruh OPD, LSM, DPRD, lembaga masyarakat, sampai dengan akademisi.

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Muatan yang terdapat dalam RKPD, antara lain kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

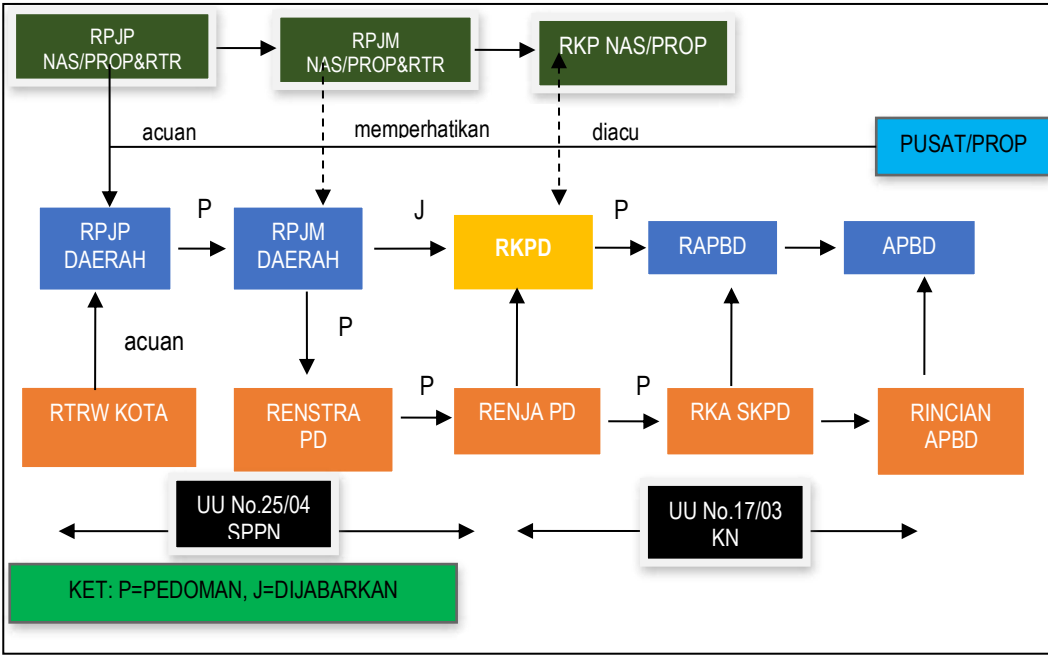
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
15. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2023;
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai bagian terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan, RKPD Kota Madiun Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan dan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) Renstra-PD; (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar Kota Madiun yang terkait dengan dokumen ini antara lain: (1) RPJP Nasional dan Provinsi; (2) RPJM Nasional dan Provinsi; dan (3) RKP Nasional dan Provinsi. Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 2 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kota Madiun Tahun 2023 merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Madiun 2019-2024. RKPD Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023; RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2023 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD dan Renja perangkat daerah Tahun 2023 Kota Madiun. Keterkaitan antar dokumen ini penting bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai pedoman perencanaan bagi semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pembangunan Kota Madiun Tahun 2023. Secara khusus, maksud penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang selaras, terintegrasi dan bersinergi dengan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2023; dan

2. menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
3. menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2023;
4. memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023;
2. menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam menyusun Rancangan dokumen Renja 2023;
3. meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi perencanaan pembangunan antar *stakeholder*, sehingga dokumen perencanaan Tahun 2023 memuat kebijakan publik untuk dapat dijadikan acuan seluruh komponen masyarakat Kota Madiun dalam melaksanakan perannya;
4. menyediakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah dan menginformasikan arah pelaksanaan pembangunan Tahun 2023;
5. mewujudkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023 mengikuti sistematika penulisan Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.

Kota Madiun merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa, merupakan salah satu Pemerintahan Kota yang secara administrasi wilayah masuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kota Madiun sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km². Yang ditunjukkan pada table di bawah ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Taman	12,46	37,50
2.	Kartoharjo	10,73	32,29
3.	Manguharjo	10,04	30,21
Kota Madiun		33,23	100,00

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2021

Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Secara geografi Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya:

1. Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, disebelah utara;
2. Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, disebelah selatan;
3. Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, disebelah timur; dan
4. Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, disebelah barat.

c. Kondisi Topografi.

Ditinjau dari kondisi topografi wilayahnya, Kota Madiun terletak dilembah sungai Madiun yaitu sekitar 30 Km disebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Keadaan topografi di Kota Madiun di bagian selatan mempunyai ketinggian 67 m diatas permukaan laut dan di bagian utara 64 m, sedangkan dibagian tengah ketinggiannya 63 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.

d. Kondisi Geologi.

Ditinjau dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

e. Kondisi Hidrologi.

Secara Hidrologi Kota Madiun terdiri dari air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah selain dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Selain itu terdapat pula anak-anak Sungai Madiun yaitu: Sungai Sono dan Sungai Piring yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian di wilayah Kota Madiun

f. Kondisi Klimatologi.

Kondisi Klimatologis Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Dilihat dari rata-rata curah hujan yang terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei, sedangkan kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan November. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101–300 mm/bulan.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian.

Tabel 2.2
Kondisi Iklim di Kota Madiun Tahun 2021

No	Kondisi Iklim	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Temperatur maksimum (°C)	28,3	29,2	29,4	30,0	30,0	29,7	31,4	31,4	32,2	32,6	30,4	29,4
2.	Penyinaran Matahari (%)	19,1	23,3	34,2	51,8	51,6	49,3	64,1	70,7	55,9	60,4	27,8	28,0
3.	Kecepatan Angin Maksimum (m/detik)*	7,0	10,0	8,0	7,0	6,0	6,0	10,0	7,0	10,0	9,0	9,0	6,0
4.	Jumlah Curah Hujan (mm)*	650,4	675,5	523,3	312,0	155,0	113,0	0,3	4,2	39,5	44,8	596,3	236,6
5.	Tekanan Udara Maksimum (mb)	937,0	939,5	1014,5	938,3	937,3	938,5	937,9	938,5	937,9	939,0	937,0	937,0

Sumber: Kota Madiun dalam Angka, 2021

g. Penggunaan lahan

Pola penggunaan lahan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun meliputi permukiman dengan fasilitas pendukungnya seluas 19,82 km² atau 59,64% dari luas kota. Sedangkan kawasan tidak terbangun meliputi sawah tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang seluas 13,41 km² atau 40,36% dari luas kota. Madiun merupakan daerah urban, sehingga dominasi penggunaan lahannya adalah untuk kawasan terbangun yang berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Untuk kawasan tidak terbangun berupa lahan pertanian yang merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar berada pada Kecamatan Manguharjo.

h. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Madiun telah disiapkan beberapa kawasan pengembangan seperti kawasan pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, permukiman, dan pengembangan aktivitas lainnya. Pengembangan pertanian Kota Madiun melalui padi dan palawija dengan luas lahan yang dipertahankan seluas 892 Ha yang tersebar ditiga kecamtan diarahkan untuk mendorong terwujudnya kedaulatan pangan.

Selanjutnya pengembangan perikanan terfokus pada pengembangan ikan air tawar khususnya ikan lele. Pengembangan sektor peternakan cukup potensial seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Pemerintah Kota Madiun telah mempersiapkan kawasan pengembangan perkebunan seluas 114 Ha dan kawasan pengembangan industri seluas 22,7 Ha yang tersebar di Kecamatan Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo. Selanjutnya perlu adanya perhatian dan pengembangan kawasan pariwisata yang memiliki nilai jual dan layak dipromosikan. Yang perlu diperhatikan dari pengembangan kawasan untuk permukiman yaitu munculnya pemukiman liar dan kepadatan penduduk dimasa mendatang. Terakhir kawasan pengembangan aktivitas lainnya terdiri dari kawasan untuk perdagangan dan jasa seluas 132,70 Ha, jalur perlintasan kereta api seluas 56 km², dan kawasan untuk peningkatan pertahanan dan keamanan seluas 39,37 Ha.

i. Wilayah Rawan Bencana

Dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2019, Kota Madiun termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang. Menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang tinggi di Kota Madiun adalah untuk bencana banjir, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan. Sedang kelas risiko bencana pada kategori sedang adalah tanah longsor dan cuaca ekstrim. Terdapat beberapa kawasan masih mengalami bencana alam berskala kecil. Kawasan yang rawan terjadi bencana alam di Kota Madiun diantaranya adalah:

1. Banjir berupa genangan air di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun yang diakibatkan oleh luapan dari Sungai Piring, Maling, dan Sono yang berhulu di wilayah Kabupaten Madiun.
2. Angin puting beliung di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun.
3. Kebakaran di wilayah Kota Madiun.

2. Demografi.

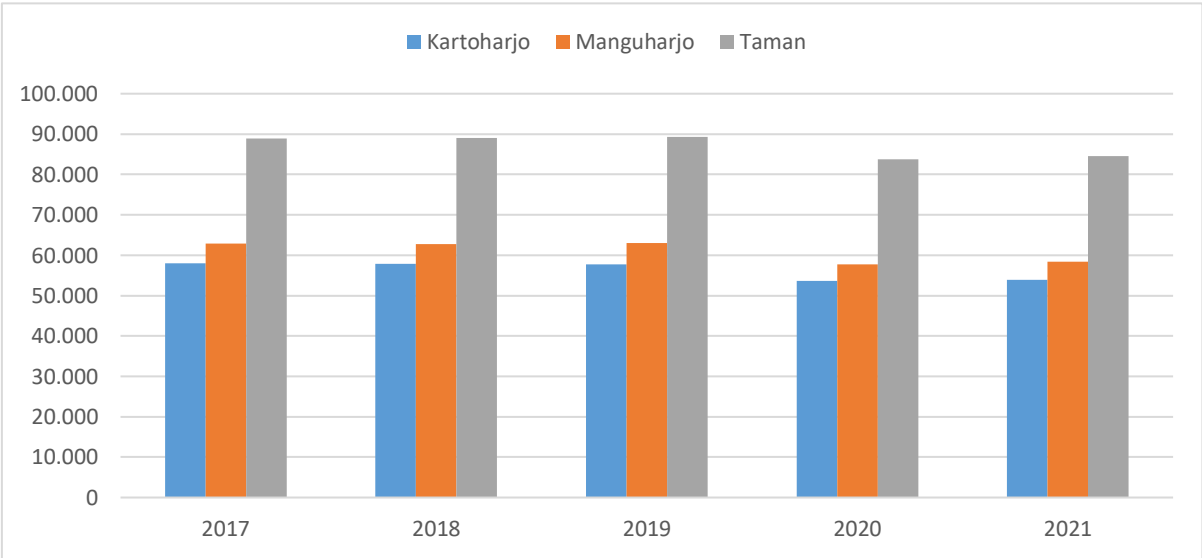
Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan tahun 2021 sebanyak 196.917 jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 53.972 jiwa, Kecamatan Manguharjo 58.431 jiwa, dan Kecamatan Taman 84.514 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan
Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kartoharjo	57.985	57.927	57.748	57.668	55.458
2	Manguharjo	62.879	62.801	63.017	62.884	59.988
3	Taman	88.945	89.069	89.350	89.398	86.006
	Total	209.809	209.797	210.115	209.950	201.452

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2021

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, grafik Jumlah penduduk Kota Madiun menurut Kecamatan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2021

Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan

Persebaran penduduk di Kota Madiun pada tahun 2017-2021 cenderung merata pada setiap kecamatan. Penurunan jumlah penduduk di beberapa Kecamatan sangat sedikit jumlahnya. Sehingga, selama lima tahun terakhir jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman, disusul Kecamatan Manguharjo, dan terakhir berada pada Kecamatan Kartoharjo.

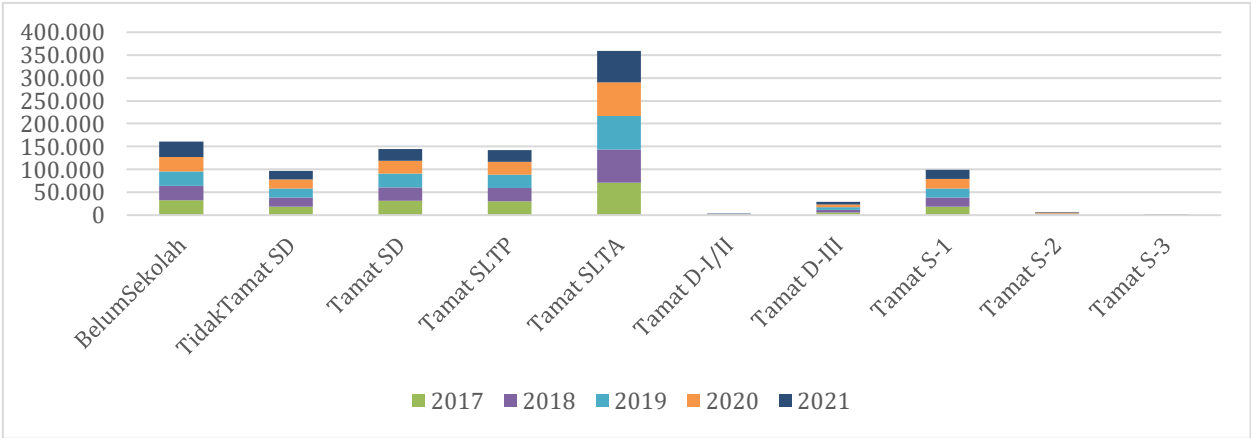
Sementara itu, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sampai Tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 69.421 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 519 jiwa; D-III 5.770 jiwa; S-1 20.170 jiwa; S-2 1.415 jiwa, dan S-3 41 jiwa. Secara lengkap jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2015 s/d 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	32.430	31.258	31.374	32.261	33.177
Tidak Tamat SD;	18.755	19.575	19.887	19.801	18.906
Tamat SD;	30.919	30.169	29.266	28.262	26.006
Tamat SLTP;	29.836	29.487	28.787	28.230	26.027
Tamat SLTA;	71.494	72.405	73.045	73.126	69.421
Tamat D-I/II;	452	468	498	502	519
Tamat D-III;	5.566	5.639	5.761	5.875	5.770
Tamat S-1;	19.065	19.431	20.071	20.442	20.170
Tamat S-2;	1.268	1.334	1.391	1.412	1.415
Tamat S-3.	24	31	35	39	41

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2021

Adapun grafik Jumlah penduduk Kota Madiun menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2021

Gambar 2.3
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2017 s/d 2021

Selama lima tahun terakhir jumlah penduduk Kota Madiun kategori tamat SLTA terus meningkat. Begitu pula dengan jumlah penduduk kategori tamat D-I/II, tamat D-III, tamat S-1, tamat S-2, Tamat S-3 yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, masih sedikit yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA

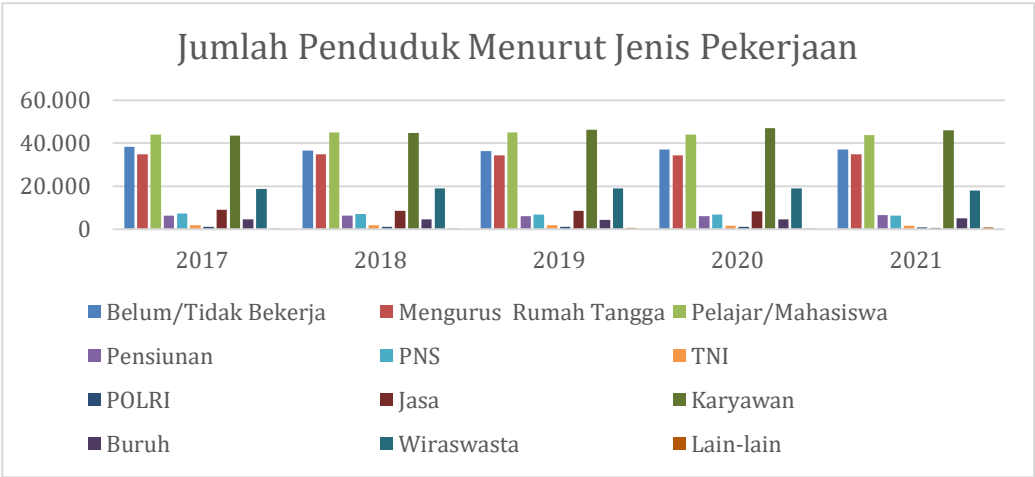
Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun Tahun 2021 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Berikut grafik Jumlah penduduk Kota Madiun menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2017 s/d 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :					
a.Belum/Tidak Bekerja	38.358	36.721	36.390	37.002	37.048
b.Mengurus Rumah Tangga	34.773	34.965	34.412	34.301	34.746
c.Pelajar/Mahasiswa	44.032	45.119	44.940	43.957	43.771
d.Pensiunan	6.270	6.237	6.095	6.046	6.622
e.PNS	7.204	6.992	6.826	6.711	6.252
f.TNI	1.830	1.806	1.771	1.733	1.583
g.POLRI	1.039	1.040	1.027	1.025	955
h.Jasa	8.951	8.449	8.449	8.213	626
i.Karyawan	43.557	44.679	46.311	46.901	46.023
j.Buruh	4.578	4.489	4.390	4.679	5.022
k.Wiraswasta	18.826	18.945	18.994	19.107	17.992
l.Lain-lain	391	355	510	275	812

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2021



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2021

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2017 s/d 2021

Berdasarkan tabel dan grafik jumlah penduduk menurut pekerjaannya, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sektor swasta. Jumlah penduduk Kota Madiun yang bekerja menjadi karyawan setiap tahun mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2021 berjumlah 46.023 orang. Sebaliknya penduduk yang Mengurus Rumah Tangga sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Posisi Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan, maka penduduk yang memiliki pekerjaan wiraswasta jumlahnya juga cukup banyak yaitu hingga tahun 2021 sebanyak 17.992 orang dan yang bekerja pada sektor jasa sebanyak 626 orang.

Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik yaitu PNS, TNI/Polri secara keseluruhan pada Tahun 2021 berjumlah 8.790 orang.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan
Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kartoharjo	27.106	28.352	55.458
2	Manguharjo	29.307	30.681	59.988
3	Taman	42.067	43.939	86.006
	Total	98.480	102.972	201.452

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

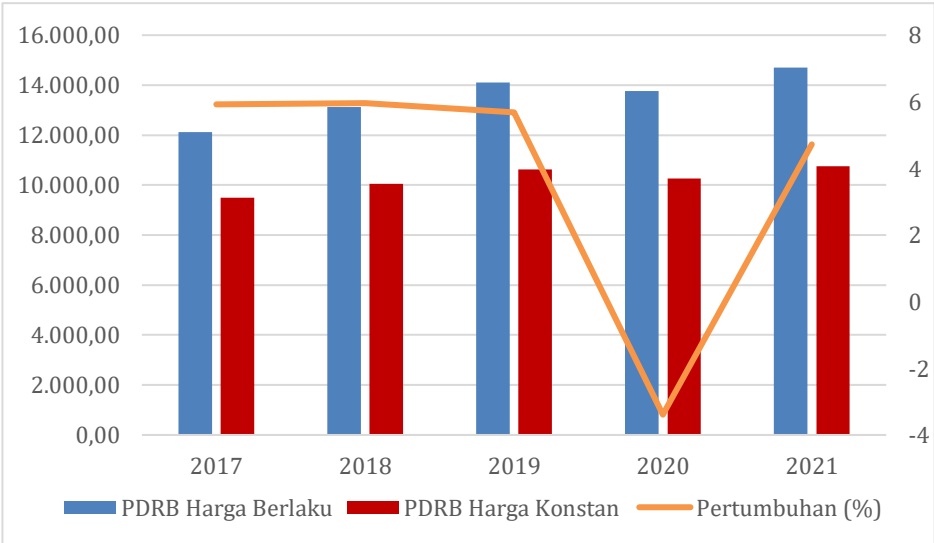
Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total nilai PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2017 s/d 2021 (Rp. Milyar)

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2017	12.111,90	9.486,12	5,93
2018	13.129,87	10.051,71	5,96
2019	14.107,33	10.623,07	5,69
2020	13.769,29	10.262,44	-3,39
2021	14.699,83	10.748,10	4,73

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021

Berdasarkan Data BPS Kota Madiun, grafik Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021

Gambar 2.5
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2017 s/d 2021 (Rp. Milyar)

PDRB Kota Madiun selama periode 2017-2019 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2017 mencapai Rp. 12.111.90 milyar dan pada tahun 2019 meningkat mencapai Rp. 14.107,33 milyar. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga sehingga menjadi sebesar 13.769,29 milyar. PDRB ADHK Kota Madiun juga meningkat dari Rp. 9.486.12 milyar pada tahun 2017 menjadi Rp. 10.623,07 milyar pada tahun 2019. PDRB ADHK mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 10.262,44 milyar. Melihat dari grafik diatas pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2017-2020 masih fluktuatif. Pada tahun 2017-2019 perlahan mengalami peningkatan dan kembali menurun pada tahun 2020. Salah satu faktor terjadinya tren fluktuatif yaitu pengaruh kondisi ekonomi global yang belum membaik. Meskipun demikian, pada tahun 2021 PDRB mengalami pertumbuhan sebesar 4,73 persen seiring dengan semakin membaiknya penanganan pandemi COVID-19 dan mulai terbukanya aktivitas ekonomi.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat diukur dengan persentase tahapan keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus.

Tabel 2.8
Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus
Kota Madiun Tahun 2017 – 2021

KATEGORI	TAHUN									
	2017		2018		2019		2020		2021	
PRA KS	190	0,36%	120	0,23%	88	0,17%	88	0,16%	105	0,19%
KS-I	5.328	10,11%	6.806	12,99%	6.115	11,63%	8.742	15,84%	6.629	11,96%
KS-II	24.502	46,47%	21.322	40,70%	22.001	41,84%	21.822	39,55%	48.686	87,85%
KS-III	18.162	34,45%	19.122	36,50%	19.231	36,57%	19.378	35,12%		
KS-III Plus	4.541	8,61%	5.021	9,58%	5151	9,80%	5.145	9,32%		
JUMLAH	52.723	100,00%	52.391	100,00%	52.586	100,00%	55.175	100,00%	55.420	100,00%

Sumber :Dinas Sosial Kota Madiun Tahun 2021

Persentase Pra KS dan KS-1 pada Tahun 2018 sebesar 13,22% atau jumlahnya 6.926 keluarga, sedangkan tahun 2019 jumlahnya 6.203 keluarga mengalami penurunan 723 keluarga atau 1,42%. Terdapat perubahan pada Tahun 2020 yaitu, persentase Pra KS dan KS mengalami peningkatan 2627 keluarga atau sebesar 4,2%. Hal ini menunjukkan sedikit penurunan kesejahteraan dalam kategori Pra KS dan KS-1. Selain itu, pada tahun 2021 jumlah Pra KS di Kota Madiun mencapai 105 atau 0,19%.

Persentase Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus mengalami kenaikan 1,43% pada tahun 2018 dari jumlahnya 45.465 menjadi 46.383 pada tahun 2019, yang artinya perbaikan ekonomi atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan sedikit. Ditemukan kondisi yang berbeda pada Tahun 2020, persentase Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus mengalami penurunan 4,2% dan jumlahnya menurun menjadi 46.345 dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi yang lain, pada tahun 2021 persentase Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus mengalami kenaikan sebesar 19,58% atau setara dengan 9.075 keluarga.

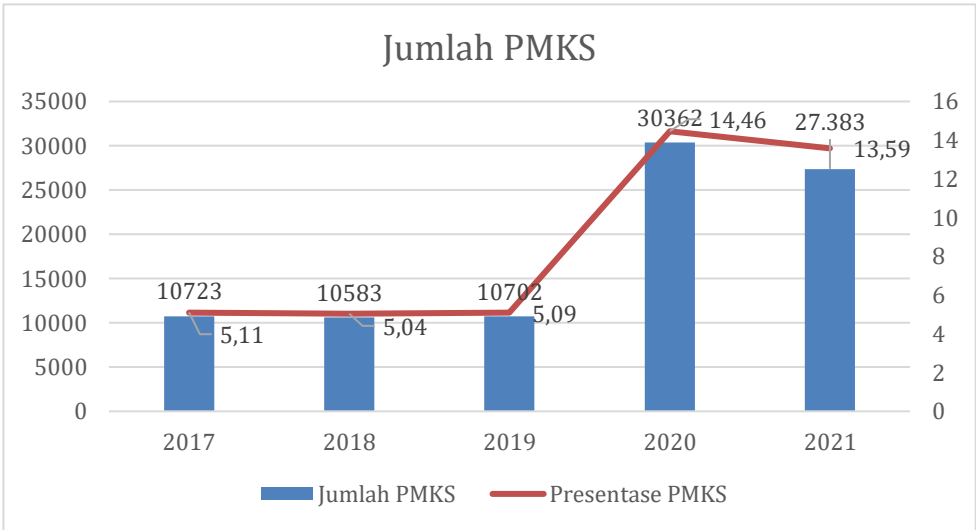
Kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang baik. Penurunan Kesejahteraan pada tahun 2021 disebabkan kondisi ekonomi Nasional dan Global yang tidak stabil. Keluarga di Kota Madiun secara umum termasuk kategori Keluarga Sejahtera II dan III serta III Plus sebanyak 48.686 keluarga atau 87,85%.

Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus, indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator ini membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun. Indikator ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Jumlah dan Presentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.9
Jumlah PMKS dan Persentase PMKS Kota Madiun
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah PMKS	Presentase PMKS
2017	10.723	5,11
2018	10.583	5,04
2019	10.702	5,09
2020	30.362	14,46
2021	27.383	13,59

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2021



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2021

Gambar 2.6
Persentase PMKS Kota Madiun
Tahun 2017 – 2021

Saat ini jumlah PMKS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan PMKS, yang mana jumlah jenis PMKS yang sebelumnya hanya sebanyak 22 jenis, bertambah menjadi 26 jenis PMKS.

Sesuai dengan instruksi pada Peraturan Menteri Sosial tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan dan pengelompokan kembali jenis-jenis PMKS, untuk diupdate data jumlah PMKS secara keseluruhan. Sehingga pada tabel di atas terlihat ada kenaikan jumlah PMKS, Pada tahun 2017 jumlah PMKS yang terdata sebanyak 10.723 orang atau sebesar 5,11% dari jumlah penduduk, akan tetapi jumlah PMKS tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah yang tertangani secara signifikan, dengan capaian 101,74% dengan intervensi program dan kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.

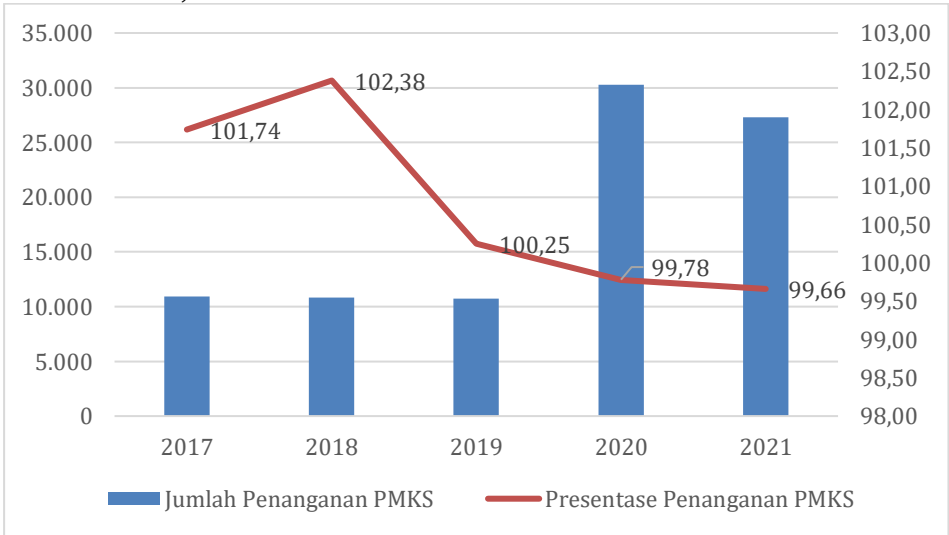
Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah PMKS meningkat drastis. Secara lebih spesifik, pada tahun 2021 jumlah PMKS Kota Madiun mencapai 27.383 orang atau sebesar 13,59% dari jumlah penduduk dengan capaian yang tertangani sebesar 27.290 orang

Jumlah Penanganan PMKS dan Presentase PMKS dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Penanganan PMKS	Presentase Penanganan PMKS
2017	10.910	101,74
2018	10.835	102,38
2019	10.729	100,25
2020	30.295	99,78
2021	27.290	99,66

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2021



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2021

Gambar 2.7
Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2017 – 2021

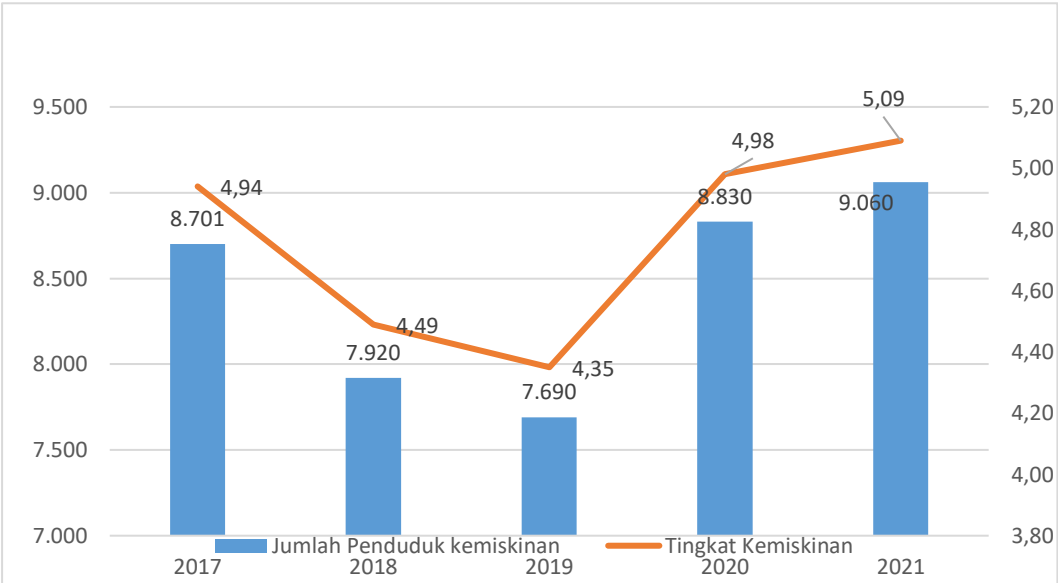
Berdasarkan data dan grafik diatas bahwa pada tahun 2017 dari 7.962 jumlah PMKS yang ada, sebanyak 7.739 jumlah PMKS berhasil ditangani atau sekitar 97,20%. Pada Tahun 2017 hingga tahun 2019 seluruh jumlah PMKS yang ada di Kota Madiun berhasil ditangani, bahkan persentase penanganan PMKS mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah PMKS yang cukup signifikan, sebesar 99,78% atau 30.295 jumlah PMKS berhasil ditangani. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah PMKS mengalami penurunan sebesar 9,81% menjadi 27.383 PMKS dan sebanyak 27.290 jumlah PMKS berhasil ditangani.

Selanjutnya terdapat tabel dan grafik Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2017-2021 sebagai berikut.

Tabel 2.11
Tingkat Kemiskinan Kota Madiun
Tahun 2017 sampai dengan 2021

Tahun	Jumlah Penduduk kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
2017	8.701	4,94
2018	7.920	4,49
2019	7.690	4,35
2020	8.830	4,98
2021	9,060	5,09

Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2021



Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2021

Gambar 2.8
Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2017 sampai dengan 2021

Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2017-2021 mengalami tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2017, tingkat kemiskinan mengalami trend yang semakin menurun hingga tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 4.35 persen. Seiring dengan terjadinya pandemi Covid19 pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 4,98 persen dan kembali meningkat menjadi 5,09 persen pada tahun 2021. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah baik melalui refocusing dan realokasi anggaran terkait terjadinya Covid19. Kebijakan tersebut setidaknya mencapai hasil jika dilihat dari kondisi perekonomian yang semakin meningkat. Namun disisi lain, penurunan kemiskinan masih memerlukan berbagai langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun setidaknya melalui program penanganan sosial seperti bantuan sembako, bantuan sosial air bersih, pemberian kesempatan kerja pada anak yatim akibat pandemi, pelatihan UMKM, santunan kematian, asuransi pekerja sektor informal, dan beasiswa mahasiswa.

Tabel 2.12
Perbandingan Tingkat Kemiskinan
Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional
Tahun 2017 sampai dengan 2021

Tahun	Kota Madiun	Jawa Timur	Nasional
2017	4,94	11,2	10,12
2018	4,49	10,85	9,66
2019	4,35	10,2	9,22
2020	4,98	11,09	9,78
2021	5,09	10,59	9,71

Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2021

Terkait kebijakan daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrim, kota madiun berupaya untuk :

1. Memberikan dukungan terhadap program nasional terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan.
2. Inovasi program komplemeter/ inisiatif daerah
3. Penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait
4. Penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrim dilaksanakan melalui tiga strategi utama yaitu :

1. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

c. Fokus Pendidikan

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat pada Fokus Kesejahteraan Sosial, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Indikator Kinerja Pendidikan
Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 – 2021

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	2	4	5	6	7
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
A	Fokus Kesejahteraan Sosial				
1	Pendidikan				
1.1	Angka Melek Huruf	98,87	97,99	97,93	98,96
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,11	11,13	11,14	11,37
1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	144,9	143,28	100,85	101,27
1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	135,03	170,76	103,62	101,25
1.5	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	134,59	135,45	95,29	95,34

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	169,63	131,33	85,8	84,88
	Pendidikan yang ditamatkan :				
1.7	Angka Harapan Lama Sekolah	14,21	14,39	14,40	14,40

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, Tahun 2021

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah usia 15 tahun keatas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) yang dapat membaca dan menulis huruf latin dana tau huruf lainnya.

Perkembangan Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun, tahun 2018 telah mencapai 98,87% namun pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 97,99%. Pada tahun 2020 angka melek huruf kembali turun menjadi 97,93%. Meskipun demikian, pada tahun 2021 angka melek huruf naik dan mencapai 98,96%. Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Madiun yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-ata lama sekolah adalah rata – rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis Pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada perhitungan metode baru, rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.

Angka rata-rata lama sekolah tahun 2018 sebesar 11,11. Tahun 2019 sedikit meningkat menjadi sebesar 11,13, tahun 2020 sebesar 11,14, dan tahun 2021 sebesar 11,37. Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,11, 11,13, 11,14, dan 11,37 maka artinya bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun baru mampu menempuh atau menamatkan pendidikan sampai dengan kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA. Hal ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya suport dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan Program BOS dari Pemerinah Pusat.

3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan sebesar 144,9% dan 143,28%. Pada tahun 2020 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A mengalami penurunan lebih dari 40% sehingga menjadi sebesar 100,85%. Hal tersebut menunjukkan terjadinya penurunan jumlah penduduk di luar usia SD (7-12) yang masih bersekolah SD, walaupun Angka Partisipasi Kasar SD/MI tahun 2018 hingga tahun 2020 nilainya masih mencapai lebih besar dari 100%. Meskipun demikian, pada tahun 2021 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A kembali naik menjadi 101,27.

4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SMP terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B periode tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2018 menunjukkan nilai persentase sebesar 135,03%, terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2019 menjadi 170,76%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga angka persentasenya sebesar 103,62%. Lalu kemudian turun kembali pada tahun 2021 menjadi 101,25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang sedang bersekolah di SMP/MTs berapapun usianya diluar usia 13-15 tahun sebesar 135% pada tahun 2018, 171% pada tahun 2019, 104% pada tahun 2020, dan 101% pada tahun 2021.

5. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A tahun 2018 yakni sebesar 134,59% dan pada tahun 2019 sebesar 135,45%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 40,16% sehingga persentasenya menjadi 95,29%. Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A meningkat sedikit menjadi 95,34%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 34,59% pada tahun 2018 dan 35,45% pada tahun 2019 anak berusia 7-12 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI. Sedangkan terjadinya penurunan pada dua tahun setelahnya mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI menjadi 95,29% pada tahun 2020 dan 95,34% pada tahun 2021.

6. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B merupakan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP dibagi dengan jumlah jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B sebesar menunjukkan trend fluktuatif pada tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 sebesar 169,63% kemudian pada tahun 2019 menurun sebesar 38,3% sehingga persentasenya menjadi 131,33%. Lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 dengan persentase sebesar 85,8% dan 84,88%. Pada tahun 2018 terdapat 69,63% anak yang berusia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SMP dan pada tahun 2019 menurun menjadi 31,33%. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan terdapat 85,8% dan 84,88% penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP.

7. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2018 adalah 14,20, pada tahun 2019 adalah 14,39, pada tahun 2020 dan 2021 capaian angka harapan lama sekolah sebesar 14,40. Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kota Madiun sudah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa.

d. Fokus Kesehatan

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Bidang Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

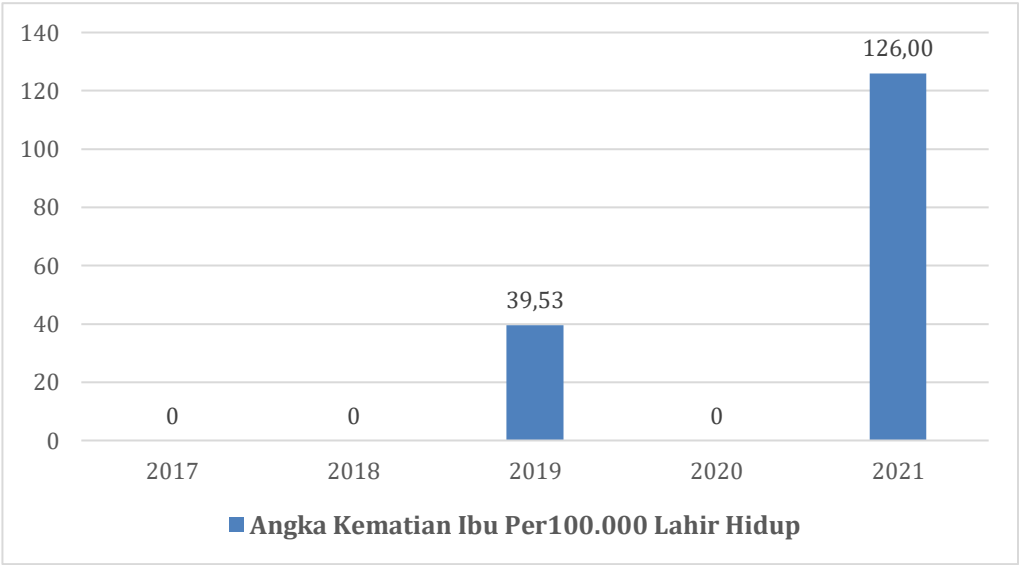
Tabel 2.14
Angka Kematian Ibu Di Kota Madiun Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah Lahir Hidup	2.583	2.561	2.530	1852	2.382
2	Jumlah Kematian Ibu	0	0	1	0	3

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
3	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	0	0	39,53	0	126
4	Target RPJMD Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	51,35	44,97	38,59	42,09	42,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, Tahun 2020.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup pada Tahun tahun 2017 dan 2018 di Kota Madiun tidak tercatat angka kematian ibu. Namun, pada tahun 2019 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53, artinya terdapat kemaian ibu sebanyak 39,53 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu tersebut sebanyak 1 orang ibu. Terjadi penurunan angka kematian ibu pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat upaya Pemerintah Kota Madiun untuk bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil baik melalui pendampingan, pembinaan, dan pelayanan langsung. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Gambar 2.9
Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun Tahun 2017 –2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa AKI di Tahun 2017-2019 mengalami kenaikan dari 0 menjadi 39,53. Pada tahun 2021 persentasenya mengalami sedikit kenaikan menjadi 126. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu adalah:

- a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal.
- b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi.

- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas.
- d. Memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC terpadu yaitu 10 T plus skrining Diabetes Militus (DM), Hipertensi, jantung, hepatitis dan HIV/AIDS di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.
- e. Menjalin kerjasama dengan SpOG terkait pelayanan rujukan pada ibu hamil.
- f. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

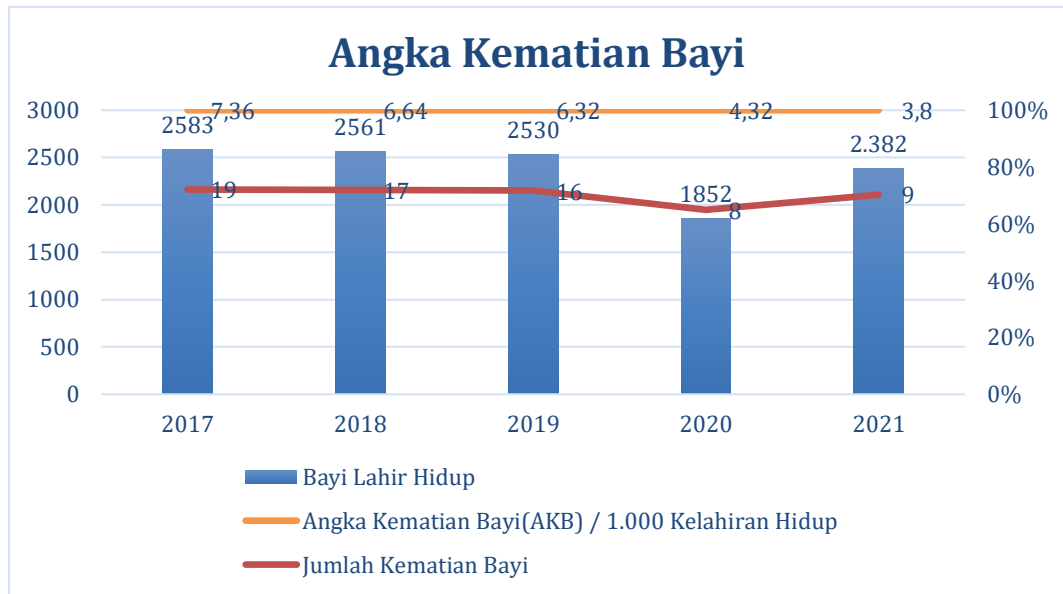
Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Bayi Lahir Hidup	2583	2561	2530	1852	2.382
2	Jumlah Kematian Bayi	19	17	16	8	9
3	Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 Kelahiran Hidup	7.36	6.64	6.32	4,32	3,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, Tahun 2021.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Tahun 2017 berjumlah 19, presentase angka kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 sebear 7,36. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 secara absolut jumlah kematian bayi mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya. Tahun 2018 presentase angka kematian bayi sebesar 6,64 dengan jumlah absolut sebanyak 17 kematian bayi. Tahun 2019 presentase kematian bayi mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 6,32 dengan jumlah absolut 16 kematian bayi. Presentase kematian bayi tahun 2020 mengalami penurunan hingga 4,32 dengan jumlah absolut 8 kematian bayi, hal tersebut disebabkan penurunan jumlah lahir hidup. Berlanjut pada tahun 2021, persentase angka kematian bayi mencapai 3,8 dengan jumlah absolut 9 kematian bayi. Adapun tren Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, Tahun 2021.

Gambar 2.10
Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun Tahun 2017-2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi/1000 kelahiran hidup setelah tahun 2017 mengalami penurunan dan diikuti penurunan jumlah kematian bayi secara absolut. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- PMT bagi ibu hamil untuk mencegah bayi BBLR.
- Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (edukasi kontrol sesuai jadwal).
- Edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah:

- Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal.
- Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi.
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas.
- Berkoordinasi dengan Dokter Spesialis Anak terkait pelayanan rujukan bayi dengan kelainan.
- Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran masing-masing.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

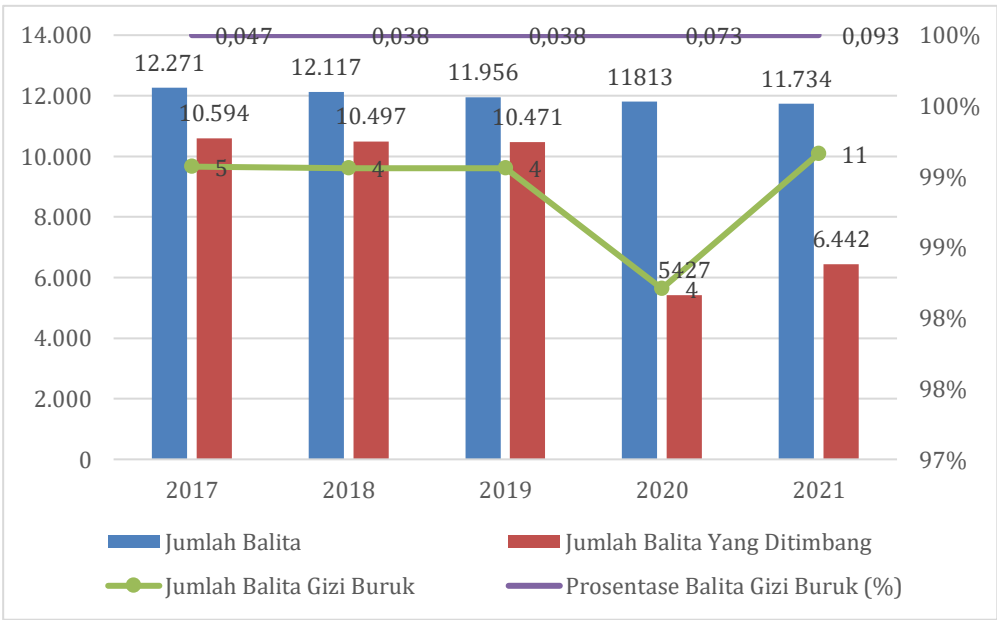
Persentase balita gizi buruk pada Tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Balita Gizi Buruk Di Kota Madiun Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah Balita	12.271	12.117	11.956	11.813	11.734
2	Jumlah Balita Yang Ditimbang	10.594	10.497	10.471	5427	6.442
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	5	4	4	4	11
4	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,047	0,038	0,038	0,073	0,093

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2021.

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama tahun 2017-2021 jumlah balita yang menderita gizi buruk dan persentase balita gizi buruk mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2017. Salah satu faktor penurunan tersebut yaitu menurunnya jumlah balita yang ditimbang setiap tahunnya. Adapun tren Balita Gizi Buruk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2021.

Gambar 2.11
Balita Gizi Buruk Di Kota Madiun Tahun 2016-2021

Dari grafik diatas terlihat Pada tahun 2017 persentase balita gizi buruk sebesar 0,065 sehingga jumlah absolut balita gizi buruk sebanyak 5 orang. Pada tahun 2018 sebesar 0,038% dengan jumlah absolut sebanyak 4 balita gizi buruk. Angka tersebut sama dengan persentase balita gizi buruk di Tahun 2019.

Pada tahun 2020 persentase balita gizi buruk meningkat dari 0,038 menjadi 0,073 dengan jumlah absolut tetap sebanyak 4 balita gizi buruk. Penyebab terjadinya kenaikan persentase balita gizi buruk karena adanya bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang kurang dari 2500 gram sehingga balita tersebut berpotensi tidak maksimal dalam penyerapan nutrisi makanan yang menyebabkan berat badan tidak naik signifikan. Selain itu masih adanya pola asuh dan pola makan yang kurang tepat pada keluarga. Selain itu, dari tabel di atas dapat diketahui juga bahwa persentase Balita Gizi Buruk di Tahun 2021 sebesar 0,093% dengan jumlah absolut 11 balita gizi buruk.

Langkah yang dilakukan untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk adalah:

1. Penimbangan balita di Posyandu setiap bulan sebagai deteksi dini terjadinya penyimpangan pertumbuhan sehingga lebih mudah dalam intervensi sebelum menjadi balita gizi buruk.
2. Pelaksanaan kelas ibu balita.
3. Edukasi kepada masyarakat tentang BBLR dan upaya perbaikan gizi keluarga.
4. Pelatihan cara Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) untuk petugas Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat.
5. Pemberian Makanan Tambahan dan vitamin bagi balita BGM dan 2T sampai tuntas.
6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil mulai ditemukan KEK sampai dengan masa nifas untuk mencegah kelahiran bayi BBLR.

e. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam event regional dan nasional, jumlah event/ kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam event Regional dan Nasional Tahun 2020 di bidang olahraga tetap di angka 50 untuk prestasi keolahragaan dan 8 untuk prestasi kebudayaan. Berikut tabel Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2017-2021:

Tabel 2.17
Prestasi Olahraga dan Kebudayaan
Kota Madiun Tahun 2017 – 2021

KETERANGAN	2017	2018	2019	2020	2021
PRESTASI KEOLAHRAGAAN	8	33	52	50	97
PRESTASI KEBUDAYAAN	10	12	8	8	2

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KotaMadiun, Tahun 2021

Dari tabel di atas jumlah prestasi keolahragaan terus meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan terjadi sedikit penurunan pada tahun 2020. Prestasi kebudayaan meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2018 lalu mengalami penurunan pada tahun 2019. Peningkatan prestasi keolahragaan dan prestasi kebudayaan diimbangi pula dengan peningkatan partisipatif peserta. Selain itu, dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah prestasi Kota Madiun mengalami kenaikan dengan rincian 97 prestasi keolahragaan dan 2 prestasi kebudayaan. Berikut grafik Prestasi Keolahragaan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2017-2021:



Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KotaMadiun, Tahun 2021

Gambar 2.12
Prestasi Olahraga dan Kebudayaan
Kota Madiun Tahun 2017 – 2021

- Rincian untuk prestasi olahraga sebagai berikut :
- Prestasi selama Tahun 2021 meraih sebanyak 99 kejuaraan diantaranya:
- Prestasi Olah Raga Tahun 2021 sebanyak 97 kejuaraan :
- a. Pon XX Papua (4 medali)
 - b. Pekan Paralimpik Provinsi Jawa Timur I (6 medali)
 - c. Kasal Cup Archery Open Sidoarjo (12 medali)
 - d. Fast Joyoboyo Archery Championship (6 medali)
 - e. Piala PSTI CUP Kab. Pacitan Jatim Jateng Jogja (1 medali)

- f. Kejurprov Senam Surabaya (3 medali)
- g. Kejurprov ISSI Jatim Tulungagung (1 medali)
- h. Titan Challenge Jujitsu di Lembang (4 medali)
- i. Kejurprov Binaraga 2021 di Surabaya (1 medali)
- j. Kejurprov Angkat Besi 2021 di Surabaya (4 medali)
- k. Kejuaran International Karate Virtual antar Pelajar “MGMP PJOK CUP IV” di Jakarta (10 medali)
- l. Kejuaran Festival Nasional Karate ESA Unggul CUP II (3 medali)
- m. Kejuaran Festival Nasional Karate ESA Unggul CUP II Virtual Open & Festival (2 medali)
- n. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Tingkat SD Kota Madiun (4 medali)
- o. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Tingkat SMP Kota Madiun (4 medali)
- p. Kejuaran International Festival Virtual Karate “UNJ CUP X” Tingkat SD di Jakarta (5 medali)
- q. Kejuaran International Festival Virtual Karate “UNJ CUP X” Tingkat SMP di Jakarta (1 medali)
- r. Jakarta Karate Open & Vestival (JKOF) IV Tingkat SD di Jakarta (2 medali)
- s. Jakarta Karate Open & Vestival (JKOF) (1 medali)
- t. Jakarta Karate Open & Vestival (JKOF) IV (1 medali)
- u. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Tingkat SD Provinsi Jawa Timur (1 medali)
- v. Kejuaraan Nasional Karate Virtual Series Tingkat SMP “Bogor Karate Open Ke-8” (2 medali)
- w. Kejuaraan Nasional Karate Open Tournament & Festival “Bogor Karate Ke-8” (1 medali)
- x. International Festival Virtual Karate “Rektor CUP Universitas ESA Unggul” (1 medali)
- y. International Festival Virtual Karate Championship Rector CUP ESA Unggul University (3 medali)
- z. Kejuaran Seri Virtual Tingkat International “MGMP PJOK CUP IV” (1 medali)

Prestasi Seni Budaya Tahun 2021 sebanyak 2 kejuaraan :

- a. Penyajian terbaik salaka festival budaya agraris tingkat Provinsi Jawa Timur
- b. Penyajian Terbaik Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur

Sedangkan pada tahun 2020, Kota Madiun mampu meraih 50 medali dalam ajang kejuaraan PORPROV JATIM dengan rincian sebagai berikut:

- a. 2 medali perunggu cabang olahraga angkat besi
- b. 1 medali perunggu cabang olahraga atletik (lompat jauh)
- c. 1 medali perunggu cabang olahraga billiard
- d. 1 medali emas cabang olahraga gulat
- e. 2 medali perunggu cabang olahraga gulat
- f. 4 medali perunggu cabang olahraga judo
- g. 1 medali perunggu cabang olahraga karate
- h. 1 medali perak cabang olahraga karate
- i. 4 medali perunggu cabang olahraga muathay
- j. 1 medali perak cabang olahraga muathay
- k. 2 medali emas cabang olahraga muathay
- l. 1 medali perak cabang olahraga renang
- m. 1 medali perunggu cabang olahraga senam
- n. 3 medali perunggu cabang olahraga taekwondo
- o. 2 medali perak cabang olahraga tenis meja
- p. 1 medali perunggu cabang olahraga tenis meja
- q. 1 medali perak cabang olahraga tinju
- r. 7 medali emas cabang olahraga jujitsu
- s. 2 medali perak cabang olahraga jujitsu
- t. 5 medali perunggu cabang olahraga jujitsu
- u. 1 medali perak cabang olahraga judo beregu
- v. 1 medali perunggu cabang olahraga tenis meja beregu

Prestasi Seni Budaya selama Tahun 2020 sebanyak 8 kejuaraan :

- a. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
- b. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
- c. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- d. Juara Penyaji Sabet Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- e. Juara Penyaji Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- f. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur

- g. Juara 3 Lomba Baca Puisi Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur
- h. Juara 3 Lomba Teater Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum daerah adalah kemampuan daerah agar terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. aspek pelayanan daerah terdiri dari pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan perizinan.

a. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang anggaranya sudah diamanatkan dalam Undang-undang sebesar 20 persen dari APBD yang diharapkan dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah. Harapan kedepannya dapat menciptakan SDM yang terampil dan cerdas. Untuk mewujudkan hal tersebut Kota Madiun sudah memetakan memetakan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik jenjang pendidikan terendah yaitu PAUD dan TK yang dapat di lihat sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 2.18
Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan, Tahun 2021

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	92	67	147
2.	Peserta PAUD	1394	1247	1996
3.	Tenaga Pendidik	10	16	23
TK				
1.	Jumlah Siswa (Orang)	1394	1247	1996
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (Unit)	92	67	147

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021

Data menunjukkan pada tahun 2021 fasilitas pendidikan PAUD di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan pendidik yang memadai. Jumlah bangunan PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 92 unit dengan jumlah peserta didik 1394 anak, Kecamatan Manguharjo sebanyak 67 unit dengan jumlah peserta didik 1247 anak, dan Kecamatan Taman sebanyak 147 unit dengan jumlah peserta didik sebanyak 1996 anak. Selanjutnya terdapat tabel Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2021.

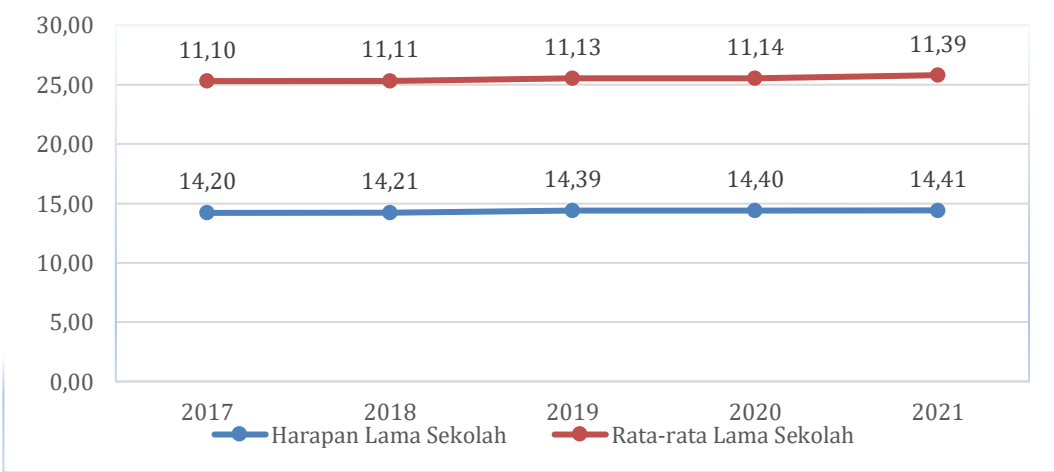
Tabel 2.19
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2021

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Mangunharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Dasar (SD)	22	27	24	73
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	7	6	3	16
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	9	3	23
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	2	1	4
Sekolah Mengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	13	16	12	41
Madrasah Aliyah (MA)	0	4	1	5

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun , 2021

Jumlah sekolah dasar (SD) di Kota Madiun tahun 2021 sebanyak 73 unit dan Madrasah Ibtidaiyah 16 unit. Jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 23 unit dan MTs sebanyak 4 unit. Jumlah sekolah menurut SMA/SMK sebanyak 41 unit dan MA sebanyak 5 unit. Kecamatan Taman menjadi kecamatan terbanyak yang memiliki jumlah unit sekolah, mengingat jumlah penduduk terbanyak juga terdapat pada Kecamatan Taman.

Kondisi dan jumlah bangunann dibeberapa jenjang pendidikan akan mendorong meningkatnya angka HLS dan RLS yang merupakan indikator dimensi pengetahuan pada IPM, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota Madiun. Sebagaimana dilihat pada Gambar II.13, selama periode tahun 2015 hingga tahun 2021, harapan lama sekolah di Kota Madiun telah meningkat dari 14,06 tahun 2015 menjadi 14,41 tahun 2021 atau naik sebesar 0,35 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,09 tahun 2016 menjadi 11,39 tahun 2021 atau naik 0,30 tahun.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Gambar 2.13
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2017-2021

Angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 0,07 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2021, harapan lama sekolah di Kota Madiun telah mencapai 14,41 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3.

Pada periode yang sama, rata-rata lama sekolah di Kota Madiun tumbuh 0,05 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. RLS Kota Madiun tahun 2021 mencapai 11,39 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Madiun usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA Kelas 2). Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.20
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan
Tahun 2018 – 2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan				
1.1	Pendidikan Dasar				
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	140,16	135,75	113,75	119,83
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk	1:39	1:52	1:56	1:16
1.1.3	Rasio guru/murid	1:16	1:16	1:16	1:16
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:22	1:28	1:24	1:15
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	134,59	135,45	174,89	130
1.2	Fasilitas Pendidikan				
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	96,95	95,24	98,48	97,20
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts	96,36	98,68	92,63	99,5
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	106,66	109	95,61	90,04
1.4	Angka Putus Sekolah				
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	0	0	0,7	0
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0	0	0,7	0
1.5	Angka Kelulusan				
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan	100	100	100	100
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	128,52	111,35	100	100
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	98,02	96,1	96,83	97
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100	100	100
1.6	Manajemen Pelayanan Pendidikan				
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	1.250	1.427	398	45

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, Tahun 2021.

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs. Capaian Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar pada tahun 2018 adalah sebesar 140,16%, pada tahun 2019 sebesar 135,75%, dan pada tahun 2020 capaian angka partisipasi sekolah menurun sehingga persentasenya menjadi sebesar 113,75. Sedangkan pada tahun 2021 capaian angka partisipasi sekolah sebesar 119,83. Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah untuk mengukur jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini adalah merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk tahun 2018 capaiannya adalah 1:39, sedangkan pada tahun 2019 capainnya adalah sebesar 1:52 dan tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 1:56. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 52 siswa per 10.000 penduduk usia sekolah pada tahun 2019. Pada tahun 2020 menjadi 1 (satu) lembaga dapat menampung 56 siswa per 10.000 penduduk. Ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kota Madiun sudah sangat mencukupi. Selain itu, dari tabel 2.16 dapat diketahui juga bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tahun 2021 sebesar 1:16.

3. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Capaian rasio guru murid pada tahun 2018 hingga tahun 2021 adalah 1:16, artinya bahwa satu orang guru menangani 16 siswa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20 peserta didik.

4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tahun 2018 adalah 1:22 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata siswa sebanyak 22 siswa. Untuk tahun 2019 capainnya adalah 1:28 artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rompel dengan rata-rata siswa sebanyak 28 siswa. Pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan disbanding capaian tahun sebelumnya, capaian rasio menjadi 1:24 artinya satu guru dapat menangani 1 kelas/rompel dengan rata-rata 24 siswa. Sedangkan pada tahun 2021 capainnya adalah 1:15 yang artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rompel dengan rata-rata siswa sebanyak 15 siswa. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.

Dibandingkan dengan tahun 2018 rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata ada peningkatan yaitu kalau tahun 2018 1 (satu) orang guru menangani 22 anak tetapi pada tahun 2019 satu orang guru menangani 28 anak, hal ini dikarenakan adanya perekrutan guru CPNS guru di Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Beersama Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 tahun 2011 tentang penataan guru Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu minimal 20 peserta didik/kelas.

5. Angka Partisipasi Murni SD/SMP

Angka Partisipasi Murni adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. Angka Partisipasi Murni adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni SD/SMP tahun 2018 yakni sebesar 134,59% dan pada tahun 2019 sebesar 135,45%. Pada tahun 2020 dan 2021 angka partisipasi murni turun menjadi 174,89 dan 130. Angka tersebut menunjukkan terdapat sekitar 130 anak berusia 7-15 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Madiun.

6. Kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik

Kondisi sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Capaian kondisi sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik tahun 2018 hingga tahun 2021 persentasenya terus meningkat. Capaian pada tahun 2018 sebesar 96,95%, sedangkan capaian tahun 2019 adalah sebesar 95,24%, di tahun 2020 meningkat menjadi 98,48%, dan di tahun 2021 menjadi sebesar 97,20%. Dibandingkan dengan tahun 2018 maka capaian tahun 2019 ada kenaikan sebesar 0,52%. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 2,12% dibandingkan tahun 2019. Kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik tahun 2018 sebesar 96,36% mengalami peningkatan sebesar 2,32% pada tahun 2019 menjadi 98,68%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,05% sehingga capaiannya menjadi 92,63, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik mencapai 99,50%. Peningkatan kondisi bangunan baik untuk SD/MI dikarenakan ada perhatian dari Pemerintah Kota Madiun untuk rehab dan pembangunan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan maupun penambahan ruang sekolah. Penurunan kondisi bangunan untuk SMP/MTs disebabkan adanya kerusakan bangunan seperti kerusakan langit-langit kelas yang bolong sehingga rawan ambol. Perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah agar memperhatikan kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan di jenjang SMP/MTs.

7. APK Pendidikan anak usia dini (PAUD) disini adalah APK PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak.

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2018 capainnya adalah 106,66%. Capian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2019 adalah sebesar 109%, sehingga ada kenaikan sebesar 2,34%. Pada tahun 2020 capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini mengalami penurunan sebesar 13,39 sehingga menjadi 95,61%. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2021 Capian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebesar 90,04%.

8. Angka putus sekolah pendidikan dasar dan rata-rata angka putus sekolah

Angka putus sekolah dan rata-rata putus sekolah pendidikan dasar pada tahun 2018 dan 2019 adalah 0. Dengan kata lain Angka Putus sekolah dan rata-rata putus sekolah di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2020 angka putus sekolah dan rata-rata angka putus sekolah kembali muncul sebesar 0,7%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0. Hal tersebut dikarenakan turunnya angka partisipasi sekolah.

9. Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)

Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) adalah persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2018 capainnya adalah 100%, demikian juga angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi siswa SD dan SMP baik yang dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota. Angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2018 capaiannya sebesar 128,52 %, kemudian capaian menurun sebesar 17,17% pada tahun 2019 menjadi 111,35%. Pada tahun 2020 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs berhasil mencapai 100%. Sedangkan pada tahun 2021 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 100%.

10. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2018 adalah 98,02 dengan jumlah guru sebanyak 1.277, sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah 96,1 % dengan jumlah guru sebanyak 1.818. Pada tahun 2020 capaian guru yang memenuhi kualifikasi meningkat menjadi 96,83%. Peningkatan jumlah guru dalam waktu satu tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar. Selain itu, pada tahun 2021 capaian guru yang memenuhi kualifikasi mencapai 97% dengan jumlah guru sebanyak 1.956.

Tabel 2.21
Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kualifikasi	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	SMA	11	11	0	0
2	D1	1	4	0	0
3	D2	15	17	0	0
4	D3	1	6	19	32
5	DIV/S1	1.277	1.818	1.804	1.956
6	S2	109	116	93	102

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun

11. Pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK

Capaian pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada tahun 2018 hingga 2021 adalah 100%. Pengelolaan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data pendidikan dan menyediakan berbagai informasi terpadu yang memuat seluruh data pendidikan dan menyediakan berbagai informasi pendidikan tingkat Kota yang dapat dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien.

Mulai tahun 2013 semua pendataan sudah berbais internet dan terkoneksi dengan Pusat data dan Statistik Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru seerta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Mulai tahun 2015 hingga saat ini Data Pokok Pendidikan menjadi dsatu-satunya basis data bagi Kementrian Pendidikan dan kebudayaan dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di update terus menerus.

Data tersebut harus di perbaharui setiap saat dengan sistem online yang terkoneksi langsung dengan server Kementrian Pendidikan dan kebudayaan dan di upload secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis web dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.

12. Sekolah Semua Jenjang Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan NBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari :

- a. Sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- b. Sekolah menyusun Rencana Kerja tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- c. Sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Di Kota Madiun semua sekolah sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap tahun anggaran dan tahun ajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian satuan pendidikan semua jenjang telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebesar 100% mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021.

13. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional

Capaian pada tahun 2018 adalah 1.250 guru, sedangkan pada tahun 2019 capainnya adalah sebanyak 1.427 guru telah sesuai dengan target RPJMD. Hal ini disebabkan adanya guru CPNS tahun 2019 sejumlah 76 orang guru. Pada tahun 2020 tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan professional menurun sangat drastis yaitu menjadi 398 guru. Sedangkan pada tahun 2021 tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan professional mencapai 45 orang guru.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Pendidikan

Tabel 2.22

Bidang Pendidikan Kota Madiun, 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100%	94,04%
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	12,27

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	96,17%

Sumber: LPPD Kota Madiun, Tahun 2021

b. Pelayanan Kesehatan

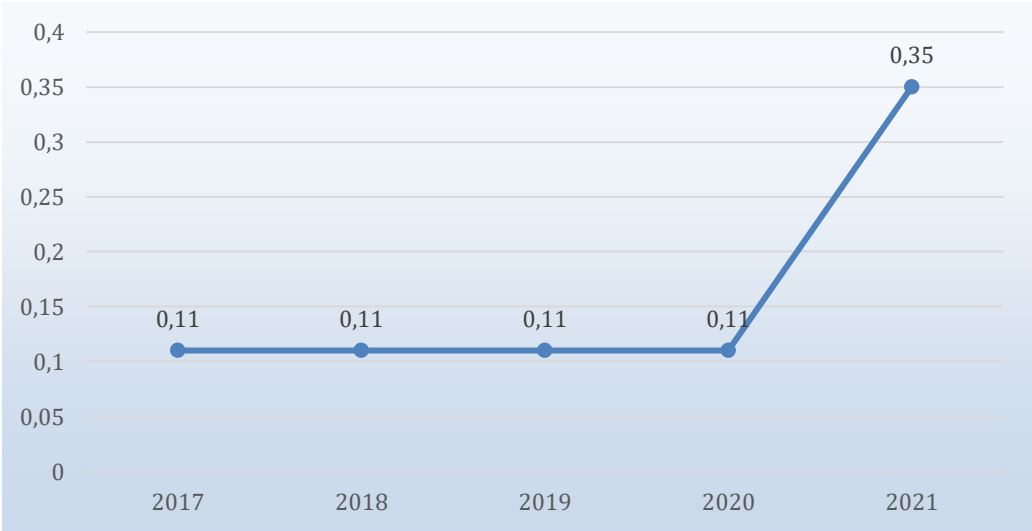
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.23
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2021

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk
2017	0,11
2018	0,11
2019	0,11
2020	0,11
2021	0,35

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, Tahun 2021

Selama tahun 2017 hingga tahun 2021, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan putsu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2017, rasio ini menunjukkan nilai stabil sebesar 0,11, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 0,35



Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2021

Gambar 2.14
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2017-2021

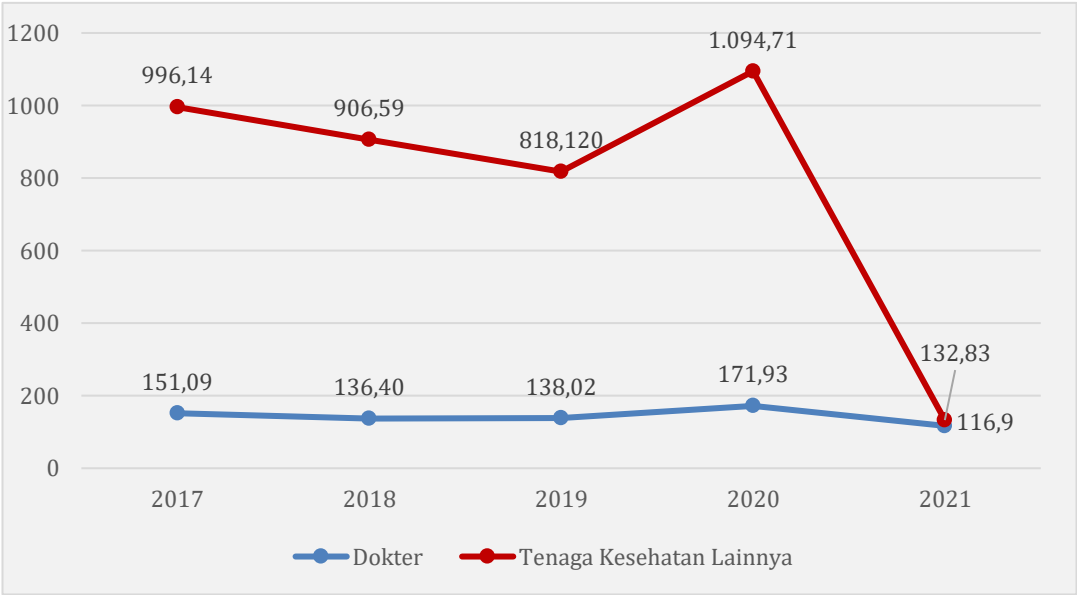
Selanjutnya terdapat tabel rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk pada tabel 2.19

Tabel 2.24
Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2017-2021

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2017	151,09	996,14
2018	136,40	906,59
2019	138,02	818,12
2020	171,93	1.094,707
2021	116,9	132,83

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2021

Rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2021, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 151,09 hingga 116,9 Rasio tenaga kesehatan pada tahun 2017 hingga tahun 2021 berkisar anantara 996,14 hingga 132,83 Namun, secara keseluruhan rasio dokter dan tenaga kesehatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Tren rasio dokter dan tanaga kesehatan lainnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2021

Gambar 2.15
Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2021

Setelah mengetahui raiso puskesmas dan rasio dokter serta tenaga kesehatan, berikut ini terdapat tabel rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun.

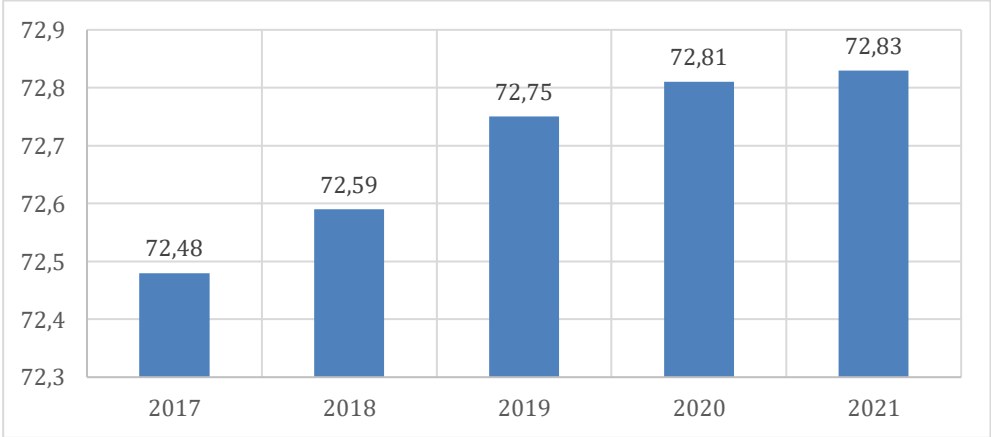
Tabel 2.25
Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2017-2021

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2017	8	209.809	0,0381
2018	8	209.672	0,0381
2019	8	210.115	0,0380
2020	8	210.147	0,0380
2021	8	201.452	0,0397

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun , 2021

Tabel data diatas menunjukkan selama tahun 2017 hingga tahun 2020 di Kota Madiun sebanyak 8 rumah sakit masih beroperasi. Adapun rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2018 menuju 2019 di Kota Madiun mengalami sedikit penurunan dari 0,0381 menjadi 0,0380. Perubahan tersebut terjadi karena penambahan jumlah penduduk tetapi secara absolut jumlah rumah sakit tetap. Sedangkan pada tahun 2021 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk mencapai 0,0397

Salah satau aspek kesehatan direpresentasikan oleh umur harapan hidup. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh umur harapan hidup saat lahir. Umur harapan hidup di Kota Madiun terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada Gambar dibawah ini, selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,48 tahun (2017) menjadi 72,83 tahun (2021) atau naik sebesar 0,35. Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 8 persen per tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kota Madiun. Masyarakat semakin menikmati pembangunan dibidang kesehatan.



Sumber: BPS Kota Madiun,2021

Gambar 2.16
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun 2015-2021 (tahun)

Aspek kesehatan juga menangani kasus Kejadian Luar Biasa, Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Tahun 2021 sebanyak 2 kasus yang terjadi pada 2 kelurahan di Kota Madiun. Dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.26
Jumlah Kasus KLB Di Kota Madiun Tahun 2021

No	Jenis Kasus KLB	Kelurahan Tempat Kejadian	Waktu Kejadian Diketahui
1	Kasus Difteri	Kelurahan Ngegong	3 Januari 2021
2	Kematian DBD	Kelurahan Manisrejo	29 Desember 2021

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Jumlah Kasus KLB di Tahun 2021 sebanyak 2 kasus, mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2020, penurunan kasus KLB ini terutama banyak terjadi pada kasus-kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), menunjukkan sebagai salah satu keberhasilan dari pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) difteri tahun 2020 dimana kekebalan kelompok meningkat sehingga kasus difteri ditahun 2021 = 1 kasus Dari 1 kasus KLB keseluruhan telah ditanggulangi dalam waktu ≤ 24 Jam.

Kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian KLB di masyarakat adalah:

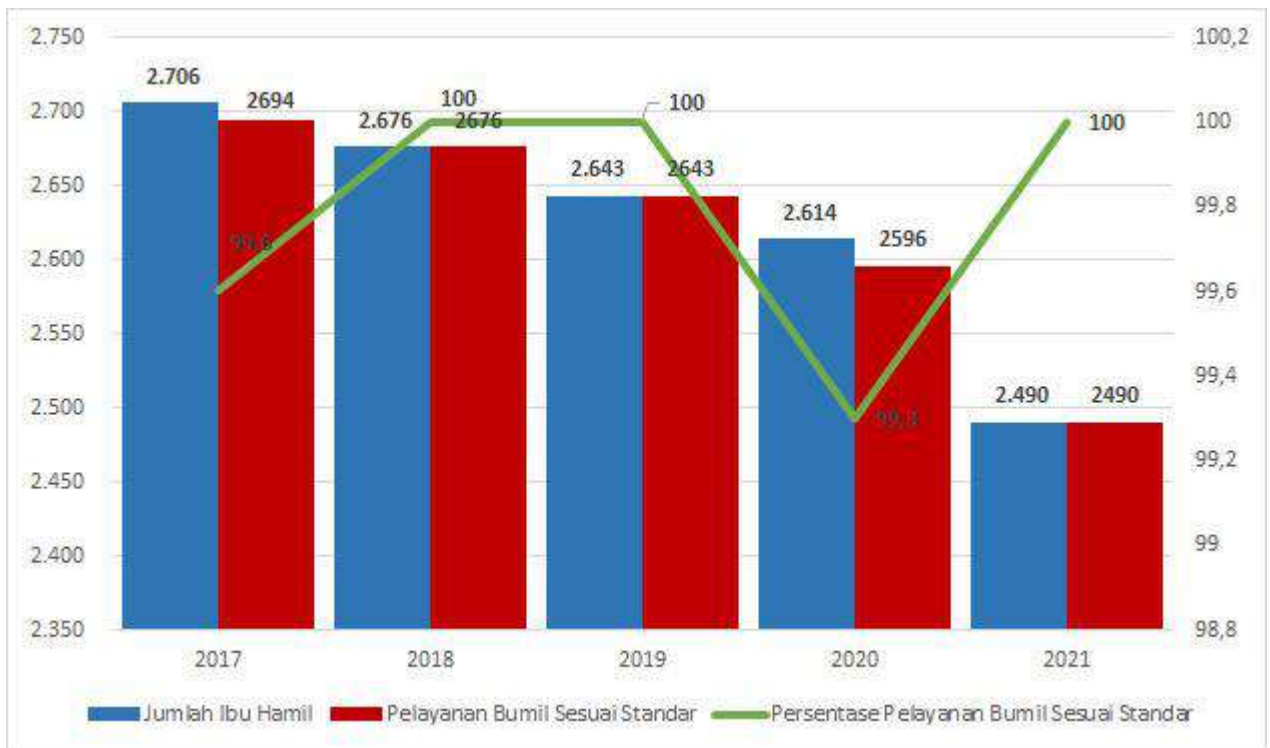
1. Meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan kekebalan kelompok sehingga kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat ditekan/menurun;
2. Meningkatkan KIE kepada seluruh jejaring surveilans epidemiologi;
3. Meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit guna kewaspadaan dini dan respon.

Berikutnya yang harus diperhatikan yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, data pelayanan kesehatan ibu hamil pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.27
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Di Kota Madiun
Tahun 2017 - Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah Ibu Hamil	2.706	2.676	2.643	2.614	2.490
2	Pelayanan Bumil Sesuai Standar	2.694	2.676	2.643	2.596	2.490
3	Persentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar	99,6	100	100	99,3	100

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun



Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Gambar 2.17
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Di Kota Madiun
Tahun 2017 - 2021

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa capaian persentase pelayanan bumil sesuai standar di Tahun 2021 sebesar 100%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standart sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun. Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah:

- sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin;
- optimalisasi kelas ibu hamil di puskesmas;
- terjalin kerjasama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC terpadu;
- pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan;
- edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.

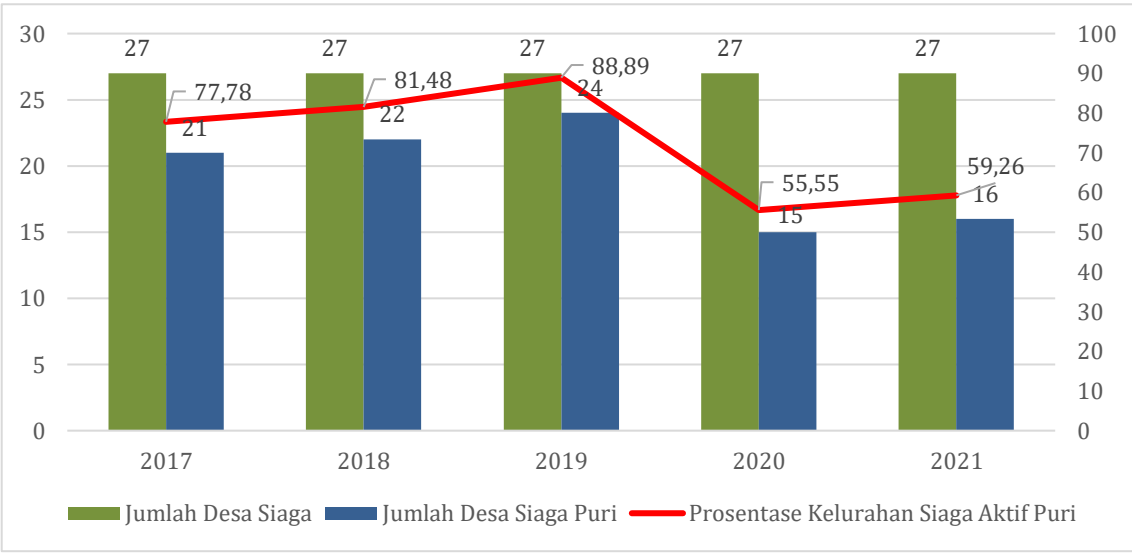
Penduduk Kota Madiun harus dapat mengaskes pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan, maka peran Kelurahan siaga aktif berstrata puri sangat dibutuhkan. Berikut terdapat data kelurahan siaga pada Tahun 2021:

Tabel 2.28
Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri Di Kota Madiun
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah Desa Siaga	27	27	27	27	27
2	Jumlah Desa Siaga Puri	21	22	24	15	16
3	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Puri	77,78	81,48	88,89	55,55	59,26

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Tabel diatas menunjukkan jumlah desa siaga puri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga, capaian persentase kelurahan siaga aktif puri juga meningkat. Berikut grafik tren peningkatan capaian kelurahan siaga aktif puri:



Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Gambar 2.18
Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri Di Kota Madiun
Tahun 2017 - Tahun 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di Tahun 2021 bahwa 100% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif (Purnama dan Mandiri) Tahun 2021 sebesar 59,26% yaitu sebanyak 16 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Adanya peningkatan 1 kelurahan dibandingkan Tahun 2020. Capaian tersebut dikarenakan:

1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif;
2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan siaga berstrata PURI;
3. kerjasama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai induk UKBM di kelurahan.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu pada Tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.29
Puskesmas Dan Pustu Di Kota Madiun
Tahun 2018 – 2021

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	7
2	Jumlah Pustu	18	18	18	19
3	Jumlah Penduduk	209.797	210.115	195.175	201.452
4	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per 1.000 Penduduk	0,11	0,11	0,11	0,35

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 tidak ada penambahan jumlah Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per 1.000 penduduk pada Tahun 2016 hingga Tahun 2020 tidak ada perubahan di kisaran 0,11 dan naik menjadi 0,35 di Tahun 2021. Di setiap Kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan Rumah Sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup mudah. Dimana terdapat 8 RS yaitu 2 RS Umum milik pemerintah, 1 RS Paru milik pemerintah, 1 RS Umum milik TNI AD, 1 RS Bersalin milik swasta serta 3 RS Umum milik swasta, sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah terpenuhi.

1. Jumlah Puskesmas Poned

Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) terdapat 1 Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo, dan sampai sekarang masih belum ada penambahan.

2. Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk

Pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021, jumlah Rumah Sakit di Kota Madiun masih sama yaitu sebanyak 8 Rumah Sakit. Rasio Rumah Sakit di Kota Madiun dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2.30
Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta Di Kota Madiun
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Milik TNI/AD	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3	3
5	Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2	2
6	Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	8	8
7	Jumlah Penduduk	209.809	209.672	210.115	210.417	201.452
8	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk	0,0381	0,0381	0,0380	0,0380	0,0397

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio jumlah Rumah Sakit terhadap 1.000 penduduk pada Tahun 2020 sebesar 8. Berkaca dengan tahun 2019, rasio jumlah rumah sakit terhadap 1000 penduduk adalah 0,380 dan di tahun berikutnya pada Tahun 2020, angka rasionya pun tetap sama. Pada tahun 2021 rasio jumlah RS meningkat menjadi 0,0397 dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan
Tahun 2018-2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN			
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Kesehatan				
2.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk	0,11	0,11	0,11	0,35
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1	1	1
2.3	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,0381	0,0380	0,0380	0,0397
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	136,32	138,02	171,93	116,9
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	906,59	818,12	1.094,707	132,83
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	0	0	0
2.7	SOP Pelayanan	444	457	478	0
2.8	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani	100	100	100	100
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100	100	100
2.10	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	65,19	68,21	69	69,43
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	62,96	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN			
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Tahun 2021
2.12	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	48
2.13	angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	39,53	0	126
2.14	Persentase Rumah Tangga Sehat	65,19	68,21	69	99,92
2.15	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Pra Bayar	100	100	95,17	113
2.16	Jumlah Kasus KLB	14	9	162	2
2.17	Persentase Penanganan Penyakit	100	87,5	100	100
2.18	Persentase Kelurahan Ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	44,4	59,26	40,74	74,1
2.19	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	100	100	100
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	81,32	81,84	74,94	84,917
2.21	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	100	100
2.22	Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi Syarat	84,01	85,12	86,63	100
2.23	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standart	100	100	100	100
2.24	Persentase Penduduk yang di skrining Faktor Resiko PTM	94,84	104,67	90,25	118,4
2.25	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI	81,48	88,89	0	59,26
2.26	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	369	408	502	550
2.27	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart	100	100	100	100
2.28	Persentase TTU dan TPM sehat	84,12	85,61	86,32	TTU : 95,3 TPM: 95,2
2.29	Angka Kematian Bayi	6,64	6,32	4,32	3,8
2.30	Angka Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Kusta	0,11	0,3	0,3	0,6
2.31	IKM Rumah Sakit	78,17	80,35	80,19	83,39
2.32	Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah	76,29	78,26	81,52	79,35
2.33	Persentase Desa ODF	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Putsu per 1.000 penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, dan putsu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama tahun 2018 hingga tahun 2021, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021, rasio berada di angka sebesar 0,35.

2. Jumlah Puskesmas PONED

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas berberap dalam menurunkan angka kematian ibu, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan kunci keberhasilan pelayanan PONED. Selama tahun 2018 hingga tahun 2021 jumlah puskesmas yang menyediakan layanan PONED sebanyak 1 puskesmas.

3. Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk

Selama tahun 2018 hingga 2021, di Kota Madiun beroperasi sebanyak 8 rumah sakit, yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah kota, 1 rumah sakit milik pemerintah provinsi, 1 rumah sakit milik TNI/AD, 1 rumah sakit swasta, dan 1 rumah sakit khusus. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,0380. Sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2021 sehingga nilainya mencapai 0,0397.

4. Rasio dokter per 100.000 penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga 2020, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 136,32 hingga 171,93. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020. Secara keseluruhan dalam tiga tahun rasio dokter menunjukkan peningkatan. Adapun pada tahun 2021, rasio dokter per 100.000 penduduk Kota madiun adalah 116,9

5. Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk

Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 906,59 hingga 1.094,707. Rasio tenaga kesehatan yang terus meningkat disebabkan adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang semakin baik. Adapun pada tahun 2021, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk Kota madiun adalah 132,83

6. Puskesmas berstandar ISO

Fungi utama puskesmas sebagai unit pelayanan masyarakat adalah upaya promotif dan preventif terhadap resiko penyakit di tengah masyarakat yang dilayani. Di Kota Madiun selama tahun 2018 hingga 2020 belum mempunyai puskesmas yang telah mempunyai standar ISO atau dapat dikatakan puskesmas plus yang dapat menjalankan rawat inap dan rawat jalan secara simultan di Kota Madiun. Setahun setelahnya, tepatnya pada Tahun 2021 jumlah puskesmas berstandar ISO di Kota Madiun adalah 0

7. SOP Pelayanan

Standar Operasional Prosedur merupakan dasar dalam melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang pelayanan. Skor SOP Pelayanan di Kota Madiun tahun 2018 hingga 2020 berkisar antara 444 hingga 478. Angka tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, diharapkan SOP pelayanan kesehatan di Kota Madiun menunjukkan kriteria yang baik. Sedangkan pada tahun 2021, skor SOP Kota Madiun tercatat sudah mencapai angka 0.

8. Cakupan Masyarakat Miskin terlayani

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, di Kota Madiun penanganan masyarakat miskin yang terlayani telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Madiun. Setahun setelah adanya pandemi covid-19 di Indonesia, cakupan masyarakat miskin yang terlayani mencapai 100 % .

9. Cakupan Kelurahan siaga aktif

Kelurahan/Desa Siaga Aktif adalah Kelurahan/Desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan. Di Kota Madiun pada tahun 2018 hingga tahun 2020 cakupan kelurahan siaga aktif sebesar 100% yang berarti seluruh Kelurahan/Desa aktif beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2021, presentase cakupan kelurahan siaga aktif terlayani di Kota Madiun adalah sebesar 100 %.

10. Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan menciptakan suatu Rumah Tangga Sehat dimana setiap anggota menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Sementara pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang mempraktikkan rumah tangga ber-PHBS yaitu sebesar 65,19%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 68,21% dan pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%. Setahun setelahnya pada tahun 2021, Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Madiun sudah mencapai 69,43%.

11. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization di Kota Madiun, pada tahun 2018 dan 2019 telah mencapai 100%. pada tahun 2020 cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan sehingga cakupannya hanya sebesar 62,96%. Dengan demikian, diharapkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat dari suatu penyakit dapat diminimalisir. Adapun pada tahun 2021, cakupan kelurahan Universal Child Immunization di Kota Madiun telah mencapai 100%.

12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selama tahun 2018 hingga tahun 2020 kota Madiun berhasil menangani kasus DBD dengan persentase mencapai 100%. Hal ini didukung oleh keterlibatan lintas program dan lintas sector, seperti koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan lingkungan dalam melaporkan kasus serta adanya penanganan yang cepat. Pada tahun 2021 penanganan kasus DBD di kota Madiun mencapai 48%.

13. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2018 tidak tercatat kasus kematian ibu. Namun, pada tahun 2019 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 39,53 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sehingga angka kematian ibu menjadi 0. Adapun kasus angka kematian ibu pada tahun 2021 adalah sebesar 126

14. Persentase Rumah Tangga Sehat

Rumah tangga sehat akan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Persentase rumah tangga sehat tahun 2018 yaitu sebesar 65,19%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 68,21 dan pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%. Pada tahun 2021, ternyata persentase rumah tangga sehat adalah mencapai 99,92% .

15. Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar Kota Madiun tahun 2018 dan 2019 sebanyak 100%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 4,73% sehingga menjadi 95,17%. Sebagian besar masyarakat Kota Madiun telah memiliki Jaminan Pra Bayar. Adapun pada tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar Kota Madiun telah mencapai 113 %.

16. Jumlah Kasus KLB

KLB adalah timbulnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jumlah kasus KLB di Kota Madiun tahun 2018 sebanyak 14 kejadian, lalu pada tahun 2019 menurun menjadi 9 kejadian. Pada tahun 2020 jumlah kasus KLB meningkat sangat drastis mengingat pada 2020 terjadi fenomena wabah yang dapat menular yaitu kasus terjadinya virus corona. Adapun berselang setahun saat 2021 dimana tahun kedua covid-19 melanda Indonesia, jumlah KLB di Kota Madiun mencapai 2 kejadian.

17. Persentase Penanganan Penyakit

Persentase penanganan penyakit Kota Madiun tahun 2018 berhasil mencapai 100% tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi 87,5%. Pada tahun 2020 pemerintah berhasil meningkatkan persentase penanganan penyakit menjadi 100%. Adapun di masa tahun kedua Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah Kota Madiun mendapatkan persentase penanganan penyakit sebesar 100 %.

18. Persentase Kelurahan Ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan, salah satunya masalah sanitasi yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pada tahun 2018 persentase kelurahan ber STBM Kota Madiun sebesar 44,4% terjadi peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2019 sehingga menjadi 59,26%. Sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pula menjadi 40,74%. Adapun pada tahun 2021, STBM Kota Madiun mencapai 74,1% .

19. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Obat harus tersedia secara cukup, baik item dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat di Kota Madiun tahun 2018 hingga 2020 mencapai angka 100%, artinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pada tahun 2021, persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun telah mencapai 100%.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun

Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan dinas kesehatan Kota Madiun tahun 2018 sebesar 81,32, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019 sehingga menjadi 81,84. Pelayanan dinas kesehatan memiliki kategori yang sangat baik dalam dua tahun tersebut. Pada tahun 2020 IKM menurun menjadi 74,94 yang artinya kategori pelayanan menurun menjadi baik. Sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pada tahun 2021, tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan dinas kesehatan Kota Madiun mencapai 84,917

21. Presentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah

Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun tahun 2018 hingga 2020 telah mencapai 100%. Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun terbilang baik hingga saat ini. Adapun pada tahun 2021 pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun adalah sebesar 100%.

22. Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai

IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Di Kota Madiun tahun 2018 produk olahan IRTP yang telah berhasil dinilai sebesar 84,01%, pada tahun 2019 sebesar 85,12%, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 86,63%. Pada tahun 2021 produk olahan IRTP Kota Madiun adalah sebesar 100%.

23. Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart

Sarana dan Prasana rumah sakit merupakan peralatan yang mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit di Kota Madiun tahun 2018 hingga 2020 telah memenuhi standart dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun 2021, sarana dan prasana rumah sakit yang terdapat di Kota Madiun sudah mencapai 100%.

24. Persentase Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM

Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM tahun 2018 sebesar 94,84%, pada tahun 2019 meningkat melebihi target yaitu mencapai 104,67%. Sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,42% menjadi 90,25%. Pada tahun 2021 presentase penduduk yang terkena faktor resiko PTM adalah sebesar 118,4 %.

25. Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI

Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI tahun 2018 sebesar 81,48% lalu meningkatn menjadi 88,89% pada tahun 2019. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penambahan 2 kelurahan yang berstrata PURI pada tahun 2019. Pada tahun 2021, persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI di Kota Madiun sudah mencapai 16 kelurahan

26. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terus meningkat, yaitu berkisar antara 369 hingga 502 sarana. Semakin meningkatnya sarana pelayanan kesehatan diharapkan semakin banyak masyarakat yang terpenuhi haknya dalam mendapat layanan kesehatan. Pada tahun selanjutnya tepatnya pada Tahun 2021, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan adalah mencapai 550 sarana.

27. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart

Pelayanan kesehtan ibu hamil di Kota Madiun tahun 2018 hingga tahun 2020 telah sesuai standart serta mendapatkan persentase sebesar 100%. Pada tahun 2021, pelayanan kesehtan ibu hamil di Kota Madiun sudah mencapai angka 100 %.

28. Persentase TTU dan TPM sehat

Persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) sehat mencapai 84,12%. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi 85,61% dan 86,32%. Diharapkan tempat-tempat umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan serta tempat pengolahan makanan seperti warung makan, toko penjual makanan, dan lokasi jajanan makanan dapat dilakukan pengawasan lebih lanjut agar persentase mengalami peningkatan. Dalam perjalanannya tepatnya pada tahun 2021 Persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) yang sudah dalam kategori sehat di Kota Madiun sudah mencapai 95,3% TTU dan 95,2% TPM.

29. Angka Kematian Bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada tahun 2018, angka kematian bayi di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 6,64. Pada tahun 2019 menurun menjadi 6,32, selanjutnya pada tahun 2020 kembali menurun sehingga aka kematian bayi menjadi sebesar 4,32. Angka kematian bayi yang terus menurun akan berpengaruh pada angka keberlangsungan hidup bayi. Adapun angka kematian bayi Kota Madiun pada Tahun 2021 mencapai 3,8.

30. Angka Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi Kusta

penghitungan angka keshatan orang dengan resiko terinfeksi Kusta menggunakan angka prevelensi kusta per 10.000 penduduk, di Kota Madiun capaiannya cenderung meningkat.

31. IKM Rumah Sakit Umum Daerah

Hasil survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada RSUD Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari 76,80 pada Tahun 2017 menjadi 83,39 pada tahun 2021, ini terjadi karena RSUD Kota Madiun dalam penerapan pelayanan melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kepuasan masyarakat.

32. Capaian SPM RSUD

Capaian standart pelayanan minimal pada RSUD Kota Madiun juga cenderung meningkat seiring meningkatnya capaian IKM pada RSUD Kota Madiun, dilihat dari capaian pada Tahun 2017 sebesar 74,19 sampai dengan 2021 telah mencapai 79,35

33. Persentase Desa ODF

Sejak 2014, Pemerintah Kota Madiun Sudah Pencanaan ODF, ini dilakukan seiring dengan menjalankan program unggulan Kepala Daerah yaitu JAMBANISASI (pembangunan jamban untuk masyarakat tidak mampu), untuk itu capaian Persentase Desa ODF di Kota Madiun sudah mencapai 100%

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Kesehatan

Tabel 2.32
Bidang Kesehatan Kota Madiun, 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,29%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	101,19%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	99,78%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	89,26%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	118,39

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	99,33%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	54,99%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	118,04%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	115,09%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	52,68%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	102,10%

Sumber: LPPD Kota Madiun, Tahun 2021

c. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
persentase Penduduk Berakses Air Minum

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2021, sekitar lebih dari 80% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum atau terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017 sebesar 92,04% penduduk dapat mengakses air minum, terus meningkat menjadi 98,14% pada Tahun 2021.

Tabel 2.33
persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun, Tahun 2017-2021

Tahun	Penduduk Berakses Air Minum
2017	92,04
2018	93,81
2019	93,30
2020	96,58
2021	98,14

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2022

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.34
Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun, 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	98,13%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	98,02%

Sumber: LPPD Kota Madiun, Tahun 2021

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2017 sampai dengan 2021 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4.1	Rasio rumah layak huni	99	99,65	99,95	99,95	99,66
4.2	Rasio permukiman layak huni	99	100	100	100	99,66

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun tahun 2018 sebesar 99,65 dan 99,95 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Semakin tinggi rasio berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak huni. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH.

Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 didapatkan sebanyak 132 rumah yang berhak menerima Bansos RTLH. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{42.849}{42.869} \times 100\% = 99,95\%$$

Adapun setahun selanjutnya terdapat kenaikan rasio rumah layak huni di Kota Madiun. Adapun rasionya naik 0,29% dari angka 99,55% menjadi 99,66 persen di tahun 2021.

2. Rasio pemukiman layak huni

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 definisi dari Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di - 65 -awasan perkotaan atau - 65 -awasan pedesaan serta Perda Kota Madiun No.6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Mengacu pada point 6 diatas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan tahun 2020 sudah tertangani semua sehingga ditingkat kelurahan sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman Kumuh atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100 = \frac{2758,67}{2758,67} \times 100\% = 100\%$$

Adapun berselang satu tahun selanjutnya tepatnya pada tahun 2021, rasio pemukiman layak huni sedikit menurun dari angka 100 % menjadi 99,66 %. Dengan hal ini terdapat penurunan rasio sebesar 0,33% terhadap rasio pemukiman layak huni di wilayah Kota Madiun.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.36
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Madiun, 2021

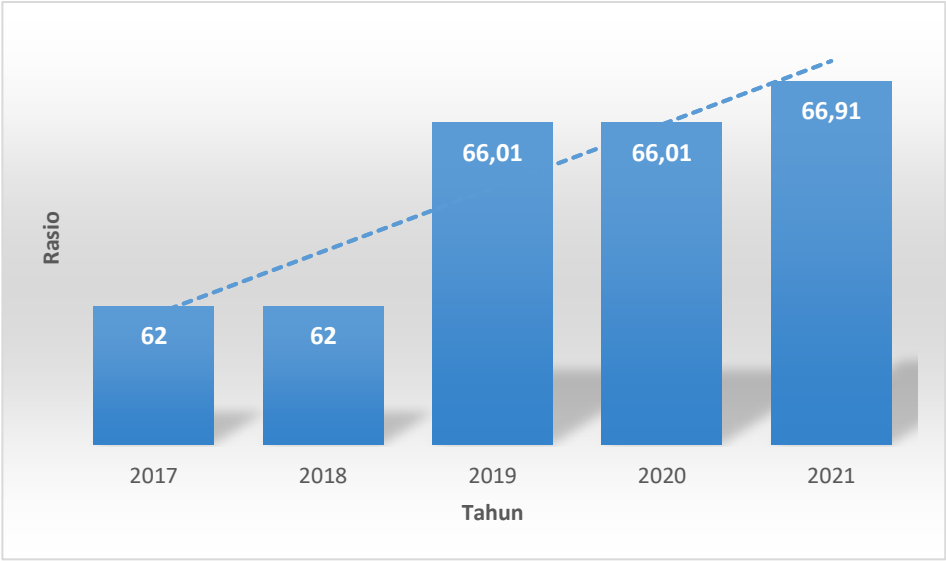
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100%	100%

Sumber: LPPD Kota Madiun, Tahun 2021

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

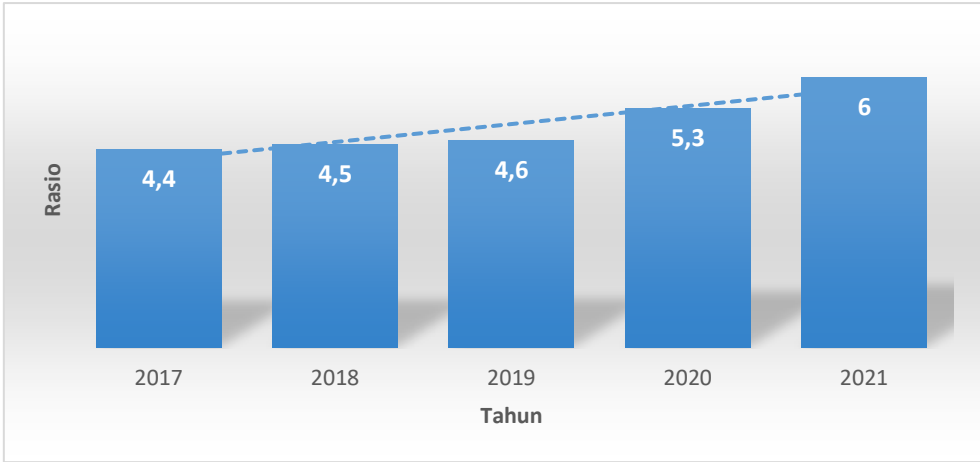
Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang di amanatkan dalam undang-undang, cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan pelindung masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan tentram dalam masyarakat, saat ini pemerintah kota madiun akan mamperkecil rasio petugas dan jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas Satpol PP per kelurahan. Untuk mengetahui besar cakupan petugas tahun 2020 Satpol PP dan Linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2021

Gambar 2.19
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2017-2021

Berdasarkan grafik diatas rasio linmas per 10.000 penduduk Kota Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi hingga nilai rasio sebesar 66,01 pada tahun 2019 dan 2020. Adapun pada tahun 2021 rasio jumlah Linmas sedikit mengalami peningkatan dengan angka sebesar 66,91.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2021

Gambar 2.20
Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk di Kota Madiun
Tahun 2017-2021

Selain petugas linmas, petugas Polisi Pamong Praja juga memiliki peran dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Data menunjukkan rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 yakni meningkat dari 4,6 menjadi 5,3. Adapun pada tahun 2021, angka rasio petugas Pol PP di Kota Madiun sudah menembus angka 6.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.37
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kota Madiun, 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber: LPPD Kota Madiun, Tahun 2021

Dilihat dari perkembangan pada sub bab ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, hasil capaian indikatornya cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari 2 indikator pendukung pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

f. Pelayanan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.38
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum
Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2018- 2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN			
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	2	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar				
6	Sosial				
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16	16
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	12936	10.612	49.075	59.691
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	10594	10.573	30.295	31.029
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	100.1	100,30%	99,80%	99,66%
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	12.936	10.612	49.075	59.691
6.6	Angka Kemiskinan	4,49	4,35	4,98	5,09
6.7	Indeks Gini	0,36	0,35	0,39	0,345

Sumber : BPS, Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, Tahun 2020

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.**

Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun pada tahun 2018 hingga 2020 terdapat 15 Panti Asuhan dan 1 Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial permakanan hanya 8 lembaga. Adapun pada tahun 2021, bantuan sosial bentuk pemberian permakanan untuk panti asuhan yang diberikan oleh pemerintah Kota Madiun kepada 14 lembaga sudah mencapai angka nominal sebesar Rp 1.218.590.000. Dari data diatas dapat disimpulkan terdapat 16 lembaga sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang terdapat di Kota Madiun.

2. Jumlah Penerima Bantuan

Tahun 2018 jumlah penerima bantuan di wilayah Kota Madiun mencapai 12936 orang. Setahun berselang, pada Tahun 2019, angkanya sedikit menurun menjadi 10.612 orang. Adapun pada tahun 2020 dan 2021 jumlah penerima bantuan meningkat dratis mencapai 49.075 dan 59.68, hal itu dikarekanan terdapat tambahan program bantuan dari pemerintah pada masa pandemi. Masing-masing bantuan sosial mempunyai persyaratan khusus dan memerlukan beberapa tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan data daerah belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pusat, sehingga bantuan yang diterima jumlahnya dibawah pagu. Untuk Bansos Lansia non potensial, bantuan tidak tersalurkan karena penerima bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris.

3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2018 sebesar 10.594, pada tahun 2019 sebesar 10.573, dan meingkat sebesar 30.295 pada tahun 2020 serta 31.029 pada tahun 2021. Penanganan yang tertangani yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang dahulu disebut dengan PMKS. Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk.

Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2 % dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

4. PMKS yang tertangani

Pada tahun 2019 capaian penanganan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya. Jumlah totalnya mencapai 10.729 orang atau sebesar 100,3%. Sebaliknya, pada tahun 2020 dan 2021 capaian penanganan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 99,8% tahun 2020 dan 99,66% pada tahun 2021. Hal ini memang sangat mungkin dicapai mengingat penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi hanya untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan sosial asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan penanganan khusus sebanyak 150 orang. Warga luar kota tersebut yang memerlukan pelayanan sosial dengan rincian : 92 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/ orang terlantar, 5 orang Pengemis, 9 orang Lansia terlantar, 9 orang Anak jalanan dan 5 orang pemulung.

5. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Berikut data PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2021.

Tabel 2.39
Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2021

JENIS PMKS	SATUAN	JUMLAH	BANTUAN
1. Lanjut Usia Terlantar/ Non potensial	orang	169	Berupa bantuan uang @ Rp 2.500.000,-
2. Anak Terlantar	orang	457	Berupa bantuan permakanan sebesar 1.218.590.000 kepada 14 lembaga yatim piatu.
3. Fakir Miskin dengan rincian :	orang	10.000	
- Fakir Miskin KPM BPNT			APBN
- Fakir Miskin KPM PKH			APBN
- Fakir Miskin KPM BPNTD			APBD II
Jumlah		10.626	

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Pada tahun 2021 jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 10.626 orang. Jenis PMKM yang diberi bantuan yaitu lanjut usia terlantar/non potensial berupa bantuan uang @Rp. 2.500.000. Anak terlantar juga mendapat bantuan berupa permakanaan sebesar Rp 1.218.590.000 yang mana bantuan tersebut langsung diberikan kepada 14 lembaga yatim piatu di Kota Madiun. Jumlah penerima bantuan terbanyak yaitu jenis PMKS fakir miskin dengan jumlah 10.626 orang, bantuan yang diterima berasal dari APBN maupun APBD.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Sosial

Tabel 2.40
Bidang Sosial Kota Madiun, 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	107,53%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	137,42%
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	204,44%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	173,76%

Sumber: LPPD Kota Madiun, Tahun 2021

6. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Sesuai data BPS angka kemiskinan Kota Madiun tahun 2021 sebesar 5,09% atau sekitar 9.060 penduduknya. Dengan hal ini dapat dipastikan angka kemiskinan di wilayah Kota Madiun naik, hal itu disebabkan di Tahun 2020 saja angka kemiskinan kota madiun hanya berkisar 4,98% saja atau dalam kata lain hanya terdapat 8.830 penduduk miskin.

7. Indeks Gini

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Madiun pada tahun 2018-2020 tercatat antara angka 0,33 hingga 0,35 dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang. Sedangkan pada tahun 2021, realiasi dari indeks gini Kota Madiun adalah sebesar 0,345 yang lebih tinggi melebihi capaian provinsi jawa timur sebesar 0,364 dan capaian nasional sebesar 0,381

g. Pelayanan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017 -2021

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja					
7.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	33	100	100	100	18
7.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,76%	64.55%	66.86%	68,63%	66,87%
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan		99.1	85,52	73,04	79,15
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	4,68%	3.85 %	4.01%	8,32%	8,15%
7.5	Keselamatan dan perlindungan		13.968	15.976	23.294	25.218
7.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	100	100	100	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, Tahun 2021.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam era industrialisasi, masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil.

Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha ditahun 2018-2020 yang terdaftar pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100%. Penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama. Untuk perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha pekerja antara tahun 2018-2020 mengalami kesamaan yaitu 100%. Namun jumlah kasus yang diselesaikan ditahun setiap berbeda.

Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan terhadap Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun. Dilihat dari data yang ada ternyata angka sengketa hanya mencapai 18%. Dalam kata lain penurunan angka sengketa ini dapat sukses dilaksanakan saat terjadi implementasi Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di suatu perusahaan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2018 sebesar 64,55%, sedangkan pada tahun 2019 adalah 66,86%, sehingga TPAK tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,31% apabila dibandingkan dengan TPAK tahun 2018 yang sebesar 64,55%. Pada tahun 2020 TPAK mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya menjadi 68,63%.

Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 66,86 %. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Berarti yang sisanya sebanyak 33 orang adalah bukan angkatan kerja yang terdiri dari usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Berselang satu tahun kemudian di tahun 2020, tepatnya di masa pandemi Covid-19. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi 68,83 %. Satu tahun setelahnya di tahun 2021, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Madiun kembali mengalami penurunan walau tidak signifikan dengan angka TPAK mencapai 66,87%.

Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurung waktu tahun 2018-2021 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan ketrampilan serta menciptakan wirausaha baru.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara persentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar. Persentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2018 sebesar 99,1% sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13,58 poin menjadi 85,52%. Pada tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan menurun 12,44 poin dan angkanya menjadi sebesar 73,04%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi yang masih berlangsung dan sebagian besar perusahaan atau pemberik kerja tidak melakukan rekrutmen tenaga kerja baru. Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 79,15%.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun adalah sebesar 3,85 %. pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,16%. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,16% sehingga persentasenya menjadi sebesar 4,01 %. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,32%. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) dan tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi yang berlangsung dan banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian kerja.

Pada tahun 2021, tepat tahun kedua adanya pandemi covid-19 di Indonesia. Angkat pengangguran terbuka di wilayah kota madiun sedikit mengalami penurunan. Hal itu terjadi dari data yang diolah BPS, bahwasannya angka pengangguran terbuka di Kota Madiun Tahun 2021 hanya berkisar 8,15%. Dalam arti lain terjadi penurunan sekitar 0,17% terhadap angka pengangguran terbuka di wilayah Kota Madiun pada Tahun 2021.

5. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hukum keselamatan kerja) meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pekerja dilingkungan pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.

Di Kota Madiun selama tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sebesar 13.968, tahun 2019 meningkat menjadi 15.976. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak 7.318 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlahnya menjadi 23.294 pekerja. Adapun pada tahun 2021, jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah mencapai 25.218 pekerja.

6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), UU NO 21 tahun 2000, KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus di pahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB).

Meskipun sudah adanya PB yang disepakati anatar pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha ditahun 2018-2020 yang terdaftar dapat terselesaikan semua.

Pada tahun 2021, permasalahan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah ternyata tidak terdapat permasalahan berarti. Hal itu terjadi mengingat penyelesaian masalah yang berjumlah 0, dalam arti lain tidak ada permasalahan mengenai perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Kota Madiun yang terjadi pada tahun 2021.

h. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusutaaan gender dengan sasaran meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.42
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun Tahun 2017 – 2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	8,21	13,32	12,78	12,72	7,83
8.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	91,73	86,67	86,95	87,27	55,58

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
8.3	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,041	0,002	0,017	0,016	0,032
8.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	56,16	-	-	59,35	59,31
8.5	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
8.6	Indeks Pemberdayaan Gender	82,19	82,28	77,07	77,18	76,75
8.7	Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan Swasta	99,94	99,43	99,73	99,99	63,41
8.8	Indeks pembangunan Gender	93,66	93,47	94,05	94,38	94,42

Sumber : BPS, Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk realisasi tahun 2018 sebesar 13,32% tahun 2019 sebesar 12,78 % dan tahun 2020 sebesar 12,72%. Beberapa alasan yang menyebabkan penurunan adalah pensiun, mutasi, ataupun meninggal dunia. Adapun pada 2021, Jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah mencapai 7,83 %.

2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

Jumlah partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami kenaikan/peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Untuk tahun 2018 realisasi sebesar 86,67, tahun 2019 sebesar 86,95 dan tahun 2020 mencapai 87,27. Pada 2021, jumlah partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Madiun sudah mencapai 55,58%.

3. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Realisasi tahun 2018 sebesar 0,002 kemudian meningkat sebesar 0,017 untuk tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan lebih kecil sehingga menjadi 0,016. Rasio KDRT menggambarkan semakin tinggi rasio maka menggambarkan adanya peningkatan kesadaran kaum perempuan untuk melapor jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pada tahun 2021 yang lalu jumlah KDRT di Kota Madiun mencapai 0,032.

4. Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2017 adalah sebesar 56,16%. Setahun dan dua tahun selanjutnya tepatnya pada tahun 2018 dan 2019 ternyata belum ada data yang di dapat dari Badan Pusat dan Statistik yang didapat. Berselang pada masa awal covid-19 di Indonesia tepatnya pada tahun 2020, jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 59,35%. Setahun selanjutnya tepatnya pada tahun 2021, jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di kota Madiun turun sedikit mencapai 59,31 %.

5. Jumlah Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2018 hingga tahun 2020 didata dan tertangani semuanya, sehingga capaiannya 100%. Di lain sisi pada setahun selanjutnya pada tahun 2021 persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan mencapai angka 100%.

6. Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender

Menurut BPS, Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun tahun pada tahun 2017 adalah 82,19% dan Tahun 2018 sebesar 82,28 % dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019 sehingga persentasenya sebesar 77,07. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Berselang dua tahun selanjutnya pada Tahun 2020 dan 2021 Indeks Pemberdayaan gender di Kota Madiun mencapai angka 77,18% pada tahun 2020 dan 76,75% pada Tahun 2021.

7. Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan swasta

Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta mengalami penurunan sedikit di tahun 2019 yaitu sebesar 99,73% sedangkan di tahun 2018 sebesar 99,43%. Adapun pada tahun 2020 dan 2021 jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta adalah sebesar 7,83% dan 55,58%

8. Jumlah Indeks Pembangunan Gender

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun tercatat pada tahun 2017 mencapai angka 93,66, dilain sisi IPG Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada tahun 2018 nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 93,47 dan ada peningkatan di tahun berikutnya sebesar 94,05. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Berselang pada tahun 2021, tercatat Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun sudah semakin membaik lagi. Hal itu dibuktikan dengan data di lapangan yang di dapat oleh BPS bahwasannya IPG Kota Madiun sudah mencapai 94,42 pada tahun 2021.

i. Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun menetapkan tujuan dalam rencana strategis yaitu “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian”, dan menetapkan sasaran strategis “meningkatkan ketersediaan pangan dan stabilnya produksi hasil pertanian dan perikanan”.

Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan di Kota Madiun berorientasi untuk “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan” dengan sasaran “meningkatkan ketersediaan pangan”. Indikator utama dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatkan ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein.

Adapun perkembangan indikator kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.43
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun
Tahun 2017-2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
9	Pangan					
		2017	2018	2019	2020	2021
9.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	ada	ada	ada	ada
9.2	ketersediaan pangan utama	140,79	183.38	154,44	138,56	139
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	138,59	138.61	138,63	138,63	126,77

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Regulasi ketahanan pangan

Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 501-401.113/67/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun.
- b. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 520-401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 520-401.204/23/2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun;
- c. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188-401.113/129/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun;
- d. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188-401.113/126/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 188-401.2014/27/2015 tentang Pembentukan Tim Bina Kegiatan Rumah Pangan Lestari;

- e. Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun No. 188-401.113/01/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor 060-401.204/001/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun.

2. Ketersediaan pangan utama

Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan utama yaitu 154,44 Kg/kapita/tahun yang diperoleh dari pembagian jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dengan jumlah penduduk 2019 yaitu 210.147 jiwa. Adapun penurunan ketersediaan ketersediaan pangan utama dari tahun 2018-2019 sekitar 28,94%, Namun ketersediaan pangan utama Tahun 2019 masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/th. Ketersediaan pangan utama Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 15,88%, penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan penurunan tahun 2018 hingga tahun 2019. Adapun pada tahun 2021, ketersediaan bahan pangan utama di Kota Madiun adalah sebesar 139%.

3. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein

Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2019 adalah 3.106 Kkal, sedangkan protein 93,14 gram. Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini adalah WNPG X tahun 2012., yaitu AKE (angka kecukupan energi) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketersediaan energi per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (138,63%). Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (147,84%). Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk tahun 2019 mengalami kenaikan 0,01% dari ketersediaan energi dan protein tahun 2018. Pada tahun 2020 ketersediaan energi dan protein masih sama dari tahun 2019 yaitu 183,63. Sedangkan untuk tahun 2021 adalah sebesar 126,77%.

j. **Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi untuk meningkatkan fungsi lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, IKLH Kota Madiun pada tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.44
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2017-2021

No	Sasaran	Indikator	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,42	64,22	63,87	60,15	58,99

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

k. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Cakupan peserta KB Aktif menunjukkan persentase peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Pada tahun 2017, cakupan peserta KB aktif mencapai 77,16%. Artinya sebanyak 77,16% jumlah pasangan subur merupakan peserta KB aktif. Pada 2 (dua) tahun selanjutnya cakupan peserta KB aktif di Kota Madiun meningkat menjadi 77,20% pada 2018 dan 78,80% pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 6,04% atau sebesar 72,76% dan Kembali turun pada tahun 2021 menjadi 52,20%.

Tabel 2.45
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Madiun, Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur (Pasangan)	Peserta KB Aktif (Orang)	Cakupan Peserta KB Aktif (persentase)
2017	28.107	21.686	77,16
2018	26.107	20.335	77,20
2019	27.452	21.633	78.80
2020	20.495	14.912	72.76
2021	30.255	15.784	52.20

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

1. **Perhubungan**

Adapun untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan tabel indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2017 – 2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
14	Perhubungan					
14.1	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	82%	95%	104%	94%	100%
14.2	Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	89	91	100	90	93
14.3	IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas	71,42	78.08	85,08	85,9	85,903
14.4	Presentase Perlengkpan Jalan	58%	61%	64%	67%	84%
14.5	Kinerja Angkutan Umum	25%	31%	44%	35%	40%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun

Penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja pada tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu

Data menyatakan bahwasannya presentase jumlah pemsangan rambu-rambu di Kota Madiun pada tahun 2021 sudah mencapai 100%,. Adapun realisasi ini diperoleh dari :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah rambu yang terpasang tahun 2021}}{\text{Jumlah Kebutuhan Rambu}} \times 100\% \\ \text{Persentase} &= \frac{2441}{2441} \times 100\% \\ \text{Persentase} &= 100\% \end{aligned}$$

Tercapainya realisasi pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai 100% melebihi kebutuhan yang telah direncanakan dikarenakan adanya beberapa lokasi atau objek baru yang sangat dinamis seperti pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, dll yang membutuhkan pemasangan rambu baru diluar kebutuhan yang telah direncanakan. Berselang dua tahun selanjutnya, Kota Madiun masih mempertahankan tren positif nya dalam presentase pemasangan jumlah rambu-rambu, dari data yang ada presentase pemsangan rambu-rambu sudah mencapai 100%.

2. Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik

Rasio sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik pada Tahun 2020 adalah 92,19% dan Tahun 2021 adalah 93,18%, Adapun rinciannya adalh sebagai berikut :

Tabel 2.47
Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik
di Kota Madiun Tahun 2020 – 2021

NO	NAMA	2020			2021		
		JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%
1	TRAFFIC LIGHT	30	30	100%	30	30	100%
2	HALTE	12	9	75%	12	10	83%
3	CCTV	25	23	92%	25	25	100%
4	WARNING LIGHT	61	56	92%	65	58	89%
JUMLAH		128	118	92,19%	132	123	93,18%

Adapun perhitungan persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah sarfas LLAJ tahun 2021}}{\text{Total Sarana dan Fasilitas LLAJ}} \times 100\% \\ \text{Persentase} &= \frac{132}{123} \times 100\% \\ \text{Persentase} &= 93,18\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2020 mencapai 92,19%. Berselang satu tahun selanjutnya pada tahun 2021, tercatat presentase sarana fasilitas LLAJ di Kota Madiun sudah mencapai 93,18%. Kenaikan ini disebabkan karena 1 halte sudah mendapat penanganan perbaikan.

3. IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas

IKM (Indek kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas tahun 2017 mencapai 71,42. Berselang pada tahun 2018 IKM masyarakat terhdap layanan angkutan dan lalu lintas mencapai 78,08. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan IKM kembali dari target awal pemerintah hanya sebesar 80 ternyata terealisasi 85,08. Adapun pada masa pandemi awal di Indonesia tepatnya di Tahun 2020, IKM masyarakat terhdap pelayanan angkutan dan lalu lintas meingkat mencapai 85,9. Sedangkan pada tahun 2021 IKM masyarakat kembali meningkat walau tidak signifikan dengan angka sebesar 85,93.

1. Persentase Perlengkapan Jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa; rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasiltas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan, dan penyelenggaraan perlengkapan jalan.

Persentase perlengkapan jalan Kota Madiun sebesar 67%, terdapat 33% jalan yang belum dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan. Adapun pada Tahun 2021, Persentase Perlengkapan Jalan di Kota Madiun sudah mencapai 84%. Itu berarti masih ada 18% jalan yang belum dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

2. Kinerja Angkutan Umum

Adapun kinerja angkutan umum di Kota Madiun pada Tahun 2017 dan 2018 masih mecapai angka 25% dan 31%. Hal itu terjadi mengingat pada waktu itu belum ada angkutan gratis khusus pendidikan. Berselang setahun setelahnya pada tahun 2019, terjadi kebijakan baru untuk angkutan umum gratis khusus pendidikan, alhasil kinerja angkutan umum naik menjadi 44%. Adapun saat masa pandemi, kinerja angkutan umum Kota Madiun tahun 2020 dan 2021 mencapai 35% dan 40%. Capaian tersebut menandakan belum optimalnya penggunaan angkutan umum di Kota Madiun. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, hal tersebut menyebabkan minimnya penggunaan angkutan umum.

m. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah persentase koperasi aktif. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedang koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021, persentase koperasi aktif, jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kota Madiun menunjukkan tren fluktuatif, peningkatan dan penurunan diakibatkan jumlah koperasi yang mengalami penambahan dan pengurangan selama kurun waktu tahun 2017-2021 sebagaimana terdapat pada table berikut :

Tabel 2.48
persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun, 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi	306	173	308	155	156
Jumlah Koperasi Aktif	300	172	302	153	154
persentase Koperasi Aktif	98,04	99,42	98,05	98,71	98,71%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun, 2021

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah UMKM Non BPR/ LKM UKM dan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Madiun cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM sebesar 23.278 unit. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan yakni 23.360 unit. Pada tahun 2019 jumlah UMK dan UMK non BPR masing-masing sebesar 23.457 unit. selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021, jumlah UMK dan UMK non BPR masing-masing sebesar 23.545 unit dan 23.618 unit.

Tabel 2.49
Jumlah UMKM Non BPR/LKM dan Usaha Kecil Mikro di Kota Madiun,
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
UKM Non BPR / Usaha Mikro Kecil	23.278	23.360	23.457	23.545	23.618

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM, 2022 (diolah)

n. Pelayanan Perizinan

Tahun 2019 lama pengurusan perizinan sudah sangat efektif dan tidak berbelit-belit, rata-rata lama mengurus perizinan di Kota Madiun membutuhkan peoses selama lima hari dan jumlah persyaratan yang harus dilengkapi jumlahnya berbeda-beda sesuai izin yang akan diurus. Hal ini dapat dilihat sesuai tabel dibawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada survei lapangan.

Tabel 2.50
Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2021

NO	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
A	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha			
1	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
2	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)/Perluasan Izin Usaha Industri	3 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
3	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
4	Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
5	Pemenuhan Komitmen Pendidikan Non Formal (PNF)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
6	Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada

NO	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
7	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
8	Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
9	Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan AMDAL	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
10	Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Untuk UKL UPL	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
11	Pemenuhan Komitmen Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3)	5 (Lima)	10 (Sepuluh)	Tidak Ada
12	Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	5 (Lima)	18 (Delapan Belas)	Tidak Ada
13	Pemenuhan Komitmen Sarana Kesehatan (17 Jenis)	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
15	Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
16	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	30 (Tiga Puluh)	5 (Lima)	Tidak Ada
17	Izin Pengusahaan Rumah Kos/Pemondokan	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
B	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Non Berusaha			
1	Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi	5 (Lima)	10 (Sepuluh)	Tidak Ada
2	Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
	-Fungsi Hunian	30 (Tiga puluh)	11 (sebelas)	L x Indeks terintegrasi x Lingkup pembangunan x Harga Satuan Retribusi(20.000/m ²)
	-Fungsi Usaha	30 (Tiga puluh)	14 (empat belas)	L x Indeks terintegrasi x Lingkup pembangunan x Harga Satuan Retribusi(20.000/m ²)
	-Fungsi Sosbud	30 (Tiga puluh)	12 (dua belas)	L x Indeks terintegrasi x Lingkup pembangunan x Harga Satuan Retribusi(20.000/m ²)
	-Fungsi Keagamaan	30 (Tiga puluh)	12 (dua belas)	L x Indeks terintegrasi x Lingkup pembangunan x

NO	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
				Harga Satuan Retribusi(20.000/m ²)
	-Fungsi Campuran	30 (Tiga puluh)	16 (enam belas)	L x Indeks terintegrasi x Lingkup pembangunan x Harga Satuan Retribusi(20.000/m ²)
3	izin Reklame Dalam Pasar	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
4	Izin Pengelolaan Parkir dan Kamar Mandi/WC	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
5	Izin Promosi Dalam Pasar	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
6	Izin Reklame			
	- Izin Reklame Insidentil	5 (Lima)	6 (Enam)	Perangkat Daerah Terkait
	- Izin Reklame Permanen	5 (Lima)	5 (Lima)	
7	Izin Penempatan Bangunan Reklame	30 (Tiga puluh)	11 (Sebelas)	3.500/m ³ /bulan
8	Izin Tenaga Kesehatan (33 Jenis)	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
9	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar	5 (Lima)	3 (Tiga)	1.000/m ² /bulan
10	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau Lapangan	5 (Lima)	3 (Tiga)	7.600.000/hari
11	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau Bangunan	5 (Lima)	2 (Dua)	6.500/m ² /bulan
12	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	5 (Lima)	11 (Sebelas)	Tidak Ada
13	Pemakaian Bahu Badan Jalan	5 (Lima)	3 (Tiga)	2.000/m ² /hari
14	Izin Penempatan Pedagang Pasar	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada

Sumber: DPMPSTPKUM, 2021

o. Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasarannya berikut:

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun
Tahun 2018-2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
18	Pemuda dan Olahraga				
18.1	Jumlah organisasi pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	3	6	6	5
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	1	1
18.3	Jumlah kegiatan olahraga	8	18	2	2
18.4	Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3
18.5	Lapangan olahraga	83	83	83	83
18.6	Jumlah Organisasi Olah Raga	28	28	28	28
18.7	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	11	7	3	4
18.8	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	34	52	79	97
18.9	Jumlah Peserta Olah Raga	20.394	19.266	2.015	2.895
18.10	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	100	100	100	100

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut adalah :

1. Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun Tahun 2021 antara lain:

- Anggota Koni;
- Anggota Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI);
- OSIS Tingkat SMP Kota Madiun;
- Gugus Pramuka Tingkat SMP Kota Madiun;
- Anggota Dewan Kesenian;

2. Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun Tahun 2021 sebanyak 1 kegiatan yaitu Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka;

Pada tahun 2020 juga hanya terdapat satu kegiatan kepemudaan yang terlaksana.

3. Jumlah kegiatan Olah raga

Jumlah kegiatan olahraga di Kota Madiun Tahun 2020 dan 2021 menurun secara drastic akibat adanya pandemi yang terjadi, menjadi sebanyak 2 kegiatan, antara lain :

- Gowes Bersama Pak Wali (peserta 30 orang)
- Madiun Night Cycling (peserta 50 orang)

4. Gelanggang/ balai remaja

Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun Tahun 2020 masih sama dengan di Tahun 2017 dan 2021 yaitu sebanyak 3, antara lain :

1. Lapangan Sepak bola Stadion Wilis Jl. Mastrip Kota Madiun ;
2. GOR Basket Jl. Mastrip Kota Madiun;
3. Gedung Kesenian Jl. Ringin Kota Madiun.

5. Lapangan olah raga

Lapangan olahraga di Kota Madiun Tahun 2018 hingga Tahun 2020 jumlahnya sebanyak 83. Adapun pada tahun 2021 jumlah lapangan olahraga di Kota Madiun sebanyak 83 lapangan.

6. Jumlah organisasi olahraga

Pada Tahun 2021 sebanyak 28 dengan jumlah yang tetap sama dengan kondisi dua tahun sebelumnya.

Tabel 2.52
Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Bulu Tangkis	3 Klub	15	Angkat Besi	3 Klub
2	Tenis Lapangan	10 Klub	16	Taekwondo	4 Klub
3	Renang	2 Klub	17	Panjat Tebing	2 Klub
4	Atletik	1 Klub	18	Judo	1 Klub
5	Wushu	1 Klub	19	Senam	4 Klub
6	Pencak Silat	11 Klub	20	Balap sepeda	1 Klub
7	Catur	1 Klub	21	Tinju	1 Klub
8	Tenis Meja	1 Klub	22	Menembak	1 Klub
9	Panahan	1 Klub	23	Karate	2 Klub
10	Basket	2 Klub	24	Sepatu Roda	5 Klub
11	Bola Volly	2 Klub	25	Drumband	42 Klub
12	Sepak Bola	23 Klub	26	Bilyard	5 Klub
13	Sepak Takraw	10 Klub	27	Sepak Bola Futsal	12 Klub
14	Gulat	1 Klub	28	KONI	1 Klub

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

7. Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional

Sejak Januari 2019, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah memberangkatkan para atlit berprestasi untuk mengikuti berbagai pertandingan di tingkat provinsi maupun nasional diantaranya cabang olahraga bola basket, pencak silat, Taekwondo dan masih banyak lagi cabang olahraga lainnya. Adapun Prestasi olahraga untuk Tahun 2019 di tingkat Nasional sebanyak 7 (tujuh) kejuaraan yaitu :

1. Kejuaraan diluar PORPROV JATIM 2019:
 - a. 2 medali emas cabang olahraga atletik;
 - b. 2 medali emas cabang olahraga sepak takraw;
 - c. 1 medali emas cabang olahraga pencak silat;
 - d. 1 medali perunggu cabang olahraga pencak silat;
 - e. 1 medali perunggu cabang olahraga catur.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah prestasi di bidang pemuda dan olah raga tingkat nasional menjadi 3 prestasi hal tersebut dikarenakan terbatasnya penyelenggaraan kegiatan keolahragaan ditengah pandemi. Adapun di Tahun 2021, Kota Madiun berhasil mengumpulkan 35 medali dari berbagai kader terbaiknya. Adapun berbagai prestasi olahraga terbaik yang di dapat pada Tahun 2021 adalah :

- a. Medali Emas Cabor Basket PON XX Papua oleh Janan Salma Najiyah
- b. Medali Perak cabor atletik 4x100 meter PON XX Papua oleh Susi Dewi Wulandari
- c. Medali Perak Cabor Kurash Perorangan Kelas 52 Kilogram oleh Safira Dyah Fitri Riskianti Pelatih Tim Sepak Takraw Jatim (Medali Emas dan Perak) oleh Ony Diar Ahyanto
- d. Pelatih Tim Sepak Takraw Jatim (Medali Emas dan Perak) oleh Ony Diar Ahyanto.

8. Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional

Prestasi olahraga untuk Tahun 2019 di tingkat Nasional dan regional sebanyak 50 (lima puluh). Pada Tahun 2020 jumlah prestasi mengalami peningkatan menjadi sebanyak 79. Adapun prestasi pada tahun 2021 adalah mencapai 97 prestasi dari target sebesar 33.

9. Rasio Kondisi Sarpras Olahraga yang layak

Rasio Kondisi Sarpras Olahraga yang layak Kota Madiun tahun 2018-2020 telah mencapai 100%. Adapun kondisi sarpras olahraga di tahun 2021 mencapai 100%.

p. Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.53
Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2017-2021

No.	Uraian Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina/ didampingi (unit)	37	37	37	36	36
2.	Jumlah Koleksi Buku (eksemplar)	36.397	49.172	51.986	85.518	88.765
3.	Jumlah Pengunjung (orang)	55.633	56.648	81.284	108.211	56.178

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2021

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah perpustakaan masyarakat yang dibina pada tahun 2021 ada sebanyak 36 unit. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung mulai dari kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, hingga mencapai 108.211 orang pengunjung di tahun 2020. Akan tetapi jumlah pengunjung Kembali landai di tahun 2021 menjadi 56.178, Hal ini dikarenakan untuk kunjungan pada aplikasi perpustakaan online berkurang.

q. Kearsipan

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan, dapat diukur melalui indikator (i) Pengelolaan arsip secara terpadu; dan (ii) Peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.54
Data Urusan Kearsipan di Kota Madiun Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Berkas Arsip Aktif yang Dikelola (berkas)	51.430	53.613	57,615	60,004	68.170

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang Mendapatkan Pelatihan (orang)	765	965	200	131	61

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah berkas arsip aktif yang dikelola terus mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hingga mencapai 68.170 berkas pada tahun 2021. Sedangkan dari segi jumlah SDM pengelola kearsipan selama kurun waktu 2017 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan, hingga mencapai 965 orang pada tahun 2018.

Peningkatan kompetensi pengelola arsip tersebut terjadi Setelah diadakannya sosialisasi, pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip. Namun pada kurun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu sebesar 200 orang pada tahun 2019, 131 orang di tahun 2020 dan 61 orang di tahun 2021 hal ini dikarenakan sudah banyak pengelola arsip yang sudah ikut pelatihan sehingga pengelola arsip yang belum mengikuti pelatihan semakin menurun. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun perlu melanjutkan program sosialisasi, pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip sehingga pengelola arsip yang mempunyai kompetensi bertambah dengan harapan jumlah arsip yang diselamatkan semakin meningkat setiap tahun.

r. Kelautan dan Perikanan

Kota Madiun tidak memiliki wilayah laut sehingga fokus kegiatan perikanan di Kota Madiun berbasis perikanan budidaya. Selain itu, dengan status sebagai wilayah perkotaan yang didominasi sektor perdagangan dan jasa, kegiatan perikanan di Kota Madiun dapat dikatakan belum berkembang dengan optimal. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kelautan dan perikanan dapat diukur melalui indikator jumlah produksi perikanan. Data dan informasi tentang perkembangan kegiatan perikanan selama kurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55
Data Perkembangan Perikanan di Kota Madiun, Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	322,07	343,9	361,3	362,9	367,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun (diolah), 2021

s. Pariwisata

Dalam rangka mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan pada penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Madiun diarahkan untuk mencapai tujuan mengembangkan potensi wisata dan ketahanan budaya dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata di Kota Madiun

Pariwisata Kota Madiun selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kemajuan seiring dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana pariwisata, dan obyek-obyek wisata lainnya yang lebih bervariasi. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan pariwisata selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.56
Data dan Informasi Urusan Pariwisata di Kota Madiun, Tahun 2017-2021

No	Uraian Data	Tahun					Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	268.803	411.237	421.753	452.891	351.554	381.247

Sumber: Dinas Disbudparpora Kota Madiun, 2021

t. Pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan mengingat laju pertumbuhan dan kontribusi sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang lebih tinggi. Dalam kurun waktu 2017-2021, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan setiap tahun menjadi hanya sebesar 0,80% pada tahun 2021. Penurunan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian juga disebabkan menurunnya jumlah lahan produktif yang mengakibatkan turunya produksi pertanian. Hal tersebut berimbas pada turunya PDRB sektor pertanian dan rendahnya pertumbuhan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman hortikultura dan perkebunan di Kota Madiun. Dari sisi pertumbuhan, sektor pertanian merupakan sektor yang tumbuh paling kecil diantara 16 sektor lainnya

Tabel 2.57
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian di Kota Madiun, Tahun 2017-2021

No	Uraian Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kontribusi (%)	0,83	0,80	0,76	0,88	0,80*

**) angka sementara*

Sumber: BPS Kota Madiun (diolah), 2021

u. Perdagangan

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar, Jumlah pasar umum di Kota Madiun tahun 2021 ada 9 unit, pasar khusus 2 unit dan pasar desa 6 unit pada Tahun 2021 dengan jumlah pedagang tetap sebanyak 3.143 pedagang.

Tabel 2.58
Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, 2017-2021

No.	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pasar Umum	11	11	9	9	9
2.	Pasar Khusus	3	3	3	2	2
3.	Pasar Desa	5	5	6	6	6
4.	Pedagang Tetap	3.478	3.478	3.485	3.555	3.143

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

v. Perindustrian

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya menurut kecamatan di Kota Madiun tahun 2021, kecamatan yang memiliki jumlah industri terbanyak adalah Kecamatan Taman yaitu 10 industri dengan menyerap tenaga kerja sebesar 412 orang. Namun kecamatan Manguharjo dengan industri sebanyak 6 unit namun dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2818 tenaga kerja yang juga merupakan terbanyak dibanding kecamatan lain.

Tabel 2.59
Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2018 – 2021

No.	Kecamatan	Industri Besar Sedang				Tenaga Kerja			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Manguharjo	5	5	5	6	2908	1874	1874	2818
2	Taman	10	10	9	10	286	345	325	412
3	Kartoharjo	9	7	7	7	308	294	294	311
Jumlah		24	22	21	23	3502	2513	2493	3541

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

w. Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good and clean governance* pada penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan dengan sasaran meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan serta meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka telah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) pada Pemerintah Kota Madiun tiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 53 Tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional, bahwa Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mendapatkan predikat Sangat Tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tingkat Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun. Secara umum terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Realisasi indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 4 (empat) tahun berturut-turut (tahun 2017 sampai dengan tahun 2020) realisasi kinerjanya mengalami kenaikan apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, nilai akuntabilitas kinerja adalah sebesar 63,50 selanjutnya meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar 68,20 pada tahun 2019 dan sebesar 70,01 pada tahun 2020. Untuk tahun 2021 masih pada tahap penilaian di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 2.60
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Administrasi Pemerintahan di Kota Madiun, Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (kategori)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah (skor)	B (63,50)	B (67,21)	B (68,20)	B (70,01)	Belum mendapat realisasi
3.	Perkembangan Indeks Kepuasan masyarakat Kota Madiun	79,57	82,85	88,85	85,501	86,456
4.	Cakupan fasilitasi pelayanan anggota DPRD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Madiun, 2021

Terkait besaran jumlah kelembagaan sudah disesuaikan dengan kriteria yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Madiun Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Melihat konteks seperti ini, maka pola hubungan yang dikembangkan adalah kemitraan atau *partnership*. Hubungan kemitraan pada realisasinya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan semata akan tetapi juga mengacu pada nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat dijalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan transparan.

Pelayanan eksekutif terhadap legislatif dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pada prinsipnya, seluruh fasilitasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi legislatif telah difasilitasi sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%.

x. Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berperan penting untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan, dan dinamika kinerja ASN. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan. Indikator kinerja persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. Pada tahun 2021 jumlah pelanggaran disiplin pegawai sebanyak 3. Realisasi capaian tersebut menunjukkan bahwa peran pengawasan internal oleh Perangkat Daerah telah berjalan dengan baik. Adapun data Penjatuhan Hukuman Disiplin dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.61
Jumlah Pelanggaran Pegawai dan Hukuman yang Dikenakan, Tahun 2017-2021

No.	Keterangan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Hukuman Disiplin Berat	6	7	2	6	1
2.	Hukuman Disiplin Sedang	2	2	2	3	2
3.	Hukuman Disiplin Ringan	3	4	1	0	0
Jumlah		11	13	5	9	3

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2021

Pada indikator persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Madiun melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan menerbitkan Peraturan Struktur Organisasi Tata Kerja berupa Peraturan Daerah. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum untuk menyusun struktur organisasi Perangkat Daerah dari staf sampai dengan pejabat struktural. Pada tahun anggaran 2021 persentase jabatan struktural yang dilaksanakan sebesar 98,69% atau dengan kata lain lebih rendah 0,94% dari tahun 2020.

Tabel 2.62
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
di Kota Madiun Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1.	persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai (%)	0,42	0,39	0,15	0,28	0,09

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
2.	persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya (%)	76,74	80,79	71,27	72,16	72,17
3.	persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 18 tahun 2016 (%)	95,01	89,13	98,71	99,63	98,69

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2021

y. Fungsi Penunjang Keuangan

Fungsi penunjang keuangan diperlukan untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya pemanfaatan aset, dan kondisi kinerja keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan. Selain indikator pada fungsi penunjang keuangan dan terdapat 5 (lima) indikator pada fungsi penunjang keuangan. Terkait dengan penetapan APBD, pengesahan APBD dalam kurun waktu 2017-2021 selalu ditetapkan secara tepat waktu dalam arti penetapan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Perkembangan perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dan staknan. Pada tahun 2017, perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan 91,71%, terdapat 29 perangkat daerah yang tertib dan 5 perangkat daerah yang tidak tertib. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga tahun 2021, semua perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu yaitu mencapai 100%. Peningkatan persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan perangkat daerah ini dipengaruhi oleh pemahaman bendahara pengeluaran dalam penatausahaan keuangan sehingga perangkat daerah segera menyelesaikan tanggung jawab pelaporan tahun 2021 baik secara kinerja dan keuangan.

Tabel 2.63
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kota Madiun Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penetapan APBD tepat waktu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	persentase PD yang menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu (%)	91,17	100	100	100	100
3.	Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
4.	persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum (%)	100	100	100	100	100
5.	persentase aset yang dikelola pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100

Sumber: BKAD dan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2021

Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun disampaikan ke BPK RI yaitu selambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pada tahun 2017-2021 penyampaian LKPD secara tepat waktu. Pada indikator persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum, pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun sudah sesuai dengan landasan hukum baik dari peraturan pusat maupun daerah, sehingga capaian tahun 2017-2021 adalah 100%.

z. Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan

Fungsi penunjang perencanaan pembangun merupakan fungsi yang berperan untuk memastikan tersedianya dan berkualitasnya data dan informasi yang mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan. Selain itu, fungsi ini perlu untuk mensinkronkan dokumen rencana pembangunan di berbagai tingkat administratif yaitu pusat, provinsi dan kota serta realisasinya.

Kinerja suatu pemerintah daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Madiun dalam fungsi perencanaan pembangunan menunjukkan kinerja yang membaik selama kurun waktu 2017-2021. Pada ketiga indikator ketersediaan dokumen, selama 2017-2021 menunjukkan status yang baik dengan tersedianya dokumen. Pada indikator yang lain juga menunjukkan keadaan yang baik pada tahun-tahun selanjutnya sasaran yang tercapai mencapai 100%. Secara umum kinerja fungsi penunjang perencanaan pembangunan Kota Madiun menunjukkan kriteria tercapai 100%.

Tabel 2.64
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan di Kota Madiun Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
6.	persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
7.	persentase Capaian Sasaran Tahunan Terhadap Target Sasaran RPJMD (%)	100	100	100	100	100
8.	persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bapelitbangda Kota Madiun, 2021

aa.Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan berperan penting untuk memastikan bahwa permasalahan penelitian dan pengembangan seperti belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Pada fungsi penunjang penelitian dan pembangunan, Pemerintah Kota Madiun menunjukkan kinerja yang stabil dengan jumlah dokumen yang mencapai 2 buah setiap tahunnya dari 2017 hingga 2018. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 kajian/penelitian meningkat menjadi 4 buah setiap tahunnya, sehingga tahun 2021 meningkat menjadi 6 buah kajian. Kajian/penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut terkait dengan bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan umum.

Tabel 2.65
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kota Madiun, 2017-2021

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kajian dan penelitian	2	2	4	4	6

Sumber: Bapelitbangda Kota Madiun, 2021

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang dimaksud Indeks Inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kota Madiun pada Tahun 2021 telah mendapatkan skor 2.693 dengan kategori sangat inovatif.

bb. Fungsi Penunjang Pengawasan

Fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Madiun dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Madiun. Tahun 2021 Inspektorat Kota Madiun telah melaksanakan pengawasan internal secara berkala pada lebih dari 53 obyek pemeriksaan. Terkait dengan persentase temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada tahun 2021 sebesar 97,77%. Pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pengawasan internal dan eksternal yang dilaksanakan setiap semester dan dalam pelaksanaan pemantauan, selain memantau hasil pemeriksaan tahun berjalan juga memantau tindak lanjut sisa temuan tahun sebelumnya. Selanjutnya terdapat level kabalitas APIP tahun 2021 sebesar 2+ naik sedikit pada tahun 2020 yang memperoleh nilai 2.

Tabel 2.66
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kota Madiun Tahun 2020 dan 2021

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	2021
1	persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	96,42%	97,77%
2	Level Kapabilitas APIP	2	2+

Sumber: Inspektorat Kota Madiun, 2021

cc. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kerukunan umat beragama mempunyai kedudukan strategis bagi kelangsungan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan tepat. Agama apapun yang dianut masyarakat akan berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara bila memang implementasi dari ajaran agama tersebut dijiwai dan diamalkan dengan benar. Adapun capaian kinerja untuk indikator ini tahun 2021 adalah sebesar 74,36 dengan status/predikat Harmonis, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan 2020 yaitu 73,95 dan 74,03. Terdapat 5 (lima) dimensi yang diukur secara berurutan : 1) Jujur 2) Menerima 3) Menghormati 4) Kesetaraan 5) Teladan,

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik di Kota Madiun yaitu :

- Kegiatan Rakor Forkopimda mengadakan pertemuan dengan masyarakat membahas isu yang berkembang di masyarakat untuk mencari solusi pemecahan masalah.
- Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat, pelajar dan generasi muda tentang kehidupan berbangsa dan bernegara,
- Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan kondusif di Kota Madiun,
- Membentuk Tim Kewaspadaan Dini untuk menampung informasi terkait isu permasalahan yang akan menimbulkan konflik di masyarakat,
- Penyusunan Peta Rawan Konflik yaitu suatu kajian tentang wilayah rawan konflik di Kota Madiun. Hasil yang diharapkan dari Pemetaan rawan konflik adalah untuk mengantisipasi tidak terjadinya potensi konflik sosial terutama memberikan gambaran dan pemetaan rawan konflik sosial di Kota Madiun, sehingga potensi konflik bisa terdeteksi dan tidak terjadi di Kota Madiun,
- Memfasilitasi/audiensi terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut.

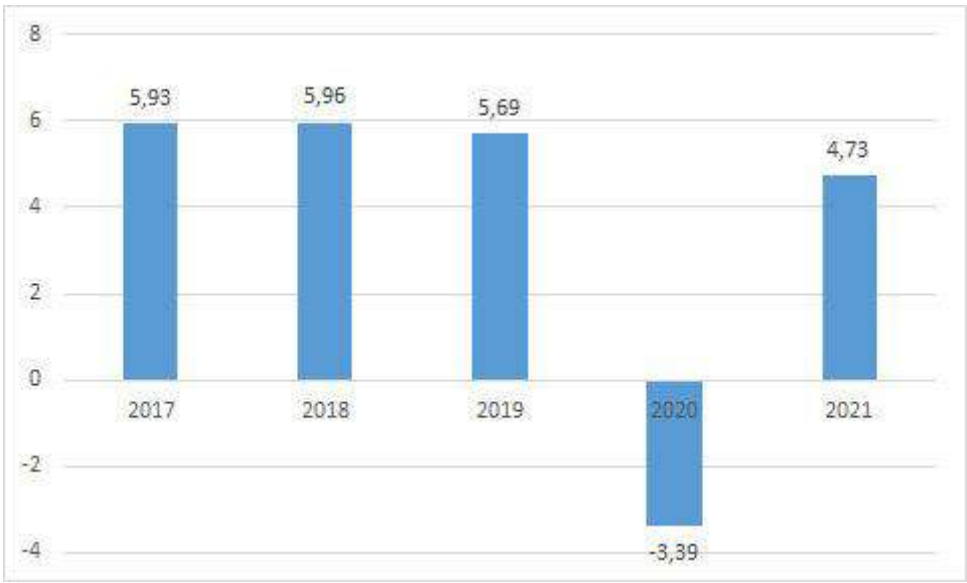
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2.67
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2017 s/d 2021 (%)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2017	5,93
2018	5,96
2019	5,69
2020	-3,39
2021	4,73

Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2021



Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2021

Gambar 2.21
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2017 s/d 2021 (%)

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun selama periode 2017-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tren fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan akan mengalami penurunan yang signifikan disebabkan adanya pandemi covid-19 yang masih terus berlangsung diseluruh dunia sehingga berdampak pada perekonomian global, nasional, maupun regional, dengan adanya kebijakan *new normal* yang diterapkan di tahun 2021, nyatanya hal itu membuat suatu dampak positif tersendiri, mengingat laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun di Tahun 2021 kembali positif dengan presentase 4,73 %.

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada Tahun 2017 s/d 2021 Kota Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2.68
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2015 s/d 2021

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(1,78)	1,78	(0,94)	11,57	-7,26	0,89
Pertambangan dan Penggalian	2,31	1,07	2,41	-5,65	-4,12	-0,09
Industri Pengolahan	8,00	7,01	4,64	-12,84	6,44	21,45
Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	5,45	6,69	1,98	2,95	4,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,84	4,44	4,52	4,86	6,28	4,77
Konstruksi	5,57	2,03	4,90	-4,71	-0,90	2,40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,83	7,54	6,20	-11,18	10,16	4,02
Transportasi dan Pergudangan	8,18	8,48	9,11	-4,38	7,17	6,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	7,47	9,23	8,86	-7,98	3,21	5,05
Informasi dan Komunikasi	6,77	5,34	4,58	16,12	4,75	7,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88	4,08	4,79	-0,66	0,47	3,88
Real Estate	4,22	3,57	5,96	0,33	1,19	3,95
Jasa Perusahaan	6,34	5,31	6,10	-3,18	0,77	4,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,46	4,48	3,85	-2,23	-0,99	2,07
Jasa Pendidikan	4,50	4,21	7,65	1,97	0,54	4,33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,93	7,38	7,52	9,98	5,46	7,35
Jasa Lainnya	4,14	5,74	6,92	-10,68	4,08	2,66
PDRB	5,93	5,96	5,69	-3,39	4,73	4,97

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2021

**) angka sangat sementara

Pada tahun 2020 ketika terjadi pandemic Covid-19, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sector pertanian yaitu sebesar 11,57. Pertumbuhan positif tersebut diikuti oleh sector lain seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa Pendidikan, real estate, informasi dan komunikasi, pengadaan air, dan pengadaan listrik gas.

Sedangkan sector lain mengalami pertumbuhan negatif. Jika di bandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (9,11%), disusul sektor transportasi dan pergudangan (8,86%), dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (7,65%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang lebih baik. Pertumbuhan yang tinggi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ditopang oleh status Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan. Sedang sector dengan pertumbuhan terendah yakni sektor pertambangan dan penggalian (2,41%) dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (-0,94%).

Jika dilihat pada tahun 2019, pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor transportasi dan perdagangan (9,11%), disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (8,86%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sector sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang baik. Pertumbuhan yang tinggi pada sector transportasi dan pergudangan ditopang oleh status kota madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis. Selama periode 2017-2021 sektor dengan pertumbuhan terendah yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan pertambangan dan penggalian. Setelah berlangsungnya pandemi covid-19 yang menimpa satu tahun lamanya, nyatanya membuat PRDB rill di tahun 2021 juga mengalami fluktuasi. Terlihat untuk sektor rill yang paling maju adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (10,16%). Adapun untuk sektor yang paling rendah tingkat pertumbuhannya selama 2021 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan (-7,26%).

PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2017 s/d 2021 Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.69
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s/d 2021
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	100,96	105,68	106,81	120,59	108,7
2	Pertambangan dan Penggalian	2,73	2,91	3,05	2,95	2,91
3	Industri Pengolahan	1.983,44	2.143,80	2.290,02	2.030,28	2.249,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,52	10,35	11,22	11,48	11,72
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	26,74	28,51	29,04	30,4	32,65
6	Konstruksi	767,94	805,27	834,71	798,95	805,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	3.031,46	3.371,83	3.658,65	3.311,32	3.712,41
8	Transportasi dan Pergudangan	407,73	449,97	498,89	477,53	516,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	574,36	636,99	705,63	661,55	716,4
10	Informasi dan Komuniasi	1.660,03	1.752,67	1.851,67	2.172,16	2.296,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.259,76	1.355,51	1.432,48	1.423,02	1.462,62
12	Real Estate	318,81	344,4	374,2	381,91	388,09
13	Jasa Perusahaan	82,45	90,3	98,17	97,71	100,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	366,76	401,37	438,16	452,66	447,71
15	Jasa Pendidikan	923,49	978,13	1.067,46	1.109,27	1.113,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155,98	172,62	189,69	212,57	227,26
17	Jasa Lainnya	439,72	479,56	518,48	474,94	506,98
PDRB		12.111,90	13.129,87	14.108,33	13.769,29	14.699,83

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2021 **) angka sementara

Sektor terbesar pada tahun 2020 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor yaitu sebesar 3.311,32 milyar. Sector terbesar kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 2.172,16 milyar. Jika dilihat pada tahun 2019, PDRB ADHB tertinggi ditempati oleh sektor perdaganga besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor (3.658,65), diikuti sektor industri pengolahan (2.290,02).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan kota industri yang mendorong munculnya bisnis baru yang dapat meningkatkan PDRB sektor lain. Berselang satu tahun setelahnya di tahun 2021, tercatat untuk sektor terbesar masih diampu oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor yaitu sebesar 3.712,41 milyar rupiah. Di urutan kedua terdapat industri pengolahan dengan nilai sebesar 2.249,65 milyar.

PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 2017 s/d 2021 Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.70
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 s/d 2021
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	75,01	76,35	75,63	84,38	78,26
2	Pertambangan dan Penggalian	2,13	2,15	2,2	2,08	1,99
3	Industri Pengolahan	1.677,59	1.795,20	1.878,54	1.637,31	1.742,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,65	8,07	8,61	8,78	9,04
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	20,39	21,29	22,26	23,34	24,8
6	Konstruksi	604,75	616,99	647,2	616,69	611,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.202,18	2.368,25	2.515,13	2.233,21	2.460,08
8	Transportasi dan Pergudangan	281,35	305,21	330	318,4	341,24
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	470,29	513,72	559,24	514,6	531,1
10	Informasi dan Komunikasi	1.517,25	1.598,22	1.671,41	1.940,86	2.032,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	868,72	904,19	947,54	941,3	945,67
12	Real Estate	239,67	248,22	263,02	263,89	267,05
13	Jasa Perusahaan	69,23	72,91	77,36	74,9	75,48
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	297,09	310,42	322,38	315,18	312,05
15	Jasa Pendidikan	685,13	714	768,65	783,82	788,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,87	129,79	139,55	153,48	161,86
17	Jasa Lainnya	346,82	366,73	392,1	350,22	364,51
PDRB		9.486,12	10.051,71	10.623,82	10.262,44	10.748,10

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2021

PDRB berdasarkan harga konstan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sector yg tertinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor sebesar 2.233,21 milyar diikuti oleh sector informasi dan komunikasi sebesar 1.940,86 milyar. Jika dilihat pada tahun 2017 hingga 2021, PDRB ADHK tertinggi ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor, kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan. Kondisi tersebut tidak jauh beda dengan PDRB ADHB, sektor dengan PDRB ADHK terendah yaitu sektor pertambangan da penggalian. Adapun pada tahun 2021 untuk PDRB atas dasar harga konstan ternyata untuk peringkat pertama masih diampu oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor sebesar 2.460,08 milyar. Sedangkan untuk peringkat kedua dalam PDRB atas dasar harga konstan diraih oleh komunikasi dan informasi sebesar 2.032,96 milyar.

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 2.71
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2015 s/d 2021 (%)

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,83	0,8	0,76	0,88	0,74	0,84
Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Industri Pengolahan	16,4	16,25	16,23	14,74	15,3	15,88
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22
Konstruksi	6,33	6,1	5,92	5,8	5,48	6,08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,14	25,71	25,93	24,05	25,25	25,12
Transportasi dan Pergudangan	3,36	3,42	3,54	3,47	3,52	3,38
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,73	4,91	4,98	4,8	4,87	4,79
Informasi dan Komunikasi	13,67	13,44	13,12	15,78	15,62	14,13
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,38	10,28	10,32	10,33	9,55	10,25
Real Estate	2,63	2,61	2,62	2,77	2,64	2,66
Jasa Perusahaan	0,68	0,68	0,69	0,71	0,68	0,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,02	3,04	3,06	3,29	3,05	3,12
Jasa Pendidikan	7,61	7,49	7,45	8,06	7,58	7,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,31	1,31	1,54	1,55	1,36
Jasa Lainnya	3,62	3,64	3,65	3,45	3,45	3,61
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2021

Melihat pada table diatas, sektor yang paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,12% per tahun. Dengan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu 2017-2021, kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,88% per tahun dimana kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 16,40%. Jenis industri dengan kontribusi terbesar di sektor ini selama periode 2017-2021 berasal dari industri alat angkutan, industri makanan dan minuman, serta barang dari karet dan plastik. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di Kota Madiun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian.

Adapun dalam satu tahun terakhir tepatnya di tahun 2021, ternyata untuk sektor yang memberikan dampak paling besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan angka kontribusi sebesar 25,12 persen. Dibawahnya, terdapat industri pengolahan dengan angka kontribusi sebesar 15,88 persen.

Selanjutnya, PDRB perkapita menurut lapangan usaha sebagai berikut :

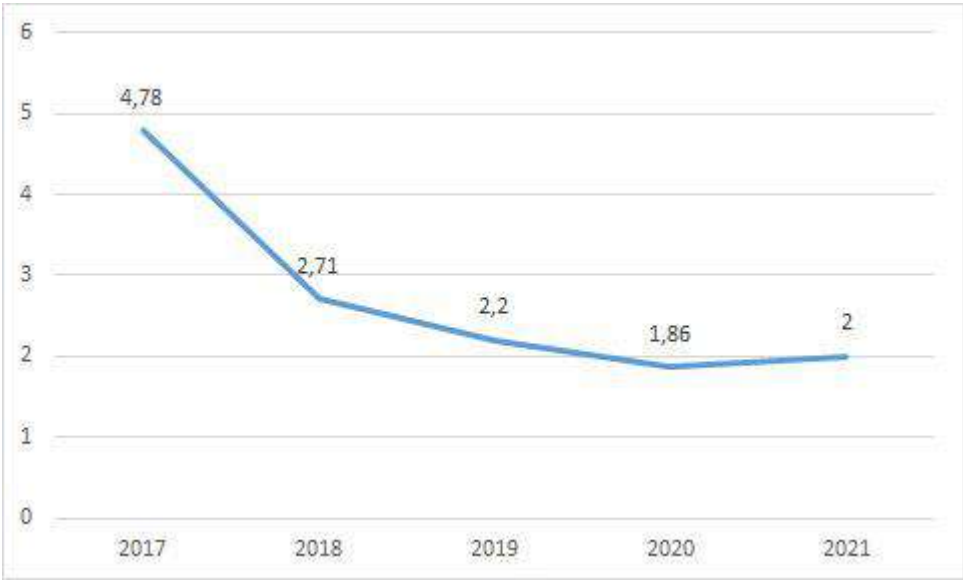
Tabel 2.72
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2017 s/d 2021

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,83	0,80	0,76	0,88	0,74
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	16,35	16,33	16,23	14,74	15,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22
6	Konstruksi	6,33	6,13	5,92	5,80	5,48
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	25,15	25,67	25,93	24,05	25,25
8	Transportasi dan Pergudangan	3,36	3,43	3,54	3,47	3,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,73	4,85	5,00	4,80	4,87
10	Informasi dan Komuniasi	13,68	13,35	13,13	15,78	15,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,38	10,32	10,15	10,33	9,95
12	Real Estate	2,63	2,62	2,65	2,77	2,64
13	Jasa Perusahaan	0,68	0,69	0,70	0,71	0,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,02	3,06	3,11	3,29	3,05
15	Jasa Pendidikan	7,61	7,45	7,57	8,06	7,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,31	1,34	1,54	1,55
17	Jasa Lainnya	3,62	3,65	3,68	3,45	3,45
PDRB Per Kapita		68,89	74,54	79,7	70,74	74,65

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021

Di Kota Madiun PDRB menurut lapangan usaha selama tahun 2017-2021 yang dominan diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran yang menduduki tingkat pertama sebesar 25,25 poin. Peringkat kedua diduduki oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 15,62 poin dan posisi ketiga disusul sektor Industri Pengolahan sebesar 15,30 poin. Selengkapnya PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha seperti terlihat pada tabel diatas.

Di Kota Madiun tingkat inflasi cenderung stabil. Lebih detail, inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2021

Gambar 2.22
Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2017 s/d 2021 (%)

Berdasarkan gambar II.21 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup tinggi Inflasi sebesar 4,78%. Penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan komoditas lainnya. Pada tahun 2018 kembali turun menjadi 2,71% dan diperkirakan akan turun menjadi 2,19% di tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 1,86%. Sedangkan berselang satu tahun setelahnya pada tahun 2021, inflasi di Kota Madiun hanya berkisar 2 %.

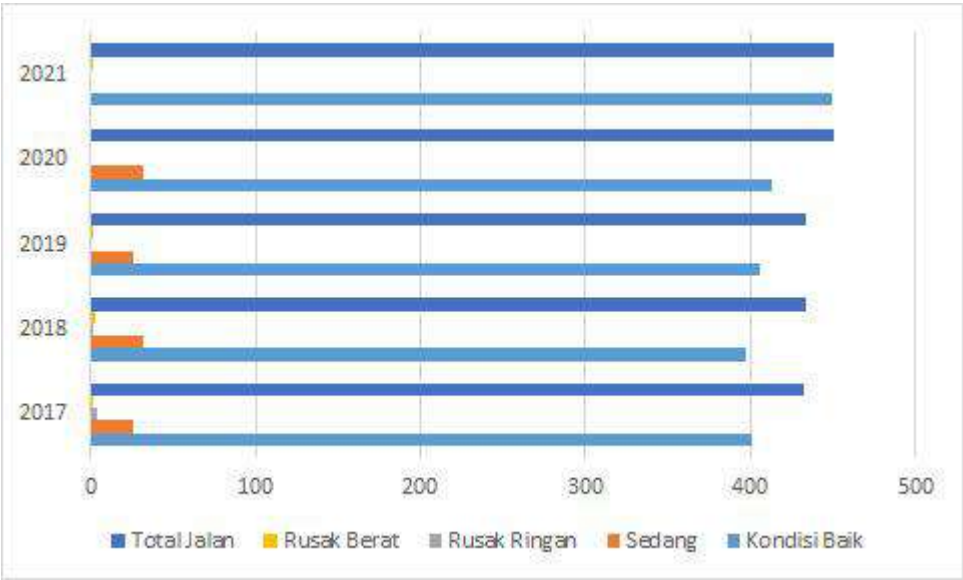
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun yang dalam hal ini jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun.

Tabel 2.73
Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2017-2021

Tahun	Kondisi Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Jalan
2017	400,702	26,189	4,544	1,365	432,8
2018	397,48	31,52	1,47	2,625	433,095
2019	405,54	26,25	0	1,305	433,104
2020	413.100	31,6	0	1.93	450,885
2021	448,820	0	0	1,925	450,745

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2021

Gambar 2.23
Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2017-2021

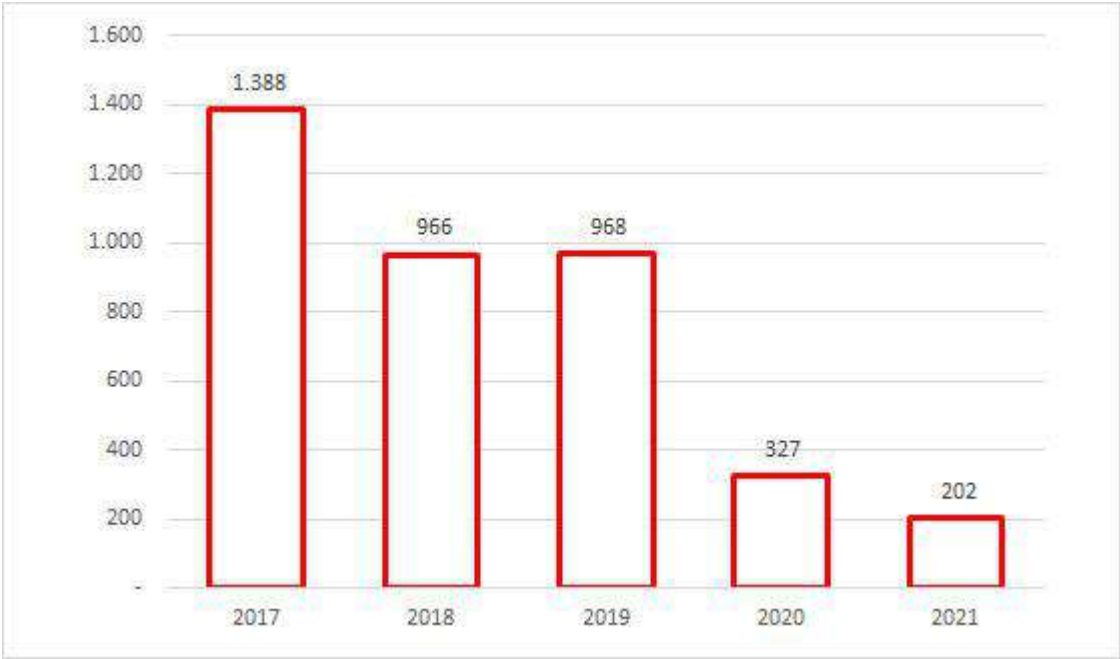
Kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Selama tahun 2017 hingga tahun 2021 kondisi jalan berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah sepanjang 400,702 km dan setiap tahunnya meningkat menjadi sepanjang 448,820 km pada tahun 2021..

Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan, secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

Dalam setahun terakhir di tahun 2021, dari data yang didapatkan ternyata kondisi jalan di Kota Madiun sudah semakin membaik. Mengingat jalan dengan kondisi baik sudah mencapai 448.82 km. Di lain sisi untuk jalan dengan predikat rusak berat di wilayah Kota Madiun hanya berkisar 1,925 km saja.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dan perindustrian dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota madiun saat ini masih berada dalam Dinas Penanaman Modal, PTSP dan KUMK. Perkembangan jumlah realisasi investasi di kota Madiun mulai 2017 – 2021 sebagai berikut.

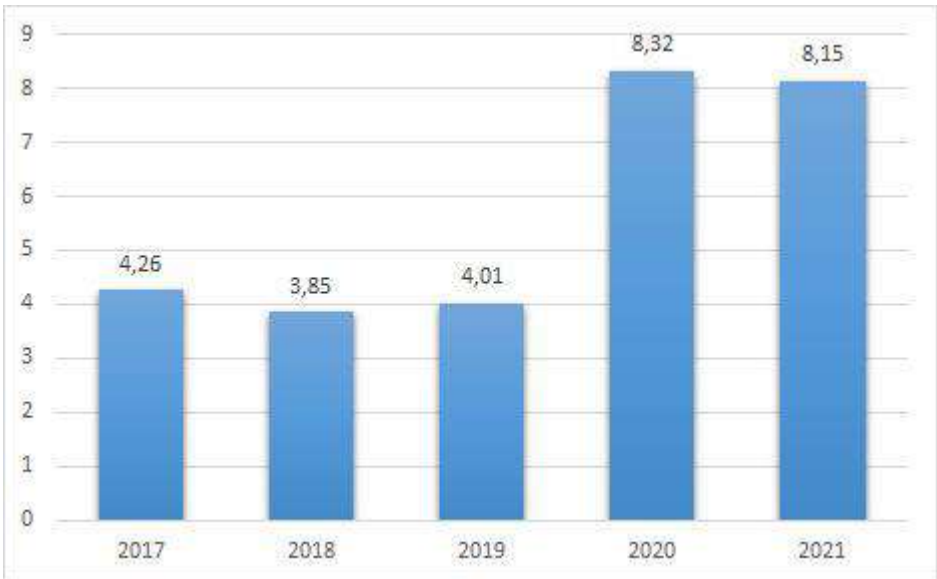


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2021

Gambar 2.24
Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2017 – 2021

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Tahun 2021

Gambar 2.25
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2017 – 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2.74
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2017 s/d 2021

Indeks	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
IPM	80,13	80,33	80,88	80,91	81,25
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Umur Harapan Hidup	72,48	72,59	72,75	72,81	72,83
Indeks Pengetahuan	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78
Harapan Lama Sekolah	14,2	14,21	14,39	14,4	14,41
Rata-rata Lama Sekolah	11,1	11,11	11,13	11,14	11,37
Indeks Pengeluaran	0,83	0,83	0,85	0,85	0,85
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	15.415	15.616	16.040	16.018	16.095

Sumber: BPS KotaMadiun, Tahun 2021

IPM Kota Madiun pada Tahun 2020 mencapai 80,91, mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,03 poin dibanding Tahun 2019 yang mencapai 80,88. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80. Adapun untuk 2021 ini IPM Kota Madiun beranjak naik sedikit dengan angka yaitu 81,25.

Tabel 2.75
Perkembangan IPM Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2017 s/d 2021

IPM	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Kota Madiun	80,13	80,33	80,88	80,91	81,25
Provinsi Jawa Timur	70,27	70,77	71,5	71,71	72,14
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS KotaMadiun, Tahun 2021

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan oleh pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan. Tabel dibawah menampilkan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah Kota Madiun sebagai berikut

Tabel 2.76
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Per Urusan Tahun 2021
Kota Madiun

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) Murni		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) Murni		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) PAK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		5		6		7		10		11		8=6+7		9=8/5 x 100%		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)		

1					2		3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																								
1	0	1	0	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	wajib belajar 9 tahun	%	100	154.191.888	100	67.279.325	0	2.976.617	0	9.365.424	0	14.419.162		23.828.310	0	50.589.513	0%	33%				Dinas Pendidikan	
				2 0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	terlaksananya 8 Standar Nasional Pendidikan		100	103.763.338		67.279.325	0	2.182.792	0	4.865.695	0	9.308.578		8.760.943	0	25.118.008	0%	24%			Dinas Pendidikan		
					Persentase lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan		%				100																		
					0 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Lembaga yang direhab	Lemb aga	20	28.200.000	98	13.476.463	10	-	32	2.802.576	32	5.633.838	24	3.800.710	98	12.237.124	490%	43%	100%	91%	Dinas Pendidikan		
					1 6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Laptop	Unit	5450	47.121.250	5.450	36.621.250	0	6.804	485 4	67.142	352	22.486	244	35.866	5450	132.298	100%	0%	100%	0%	Dinas Pendidikan		
					2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	398.922	1	335.097	0	61.289	0	44.807	0	79.497	1	79.347	1	264.940	100%	66%	100%	79%	Dinas Pendidikan		
					2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	174.226	1	146.350	0	32.127	0	23.791	0	41.925	1	47.368	1	145.212	100%	83%	100%	99%	Dinas Pendidikan		
					2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	158.714	1	133.320	0	26.570	0	22.241	0	30.539	1	48.528	1	127.878	100%	81%	100%	96%	Dinas Pendidikan		

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegan)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	439.917	1	369.531	0	55.347	0	64.710	0	89.829	1	149.232	1	359.117	100%	82%	100%	97%	Dinas Pendidikan
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegan)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	235.868	1	198.129	0	51.385	0	18.619	0	23.713	1	94.213	1	187.929	100%	80%	100%	95%	Dinas Pendidikan
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegan)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	427.646	1	359.225	0	94.760	0	57.444	0	90.485	1	103.097	1	345.785	100%	81%	100%	96%	Dinas Pendidikan
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegan)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	188.682	1	158.493	0	33.046	0	24.822	0	50.456	1	48.710	1	157.033	100%	83%	100%	99%	Dinas Pendidikan
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	404.181	1	339.512	0	64.491	0	38.193	0	92.634	1	137.087	1	332.406	100%	82%	100%	98%	Dinas Pendidikan
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	152.984	1	128.506	0	26.709	0	23.751	0	35.992	1	28.730	1	115.183	100%	75%	100%	90%	Dinas Pendidikan
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	118.578	1	149.605	0	32.117	0	21.832	0	52.311	1	44.025	1	150.286	100%	127%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	203.514	1	170.952	0	33.693	0	26.560	0	40.633	1	54.107	1	154.994	100%	76%	100%	91%	Dinas Pendidikan
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	236.473	1	198.637	0	47.623	0	24.980	0	40.008	1	67.139	1	179.750	100%	76%	100%	90%	Dinas Pendidikan
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	325.999	1	273.839	0	39.991	0	19.999	0	59.996	1	75.950	1	195.937	100%	60%	100%	72%	Dinas Pendidikan
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	133.034	1	151.748	0	25.014	0	23.115	0	38.347	1	60.096	1	146.572	100%	110%	100%	97%	Dinas Pendidikan
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	434.648	1	365.105	0	54.851	0	31.607	0	47.594	1	198.698	1	332.750	100%	77%	100%	91%	Dinas Pendidikan
			2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	245.295	1	206.048	0	34.494	0	25.143	0	53.352	1	87.295	1	200.283	100%	82%	100%	97%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	201.133	1	168.951	0	32.471	0	34.369	0	44.116	1	39.430	1	150.386	100%	75%	100%	89%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	219.314	1	184.224	0	14.787	0	3.375	0	37.830	1	97.902	1	153.895	100%	70%	100%	84%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	442.250	1	371.490	0	39.999	0	64.634	0	102.682	1	163.959	1	371.274	100%	84%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	361.332	1	303.519	0	69.803	0	41.633	0	94.388	1	69.128	1	274.953	100%	76%	100%	91%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	168.804	1	141.796	0	31.712	0	10.775	0	29.336	1	41.111	1	112.934	100%	67%	100%	80%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	200.240	1	168.202	0	20.000	0	19.999	0	29.316	1	81.539	1	150.854	100%	75%	100%	90%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	187.440	1	157.449	0	16.480	0	22.005	0	44.840	1	49.491	1	132.816	100%	71%	100%	84%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	713.782	1	599.577	0	55.841	0	88.761	0	116.720	1	161.416	1	422.738	100%	59%	100%	71%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	368.391	1	309.448	0	79.327	0	21.655	0	90.533	1	102.590	1	294.105	100%	80%	100%	95%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	404.274	1	358.790	0	65.497	0	38.558	0	110.774	1	105.938	1	320.767	100%	79%	100%	89%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	215.169	1	180.742	0	39.995	0	18.631	0	39.584	1	42.756	1	140.966	100%	66%	100%	78%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	171.753	1	144.272	0	15.447	0	19.237	0	51.310	1	38.444	1	124.438	100%	72%	100%	86%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	367.122	1	308.382	0	34.991	0	62.579	0	57.003	1	91.435	1	246.008	100%	67%	100%	80%	Dinas Pendidikan
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	163.859	1	137.641	0	16.776	0	10.380	0	26.170	1	39.652	1	92.978	100%	57%	100%	68%	Dinas Pendidikan
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	311.610	1	261.752	0	35.000	0	28.600	0	66.482	1	97.326	1	227.407	100%	73%	100%	87%	Dinas Pendidikan
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	182.399	1	153.215	0	19.940	0	20.363	0	30.861	1	37.078	1	108.241	100%	59%	100%	71%	Dinas Pendidikan
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	165.505	1	139.024	0	16.209	0	16.420	0	39.092	1	49.446	1	121.166	100%	73%	100%	87%	Dinas Pendidikan
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	392.924	1	330.056	0	57.841	0	49.007	0	92.547	1	100.079	1	299.474	100%	76%	100%	91%	Dinas Pendidikan
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	171.380	1	143.959	0	14.442	0	33.902	0	32.373	1	39.453	1	120.170	100%	70%	100%	83%	Dinas Pendidikan
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	289.616	1	243.277	0	29.307	0	12.494	0	39.152	1	97.382	1	178.334	100%	62%	100%	73%	Dinas Pendidikan
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	237.278	1	199.313	0	19.957	0	4.497	0	39.486	1	94.174	1	158.113	100%	67%	100%	79%	Dinas Pendidikan
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	448.761	1	376.959	0	99.291	0	56.257	0	86.636	1	96.297	1	338.481	100%	75%	100%	90%	Dinas Pendidikan
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	139.473	1	117.158	0	19.981	0	23.188	0	38.639	1	34.518	1	116.325	100%	83%	100%	99%	Dinas Pendidikan
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	216.523	1	181.879	0	18.418	0	38.320	0	45.590	1	78.597	1	180.924	100%	84%	100%	99%	Dinas Pendidikan
			2 3		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	359.065	1	301.614	0	59.889	0	30.025	0	76.539	1	100.809	1	267.261	100%	74%	100%	89%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Didik (SDN 01 Pandean)																					
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	408.004	1	342.723	0	61.368	0	52.489	0	96.313	1	88.578	1	298.748	100%	73%	100%	87%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	483.713	1	406.319	0	50.000	0	132.498	0	107.633	1	104.327	1	394.458	100%	82%	100%	97%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	259.986	1	218.388	0	19.160	0	39.886	0	71.143	1	71.757	1	201.946	100%	78%	100%	92%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	572.308	1	480.739	0	68.930	0	66.208	0	120.159	1	169.113	1	424.410	100%	74%	100%	88%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	432.337	1	36gr3	0	69.593	0	48.371	0	107.128	1	126.069	1	351.159	100%	81%	100%	97%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	330.217	1	277.382	0	33.659	0	36.668	0	65.511	1	77.986	1	213.824	100%	65%	100%	77%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	275.373	1	231.313	0	20.840	0	49.641	0	94.099	1	43.369	1	207.949	100%	76%	100%	90%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	382.671	1	321.444	0	50.685	0	29.830	0	108.136	1	113.851	1	302.502	100%	79%	100%	94%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	190.640	1	160.138	0	18.708	0	20.925	0	36.655	1	63.405	1	139.693	100%	73%	100%	87%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	198.443	1	166.692	0	19.925	0	13.386	0	47.271	1	64.419	1	145.001	100%	73%	100%	87%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	215.164	1	180.738	0	19.138	0	16.860	0	28.996	1	77.506	1	142.501	100%	66%	100%	79%	Dinas Pendidikan
			2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	193.994	1	162.955	0	19.744	0	21.070	0	53.987	1	55.181	1	149.982	100%	77%	100%	92%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Didik (SDN 02 Josenan)																					
				2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	180.272	1	151.428	0	27.539	0	23.560	0	36.050	1	33.529	1	120.678	100%	67%	100%	80%	Dinas Pendidikan
				2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	181.820	1	152.729	0	35.367	0	26.060	0	42.608	1	47.123	1	151.158	100%	83%	100%	99%	Dinas Pendidikan
				2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	162.479	1	136.482	0	19.821	0	27.786	0	36.563	1	33.619	1	117.789	100%	72%	100%	86%	Dinas Pendidikan
				2 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Lemb aga	73	746.342	73	626.928	0	3.900	0	81.630	0	149.950	73	54.107	73	289.587	100%	39%	100%	46%	Dinas Pendidikan
				2 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	Bidan g Kreati fitas	14	1.016.686	14	854.016	0	704	0	25.840	0	104.078	14	57.378	14	188.001	100%	18%	100%	22%	Dinas Pendidikan
				2 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	Lemb aga	73	797.965	73	670.291	0	-	0	21.988	0	16.667	73	369.480	73	408.135	100%	51%	100%	61%	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 2	2 0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	terlaksananya 8 Standar Nasional Pendidikan	%	100	38.165.027			0	755.907	0	2.357.823	0	4.494.347		9.861.783	0	17.469.860	0%	46%			Dinas Pendidikan
						Persentase lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan				100																
				1 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Lembaga yang direhab	Lemb aga	6	11.800.000	6	5.773.360	0	17.280	0	644.754	2	1.646.299	4	3.027.005	6	5.335.337	100%	45%	100%	92%	Dinas Pendidikan
				2 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan sekolah	Kain Serag am	5960	3.384.371	5960	3.384.371	0	1.800	543	13.013	452 1	42.290	587	2.750.916	5651	2.808.018	95%	83%	95%	83%	Dinas Pendidikan
				3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	1.102.907	1	926.440	0	74.021	0	138.578	0	309.241	1	387.587	1	909.427	100%	82%	100%	98%	Dinas Pendidikan
				3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	960.417	1	806.751	0	19.896	0	94.383	0	162.298	1	312.836	1	589.413	100%	61%	100%	73%	Dinas Pendidikan
				3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	723.469	1	607.714	0	65.459	0	127.448	0	178.085	1	199.155	1	570.146	100%	79%	100%	94%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	896.884	1	753.383	0	36.008	0	103.023	0	128.297	1	332.153	1	599.481	100%	67%	100%	80%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	447.271	1	580.908	0	74.741	0	94.983	0	175.439	1	203.408	1	548.572	100%	123%	100%	94%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	848.058	1	712.369	0	59.438	0	139.332	0	198.425	1	228.625	1	625.820	100%	74%	100%	88%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	856.073	1	719.101	0	29.910	0	41.587	0	195.702	1	291.109	1	558.308	100%	65%	100%	78%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	647.542	1	543.935	0	34.610	0	140.144	0	95.385	1	243.475	1	513.613	100%	79%	100%	94%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	970.102	1	814.886	0	71.494	0	136.496	0	166.685	1	382.451	1	757.125	100%	78%	100%	93%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	990.883	1	832.342	0	75.350	0	149.144	0	211.584	1	275.946	1	712.025	100%	72%	100%	86%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	572.025	1	733.300	0	65.344	0	123.269	0	193.615	1	281.941	1	664.169	100%	116%	100%	91%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	788.114	1	662.016	0	37.732	0	119.247	0	148.888	1	288.575	1	594.441	100%	75%	100%	90%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	721.871	1	606.371	0	63.133	0	78.507	0	180.715	1	217.367	1	539.722	100%	75%	100%	89%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	549.837	1	461.863	0	14.211	0	46.968	0	182.620	1	184.736	1	428.534	100%	78%	100%	93%	Dinas Pendidikan
				37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Lembaga	23	677.310	23	568.940	0	7.800	0	68.560	0	158.035	23	16.694	23	251.089	100%	37%	100%	44%	Dinas Pendidikan
				38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	Bidang Kreatifitas	14	1.207.005	14	403.412	0	-	0	2.662	8	104.078	6	166.356	14	273.096	100%	23%	100%	68%	Dinas Pendidikan
				41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	Lembaga	23	656.888	23	418.844	0	7.680	0	95.725	0	16.667	23	71.450	23	191.522	100%	29%	100%	46%	Dinas Pendidikan
				42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	1.303.000			0	-	0	-	0	0			0	-	0%	0%			Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
					Menengah Pertama (SMPN 1)																						
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	744.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	573.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	886.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	462.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	650.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	764.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	550.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	439.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	518.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	651.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	723.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	725.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
				4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	Jumlah Lembaga	Lemb aga	1	376.000			0	-	0	-	0	0		0	-	0%	0%					Dinas Pendidikan
			2 ,		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	100	9.483.619			0	37.918	0	1.666.907	0	248.230		4.697.105	0	6.650.160	0%	70%				Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
			03																							
				13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga yang terpenuhi anggaran pengelolaannya	Lembaga	1	376.297	1	316.089	0	37.918	0	30.407	0	53.735	1	147.515	1	269.575	100%	72%	100%	85%	Dinas Pendidikan
				16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang memahami kurikulum PAUD	Lembaga	163	3.195.000	995	3.195.000	0	-	0	-	0	13.633	0	2.950.183	0	2.963.815	0%	93%	0%	0%	Dinas Pendidikan
						Jumlah Tenaga Pendidik yang Memahami Kurikulum PAUD dan Pendidikan Kesetaraan SD SMP	Orang					0		0		0		990		990		99%	93%	99%	93%	
				17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Prosentase lembaga paud yang berizin	%	30	5.912.322	30	4.752.719	0	-	0	1.636.500	0	180.862	30	1.599.408	30	3.416.770	100%	58%	100%	72%	Dinas Pendidikan
			204		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase lembaga yang terakreditasi	%	65	2.779.904	65		0	-	0	475.000	0	368.007		508.479	0	1.351.486	0%	49%			Dinas Pendidikan
				12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Peserta Lulus Ujian	Siswa	175	964.840	175	918.690	0	-	0	-	0	344.090	168	291.355	168	635.445	96%	66%	96%	69%	Dinas Pendidikan
				15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah tenaga kependidikan yang memahami pengelolaan perpustakaan sekolah	Tenaga Pendidik	92	625.000	92	150.562	0	-	0	-	0	0	87	59.315	87	59.315	95%	9%	95%	39%	Dinas Pendidikan
				16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang bersertifikat	%	60	1.190.064	60	985.443	0	-	0	475.000	40	23.917	60	157.810	60	656.727	100%	55%	100%	67%	Dinas Pendidikan
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase sekolah yang berkurikulum SNP	%	100	681.084	100	572.111	0	-	0	-	0	9.177		383.943	0	393.120	0%	58%			Dinas Pendidikan
			201		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase sekolah yang melaksanakan kurikulum SNP	%	100	681.084	100	572.111	0	-	0	-	0	9.177		383.943	0	393.120	0%	58%			Dinas Pendidikan
				04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	%	100	681.084	100	572.111	0	-	0	-	0	9.177	100	383.943	100	393.120	100%	58%	100%	69%	Dinas Pendidikan
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase tenaga pendidik bersertifikasi yang berprestasi	%	60	6.616.572	60	2.027.681	0	18.450	0	343.034	0	287.621	60	696.055	60	1.345.160	100%	20%			Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
			2 0 1		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase tenaga pendidik bersertifikasi yang berprestasi	%	60	6.616.572	60	2.027.681	0	18.450	0	343.034	0	287.621	60	696.055	60	1.345.160	100%	20%			Dinas Pendidikan			
				0 1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase guru berprestasi	%	50	5.382.509	50	1.691.076	0	18.450	0	226.515	0	284.471	50	604.272	50	1.133.707	100%	21%	100%	67%	Dinas Pendidikan			
				0 2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase sekolah yang memiliki guru berprestasi min 10%	%	10	1.234.063	10	336.605	0	-	0	116.520	0	3.150	10	91.783	10	211.453	100%	17%	100%	63%	Dinas Pendidikan			
1	0 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																								
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Keluarga Sehat	Indeks/ Nilai	0,39	145.046.778				9.714.195	0	11.723.178	0	17.838.664			0	39.276.037	0%	27%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB			
			2 0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	96.066.766				132.306	0	301.299	0	5.530.958			0	5.964.563	0%	6%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB			
				0 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	Unit	1	4.021.431			0	-				0			0	-	0%	0%			RSUD			
				0 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Paket Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Paket	0	-	1	249.688					675	1	42.798	1	43.473	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	17%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB				
				1 2	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Unit	1	3.116.724			0	-				0			0	-	0%	0%			RSUD			
				1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	kegiatan	2	1.860.600	2	2.466.843	0	-	0	-		19.795	2	1.400.474	2	1.420.269	100%	76%	100%	58%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Unit	20	3.404.950			0	-			949.000			0	949.000	0%	28%			RSUD		
				1 5	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Jenis Alat Kesehatan yang Mendapatkan Pemeliharaan Kalibrasi	Jenis	0	-	28	105.676	0	-	0	-	0	-	28	96.288	28	96.288	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	91%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				1 6	Pengadaan Obat, Vaksin (Dinkes)	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin	paket	1	5.696.091	1	5.136.645	0	132.306	0	301.299	0	855.818	1	2.750.544	1	4.039.968	100%	71%	100%	79%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				1 6	Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD)	Jenis obat/vaksin yang diadakan	Jenis	6	502.609			6	-			2.203.808			6	2.203.808	100%	438%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
				1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinkes)	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	kegiatan	2	1.310.409	2	852.125	0	-	0	-	3.498	2	675.931	2	679.428	100%	52%	100%	80%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
				2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Jenis Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala	Jenis	0	-	20	35.081	0	-	0	-	11.364	20	23.713	20	35.077	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
				2 1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alkes, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman	Fasilitas Kesehatan	0	-	14	27.887	0	-	0	-	0	-	14	27.759	14	27.759	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	%	100	76.153.952			100	-			100	1.487.000		100	1.487.000	100%	2%			RSUD		
			2 0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPM mencapai target	%	100	48.980.013		56.953.173		9.581.888	0	11.421.879	0	12.307.706		0	33.311.474	0%	68%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
				0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	%	100	657.104	100	279.854	0	6.600	0	41.198	0	127.959	100	73.035	100	248.792	100%	38%	100%	89%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	3.060	100	32.117	0	2.660	0	8.604	0	7.055	100	9.298	100	27.616	100%	902%	100%	86%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	3.060	100	79.656	0	-	0	1.220	0	1.440	100	65.904	100	68.564	100%	2241%	100%	86%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	31.760	100	28.089	0	1.010	0	1.960	0	1.010	100	22.778	100	26.758	100%	84%	100%	95%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	1.440	100	10.601	0	264	0	288	0	-	100	9.967	100	10.519	100%	730%	100%	99%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	504.563	100	128.786	0	-	0	2.971	0	-	100	124.302	100	127.272	100%	25%	100%	99%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100	1.440	100	1.440	0	-	0	864	0	288	100	288	100	1.440	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (dinas kesehatan)	%	100	9.364	100	4.000	0	-	0	-	0	-	100	3.967	100	3.967	100%	42%	100%	99%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	3.850	100	3.850	0	-	0	-	0	-	100	3.676	100	3.676	100%	95%	100%	95%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	40.565	100	38.168	0	-	0	-	0	-	100	38.158	100	38.158	100%	94%	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis mencapai target	%	100	150.800	100	19.320	0	-	0	1.830	0	-	100	16.124	100	17.954	100%	12%	100%	93%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mencapai target	%	100	600.836	100	152.359	0	8.200	0	49.705	70	31.039	100	53.925	100	142.870	100%	24%	100%	94%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Prosentase Pemenuhan dan Penanganan Penyakit Pada Kondisi KLB	%	0	-	100	275.896	0	-	0	-	0	122.400	100	78.595	100	200.995	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	73%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi stunting	%	9,7	412.899	10	139.897	0	1.260	0	2.130	0	93.348	9,7	38.930	9,7	135.668	100%	33%	100%	97%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manguharjo)									0	19.120					0	19.120	#DIV/0! !	#DIV/0!			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Patihan)									0	24.785					0	24.785	#DIV/0! !	#DIV/0!			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Oro - Oro Ombo)									0	40.860					0	40.860	#DIV/0! !	#DIV/0!			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tawangrejo)				-					0	-					0	-	#DIV/0! !	#DIV/0!			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banjarejo)									0	40.605					0	40.605	#DIV/0! !	#DIV/0!			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Demangan)									0	60.540					0	60.540	#DIV/0! !	#DIV/0!			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pekerja yang dilayani	%	40	65.716	40	431.071	0	-	0	9.058	0	-	40	381.375	40	390.433	100%	594%	100%	91%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indek Keluarga Sehat	%	85	232.743	85	505.511	0	864	0	21.838	56	185.013	85	175.221	85	382.937	100%	165%	100%	76%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							0	-	0	-		0									
			1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kegiat an	0	-	2	18.375							2	14.653	2	14.653	#DIV/0! !	#DIV/0!	100%	80%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100	152.401	100	5.401.822	0	54.000	100	94.162	100	499.322	100	1.633.899	100	2.281.382	100%	1497%	100%	42%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	%	100	217.113	100	121.363	0	1.350	0	32.444	0	22.963	100	55.346	100	112.103	100%	52%	100%	92%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	%	100	242.113	100	757.930	0	9.500	0	15.259	0	32.896	100	556.118	100	613.772	100%	254%	100%	81%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
						Prosentase penyakit tidak menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	%	62,5				0								0		0	0	0			
				2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Orang	8896 6	23.627.334	88.966	41.560.722	0	9.355.491	0	9.471.113	0	9.491.009	889 70	6.756.328	88970	35.073.942	100%	148%	100%	84%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase kasus potensial KLB konfirmasi lab	%	60	9.910	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0 !	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Kelurahan yg melaksanakan tatanan wajib dan pilihan	%	60	442.024	60	102.183	0	4.400	0	15.610	0	6.657	60	63.902	60	90.569	100%	20%	100%	89%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Manguharjo)	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	%	89	3.187.530				-	0	183.689					0	183.689	0%	6%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Patiham)	PKP Puskesmas	%	88	2.516.603				-	0	219.609					0	219.609	0%	9%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Oro - Oro Ombo)	PKP Puskesmas	%	92,6 6	3.014.274				-	0	192.867					0	192.867	0%	6%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tawangrejo)	PKP Puskesmas	%	90	2.922.392				-	0	248.068					0	248.068	0%	8%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banjarejo)	Presentase PKP Puskesmas	%	85	3.564.193				-	0	228.598					0	228.598	0%	6%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Demangan)	Presentase PKP Puskesmas	%	80	3.173.854				-	0	176.664					0	176.664	0%	6%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	terlaksananya pelayanan gawat darurat	%	100	2.484.156	100	5.562.649	0	50.749	0	31.161	0	1.543.440	100	2.616.065	100	4.241.414	100%	171%	100%	76%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	%	100	247.615	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	terlaksananya pelayanan gawat darurat	%	100	459.300	-	1.297.514	0	85.540	0	185.059	100	141.868	-	233.413	100	645.880	100%	141%	100%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
						Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	Sarana	-	-	7		-		-		7		7									
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan	%	90	318.637		235.589	0	29.622	0	65.614	0	61.962		40.370	0	197.567	0%	62%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Dokter	1	30.000		48.750	1	5.000	1	17.500	1	7.500		15.000	1	45.000	100%	150%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Dokter	1	30.000	1	48.750	1	5.000	1	17.500	1	7.500	1	15.000	1	45.000	100%	150%	100%	92%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	%	92	288.637	92	186.839	0	24.622	0	48.114	0	54.462		25.370	0	152.567	0%	53%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar	%	92	288.637	92	186.839	0	24.622	0	48.114	0	54.462	95	25.370	95	152.567	103%	53%	103%	82%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
1	0	0			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	%	85	247.445		178.377	0	1.719	0	39.503	0	32.011		83.158	0	156.390	0%	63%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			2	0	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	%	0,85	196.245		168.169	0	1.719	0	35.579	0	32.011		78.374	0	147.683	0%	75%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah jenis Fasilitas Pelayanan kefarmasian (Fasyanfar) yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	Jenis	6	196.245	6	168.169	6	1.719	6	35.579	6	32.011	6	78.374	6	147.683	100%	75%	100%	88%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			2	0	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) Baru yang mendapat Sertifikat Produksi Pangan dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang mendapat No.P-IRT	%	0,85	51.200		10.208	0	-	0	3.924	0	-		4.784	0	8.708	0%	17%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase IRT yang sehat	%	65	51.200	65	10.208	0	-	0	3.924	0	0	65	4.784	65	8.708	100%	17%	100%	85%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
1	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	%	57,14	10.414.912			0	72.912	0	60.240		110.370			0	243.522	0%	2%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			2	0	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas	kegiatan	1	500.437			0	10.007	0	13.649		41.284		149.417	0	214.357	0%	43%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah jenis media promosi yang dihasilkan	Jenis	6	500.437	6	283.676	1	10.007	1	13.649	2	41.284	2	149.417	6	214.357	100%	43%	100%	76%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
					Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan	kegiatan	2																			
			202		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Puskesmas	1	3.885.744			0	-	0	-		-		0	-	0%	0%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	%	100	789.041	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Manguharjo)	Persentase SPM yang mencapai target	%	100	463.002			0	-	0	-				0	-	0%	0%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Patihan)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	%	100	456.810			0	-	0	-				0	-	0%	0%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Oro - Oro Ombo)	Prosentase SPM mencapai target	%	100	496.964			0	-	0	-				0	-	0%	0%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase SPM mencapai target	%	100	564.295			0	-	0	-				0	-	0%	0%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Banjarejo)	Presentase SPM mencapai target	%	100	580.632			0	-	0	-				0	-	0%	0%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Demangan)	Presentase SPM mencapai target	%	100	535.000			0	-	0	-				0	-	0%	0%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
			203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM aktif	%	42,86	6.028.731		721.646	0	62.905	0	46.591	0	69.085		473.632	0	652.214	0%	11%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Persentase Puskesmas	%	33,33	4.346.761	33	721.646	0	62.905	0	46.591	0	69.085	33	473.632	33	652.214	99%	15%	99%	90%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1					2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14
					Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	membina UKBM sesuai standar																			
						Persentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	%	41			0		0												
				01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah jenis fasilitas kegiatan promotif preventif	%	33,33	266.050		-	0	-				0		-	0%	0%				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Patihan)	Jumlah jenis fasilitas kegiatan promotif preventif	%	88	212.330		-	0	-				0		-	0%	0%				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Oro - Oro Ombo)	Prosentase puskesmas membina UKBM sesuai standart	%	33,33	281.900		-	0	-				0		-	0%	0%				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah jenis fasilitas kegiatan promotif preventif	%	90	249.475		-	0	-				0		-	0%	0%				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah jenis fasilitas kegiatan promotif preventif	%	33,33	346.215		-	0	-				0		-	0%	0%				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Demangan)	Jumlah jenis fasilitas kegiatan promotif preventif	%	88	326.000		-	0	-				0		-	0%	0%				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																					
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Banjir	%	15	27.250.000	15	12.299.395	1	85.826	2	381.962	2	1.768.962	10	9.080.851	15	11.317.601	100%	42%	100%	92%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Daerah genangan	%	15	27.250.000	15	12.299.395	1	85.826	2	381.962	2	1.768.962	10	9.080.851	15	11.317.601	100%	42%	100%	92%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung yg dibangun	Tiitik	2	3.657.399	2	2.257.185	0	42.913	0	-	0	0	2	2.103.397	2	2.146.310	100%	59%	100%	95%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yg direhab	Tiitik	4	194.913	4	194.913	0	-	0	-	0	11.600	4	175.704	4	187.304	100%	96%	100%	96%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yg dinormalisasi	Km	1,5	22.942.602	2	8.988.123	0	19.007	0	111.309	1	1.718.305	0,5	6.298.677	1,5	8.147.298	100%	36%	100%	91%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase Berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	Tiitik	2	455.086	2	859.174	0	23.907	1	270.654	0	39.057	1	503.073	2	836.689	100%	184%	100%	97%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	%	90,5	31.450.000	80	22.274.002	0	233.424	10	957.978	10	5.143.456	60	10.606.306	80	16.941.163	88%	54%	100%	76%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kondisi baik	Km	10	31.450.000	10	22.274.002	0	233.424	10	957.978	10	5.143.456	10	10.606.306	10	16.941.163	100%	54%	100%	76%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	Dokumen	8	1.000.000	8	1.630.470	0	-	0	-	0	-	7	469.750	7	469.750	88%	47%	88%	29%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun	Km	1,5	27.950.000	1,5	18.410.332	0	-	0	270.692	1	4.736.395	0,5	9.448.228	1,5	14.455.315	100%	52%	100%	79%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara	Km	10	2.500.000	10	2.233.200		233.424	3	687.286	4	407.060	3	688.328	10	2.016.098	100%	81%	100%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	%	100	29.300.000	100	20.857.814	10	-	0	585.350	0	7.054.566	100	9.619.716	100	17.259.631	100%	59%	100%	83%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	%	100	29.300.000	100	20.857.814	10	-	0	585.350	0	7.054.566	100	9.619.716	100	17.259.631	100%	59%	100%	83%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
					Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																						
				01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase jumlah permohonan yg ditindaklanjuti	%	100	200.000	100	200.000	10	-	0	-	30	39.200	50	62.000	90	101.200	90%	51%	90%	51%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
				02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung	Gedung	5	29.100.000	5	20.657.814	-	1	585.350	1	7.015.366	3	9.557.716	5	17.158.431	100%	59%	100%	83%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR		
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	%	100	17.481.400	100	19.966.147	0	-	5	298.801	50	8.500.846	100	7.279.711	100	16.079.358	100%	92%	100%	81%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
				201	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase bangunan sesuai ketentuan	%	100	17.481.400	100	19.966.147	0	-	5	298.801	50	8.500.846	100	7.279.711	100	16.079.358	100%	92%	100%	81%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
					Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi	Lokasi	30	17.481.400	30	19.966.147	5	-	6	298.801	9	8.500.846	8	7.279.711	28	16.079.358	93%	92%	93%	81%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	%	94,5	76.589.000	94,5	58.330.391	10	127.288	0	10.147.655	0	19.220.733	94,5	21.906.152	94,5	51.401.827	100%	67%	100%	88%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
				201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Km	409,835	76.589.000	409,8	58.330.391	0	127.288	0	10.147.655	0	19.220.733	409,8	21.906.152	409,8	51.401.827	100%	67%	100%	88%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
				01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	jumlah dokumen yang ditindaklanjuti	Dokumen	10	2.017.000	10	3.314.326	0	4.900	3	934.392	1	66.350	5	1.186.142	9	2.191.784	90%	109%	90%	66%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
				02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas lahan yang dibebaskan	Hektar	5	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
				04	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	jumlah dokumen	Dokumen	2	412.000	2	401.100	0	-	0	-	0	1.400	2	399.419	2	400.819	100%	97%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Meter	200	22.450.000	200	25.190.022	0	-	25	4.699.272	78	9.024.719	87	10.624.036	190	24.348.027	95%	108%	95%	97%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah ruas yg dilebarkan	Ruas	6	1.320.000	6	2.743.821	0	-	2	1.176.042	1	488.918	3	620.263	6	2.285.223	100%	173%	100%	83%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jumlah ruas yg ditambah lajunya	Ruas	1	5.075.000	1	6.936.380	0	-	0	587.752	0	1.704.639	1	1.378.443	1	3.670.834	100%	72%	100%	53%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yg direhab	Km	6	12.580.000			0	-	0	-	0				0	-	0%	0%			Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yg dipelihara secara berkalan	Km	6	14.540.000	6	14.779.100	0	-	0	1.401.645	2	6.825.087	4	5.798.821	6	14.025.553	100%	96%	100%	95%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan yg dipelihara	Ruas	28	2.335.000	28	3.451.543	0	122.388	10	1.048.509	7	635.469	11	1.170.761	28	2.977.126	100%	128%	100%	86%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Jembatan	1	655.000	1	1.079.714	0	-	0	200.841	1	374.481	0	496.295	1	1.071.618	100%	164%	100%	99%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	Jembatan	10	205.000	10	434.386	0	-	8	99.202	0	99.671	2	231.970	10	430.843	100%	210%	100%	99%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaku Jasa Konsultasi yang Memenuhi Standart Kompetensi	%	95	800.000	47,68	500.000	10	1.500	0	-	0	27.004	47,68	153.042	47,68	181.547	50%	23%	100%	36%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			201	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga trampil konstruksi yg bersertifikat	Orang	100	550.000	100	250.000	10	1.500	0	-	0	27.004	100	85.197	100	113.701	100%	21%	100%	45%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta	Orang	100	550.000	100	250.000	10	1.500	0	-	0	27.004	10	85.197	20	113.701	20%	21%	20%	45%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			203	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah rekomendasi IUJK	Dokumen	50	250.000	50	250.000	0	-	0	-	0	-	45	67.845	45	67.845	90%	27%	90%	27%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah BUJK	BUJK	50	250.000	50	250.000	0	-	0	-	0	0	50	67.845	50	67.845	100%	27%	100%	27%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RT/RW	%	100	1.500.000	100	1.123.800	0	3.368	10	112.832	40	437.533	50	498.132	100	1.051.865	100%	70%			Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			201	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen tata ruang yg ditetapkan	Dokumen	1	800.000	1	825.000	0	1.403	0	44.606	1	371.110	0	326.045	1	743.164	100%	93%			Dinas Pekerjaan Umum dan PR

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
				01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yg disusun	Doku men	1	800.000	1	825.000	0	1.403	0	44.606	1	371.110	0	326.045	1	743.164	100%	93%	100%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR			
			203		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	Doku men	1	300.000			0	1.966	0	32.110	0	30.929	1	76.329	1	141.333	100%	47%			Dinas Pekerjaan Umum dan PR			
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yg ditindaklanjuti	%	100	300.000	100	157.182	10	1.966	10	32.110	10	30.929	70	76.329	100	141.333	100%	47%	100%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR			
			204		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfaata Ruang	Doku men	1	400.000	1	298.800	0	-	0	36.116	0	35.493	1	95.758	1	167.368	100%	42%			Dinas Pekerjaan Umum dan PR			
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban danPenegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase penanganan pelanggaran penataan ruang	%	100	400.000	100	298.800	0	-	10	36.116	40	35.493	100	95.758	100	167.368	100%	42%	100%	56%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR			
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																								
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan	%	100	1.676.950	100	1.292.650	10	56.083	10	250.833	0	98.865	100	784.368	100	1.190.148	100%	71%	100%	92%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
			201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	Doku men	1	566.000	1	76.500	0	-	0	-	0	-	1	75.350	1	75.350	100%	13%	100%	98%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
				06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen data rumah yang dihasilkan	Doku men	1	566.000	1	76.500	0	-	0	-	0	0	1	75.350	1	75.350	100%	13%	100%	98%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
			203		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Lokasi	1	1.110.950	1	1.216.150	0	56.083	0	250.833	0	98.865	1	709.018	1	1.114.798	100%	100%	100%	92%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program Kota yang terpelihara	Lokasi	1	1.110.950	1	1.216.150	1	56.083	1	250.833	1	98.865	1	709.018	1	1.114.798	100%	100%	100%	92%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	98,5	4.264.200	99	7.283.612	0	29.408	0	3.135.524	0	1.642.412	99,39	2.235.543	99,39	7.042.888	101%	165%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			202		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,5	504.000	1	540.097	0	-	0	-	0	7.630	0,89	429.997	0,89	437.627	178%	87%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Dokumen	1	204.000	1	209.286	0	-	0	-	0	1.300	1	198.081	1	199.381	100%	98%	100%	95%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dihasilkan	Dokumen	1	300.000	1	330.811	0	-	0	-	0	6.330	1	231.916	1	238.246	100%	79%	100%	72%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			203		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	98,5	3.760.200	1	6.743.515	0	29.408	0	3.135.524	0	1.634.782	0,89	1.805.546	0,89	6.605.261	1%	176%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen kajian/perencanaan	Dokumen	3	203.850	5	416.374	0	1.562	0	165.745	3	15.405	2	213.552	5	396.264	167%	194%	100%	95%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria	%	100	2.800.350	100	2.745.395	0	8.814	60	2.486.120	23	52.856	100	133.868	100	2.681.658	100%	96%	100%	98%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Lokasi	3	756.000	3	3.581.746	0	19.032	0	483.660	3	1.566.521	0	1.458.127	3	3.527.340	100%	467%	100%	98%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100	8.954.200	100	19.023.619	20	778.867	30	6.590.979	40	4.788.576	100	5.788.658	100	17.947.079	100%	200%	100%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			2		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase Penyelenggaraan PSU Perumahan yang memadai	%	100	8.954.200	100	19.023.619	3	778.867	0	6.590.979	70	4.788.576	100	5.788.658	100	17.947.079	100%	200%	100%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				0	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi Prasarana,sarana dan utilitas umum yang disediakan	Keca mata n	3	8.854.000	3	19.023.619	3	778.867	3	6.590.979	3	4.788.576	3	5.788.658	3	17.947.079	100%	203%	100%	94%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				0	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Doku men	1	100.200	0	-	0	0	0	-	0	-	0		0	#VALUE!	0%	#VALUE!			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																					
1	0	5	0		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	%	96	2.116.260	97	4.683.621		267.753	0	1.168.693	97	1.208.858	100	1.608.563	100	4.253.867	104%	201%	103%	91%	SatPol PP dan PK
			2		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	%	96	1.776.260	96	3.618.811		245.420	0	820.794	100	904.319	100	1.247.430	100	3.217.963	104%	181%	104%	89%	SatPol PP dan PK
				0	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	%	100	250.000	100	870.341	0	26.850	20	238.640	100	210.084	100	300.609	100	776.183	100%	310%	100%	89%	SatPol PP dan PK
				0	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Prosentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada yang tertangani	%	96	986.030	96	2.040.573	0	137.400	0	405.034	100	617.367	100	680.379	100	1.840.179	104%	187%	104%	90%	SatPol PP dan PK

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase peserta koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	%	90	58.500	90	83.555	0	2.250	0	20.429	90	13.548	90	40.105	90	76.332	100%	130%	100%	91%	SatPol PP dan PK
				04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	%	92	181.730	92	412.130	0	36.000	0	54.000	100	52.500	100	179.600	100	322.100	109%	177%	109%	78%	SatPol PP dan PK
				05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Prosentase SDM Satpol Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Damkar yang berkompeten	%	80	300.000	80	212.212	0	42.920	0	102.691	100	10.821	100	46.738	100	203.169	125%	68%	125%	96%	SatPol PP dan PK
			202		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota	%	100	340.000	100	1.064.810	0	22.333	30	347.899	100	304.539	100	361.133	100	1.035.904	100%	305%	100%	97%	SatPol PP dan PK
				01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase peserta sosialisasi yang paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	%	100	210.000	100	180.810	0	-	0	50.463	100	51.727	100	62.549	100	164.739	100%	78%	100%	91%	SatPol PP dan PK
				03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota yang tertangani	%	100	130.000	100	884.000	0	22.333	50	297.436	100	252.812	100	298.584	100	871.165	100%	670%	100%	99%	SatPol PP dan PK
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	%	100	1.584.327	100	1.377.859	78,5	238.968	0	366.206	0	268.678	100	425.003	100	1.298.855	100%	82%	100%	94%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			201		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	131.700	100	72.211	0	-	0	20.129	0	-	100	44.501	100	64.630	100%	49%	100%	90%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	%	100	131.700	100	72.211	0	-	0	20.129	0	-	100	44.501	100	64.630	100%	49%	100%	90%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			202	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	1.299.067	100	1.208.120	67	216.280	0	346.077	0	235.992	100	340.942	100	1.139.291	100%	88%	100%	94%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparaturnya dan penduduk yang ikut pelatihan	%	100	155.953	100	92.253	0	-	0	-	0	51.745	100	35.525	100	87.270	100%	56%	100%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	%	100	131.764	100	75.717	0	-	100	48.037	100	13.448	100	12.382	100	73.867	100%	56%	100%	98%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	%	100	186.350	100	111.350	27,5	13.000	12,5	20.611	30	12.106	30	11.424	100	57.141	100%	31%	100%	51%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	%	100	825.000	100	928.800	39,5	203.280	19,75	277.429	13	158.693	27,75	281.611	100	921.013	100%	112%	100%	99%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			203	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	153.560	100	97.528	90	22.688	0	-	0	32.686	100	39.560	100	94.934	100%	62%	100%	97%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	%	100	153.560	100	97.528	90	22.688	0	-	0	32.686	100	39.560	100	94.934	100%	62%	100%	97%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	1.799.306	100	1.285.321	0	154.075	0	340.635	100	251.426	100	484.577	100	1.230.712	100%	68%	100%	96%	SatPol PP dan PK
			201	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	persentase penanganan, pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya	%	100	1.022.948	100	1.231.221	0	148.810	0	328.329	100	240.605	100	473.756	100	1.191.500	100%	116%	100%	97%	SatPol PP dan PK

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
					dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota																							
				01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota yang dilaksanakan	%	80	776.358	80	888.998		133.485	50	260.298	100	176.248	100	293.799	100	863.830	125%	111%	125%	97%	SatPol PP dan PK			
				02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kasus Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	%	100	246.590	100	342.223		15.325	50	68.031	100	64.357	100	179.957	100	327.670	100%	133%	100%	96%	SatPol PP dan PK			
			202		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	persentase kegiatan inspeksi proteksi kebakaran	%	90	776.358	90	54.100	0	5.265	0	12.306	0	10.821	100	10.821	100	39.212	111%	5%	111%	72%	SatPol PP dan PK			
				01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Prosentase Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang didata	%	90	776.358	90	54.100	0	5.265	0	12.306	100	10.821	100	10.821	200	39.212	222%	5%	222%	72%	SatPol PP dan PK			
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																								
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	%	90	3.511.385	90	2.210.456	0	22.612	0	288.413	0	1.342.992	100	503.028	100	2.157.044	111%	61%			Dinas Sosial PPPA			
			203		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan	Orang	7	3.511.385	7	2.210.456	3	22.612	6	288.413	6	1.342.992	7	503.028	7	2.157.044	100%	61%			Dinas Sosial PPPA			
				01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan kemampuan	Orang	135	311.172	135	103.875	0	-	135	70.601	135	3.018	135	21.036	135	94.655	100%	30%	100%	91%	Dinas Sosial PPPA			
				02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang didampingi oleh TKSK	Orang	80	28.920	80	10.794	229	2.030	259	584	288	584	178	1.167	178	4.364	223%	15%	223%	40%	Dinas Sosial PPPA			
				03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah siswa yang mengikuti sarasehan	Orang	115	43.980	115	5.639	0	-	0	0	0	0	0	2.819	0	2.819	0%	6%	0%	50%	Dinas Sosial PPPA			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
					Kewenangan Kabupaten/Kota																						
				04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Lembaga	5	3.127.313	5	2.090.149	3	20.582	4	217.228	4	1.339.391	5	478.006	5	2.055.206	100%	66%	100%	98%	Dinas Sosial PPPA	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang tertangani	%	100	1.758.015	18,70	1.508.845	0	117.780	0	302.668	0	535.764	0	411.334	0	1.367.546	0%	78%			Dinas Sosial PPPA	
			201		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang tertangani	%	100	1.507.213	90	1.279.365	0	97.620	0	245.439	0	505.439	100	330.761	0	1.179.258	0%	78%			Dinas Sosial PPPA	
						Prosentase PMKS terlantar yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%																				
				01	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan pangannya	Orang	155	278.538	155	432.131	182	73.198	359	160.288	368	69.122	464	110.103	464	412.711	299%	148%	299%	96%	Dinas Sosial PPPA	
				02	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Orang	10	15.000	10	15.000	6	2.762	34	6.714	42	0	64	5.521	64	14.997	640%	100%	640%	100%	Dinas Sosial PPPA	
				03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	Orang	6	10.500	6	7.000	0	-	0	-	0	0	0	6.444	0	6.444	0%	61%	0%	92%	Dinas Sosial PPPA	
				04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	Orang	10	27.300	10	18.200	6	1.420	8	1.080	10	580	10	8.790	10	11.870	100%	43%	100%	65%	Dinas Sosial PPPA	
				05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	130	276.625	130	67.500	98	9.300	198	14.850	206	9.800	300	15.890	300	49.840	231%	18%	231%	74%	Dinas Sosial PPPA	
				06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial	Orang	286	821.400	165	697.844	18	6.520	45	53.632	94	414.729	160	174.483	317	649.363	111%	79%	192%	93%	Dinas Sosial PPPA	
				10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang terlayani	Orang	40	77.850	25	41.690	1	4.420	8	8.875	15	11.208	4	9.530	28	34.033	70%	44%	112%	82%	Dinas Sosial PPPA	
			202		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	%	100	250.802	100	229.480	0	20.160	0	57.229	0	30.325	100	80.574	100	188.288	100%	75%			Dinas Sosial PPPA	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																					
				02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan layanan kedaruratan	Orang	15	138.302	15	147.493	22	13.590	35	28.247	35	24.945	11	69.214	35	135.996	233%	98%	233%	92%	Dinas Sosial PPPA
				04	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS lainnya yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Orang	105	47.400	100	41.327	0	-	110	18.630	110	0	100	1120	100	19.750	95%	42%	100%	48%	Dinas Sosial PPPA
				05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	Orang	6	7.500	6	4.261	2	-	7	3.942	7	0	0	0	7	3.942	117%	53%	117%	93%	Dinas Sosial PPPA
				07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	10	39.400	10	18.200	8	4.460	14	3.460	15	4.800	4	4640	15	17.360	150%	44%	150%	95%	Dinas Sosial PPPA
				12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	Orang	10	18.200	10	18.200	3	2.110	5	2.950	6	580	2	5600	6	11.240	60%	62%	60%	62%	Dinas Sosial PPPA
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	90	10.740.275	90	9.360.727	0	284.689	0	1.960.331	0	2.187.447	0	1.815.566	0	6.248.033	0%	58%			Dinas Sosial PPPA
				201	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	90	7.880	90	7.880	0	-	0	200	0	-	0	1.450	0	1.650	0%	21%			Dinas Sosial PPPA
				01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang didata	Orang	24	3.600	24	3.600	0	-	0	200	4	-	4	1450	8	1.650	33%	46%	33%	46%	Dinas Sosial PPPA
				02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Orang	24	4.080	24	4.080	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	0%	0%	Dinas Sosial PPPA
				03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Orang	24	200	24	200	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	0%	0%	Dinas Sosial PPPA
				202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	10.732.395	100	9.352.847	0	284.689	0	1.960.131	0	2.187.447	0	1.814.116	0	6.246.383	0%	58%			Dinas Sosial PPPA
				01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah fakir miskin yang didata	Orang	10000	871.765	10000	887.764	0	10.155	0	160.759	0	142.745	10000	482.085	10000	795.743	100%	91%	100%	90%	Dinas Sosial PPPA
				02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang melaksanakan verval DTKS	Kelurahan	27	757.899	27	662.766	0	-	27	103.480	27	119.501	27	345.278	27	568.260	100%	75%	100%	86%	Dinas Sosial PPPA

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial	KK	4638	9.067.630	3252	7.780.736	273	274.534	3209	1.695.892	730	1.913.682	1082	980.849	5294	4.864.957	114%	54%	163%	63%	Dinas Sosial PPPA
			04	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi	KUBE	10	35.101	10	21.582	0	-	0	-	0	11.519	10	5.904	10	17.423	100%	50%	100%	81%	Dinas Sosial PPPA
1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100	502.390	100	344.886	0	44.017	0	50.292	0	58.912	100	138.980	100	292.200	100%	58%			Dinas Sosial PPPA
			201	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase Taruna Siaga Bencana yang handal	%	100	183.250	100	30.301	0	-	0	950	0	-	100	9.438	100	10.388	100%	6%			Dinas Sosial PPPA
			01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	Orang	3300	40.150	3300	17.890	0	0	0	-	0	0	400	6.038	400	6.038	12%	15%	12%	34%	Dinas Sosial PPPA
			02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	Orang	1000	10.000	1000	5.378	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-	0%	0%	0%	0%	Dinas Sosial PPPA
			05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan psikososial	Orang	300	133.100	300	7.034	0	0	0	950	0	0	10	3.400	10	4.350	3%	3%	3%	62%	Dinas Sosial PPPA
			202	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase terbentuknya kelurahan tanggap bencana	%	100	319.140	100	314.585	0	44.017	0	49.342	0	58.912	100	129.542	100	281.812	100%	88%			Dinas Sosial PPPA
			01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	Orang	60	13.370	60	11.750	0	-	0	-	0	0	60	11.250	60	11.250	100%	84%	100%	96%	Dinas Sosial PPPA
			02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang mendapatkan sosialisasi	Orang	20	305.770	20	302.835	20	44.017	20	49.342	20	58.912	20	118.292	20	270.562	100%	88%	100%	89%	Dinas Sosial PPPA
1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	%	100	115.600	100	103.194	25	6.120	25	15.482	25	25.677	25	43.904	100	91.183	100%	79%			Dinas Sosial PPPA
			201	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi taman makam pahlawan nasional yang	Lokasi	1	115.600	1	103.194	1	6.120	1	15.482	1	25.677	1	43.904	1	91.183	100%	79%			Dinas Sosial PPPA

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
						dilakukan pemeliharaan																				
				02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi taman makam pahlawan yang dipelihara	Lokasi	1	115.600	1	103.194	1	6.120	1	15.482	1	25.677	1	43.904	1	91.183	100%	79%	100%	88%	Dinas Sosial PPPA

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) Murni		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) Murni		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) PAK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		5		6		7		10		11		8=6+7		9=8/5 x 100%		9=8/5 x 100%		10								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)									
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
2	0	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																									
2	0	7	0	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA S TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang Dilatih	%	23	1.282.159	23	418.950	0	8.800	0	31.590	0	26.399	23	299.482	23	366.271	100%	29%	100%	87%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
				2 · 0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tersedianya peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten	Orang	230	1.143.194	90	370.954	0	8.800	0	15.200	0	26.399	90	278.530	90	328.929	39%	29%	100%	89%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah				
					0 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru	Orang	230	1.143.194	90	370.954	0	8.800	0	15.200	38	26.399	90	278.530	128	328.929	56%	29%	142%	89%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
				2 · 0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPTKS yang terakreditasi	%	20	138.965	20	47.996	0	-	0	16.390	0	-	38	20.952	38	37.342	190%	27%	190%	78%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah				
					0 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPTKS)	Pembinaa n	4	138.965	4	47.996	0	-	1	16.390	0	-	3	20.952	4	37.342	100%	27%	100%	78%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
2	0	7	0	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	79	457.327	79	272.466	0	8.000	0	32.767	0	43.183	79, 15	166.477	79, 15	250.427	100%	55%	100%	92%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
				2 · 0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diluar Negeri	Orang	500	457.327	200	272.466	0	8.000	0	32.767	0	43.183	391	166.477	391	250.427	78%	55%	196%	92%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah				

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersediaanya aplikasi ketenagakerjaan yang terupdate	Aplikasi	1	180.584	1	125.866	0	4.000	0	21.432	1	11.819	0	81.363	1	118.613	100%	66%	100%	94%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan Sosialisasi Bursa Kerja	Orang	500	156.469	100	133.671	0	4.000	27	11.335	34	31.365	289	72.259	350	118.958	70%	76%	350%	89%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	Orang	75	120.274	5	12.929	0	-	0	-	0	-	5	12.856	5	12.856	7%	11%	100%	99%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%	70	1.993.000	10	1.682.439	0	153.948	0	466.478	0	281.446	25	619.026	25	1.520.898	36%	76%	250%	90%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				201	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Prosentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB	%	25	511.825	25	550.262	0	-	0	190.535	0	1.167	31	281.664	31	473.366	124%	92%	124%	86%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah dokumen peraturan ketenagakerjaan	Dokumen	15	200.000	15	295.866	0	-	6	-	0	1.167	9	234.477	15	235.644	100%	118%	100%	80%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				03	Penyelenggaraa n Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	jumlah perusahaan yang terdata dan mendapatkan sosialisasi sarana HI	Perusaha an	300	311.825	300	254.397	0	-	100	190.535	0	-	200	47.188	300	237.722	100%	76%	100%	93%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				202	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	%	100	1.481.175	100	1.132.177	0	153.948	0	275.944	0	280.279	100	337.362	100	1.047.532	100%	71%	100%	93%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Daerah Kabupaten/Kot a																					
					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berd ampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan melalui PB	Kasus	15	206.000	15	107.768	0	4.400	3	9.582	2	20.283	10	52.154	15	86.419	100%	42%	100%	80%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga kerja Sektor Informal yang mendapatkan SIAGAKITA	Tenaga Kerja	350 0	1.275.175	3500	1.024.408	0	149.548	4237	266.362	4457	259.997	421 5	285.207	421 5	961.114	120%	75%	120%	94%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	0 8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																					
2	0 8	0 2			PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	%	10	885.073	10	428.180	0	10.392	0	180.223	0	67.321	7,7	36.606	7,7	294.542	77%	33%	77%	69%	Dinas Sosial PPPA
				2 · 0 1	Pelebagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a	Alokasi anggaran program yang di ARG	%	10	169.823	10	133.426	0	10.392	0	73.106	0	35.281	30	11.850	30	130.627	300%	77%	300%	98%	Dinas Sosial PPPA
				0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	jumlah peserta pertemuan	Orang	100	98.923	100	91.755	0	-	50	59.147	50	20.935	100	10.157	100	90.239	100%	91%	100%	98%	Dinas Sosial PPPA
				0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten /Kota	jumlah peserta rakor	Orang	350	43.750	350	14.621	65	5.140	75	13.959	140	0	195	1.692	475	20.791	136%	48%	136%	142%	Dinas Sosial PPPA
				0 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	jumlah peserta review	Orang	68	12.550	68	12.550	68	5.252	0	-	0	0	68	-	68	5.252	100%	42%	100%	42%	Dinas Sosial PPPA

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					PUG termasuk PPRG																					
				04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	jumlah peserta sosialisasi	Orang	100	14.600	100	14.500	0	-	0	-	100	14.345	100	-	100	14.345	100%	98%	100%	99%	Dinas Sosial PPPA
				202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase partisipasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	%	92	250.000	92	261.524	0	-	44	102.103	44	17.178	92	11.991	44	131.271	48%	53%	48%	50%	Dinas Sosial PPPA
				01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pertemuan money P3EL dan UP2PKK	Orang	140	37.300	140	136.352	0	-	60	8.980	67	0	127	2.200	127	11.180	91%	30%	91%	8%	Dinas Sosial PPPA
				02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan	Orang	162	212.700	162	125.172	0	-	108	93.123	108	17.178	108	9.791	108	120.091	67%	56%	67%	96%	Dinas Sosial PPPA
				203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	%	48,34	465.250	48	33.230	0	-	0	5.015	0	14.862	0	12.766	0	32.643	0%	7%	0%	98%	Dinas Sosial PPPA
				01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti	pameran	1	65.250	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial PPPA
				02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	Jumlah peserta pertemuan forum/pembinaan	Orang	150	200.000	110	33.230	0	-	70	5.015	88	14.862	70	12.766	228	32.643	152%	16%	207%	98%	Dinas Sosial PPPA

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
				03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan	Orang	250	200.000	250	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0%	0%	0%	#DIV/0!	Dinas Sosial PPPA
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	%	100	301.672	100	225.292	0	23.850	0	49.370	0	33.123	100	116.544	100	222.887	100%	74%	100%	99%	Dinas Sosial PPPA
				201	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	100	96.115	100	27.317	0	-	0	-	0	-	100	26.671	100	26.671	100%	28%	100%	98%	Dinas Sosial PPPA
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Orang	110	58.630	40	16.602	0	-	0	-	9	0	9	16.421	18	16.421	16%	28%	45%	99%	Dinas Sosial PPPA
				02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	Orang	150	37.485	30	10.714	0	-	0	-	0	0	30	10.250	30	10.250	20%	27%	100%	96%	Dinas Sosial PPPA
				202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan layanan bagi perempuan korban kekerasan	%	100	160.372	100	156.472	0	21.200	0	34.017	0	32.973	100	68.086	100	156.276	100%	97%	100%	100%	Dinas Sosial PPPA

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan sinkronisasi	Orang	60	160.372	40	156.472	30	21.200	60	34.017	60	32.973	60	68.086	60	156.276	100%	97%	150%	100%	Dinas Sosial PPPA
				203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Prosentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifiknya dalam situasi darurat	%	100	45.186	100	41.503	0	2.650	0	15.353	0	150	100	21.787	100	39.940	100%	88%	100%	96%	Dinas Sosial PPPA
				03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	Klien	29	26.277	29	26.444	0	2.650	0	300	0	150	24	21.787	24	24.888	83%	95%	83%	94%	Dinas Sosial PPPA
				04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Orang	30	18.909	30	15.059	0	-	30	15.053	0	0	30	-	60	15.053	200%	80%	200%	100%	Dinas Sosial PPPA
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	%	5	673.060	5	196.558	0	26.709	0	63.396	0	9.773	5	89.508	5	189.386	100%	28%	100%	96%	Dinas Sosial PPPA
				201	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	%	70	220.000	70	52.874	0	9.930	0	34.702	0	-	70	6.792	70	51.424	100%	23%	100%	97%	Dinas Sosial PPPA
				01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan	Jumlah peserta review / pelatihan/ lomba	Orang	250	100.000	81	10.130	83	9.930	81	-	81	0	81	-	326	9.930	130%	10%	402%	98%	Dinas Sosial PPPA

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota																					
				0 2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah peserta pertemuan	Orang	5	20.000	280	20.557	0	-	140	13.765	140	0	245	6.792	245	20.557	4900%	103%	88%	100%	Dinas Sosial PPPA
				0 3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah peserta pelatihan	Orang	100	100.000	220	22.187	0	-	220	20.937	220	0	220	-	220	20.937	220%	21%	100%	94%	Dinas Sosial PPPA
				2 . 0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Prosentase kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	%	100	353.456	11	40.844	0	14.314	0	22.892	11	3.038	11	-	11	40.244	11%	11%	100%	99%	Dinas Sosial PPPA
				0 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah peserta rakor	Orang	300	109.750	135	20.950	135	12.750	0	8.000	0	0	135	-	135	20.750	45%	19%	100%	99%	Dinas Sosial PPPA
				0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Jumlah peserta studi tiru/jambore nasional	Orang	200	99.706	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0! !	#DIV/0!	Dinas Sosial PPPA

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
				03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi 10 program pokok PKK	Kelurahan	27	144.000	1	19.894	27	1.565	27	14.892	1	3.038	1	-	1	19.494	4%	14%	100%	98%	Dinas Sosial PPPA
				203	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang terlayani di Pusta dan/atau Pos Curhat	%	100	99.603	100	102.841	0	2.465	0	5.803	0	6.735	0	82.716	0	97.718	0%	98%	0%	95%	Dinas Sosial PPPA
				01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan	Orang	100	99.603	400	102.841	30	2.465	180	5.803	330	6.735	400	82.716	400	97.718	400%	98%	100%	95%	Dinas Sosial PPPA
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Terpilah Gender dan Anak	%	100	175.000	100	113.616	0	1.600	0	40.387	0	14.730	100	54.123	100	110.840	100%	63%	100%	98%	Dinas Sosial PPPA
				201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gender dan anak yang terdata	%	100	175.000	100	113.616	0	1.600	0	40.387	0	14.730	100	54.123	100	110.840	100%	63%	100%	98%	Dinas Sosial PPPA
				01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan	Jumlah peserta bintek data gender dan anak	Orang	50	100.000	50	68.780	0	-	50	14.119	0	0	50	52.123	50	66.242	100%	66%	100%	96%	Dinas Sosial PPPA

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Kabupaten/Kota																					
				02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta movev dan rakor	Orang	50	75.000	50	44.836	0	1.600	50	26.268	0	14.730	50	2.000	50	44.598	100%	59%	100%	99%	Dinas Sosial PPPA
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak	%	100	719.308	100	266.236	0	11.688	0	49.739	0	83.097	100	104.617	100	249.142	100%	35%	100%	94%	Dinas Sosial PPPA
				201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pertemuan gugus tugas	%	100	95.795	100	44.583	0	7.385	0	21.963	0	-	100	1.433	100	30.781	100%	32%	100%	69%	Dinas Sosial PPPA
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi	Orang	140	95.795	140	44.583	0	7.385	140	21.963	0	0	140	1.433	140	30.781	100%	32%	100%	69%	Dinas Sosial PPPA
				202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	%	100	623.513	100	221.653	0	4.303	0	27.776	0	83.097	100	103.184	100	218.360	100%	35%	100%	99%	Dinas Sosial PPPA
					Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi / sinkronisasi	Orang	100	154.256	30	69.557	0	-	0	-	0	42.121	30	26.707	30	68.828	30%	45%	100%	99%	Dinas Sosial PPPA
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah anak yang dibina	Orang	100	160.150	65	70.733	0	1.103	65	19.709	0	35.502	65	14.375	65	70.689	65%	44%	100%	100%	Dinas Sosial PPPA

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia	Dokumen	1	179.865	1	67.376	0	3.200	0	8.067	0	5.474	1	48.294	1	65.035	100%	36%	100%	97%	Dinas Sosial PPPA
					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi / sinkronisasi	Orang	150	129.242	30	13.987	0	-	0	-	0	-	30	13.808	30	13.808	20%	11%	100%	99%	Dinas Sosial PPPA
2	0	8	0	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	%	100	214.596	100	81.739	0	-	0	43.184	0	15.178	100	2.836	100	61.198	100%	29%	100%	75%	Dinas Sosial PPPA
				2 0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	%	100	82.230	100	51.532	0	-	0	42.084	0	674	100		100	42.758	100%	52%	100%	83%	Dinas Sosial PPPA
				0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah	Sekolah	49	82.230	40	51.532	0	-	0	42.084	0	674	40	7.780	40	50.538	82%	61%	100%	98%	Dinas Sosial PPPA
				2 0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Prosentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	100	92.571	100	21.677	0	-	0	-	0	14.504	100	2.836	100	17.341	100%	19%	100%	80%	Dinas Sosial PPPA

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
					Kabupaten/Kota																								
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien yang mendapatkan pendampingan dan memerlukan perlindungan khusus	Orang	8	2.400	8	1.250	0	-	0	-	0	0	8	1.250	8	1.250	100%	52%	100%	100%	Dinas Sosial PPPA			
				04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi/bimbingan teknis	Orang	40	90.171	25	20.427	0	-	0	-	0	14.504	25	1.586	25	16.091	63%	18%	100%	79%	Dinas Sosial PPPA			
				203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	100	39.796	100	8.530	0	-	0	1.100	0	-	100	100	1.100	100%	3%	100%	13%	Dinas Sosial PPPA				
				03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga / jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Orang	60	39.796	20	8.530	0	-	0	1.100	0	-	20	5.312	20	6.412	33%	16%	100%	75%	Dinas Sosial PPPA			
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																								
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	Skor	95,8	962.000		1.287.926	0	131.960	0	448.959	0	248.804	0	91.180	0	920.903	0%	96%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
						Prosentase Angka Kecukupan Energi	%			100		0		0		0		100		100									

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
					PANGAN MASYARAKAT																					
			2 . 0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	16200	357.000	16200	309.866	0	4.050	0	30.077	0	122.554	91.180	0	247.860	0%	69%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen (Prognosa Panel Harga dan Neraca Bahan Pangan)	Dokumen	2	65.000	2	55.050	0	-	0	4.193	0	15.750	2	11.222	2	31.165	100%	48%	100%	57%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Produksi Pangan Hasil Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari	Kg	2000	210.000	2000	172.816	500	4.050	500	23.329	1000	49.829	1000	64.857	3000	142.065	150%	68%	150%	82%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen (Dok. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Grosir dan Eceran)	Dokumen	4	82.000	4	82.000	0	-	0	2.555	0	56.975	4	15100	4	74.630	100%	91%	100%	91%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2 . 0 4		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE	kkal/kapita	2100	605.000	2100	978.060	0	127.910	0	418.882	0	126.250		0	673.042	0%	111%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen (Pola Pangan Harapan & Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	Dokumen	2	65.000	2	55.050	0	6.176	0	8.828	2	38.296	4	0	6	53.300	300%	82%	300%	97%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Menu Olahan yang Tercipta (Produk Lomba Cipta Menu)	Produk	190	420.000		854.584	0	121.735	0	410.054	0	87.953	0	306.309	0	926.051	0%	220%	133%	108%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi dan Seimbang	Kali		0		0	4	4														

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
				03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen (Dok. Rakor Dewan Ketahanan Pangan & Rencana Aksi Daerah Ketahanan Pangan)	Dokumen	2	120.000		68.426	0	-	0	-	0	-	0	65.987	0	65.987	0%	55%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
					Jumlah Koordinasi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun		Kali			1		0		0		0		1		1									
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Peningkatan Sample Pangan Aman yang Teruji (%)	%	1	325.000		211.622	0	-	0	56.897	0	62.039		76.602	0	195.537	0%	60%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
					Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji	%				80								80											
			201		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kot a	Prosentase Pangan Segar Aman	%	4	325.000		211.622	0	-	0	56.897	0	62.039		76.602	0	195.537	0%	60%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
					Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Lokasi				8								8											
				01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan (orang)	Orang	450	225.000	450	128.033	0	-	0	-	450	62.039		61.465	450	123.504	100%	55%	100%	96%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
				05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Sampel yang diperiksa (sampel)	Sampel	45	100.000	45	83.589	0	-	0	56.897	45	-	45	15.136	45	72.033	100%	72%	100%	86%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																								
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	%		100	85.000	0	-	0	-	0	-	100	66.404	100	66.404	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	78%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
			201		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Prosentase pemberian izin lokasi	%		100	85.000	0	-	0	-	0	-	100	66.404	100	66.404	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	78%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	%		100	85.000	0	-	0	-	0	-	100	66.404	100	66.404	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	78%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Kemudahan Berusaha	(IPPT) sesuai ketentuan																				
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penatagunaan Tanah	%	100	120.000	100	120.000	0	-	0	10.036	10	38.723	100	61.000	110	109.759	110%	91%	110%	91%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			201		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi tanah yang digunakan	Lokasi	10	120.000	10	120.000	10	-	0	10.036	10	38.723	10	61.000	10	109.759	100%	91%	100%	91%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Kali	10	120.000	10	120.000	11	-	0	10.036	11	38.723	11	61.000	11	109.759	110%	91%	110%	91%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																					
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	%	69,23	475.000	69,23	397.958	0	42.520	64,1	110.515	66,67	45.577	69,23	157.167	66,67	355.779	96%	75%	96%	89%	Dinas Lingkungan Hidup
			201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	Dokumen	4	375.000	2	247.958	0	1.750	0	46.540	1	31.950	1	136.211	2	216.451	50%	58%	100%	87%	Dinas Lingkungan Hidup
				01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	4	375.000	2	247.958	0	1.750	0	46.540	1	31.950	1	136.211	2	216.451	50%	58%	100%	87%	Dinas Lingkungan Hidup
			202		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	Dokumen	1	100.000	1	150.000	0	40.770	0	63.975	1	13.627	0	20.956	1	139.328	100%	139%	100%	93%	Dinas Lingkungan Hidup
				03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1	100.000	1	150.000	0	40.770	0	63.975	1	13.627	0	20.956	1	139.328	100%	139%	100%	93%	Dinas Lingkungan Hidup

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	48	2.085.000	48	1.242.680	0	38.983	0	237.512	12,28	228.881	55, 9	709.850	55, 9	1.215.225	116%	58%	116%	98%	Dinas Lingkungan Hidup
			2 . 0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahannya	Kegiatan / Usaha	68	1.650.000	68	934.075	5	37.483	48	185.790	9	212.118	35	481.722	97	917.113	143%	56%	143%	98%	Dinas Lingkungan Hidup
				0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah koordinasi,sinkronisa si dan pelaksanaan pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut	Kali	20	1.100.000	20	555.992	1	28.398	9	98.198	6	141.119	6	279391,255	22	547.106	110%	50%	110%	98%	Dinas Lingkungan Hidup
				0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	1	550.000		378.083	0	9.085	0	87.592	0	70.999		202331,22	0	370.008	0%	67%	#DIV/0 !	98%	Dinas Lingkungan Hidup
							Kegiatan			3								5								
			2 . 0 2		Penanggulanga n Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	Usaha / Kegiatan	15	435.000	15	308.605	3	1.500	5	51.722	3	16.763	4	228.127	15	298.111	100%	69%	100%	97%	Dinas Lingkungan Hidup
				0 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Kali	20	435.000	20	308.605	13	1.500	3	51.722	6	16.763	1	228.127	23	298.111	115%	69%	115%	97%	Dinas Lingkungan Hidup

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	96, 83	19.515.841	94	125.500	0	1.600	0	51.057	0	5.430	94, 32	54.818	94, 32	112.905	97%	1%	100%	90%	Dinas Lingkungan Hidup	
			2 0 1		Pengelolaan Keanekaragam an Hayati Kabupaten/Kot a	jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab / Kota	Lokasi	1	19.515.841	1	125.500	0	1.600	0	51.057	0	5.430	1	54.818	1	112.905	100%	1%	100%	90%	Dinas Lingkungan Hidup	
				0 1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragam an Hayati	jumlah dokumen yang di susun	Dokumen	1	135.000	1	125.500	0	1.600	0	51.057	0	5.430	1	54.818	1	112.905	100%	84%	100%	90%	Dinas Lingkungan Hidup	
				0 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah RTH yang dibangun	Lokasi	4	6.700.000	0		0	-	0	-				0	-	0%	0%			Dinas Lingkungan Hidup		
				0 5	Pengelolaan Taman Keanekaragam an Hayati Lainnya	jumlah taman yang dipelihara	Lokasi	59	6.380.600	0		0	-	0	-				0	-	0%	0%			Dinas Lingkungan Hidup		
				0 6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragam an Hayati	jumlah SDM	Orang	120	5.705.241	0		0	-	0	-				0	-	0%	0%			Dinas Lingkungan Hidup		
				0 7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam an Hayati	persentase pemenuhan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	%	100	595.000	0		0	-	0	-				0	-	0%	0%			Dinas Lingkungan Hidup		
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	%	71	100.000	72	257.127	10	-	10	18.161	25,48	12.055	72, 5	201.585	72, 5	231.801	102%	232%	101%	90%	Dinas Lingkungan Hidup	
			2 0 1		Penyimpanan Sementara Limbah B3	jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi syarat	Lokasi	15	100.000	15	257.127	4	-	0	18.161	4	12.055	10	201.585	18	231.801	120%	232%	120%	90%	Dinas Lingkungan Hidup	
				0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	jumlah kegiatan/usaha yang mengurus izin	Perusaha an	5	100.000	5	257.127	5	-	1	18.161	1	12.055	1	201.585	8	231.801	160%	232%	160%	90%	Dinas Lingkungan Hidup	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																					
2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	52,9	450.000	53	336.516	47,5	-	1,97	11.159	2,98	38.832	54,65	254.403	54,64	304.394	103%	68%	103%	90%	Dinas Lingkungan Hidup
				2011	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan	15	450.000	15	336.516	0	-	4	11.159	5	38.832	6	254.403	15	304.394	100%	68%	100%	90%	Dinas Lingkungan Hidup
				01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan	Perusahaan	4	290.000	4	192.754	0	-	2	2.639	1	1.440	1	174918	4	178.997	100%	62%	100%	93%	Dinas Lingkungan Hidup
				03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat membuat laporan	Wajib Usaha	15	160.000	15	143.763	0	-	4	8.520	5	37.392	6	79484,75	15	125.397	100%	78%	100%	87%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	90	1.175.000	90	654.550	0	25.454	0	77.689	0	92.949	90	239.276	90	435.368	100%	37%	100%	67%	Dinas Lingkungan Hidup

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				2 · 0 1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Kegiatan	15	1.175.000	15	654.550	6	25.454	0	77.689	6	92.949	4	239.276	16	435.368	107%	37%	107%	67%	Dinas Lingkungan Hidup
				0 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup	Kegiatan	4	1.175.000	4	654.550	3	25.454	0	77.689	0	92.949	1	239.276	4	435.368	100%	37%	100%	67%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	1 0			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	90	85.000	90	85.000	0	-	0	5.420	0	8.188	90	60.730	90	74.338	100%	87%	100%	87%	Dinas Lingkungan Hidup
				2 · 0 1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Kasus	10	85.000	5	85.000	0	-	2	5.420	3	8.188	1	60.730	6	74.338	60%	87%	120%	87%	Dinas Lingkungan Hidup
				0 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kotantuk	Kasus	10	35.000	10	39.000	0	-	2	5.420	3	8.188	1	22.058	6	35.666	60%	102%	60%	91%	Dinas Lingkungan Hidup
				0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentukntuk	Orang	50	50.000	50	46.000	0	-	0	-	0	0	50	38672,25	50	38.672	100%	77%	100%	84%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	74	8.030.000	74	8.576.232	73,9	871.024	0,01	1.254.301	0,041	1.961.550	73,98	1.674.241	73,98	5.761.115	100%	72%	100%	67%	Dinas Lingkungan Hidup
				2 · 0 1	Pengelolaan Sampah	jumlah sampah yang ditangani DLH	Ton	32350	7.930.000	43777	8.506.232	7768,8	870.424	5209	1.253.006	10428,8	1.959.790	18855	1.627.365	42261,6	5.710.585	131%	72%	97%	67%	Dinas Lingkungan Hidup

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				0 2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	jumlah tempat / lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH	Lokasi	2	360.000	2	247.300	2	950	0	950	0	3.825	2	197.354	2	203.079	100%	56%	100%	82%	Dinas Lingkungan Hidup	
				0 3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah volume sampah harian yang masuk di TPA	Ton	322 80	5.700.000	32280	5.454.300	1	826.172	0	1.184.772	0	1.542.731	312 66	1.136.814	312 67	4.690.489	97%	82%	97%	86%	Dinas Lingkungan Hidup	
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat yang Berperan Aktif terhadap Pengelolaan Persampahan	Orang			100	92.582	0	-	0	-	0	0	317	90.070					0%	0%		
				0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	Jenis	11	1.870.000	10	2.712.050	0	43.303	4	67.283	6	413.233	0	203.128	10	726.947	91%	39%	100%	27%	Dinas Lingkungan Hidup	
				2 0 3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	Kelompok	35	100.000	35	70.000	6	600	2	1.295	6	1.760	100	46.876	100	50.531	286%	51%	286%	72%	Dinas Lingkungan Hidup	
				0 2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah (Adipura)	Kecamatan	3	100.000	3	70.000	3	600	3	1.295	3	1.760	3	46.876	3	50.531	100%	51%	100%	72%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																						
2	1 2	0 2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	84	579.680	84	228.148	0	9.715	0	60.575	0	62.120	96, 63	98.272	96, 63	230.682	115%	40%	115%	101%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 . 0 1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	Dokumen	370 00	328.148	-	228.148	0	9.715	0	60.575	0	62.120	0	98.272	0	230.682	0%	70%	110%	101%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	-		84		0		0		0		92		92						
				0 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman KTP EL	Data	300 00	177.640	2.500	127.640	0	5.075	0	31.987	0	32.983	313 0	57.176	313 0	127.221	10%	72%	125%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				0 5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Dokumen	370 00	150.508	26.000	100.508	0	4.640	0	28.588	0	29.137	228 09	41.096	228 09	103.461	62%	69%	88%	103%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2 . 0 3		Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KTP EL	Dokumen	100 00	251.532	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0 !	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				0 2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan KTP EL penduduk usia diatas 18 tahun	Orang	300	251.532	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0 !	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencataan Sipil	%	94	824.878	94	559.473	0	1.178	0	126.858	0	132.815	98, 11	284.136	98, 11	544.986	104%	66%	104%	97%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2 . 0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	Dokumen	120 0	674.878	1600	559.473	0	1.178	0	126.858	0	132.815	498 7	284.136	498 7	544.986	416%	81%	312%	97%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				0 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen akta pencatatan sipil yang diterbitkan	Dokumen	120 0	130.488	1500	99.738	0	-	0	72.697	0	0	487 6	26.000	487 6	98.697	406%	76%	325%	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				0 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta kelahiran penduduk usia diatas 50 tahun	Dokumen	500 0	544.390	100	459.735	0	1.178	0	54.161	0	132.815	100	258.136	100	446.289	2%	82%	100%	97%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2 . 0 2		Penyelenggara an Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	Dokumen	120 0	150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0 !	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akte kelahiran	Dokumen	1500	150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi Database Kependudukan	%	99,1	888.526	99	347.749	0	13.210	0	107.934	0	101.413	99,44	124.425	99,44	346.982	100%	39%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			201		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	%	77	458.526	77	347.749	0	13.210	0	107.934	0	101.413	83,56	124.425	83,56	346.982	109%	76%	109%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	Laporan	13	357.223	13	296.446	0	13.210	0	93.193	4	90.664	9	102.856	13	299.924	100%	84%	100%	101%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama dan Inovasi	Buah	4	101.303	5	51.303	0	0	0	14.741	2	10.748	10	21.569	12	47.058	300%	46%	240%	92%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			203		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk	Orang	210210	430.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitas	Kali	8	130.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi	Kali	16	300.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																					
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	%	≤ 4	226.618			0	29.253	0	41.690	0	30.873		166.787	0	268.603	#VALUE!	119%	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 . 0 1		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prosentase OPD yang terlibat dalam program Bangga Kencana (Kampung KB)	%	<50	52.627			0	-	0	2.509	0	2.487		7.359	0	12.355	#VALUE!	23%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
					Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	terbentuknya RPP Sekolah siaga Kependudukan di 5 sekolah	%	100	52.627			0		0		0		0		0						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				0 7		Jumlah Sekolah yang Telah Membentuk RPP SSK 5 Sekolah	Jumlah			4	12.356	0	-	0	2.509	0	2.487	4	7.359	4	12.355	0%	23%	100%	100%	
			2 . 0 2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data PK di 18 kel	%	100	173.991			12		14		100				100						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
						Persentase Pendataan Keluarga	%			100	288.597	0	29.253	100	39.181	100	28.387	100	159.428	100	256.248	100%	147%	100%	89%	
						terdatanya semua keluarga dalam Pendataan Keluarga (PK) 2021 di 18 kelurahan	%	100		100		0		20		27		98		98						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				1 2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kelurahan yang telah Mendata Semua Keluarga dalam Pendataan Keluarga	Kelurahan		173.991	27	288.597	0	29.253	0	39.181	0	28.387	0	159.428	27	256.248	98%	147%	100%	89%	
2	1 4	0 3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmeet Need	%	< 8	2.716.075		340.290	0	11.670	0	219.848	0	258.167		1.042.018	0	1.531.703	#VALUE!	56%	#DIV/0!	450%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	tersedianya data PK di 18 kel	%	100	1.013.763			0		0		0				0						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			2 . 0 1			Persentase Pelaksanaan Kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	%			100	340.290		-		181.337		81.747		42.117		305.201	0%	30%	0%	90%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPB	Jumlah Jenis Sarana KIE Program KKBPB	Jenis	-	-	4	120.042	0	-	0	36.414	0	47.350	4	13.594	4	97.358	#VALUE!	#DIV/0!	100%	81%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB	Jumlah balai KB	Balai	3	1.013.763		220.248	0	-	3	144.923	3	34.397	3	28.523	3	207.843	100%	21%	100%	94%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
						Jumlah Kelompok yang Terpapar Program Bangga Kencana (BKB, BKR, PIK R, UPPKS, BKL, IMP, PKB, PUS)	Kelompok	-		8		0		0		8		0		8						
			2022		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Kader yang Melakukan Updating Data	%	0	-	100															Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP yang melakukan Updating Data	Kader	0	-	148	129.600	0	-	0	41.000	0	92.500	132	-	132	133.500	#DIV/0!	#DIV/0!	89%	103%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			2023		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka Drop Out	%	<15	1.702.312	<15	2.053.808		11.670		38.511	0	176.420		999.900	0	1.226.501	#VALUE!	72%	#VALUE!	60%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang Mendapatkan Distribusi Alokon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Faskes			22	51.766	0	-	0	6.300	0	5.967	22	4.392	22	16.659	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	32%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tercapainya KB MKJP 80 aseptor	%	100	961.962	-	960.427	0	11.670	0	38.511	0	25.940		87.923	0	164.044	0%	17%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
						Jumlah Aseptor yang Mendapatkan Pelayanan KB Baru MKJP	Aseptor	-		651		0		0		0										
				06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah paket pengadaan	paket	2	740.350	2	1.093.381	0	-	0		0	150.480	2	911.978	2	1.062.458	100%	144%	100%	97%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
			2 . 0 4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan IMP dan Pokja Kampung KB yang Menerima Pembinaan Kesetaraan ber - KB	%			100	152.112		-		62.217		43.982	100	45.665	100	151.864	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
			0 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kegiatan			3	152.112	0	-	1	62.217	1	43.982	1	45.665	3	151.864	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	1 4	0 4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	70	542.979				15.400	0	61.290	0	38.807			0	115.497	0%	21%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
			2 . 0 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	%	70	542.979				15.400	0	61.290	0	38.807			0	245.764	0%	45%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
					Persentase Angka Kepesertaan Sasaran dalam Kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	%			60																	
			0 4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kegiatan	2	88.020	2	13.413	0	-	0	2.299	1	6.517	1	4.597	2	13.413	100%	15%	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
			0 7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kegiatan	3	454.959	3	244.083	0	15.400	1	58.991	1	32.290	1	125.671	3	232.352	100%	51%	100%	95%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
					Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)																					
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																					
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGA RAAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	KECEPATAN LALU LINTAS	Km/Jam	38			0		0		0		0		0							
					Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas		%		29.936.191	84	8.363.010		438.804		1.336.605		993.170	84	5.448.257	84	8.216.837	0%	27%	100%	98%	Dinas Perhubungan
			201		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen	Dokumen	1		-	0		0		0		0		0		0					
					Persentase Terlaksananya Kebijakan		%	-	100.000	100	100.000		-		-		-	100	99.700	100	99.700	0%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
				01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen	Dokumen	1	100.000	1	100.000	0	0	-	0	-	1	99.700	1	99.700	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
			202		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	Persentase perengkapan jalan yang berfungsi baik	%	75	24.542.324	75	2.935.714	0	89.872	0	107.424	0	263.452	75	2.457.116	75	2.917.863	100%	12%	100%	99%	Dinas Perhubungan
				01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	Jumlah prasarana jalan	Unit	1	13.205.000	1	340.000	0	28.400	0	28.400	0	229.590	1	77.733	1	364.123	100%	3%	100%	107%	Dinas Perhubungan
				02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	Jumlah perengkapan jalan yang terpasang	Unit	1137	7.765.700	283	1.359.780	0	39.440	0	39.440	0	-	283	1.273.660	283	1.352.540	25%	17%	100%	99%	Dinas Perhubungan
				03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah perengkapan jalan dipelihara	Jenis	5	3.571.624	5	1.235.934	0	22.032	0	39.584	0	33.862	5	1.105.723	5	1.201.199	100%	34%	100%	97%	Dinas Perhubungan
			203		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	%	100	710.062	100	1.024.111	0	73.653	0	191.569	0	102.293	100	691.387	100	1.058.903	100%	149%	100%	103%	Dinas Perhubungan
				03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	luas bangunan	m²	45	710.062	45	1.024.111	0	73.653	0	191.569	0	102.293	45	691.387	45	1.058.903	100%	149%	100%	103%	Dinas Perhubungan
			205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan Lulus uji	Kendaraa n	1	650.327	1	620.752	0	24.511	0	119.842	0	119.184	1	359.363	1	622.900	100%	96%	100%	100%	Dinas Perhubungan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji	Buah	4600	544.327	4600	514.752	0	24.511	0	119.842	0	119.184	4600	256.463	4600	520.000	100%	96%	100%	101%	Dinas Perhubungan	
				07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi	Unit	12	106.000	12	106.000	0	-	0	-	-	-	12	102.900	12	102.900	100%	97%	100%	97%	Dinas Perhubungan	
			206		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah MRLL	MRLL	160	1.953.423	100	2.117.784	0	123.400	0	502.363	0	274.715	-	1.084.908	-	1.985.386	#VALUE!	102%	100%	94%	Dinas Perhubungan	
						Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%							-		100		-		100							
				01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah MRLL	Dokumen	1	626.558	1	236.400	0	4.040	0	47.116	0	30.414	1	154.445	1	236.015	100%	38%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
				03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah uji coba dan sosialisasi	Kegiatan	5	170.140	5	68.900	0	3.525	0	20.625	2	3.360	3	44.541	5	72.051	100%	42%	100%	105%	Dinas Perhubungan	
				04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	Kegiatan	2	1.064.725	6	1.720.484	0	106.008	0	406.041	1	225.257	5	844.225	6	1.581.531	300%	149%	100%	92%	Dinas Perhubungan	
				05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah forum	Forum	12	92.000	12	92.000	0	9.827	0	28.580	4	15.684	8	41.698	12	95.789	100%	104%	100%	104%	Dinas Perhubungan	
			208		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kegiatan keselamatan	%	100	115.884	100	247.884	0	-	0	39.592	0	6.881	100	184.950	100	231.423	100%	200%	100%	93%	Dinas Perhubungan	
				02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana	Nilai akreditasi	Lulus	1	73.502	1	205.502	0	-	0	4.720	0	6.881	1	178.200	1	189.801	100%	258%	100%	92%	Dinas Perhubungan	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Uji Berkala Kendaraan Bermotor																					
				04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	Kegiatan	1	42.382	4	42.382	0	-	0	34.873	0	-	4	6.750	4	41.623	400%	98%	100%	98%	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja Angkutan	Nilai	0,4				0		0		0				0						
			209			Persentase Ketersediaan Angkutan Umum	%		1.864.171	100	1.316.765	-	127.368	-	375.815	-	226.645	100	570.833	100	1.300.661	0%	70%	100%	99%	Dinas Perhubungan
				01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan	Kendaraan	41	1.864.171	41	1.316.765	0	127.368	0	375.815	0	226.645	41	570.833	41	1.300.661	100%	70%	100%	99%	Dinas Perhubungan
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																					
			02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	%	50	12.258.826	75	4.619.278	0	541.008	0	1.019.490	0	1.101.701	83	1.893.490	83	4.555.689	166%	37%	111%	99%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	%	100	12.258.826	100	4.619.278	100	541.008	0	1.019.490	0	1.101.701	100	1.893.490	200	4.555.689	200%	37%	200%	99%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	Informasi	1200	4.438.000	1200	2.589.955	189	285.000	375	681.900	251	706.837	612	899.166	1427	2.572.903	119%	58%	119%	99%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan	Media	5	2.500.000	5	1.416.495	5	180.542	5	227.829	5	268.323	5	719.013	5	1.395.707	100%	56%	100%	99%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah sosialisasi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Sosialisasi	10	3.076.826	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	%	100	594.000	100	151.290	100	21.684	100	21.642	100	35.278	100	60.801	100	139.405	100%	23%	100%	92%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	Kelompok	27	750.000	27	201.460	27	16.020	27	17.268	27	27.133	27	129.725	27	190.146	100%	25%	100%	94%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Tema Informasi	6	900.000	6	260.078	2	37.762	2	70.851	2	64.130	2	84.784	8	257.527	133%	29%	133%	99%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Domain Layanan SPBE Administrasi Pemerintahan	Skor	3,6	9.949.850	100	9.760.451	144.477	1.502.529	2.942.928	4.842.605	9.432.539	0%	95%								Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
						Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%																			
				201	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	%	100	5.394.650	100	5.718.548	100	-	0	1.302.534	0	1.250.515	100	3.039.779	100	5.592.829	100%	104%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	Domain	126	350.000	238	26.800	238	-	238	6.420	238	274	238	14.744	238	21.438	189%	6%	100%	80%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presntase Koperasi Aktif	%	98,69	1.004.010	98,69	750.310	0	48.518	0	277.294	0	39.606	100	314.400	100	679.818	101%	68%	101%	91%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi bersertifikat NIK	Koperasi	150	1.004.010	125	750.310	0	48.518	0	277.294	0	39.606	125	314.400	125	679.818	83%	68%	100%	91%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah koperasi yang tertib melaksanakan RAT	Koperasi	108	1.004.010	108	750.310	0	48.518	108	277.294	108	39.606	108	314.400	108	679.818	100%	68%	100%	91%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	%	30	190.000	30	148.050	0	-	0	10.821	0	10.821	40	94.170	40	115.811	133%	61%	133%	78%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang meningkat omsetnya	Koperasi	50	190.000	50	148.050	0	-	0	10.821	0	10.821	60	94.170	60	115.811	120%	61%	120%	78%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kperasi yang dibina	Koperasi	152	190.000	152	148.050	0	-	0	10.821	0	10.821	150	94.170	150	115.811	99%	61%	99%	78%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Usaha Mikro Naik Kelas	%	1,86	1.010.000	7	829.985	0	23.048	0	216.336	0	77.740	9	484.524	9	801.648	484%	79%	129%	97%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah pelaku usaha mikro naik kelas	Orang	3	1.010.000	10	829.985	0	23.048	0	216.336	0	77.740	19	484.524	19	801.648	633%	79%	190%	97%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Orang	145	1.010.000	160	829.985	0	23.048	139	216.336	145	77.740	209	484.524	145	801.648	100%	79%	91%	97%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																					
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasi	%	13	472.366	13	373.118	19	1.000	19	35.845	19	37.149	19	281.159	19	355.152	146%	75%	146%	95%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			201		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah investor baru	Investor	10	472.366	10	373.118	3	1.000	3	35.845	3	37.149	4	281.159	13	355.152	130%	75%	130%	95%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah promosi penanaman modal	Kegiatan	5	472.366	5	373.118	0	1.000	2	35.845	2	37.149	1	281.159	5	355.152	100%	75%	100%	95%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	%	80	466.200	80	876.549	89	22.623	99,6	150.129	99,6	148.696	99,6	472.280	99,6	793.728	125%	170%	125%	91%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			201		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman	jumlah pemohon izin	Izin	1500	466.200	2.500	876.549	819	22.623	1858	150.129	2034	148.696	2573	472.280	2573	793.728	172%	170%	103%	91%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																					
				01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah peserta sosialisasi perizinan elektronik	Orang	75	210.000	75	568.871	0	2.000	0	60.156	0	85.106	75	346.832	75	494.094	100%	235%	100%	87%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah pemenuhan komitmen berusaha yang dievaluasi	%	10	237.400	10	288.878	10,3	17.402	16,2	82.516	14	60.673	15	117.022	15	277.613	150%	117%	150%	96%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah layanan konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Kali	50	18.800	50	18.800	10	3.221	22	7.457	6	2.917	12	8.425	50	22.021	100%	117%	100%	117%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	Perusahaan	80	198.225	80	454.985	65	21.430	80	75.128	80	51.482	20	239.134	80	387.174	100%	195%	100%	85%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang dibina	Perusahaan	100	198.225	100	454.985	0	21.430	181	75.128	181	51.482	20	239.134	181	387.174	181%	195%	181%	85%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang memahami ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Perusahaan	30	50815	30	50815	0	-	5	1.031	15	4.031	10	15.337	30	20.399	100%	40%	100%	40%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan	jumlah perusahaan yang tertib melaporkan LKPM	Perusahaan	15	198.225	15	454.985	5	21.430	20	75.128	20	51.482	20	239.134	20	387.174	133%	195%	133%	85%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Penanaman Modal																					
				03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pelaksanaan penanaman Modal	Perusahaan	25	20.000	25	20.000	0	-	0	-	0	400	25	12.276	25	12.676	100%	63%	100%	63%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase jenis izin yang diproses secara elektronik	%	90	61.000	90	83.200	0	-	100	-	100	31.097	100	61.226	100	92.323	111%	151%	111%	111%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jenis izin yang diproses secara elektronik	Jenis Izin	65	61.000	65	83.200	0	-	65	-	65	31.097	65	61.226	65	92.323	100%	151%	100%	111%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah jenis izin yang terintegrasi menggunakan sistem elektronik	Jenis Izin	30	61.000	30	83.200	0	-	30	-	30	31.097	30	61226	30	92.323	100%	151%	100%	111%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA																					
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Prestasi Pemuda	Prestasi	1	996.000	1	700.000	0	-	2	46.132	2	436.941	0	193.724	2	676.796	200%	68%	200%	97%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
				201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha	Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan	Event	2	996.000	2	700.000	0	-	1	46.132	1	436.941	0	193.724	2	676.796	100%	68%	100%	97%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
					Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																						
				08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	jumlah keikutsertaan pemuda	Orang	200	996.000	400	700.000	0	-	400	46.132	400	436.941	400	193.724	400	676.796	200%	68%	100%	97%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	Mendali	12	5.269.000	12	3.511.443	0	67.729	0	1.100.698	0	1.139.282	11	979.669	11	3.287.378	92%	62%	92%	94%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
			201		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras olahraga yang terfasilitasi	Sarpras Olahraga	3	2.314.000	3	2.039.200	1	65.319	2	446.336	3	938.032	3	449.521	3	1.899.208	100%	82%	100%	93%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
				03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras olahraga yang terfasilitasi	Sarpras Olahraga	3	2.314.000	3	2.039.200	1	65.319	2	446.336	3	938.032	3	449.521	3	1.899.208	100%	82%	100%	93%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
			202		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kejuaraan yang diselenggarakan	Event	3	1.226.000	1	250.000	0	-	0	119.604	0	23.874	1	97.364	1	240.841	33%	20%	100%	96%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
				02	Penyelenggaraa n Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event kejuaraan yang diselenggarakan	Event	3	1.226.000	1	250.000	0	-	0	119.604	0	23.874	1	97.364	1	240.841	33%	20%	100%	96%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
			204		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	cabang olahraga	10	1.000.000	10	1.000.000	0	-	5	500.000	0	-	10	427.261	10	927.261	100%	93%	100%	93%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
				02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	cabang olahraga	10	1.000.000	10	1.000.000	0	0	5	500.000	0	0	10	427.261	10	927.261	100%	93%	100%	93%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
			205		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Festival Olahraga	3	729.000	2	222.243	0	2.410	2	34.759	2	177.375	2	5.524	2	220.068	67%	30%	100%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
				01	Penyelenggara n, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Festival Olahraga	3	729.000	2	222.243	0	2.410	2	34.759	2	177.375	2	5.524	2	220.068	67%	30%	100%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																								
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGA RAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	%	80	5.700.000	100	313.278	0	6.018	0	31.244	0	104.859	100	167.788	100	309.909	125%	5%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
			201		Penyelenggara n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah OPD yang memenuhi Data Statistik Sektoral	OPD	34	5.700.000		313.278	34	6.018	0	31.244	34	104.859	-	167.788	34	309.909	100%	5%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
					Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral yang Dilakukan	Jenis		1		0		0		0		1		0											
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik	Dokumen	5	5.700.000	5	313.278	0	6.018	1	31.244	2	104.859		167.788	3	309.909	60%	5%	60%	99%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																								
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGA RAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Level	II	400.000		195.503	II	3.869	0	35.204	0	36.944		117.462	II	193.479	100%	48%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
						Persentase OPD yang menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%			0		0		0		100		100											
			201		Penyelenggara n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase OPD yang mengimplementasik an keamanan informasi	%	40	400.000		195.503	25	3.869	0	35.204	0	36.944		117.462	25	193.479	63%	48%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
						Jumlah OPD yang mengimplementasikan Tanda Tengan Elektronik (TTE)	OPD			5								5											
				04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Berita Sandi yang diamankan	Jumlah	900	400.000	900	195.503	0	3.869	0	35.204	0	36.944	980	117.462	980	193.479	109%	48%	109%	99%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																								
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	%	30	4.570.000	30	1.924.765	0	3.300	30	475.030	30	658.134	30	756.336	30	1.892.801	100%	41%	100%	98%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
				202	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi	Budaya	50	4.570.000	15	1.924.765	0	3.300	4	475.030	4	658.134	7	756.336	15	1.892.801	30%	41%	100%	98%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
				01	Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi	Event	25	3.000.000	11	1.395.979	0	3.300	3	286.645	4	452.918	4	624.810	11	1.367.673	44%	46%	100%	98%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
				03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	Festival	33	1.570.000	8	528.786	0	-	1	188.386	2	205.217	5	131.526	8	525.128	24%	33%	100%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Kesenian	2	210.000	2	123.886	0	-	0	32.326	0	2.400	2	88.390	2	123.116	100%	59%	100%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 0 1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	Pelatihan	2	210.000	1	123.886	0	-	1	32.326	1	2.400	1	88.390	1	123.116	50%	59%	100%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
				0 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	Pelatihan	2	210.000	1	123.886	0	-	1	32.326	1	2.400	1	88.390	1	123.116	50%	59%	100%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	2 2	0 5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	21	700.000	21	200.000	0	-	21	55.571	21	84.013	21	55.706	21	195.290	100%	28%	100%	98%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
			2 0 2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	21	700.000	21	200.000	0	-	21	55.571	21	84.013	21	55.706	21	195.290	100%	28%	100%	98%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
					Pengembangan Cagar Budaya	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yg dilestarikan	%	21	700.000	21	200.000	0	-	21	55.571	21	84.013	21	55.706	21	195.290	100%	28%	100%	98%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	2 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																					
2	2 3	0 2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan	%	72	2.176.750	72	1.225.410	0	53.790	0	196.908	0	286.658	73	635.000	73	1.172.356	101%	54%	101%	96%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2 0 1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	5	1.698.750	5	802.410	0	29.550	0	119.415	0	183.168	5	440.889	5	773.022	100%	46%	100%	96%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				0 1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah anggaran	Orang	100 000	635.000	10000	324.000	0	29.550	3481	119.415	3476	35.836	432 7	119.791	112 84	304.593	11%	48%	113%	94%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				0 2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket	Paket	2	418.750	2	226.720	0	-	0	-	1	96.724	1	124.009	2	220.733	100%	53%	100%	97%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				0 8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi	Eksemplar	350 0	645.000	1750	51.500	0	-	0	-	1243	50.608	325	-	156 8	50.608	45%	8%	90%	98%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	2600	-	2600	200.190	0	-	0	-	0	0	2583	197.089	2583	197.089	99%	#DIV/0!	99%	98%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			202		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Minat Baca	Indeks	2	478.000	2	423.000	0	24.240	0	77.493	0	103.490	2	194.111	2	399.334	100%	84%	100%	94%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah perpustakaan terakreditasi	Lembaga	10	338.000	10	338.000	10	24.240	10	77.493	10	103.490	10	126.512	10	331.735	100%	98%	100%	98%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket	Paket	2	140.000	2	85.000	0	-	0	-	0	0	2	67.599	2	67.599	100%	48%	100%	80%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																					
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah berkas arsip yang dikelola	Berkas	59500	3.355.000	59500	436.332	0	95.063	#####	58.704	0	73.356	59623	199.682	73112	426.806	123%	13%	123%	98%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			201		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip dinamis yang dikelola	Berkas	59556	305.000	59556	216.024	0	39.902	13489	48.036	0	10.880	59623	114.733	73112	213.551	123%	70%	123%	99%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah berkas arsip yang dipelihara dan disusutkan	Berkas	59556	305.000	59556	216.024	0	39.902	13489	48.036	21489	10.880	17321	114.733	52299	213.551	88%	70%	88%	99%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			202		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip statis yang dikelola	Berkas	250	3.050.000	250	220.308	0	55.161	0	10.668	0	62.476	250	84.949	250	213.254	100%	7%	100%	97%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan layanan akses arsip	Berkas	250	3.050.000	250	220.308	0	55.161	0	10.668	0	62.476	250	84.949	250	213.254	100%	7%	100%	97%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) Murni		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) Murni		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) PAK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		5		6		7		10		11		8=6+7		9=8/5 x 100%		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
3	2	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																						
3	2	5	0	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	5			0		0		0		0		0	234.971	0%	90%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
					Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya		ton		260.000	277	243.130	15.869	59.412	76.369	277	83.321		234.971									
			2	0	2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkapan	ton/th	378	260.000	378	243.130	89,2	15.869	84,21	59.412	102	76.369	102,59	83.321	378	234.971	100%	90%	100%	97%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					0	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	180	260.000	180	243.130	0	15.869	0	59.412	0	76.369	180	83.321	180	234.971	100%	90%	100%	97%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2	0	4	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan	RTP		245	53.000	0	-	0	-	0	52.734	235	83.321	235	136.055	#DIV/ 0!	#DIV/0!	96%	257%		
					0	Penyediaan Prasarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Prasarana yang diperbaiki	Unit		2	53.000	0	-	0	-	0	52.734	2	83.321	2	136.055	#DIV/0 !	#DIV/0!	100%	257%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	2	5	0	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	%	1	553.000		459.215	0	43.542	0	168.856	0	108.797		0	321.195	0%	58%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
					PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	kg / perkapita / tahun			15,6								15,6											
			2 . 0 2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Konsumsi Makan Ikan (kg/perkapita/tahun)	kg / perkapita / tahun	15, 4	553.000		459.215	0	43.542	0	168.856	0	108.797	0	130.377	0	451.571	0%	82%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
					Jumlah Pengolah dan Pemasar Ikan yang dibina	Orang		50		10		20		10		21		61											
				0 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan (orang)	Orang	488	553.000	488	459.215	120	43.542	200	168.856	363	108.797	400	130.377	1083	451.571	222%	82%	222%	98%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
3	2 6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																								
3	2 6	0 2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola	Destinasi	2	398.254	2	265.000	0	-	2	44.823	0	34.700	0	168.677	2	248.200	100%	62%	100%	94%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
			2 . 0 3		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	Destinasi	2	398.254	2	265.000	0	-	2	44.823	0	34.700	0	168.677	2	248.200	100%	62%	100%	94%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
				0 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	Lokasi	1	250.254	1	140.000	0	-	2	-	2	0	2	123.832	2	123.832	200%	49%	200%	88%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
				0 6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	Jumlah event pemberdayaan masyarakat	Event	2	148.000	2	125.000	0	-	2	44.823	2	34.700	2	44.845	2	124.368	100%	84%	100%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Pariwisata	Promosi	2	1.058.050	2	459.149	0	-	1	73.028	0	232.364	1	140.435	2	445.827	100%	42%	100%	97%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
			201		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Promosi	4	1.058.050	4	459.149	0	-	1	73.028	1	232.364	2	140.435	4	445.827	100%	42%	100%	97%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
				02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Event	4	1.058.050	3	459.149	0	-	1	73.028	1	232.364	1	140435	3	445.827	75%	42%	100%	97%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Event	2	650.000	1	328.411	0	-	0	16.396	0	38.223	1	243.415	1	298.033	50%	46%	100%	91%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
			201		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Event	2	650.000	1	328.411	0	-	0	16.396	0	38.223	1	243.415	1	298.033	50%	46%	100%	91%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
				06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah event pengembangan SDM ekonomi kreatif	Event	2	650.000	1	328.411	0	-	0	16.396	0	38.223	1	243414,64	1	298.033	50%	46%	100%	91%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																						

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	75	2.391.256	50	1.608.738	0	30.591	0	192.855	0	863.396	50	406.459	50	1.493.301	67%	62%	100%	93%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani	%	50	1.952.256	50	1.350.938	0	14.968	0	145.565	0	828.377	50	253.175	50	1.242.084	100%	64%	100%	92%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kali	117	620.539	-	326.588	0	4.800	30	133.543	0	50.282	0	102.492	30	291.117	26%	47%	100%	89%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Lokasi	-		39		0		0		0		39		39						
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian Pendukung Produksi Pertanian/Peternaka n	Paket	1	1.331.718	1	1.024.349	0	10.168	1	12.022	0	778.095	0	150.683	1	950.967	100%	71%	100%	93%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	%	75	439.000	75	257.800	0	15.624	0	47.290	0	35.019	75	153.284	75	251.217	100%	57%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/T anaman Skala Kecil	Jumlah Sampel Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanam an Yang Diawasi	Lokasi	12	439.000	12	257.800	2	15.624	4	47.290	6	35.019	0	153.284	12	251.217	100%	57%	100%	97%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana yang Berfungsi dengan baik	%	15	40.349	50	29.653	0	-	0	2.625	0	-	50	16.375	50	19.000	333%	47%	100%	64%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2		Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	20	40.349	50	29.653	0	-	0	2.625	0	-	50	16.375	50	19.000	250%	47%	100%	64%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Penyusunan Laporan / Peta / Peraturan Daerah tentang LP2B, KP2B, dan LCP2B Kota Madiun	Laporan	1	40.349	1	29.653	0	0	0	2.625	0	-	1	16.375	1	19.000	100%	47%	100%	64%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Jumlah Hewan dan Produk asal Hewan yang Terawasi (%)	%	75	420.000	10	478.050	0	60.232	0	153.581	0	77.236	10	211.377	0	502.425	0%	120%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
						Presentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%																				
			201		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Hewan	%	80	220.000	80	210.500	0	41.508	0	118.013	0	31.248	80	45.685	80	236.454	100%	107%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	3250	220.000	3250	210.500	350	41.508	450	118.013	2250	31.248	1168	45.685	4218	236.454	130%	107%	130%	112%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			203		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Pelayanan yang direkomendasikan (Izin Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner)	Jenis	-	-	1	105.850	0	-	0	-	0	-	1	99.480	1	99.480	#VALUE!	#VALUE!			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dokumen Naskah Akademik / Raperda / Perda / Perwal terkait Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Dokumen	-	-	1	105.850	0	-	0	-	0	0	1	99.480	1	99.480	#VALUE!	#VALUE!	100%	94%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			204		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Jumlah sampel Produk asal Hewan yang Aman dikonsumsi	%	80	200.000	80	161.700	0	18.724	0	35.568	0	45.987	80	66.211	80	166.491	100%	83%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah sampel produk hewan yang diperiksa	Sampel	200	200.000	200	161.700	30	18.724	50	35.568	60	45.987	80	66.211	220	166.491	110%	83%	110%	103%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	05			ROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	70	185.000	70	171.200	0	-	0	53.420	0	28.541	0	75.263	0	157.224	0%	85%	0%	92%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 · 0 1		Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Kabupaten/Kot a	Luas lahan aman bencana pertanian	Ha/Tahu n	200	185.000	1.750	171.200	0	-	0	53.420	0	28.541	0	75.263	0	157.224	0%	85%	0%	92%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				0 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Lahan yang Aman dari Gangguan OPT dengan Penerapan Budidaya Ramah Lingkungan	Hektar	10	185.000	10	171.200	0	0	0	53.420	0	28.541	0	75.263	0	157.224	0%	85%	0%	92%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2 7	0 7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	%	20	160.878	15	131.363	0	15.817	0	37.963	0	22.045	15	60.248	15	136.073	75%	85%	100%	104%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2 · 0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian Terlatih	Orang	200	160.878	135	131.363	0	15.817	0	37.963	0	22.045	135	60.248	135	136.073	68%	85%	100%	104%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				0 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dokumen Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani dan Gapoktan	Dokumen	1	160.878	1	131.363	0	15.817	0	37.963	0	22.045	1	60.248	1	136.073	100%	85%	100%	104%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	3 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																					
3	3 0	0 2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	%	100	167.200	100	388.870	0	5.871	0	40.345	0	55.664	144	276.679	144	378.559	144%	226%	144%	97%	Dinas Perdagangan
			2 · 0 1		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase Ijin yang diterbitkan	%	100	167.200	100	388.870	0	5.871	0	40.345	0	55.664	144	276.679	144	378.559	144%	226%	144%	97%	Dinas Perdagangan
				0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Rekomendasi Perijinan Yang Dikeluarkan	Surat	75	167.200	75	388.870	0	5.871	0	40.345	55	55.664	86	276.679	86	378.559	115%	226%	115%	97%	Dinas Perdagangan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																					
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar sesuai standar	%	5,88			0		0		0		0			0						
						Prosentase Pasar yang Dikelola Sarana Distribusinya	%		6.415.335	100	8.242.966		763.346		1.418.788		1.851.741	100	2.475.213	100	6.509.088	0%	101%			Dinas Perdagangan
			201		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar sesuai standar	Pasar	1			0		1		1				1							
					Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	Pasar		1.940.500	17	3.832.795		49.805		330.116		779.015	17	2.475.213	17	3.634.150	100%	187%			Dinas Perdagangan	
				01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Direvitalisasi	Pasar	3	110.000	3	2.676.471	0	-	0	47.990	3	557.768	0	1.977.054	3	2.582.812	100%	2348%	100%	97%	Dinas Perdagangan
				02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Pasar	17	1.830.500	17	1.156.324	0	49.805	0	282.126	17	221.247	17	498.159	34	1.051.337	200%	57%	200%	91%	Dinas Perdagangan
			202		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah peningkatan omset pasar rakyat	Milyar	3,2	4.474.835	3,20	4.410.171	0	713.541	0	1.088.672	0	1.072.726	3,1		3,1	2.874.939	97%	64%			Dinas Perdagangan
					Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pedagang pasar dengan pendapatan diatas UMK perbulan	Orang	500	1.045.885		982.521	0	16.110	0	91.182	331	257.202	0	510.338	331	874.832	66%	84%			Dinas Perdagangan
					Jumlah Pelaksanaan Promosi Pasar	Kegiatan		2							2											
				02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah orang yang melaksanakan pengelolaan pasar	Orang	118	3.428.950	118	3.427.651	0	697.431	87	997.490	32	815.524	0	815.111	119	3.325.555	101%	97%	101%	97%	Dinas Perdagangan
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Bahan Pokok dengan Harga Stabil	%	100			0		0		0		0		0							
						Persentase Pelaksanaan Pengawasan Bahan Pokok Dan Barang Penting			137.800	100	77.967		4.770		7.589		20.200	100	41.908		74.466	0%	54%			Dinas Perdagangan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 0 2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	%	100	137.800	100	77.967	0	4.770	0	7.589		20.200	100	41.908	100	74.466	100%	54%			Dinas Perdagangan
				0 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan	Kali	3	87.800	3	77.967	0	4.770	0	7.589	2	20.200	1	41.908	3	74.466	100%	85%			Dinas Perdagangan
				0 3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Hasil Tembakau Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak Dilekati Pita Cukai	Kali	1	50.000	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%			Dinas Perdagangan
3	3 0	0 6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTPP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	100	260.457	100	342.050	0	25.612	0	44.092	0	44.718	117	213.109	117	327.531	117%	126%	117%	96%	Dinas Perdagangan
			2 0 1		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	Bulan	12	260.457	12	342.050	0	25.612	0	44.092	0	44.718	12	213.109	12	327.531	100%	126%	100%	96%	Dinas Perdagangan
				0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya (UTPP) Yang Sudah Di Tera Atau Tera Ulang	UTTP	700 0	237.457	7000	328.900	0	25.612	0	44.092	0	44.718	8186	200.918	8186	315.340	117%	133%	117%	96%	Dinas Perdagangan
				0 2	Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan Produk dalam kemasan yang telah diawasi	Lokasi	9	23.000	9	13.150	0	-	0	-	0	-	9	12.191	9	12.191	100%	53%			Dinas Perdagangan
3	3 0	0 7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	Produk	15	708.000	15	379.623	0	-	0	14.751	0	15.120	15	340.692	15	370.563	100%	52%	100%	98%	Dinas Perdagangan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 · 0 1		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kali	4	708.000	4	379.623	0	-	0	14.751	0	15.120	4	340.692	4	370.563	100%	52%	100%	98%	Dinas Perdagangan
				0 1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya promosi produk perdagangan	Kali	4	548.000	4	224.153	0	-	0	14.751	0	-	4	200.692	4	215.443	100%	39%	100%	96%	Dinas Perdagangan
				0 3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen Informasi Perdagangan	Dokumen	1	160.000	2	155.470	0	-	0	-	0	15.120	2	140.000	2	155.120	200%	97%			Dinas Perdagangan
3	3 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																					
3	3 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	%	100	650.151	100	563.351	0	-	0	91.030	0	43.502	100	353.760	100	488.292	100%	75%	100%	87%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			2 · 0 1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perindustrian	Dokumen	2	650.151	2	563.351	0	-	0	91.030	0	43.502	2	353.760	2	488.292	100%	75%	100%	87%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				0 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	tersusunnya dokumen rencana induk pembangunan industri dokumen induk perindustrian	Dokumen	2	250.000	2	250.000	0	-	0	-	0	-	2	248.285	2	248.285	100%	99%	100%	99%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				0 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi HKI	IKM	29	60.000	20	73.200	0	-	20	19.445	0	-	20	36.497	20	55.942	69%	93%	100%	76%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				0 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Fasilitasi pengujian TAR dan Nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dabn penerapan Good manufacturing	Kali	4	100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
						Practies bagi Industri hasil tembakau																					
				05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Usaha Mikro	IKM	80	240.151	80	240.151	0	-	50	71.585	30	43.502	80	68.978	80	184.065	100%	77%	100%	77%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	%	12,8	506.000	12,80	407.054		21.302	0	38.210	0	-	12,83	293.318	12,83	352.830	100%	70%	100%	87%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
			201		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyebarluasan informasi produk IKM	Kali	5	506.000	3	407.054		21.302	1	38.210	0	-	3	293.318	4	352.830		80%	70%	133%	87%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
				02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Publikasi Produk IKM berbasis SIINas	Kali	5	506.000	3	407.054		21.302	1	38.210	0	-	2	293.318	3	352.830	60%	70%	100%	87%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																						
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase Pendaftar Transmigrasi yang Terfasilitasi	%	3	32.694	3	13.500	0	-	3	12.800	0	-	0	-	3	12.800	100%	39%	100%	95%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			201		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan sosialisasi penataan persebaran	Orang	100	32.694	50	13.500	0	-	30	12.800	0	-	0	-	30	12.800	30%	39%	60%	95%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
				05	Penyuluhan Transmigrasi	jumlah sosialisasi ketranmigrasian	Kegiatan	1	32.694	1	13.500	0	-	1	12.800	0	-	0	-	1	12.800	100%	39%	100%	95%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan, Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) Murni		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) Murni		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) PAK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		5		6		7		10		11		8=6+7		9=8/5 x 100%		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																					
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	80,08			0		0		0		0		0							
						Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%		12.502.438	100	-	-	506.406	-	1.471.986	100	2.634.504	100	4.691.174	0%	38%	100%	52%	Bagian Pemerintahan		
			201		Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase laporan administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	100	1.816.403	100	1.260.718	0	33.100	100	214.455	100	211.240	100	787.982	100	1.246.778	100%	69%		Bagian Pemerintahan	
				01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan	Kali	10	1.476.403	10	978.458	0	21.850	8	94.549	0	176.608	2	664.629	10	957.635	100%	65%	100%	98%	Bagian Pemerintahan
				02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen rupa bumi	Dokumen	1	50.000	1	49.050	0	0	1	38.967	0	8.750	0	-	1	47.717	100%	95%	100%	97%	Bagian Pemerintahan
				03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen	5	290.000	5	233.210	0	11.250	4	80.940	0	25.882	1	123.353	5	241.425	100%	83%	100%	104%	Bagian Pemerintahan
			202		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	8.989.315	100	6.849.064	0	20.178	0	-	0	1.132.465	100	1.382.585	100	2.535.228	100%	28%	100%	37%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
				01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	jumlah fasilitasi bina mental spiritual	Kegiatan	15	8.989.315	15	6.849.064	2	20.178	0	-	4	1.132.465	9	1.382.585	15	2.535.228	100%	28%	100%	37%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
			203		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	%	100	1.251.720	100	658.490	0	-	0	197.414	0	92.486	100	298.858	100	588.757	100%	47%	100%	89%	Bagian Hukum
				01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah fasilitasi penyusunan produk hukum	Perda / Raperda	33	419.360	33	253.004	0	-	10	78.093	8	61.683	15	107.000	33	246.776	100%	59%	100%	98%	Bagian Hukum

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	Kegiatan	3	633.286	3	207.994	0	-	1	-	1	19.882	1	129.538	3	149.420	100%	24%	100%	72%	Bagian Hukum
			03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah	Jenis	3	199.074	3	197.492	0	-	2	119.321	4	10.920	0	62.319	6	192.560	200%	97%	200%	98%	Bagian Hukum
			204	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Prosentase kerjasama yang difasilitasi	%	100	445.000	100	263.853	0	25.000	0	94.537	0	35.795	100	165.079	100	320.411	100%	72%			Bagian Pemerintahan
			01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	Kali	5	445.000	5	263.853	0	25.000	7	94.537	5	35.795	7	165.079	19	320.411	380%	72%	380%	121%	Bagian Pemerintahan
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks	80,98	2.348.233		1.265.520	0	29.861	0	114.178	0	173.784		730.077	0	1.047.900	0%	45%			
			201	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan sesuai Target	%	100	1.233.734	100	483.734	0	1.200	0	-	0	46.654	100	236.424	100	284.278	100%	23%	100%	59%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
			02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Kegiatan	3	1.080.000	3	330.000	0	1.200	0	-	0	39.654	3	143.772	3	184.626	100%	17%	100%	56%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
			05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Kegiatan	2	153.734	2	153.734	0	-	0	-	0	7.000	2	92.652	2	99.652	100%	65%	100%	65%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
			202	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya > 79% dari target	%	100	430.533	100	389.404	0	5.500	31,73	41.912	83	11.131	100	321.034	100	379.577	100%	88%	100%	97%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
			01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	Dokumen	2	289.630	2	299.080	0	-	0	-	0	0	2	286.080	2	286.080	100%	99%	100%	96%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
			03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pembangunan yang terealisasi sesuai target	Dokumen	12	140.903	12	90.324	1	5.500	6	41.912	2	11.131	5	34.953	14	93.496	117%	66%	117%	104%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 0 3		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang & Jasa > 79% dari target	%	100	574.966	100	392.382	0	23.161	0	72.266	0	105.183	100	144.653	100	345.263	100%	60%	100%	88%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
				0 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah personel PD yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai jadwal dan ketentuan perundang - undangan	Dokumen	130	221.022	120	166.388	2	5.054	34	44.009	40	49.018	28	15.187	104	113.268	80%	51%	87%	68%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
				0 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai target	Paket	120	353.944	120	225.994	0	18.107	10	28.257	35	56.165	70	129.466	115	231.995	96%	66%	96%	103%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
			2 0 4		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				109.000			0	-		-	0	10.816		27.966	0	38.782	#DIV/0!	36%	#DIV/0!	#DIV/0!	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
				0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Presentase kegiatan yang telah dilaksanakan	%	100	109.000	100	140.000	0	-	0	-	10	10.816	100	27.966	100	38.782	100%	36%	100%	28%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
4		0 2			SEKRETARIA T DPRD																					
4	0 2	0 2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA AN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Perundang-undangan	IKM	79	14.349.374	79	12.826.552	0	1.536.010	0	3.639.436	0	2.063.049	79	4.079.218	79	11.317.712	100%	79%	100%	88%	Sekretariat DPRD
			2 0 1		Pembentuk an Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase tercapainya fungsi pembentukan perda DPRD	%	100	4.776.242	100	5.979.807	31,67	818.376	0	1.651.925	0	532.341	100	2.270.853	100	5.273.495	100%	110%	100%	88%	Sekretariat DPRD
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah raperda yang dibahas	Raperda	10	3.276.242	10	5.034.899	3	622.195	0	1.260.041	2	361.448	5	2.248.753	10	4.492.437	100%	137%	100%	89%	Sekretariat DPRD
					Penyelengga raan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dikaji	Dokumen	3	1.500.000	3	944.908	1	196.181	1	391.885	1	170.893	0	22.100	3	781.058	100%	52%	100%	83%	Sekretariat DPRD
			2 0		Pembahasa n Kebijakan Anggaran	persentase tercapainya fungsi Penganggaran DPRD	%	100	2.312.838	100	899.228	0	2.400	0	18.706	0	340.963	100	330.708	100	692.776	100%	30%	100%	77%	Sekretariat DPRD

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			0 2																							
				0 3	Pembahasan APBD	Pembahasan Program Pemerintah Daerah sesuai jadwal/tepat waktu	Dokumen	4	2.312.838	4	899.228	0	2.400	0	18.706	2	340.963	2	330.708	4	692.776	100%	30%	100%	77%	Sekretariat DPRD
			2 0 3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	1.081.096	100	366.095	35	148.128	0	260.324	15	4.500	100	51.976	100	464.928	100%	43%	100%	127%	Sekretariat DPRD
					Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen notulensi hasil rapat pembahasan tindak lanjut atas LHP-BPK	Dokumen	5	732.438	5	114.821	1	58.884	4	73.248	0	0	0	32.680	5	164.812	100%	23%	100%	144%	Sekretariat DPRD
					Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pembahasan LKJP dan LPJ yang tepat waktu	Dokumen	2	348.658	2	251.274	1	89.244	1	187.076	0	4.500	0	19.296	2	300.116	100%	86%	100%	119%	Sekretariat DPRD
			2 0 4		Peningkatan Kapasitas DPRD	persentase peningkatan SDM anggota DPRD	%	100	5.314.779	100	4.542.827	30,56	567.106	0	1.451.058	0	921.673	100	1.145.085	100	4.084.922	100%	77%	100%	90%	Sekretariat DPRD
					Bimbingan Teknis DPRD	Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	orang	150	3.266.086	150	2.241.786	34	338.032	56	936.027	29	181.730	31	630.585	150	2.086.373	100%	64%	100%	93%	Sekretariat DPRD
					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Acara	50	1.853.820	50	1.498.205	22	164.516	12	515.032	5	509.130	11	393.436	50	1.582.113	100%	85%	100%	106%	Sekretariat DPRD
					Penyusunan Program Kerja DPRD	tersusunnya program kerja DPRD tepat waktu	Dokumen	4	194.873	4	802.836	1	64.559	1	-	1	230.813	1	121.065	4	416.437	100%	214%	100%	52%	Sekretariat DPRD
			2 0 5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	persentase jumlah pokir yang masuk RKPD	%	70	864.420	70	1.038.595	0	-	0	257.424	0	263.571	70	280.596	70	801.591	100%	93%	100%	77%	Sekretariat DPRD
				0 3	Pelaksanaan Reses	jumlah pelaksanaan kegiatan reses	Kali	3	864.420	3	1.038.595	0	0	1	257.424	1	263.571	1	280.596	3	801.591	100%	93%	100%	77%	Sekretariat DPRD

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia- tan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) Murni		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) Murni		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) PAK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		5		6		7		10		11		8=6+7		9=8/5 x 100%		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
5	01				PERENCANAAN																					
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	%	100	1.906.694	100	1.579.333	0	342.466	0	272.091	0	676.304	100	244.022	100	1.534.883	100%	80%	100%	97%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			201		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan / pendanaan tingkat kota	%	100	923.665	100	1.283.300	0	315.070	0	205.879	0	599.561	100	130.537	100	1.251.048	100%	135%	100%	97%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah pelaksanaan Konsultasi Publik Perangkat Daerah	Kali	1	188.200	1	29.517	1	29.517	0	-	0	-	0	-	1	29.517	100%	16%	100%	100%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kali	1	150.465	1	125.359	1	51.784	1	73.472	0	-	0	-	1	125.256	100%	83%	100%	100%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a	jumlah pelaksanaan musrenbang kota	Kali	1	210.000	2	402.644	2	205.461	0	16.720	0	124.482	0	53.780	2	400.442	200%	191%	100%	99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi tingkat Kota	%	100	375.000	100	725.780	0	28.308	0	115.687	100	475.079	0	76.757	100	695.832	100%	186%	100%	96%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Kabupaten/Kota																					
			2 0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	terpenuhinya dokumen analisis data dan informasi pemerintah daerah	%	100	87.000	100	79.917	0	17.100	0	17.844	0	36.512	100	5.835	100	77.292	100%	89%	100%	97%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				0 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	persentase terpenuhinya kebutuhan data dan informasi	%	100	87.000	100	79.917	0	17.100	0	17.844	75	36.512	100	5.835	175	77.292	175%	89%	175%	97%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			2 0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaporkannya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara tepat waktu	%	100	896.029	100	216.117	0	10.296	0	48.367	0	40.230	100	107.650	100	206.544	100%	23%	100%	96%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				0 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen berita acara verifikasi pengendalian antara BAPPEDA dengan OPD	Dokumen	2	168.745	2	74.085	0	7.000	1	19.928	0	16.500	1	26.435	2	69.863	100%	41%	100%	94%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				0 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi OPD	Dokumen	4	727.284	4	142.032	1	3.296	1	28.439	1	23.730	1	81.215	4	136.681	100%	19%	100%	96%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0 1	0 3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	%	100	1.183.814	100	1.452.140	0	20.184	0	146.698	0	141.526	100	1.112.281	100	1.420.689	100%	120%	100%	98%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			2 0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan	%	100	543.474	100	496.033	0	9.727	0	61.161	0	63.373	100	345.547	100	479.807	100%	88%	100%	97%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
						pembangunan manusia																				
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase terpenuhinya koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	%	100	107.474	100	70.953	0	-	0	16.446	0	20.807	100	27.955	100	65.208	100%	61%	100%	92%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan tingkat Kota	Dokumen	14	25.000	14	104.080	0	-	0	-	7	0	7	96.879	14	96.879	100%	388%	100%	93%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	269.850	1	189.000	0	3.793	0	42.381	0	42.566	1	97.006	1	185.745	100%	69%	100%	98%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (notulensi/BA verifikasi) bidang pembangunan manusia	Dokumen	1	141.150	1	132.000	0	5.934	0	2.334	0	0	1	123.707	1	131.975	100%	93%	100%	100%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			202		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	%	100	149.600	100	526.011	0	3.287	0	20.723	0	10.476	100	481.500	100	515.985	100%	345%	100%	98%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen hasil koordinasi / notulen koordinasi bidang pemerintahan	Dokumen	1	47.237	1	316.887	0	3.287	0	4.085	0	0	1	305.088	1	312.459	100%	661%	100%	99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					(RPJPD, RPJMD dan RKPD)																					
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (Notulensi / BA Verifikasi) bidang perekonomian	Dokumen	1	102.363	1	209.124	0	-	0	16.639	0	10.476	1	176.411	1	203.526	100%	199%	100%	97%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	100	490.740	100	430.097	0	7.171	0	64.814	0	67.677	100	285.235	100	424.896	100%	87%	100%	99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil sinkronisasi bidang infrastruktur	Dokumen	1	113.865	1	148.900	0	-	1	43.543	0	43.458	0	60.592	1	147.594	100%	130%	100%	99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	Dokumen	1	101.875	1	106.196	0	400	1	13.207	0	15.176	0	76.399	1	105.182	100%	103%	100%	99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil sinkronisasi bidang kewilayahan	Dokumen	1	155.000	1	150.000	0	6.771	0	3.112	0	2.751	1	136.559	1	149.192	100%	96%	100%	99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	Dokumen	1	120.000	1	25.000	0	-	0	4.951	0	6.293	1	11.684	1	22.928	100%	19%	100%	92%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Daerah Bidang Kewilayahan																					
5	0	2			KEUANGAN																					
5	0	2	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja yang Memenuhi Target	%	100	3.659.921	100	60.340.673	0	423.652	0	1.822.095	0	3.910.438	100	12.779.034	100	18.935.219	100%	517%	100%	31%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	%	100	1.142.592	100	906.618	0	21.200	0	104.592	0	354.145	100	323.391	100	803.328	100%	70%	100%	89%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen yang Disusun	Dokumen	2	100.000	2	103.730	0	-	0	-	2	64.304	0	8.000	2	72.304	100%	72%	100%	70%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	2	75.000	2	78.730	0	-	0	-	2	43.976	0	31.752	2	75.728	100%	101%	100%	96%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA yang terfasilitasi	Dokumen	34	35.840	34	35.840	0	-	34	14.684	34	16.877	0	-	34	31.561	100%	88%	100%	88%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				0 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA yang terfasilitasi	Dokumen	34	32.689	34	36.418	0	-	0	-	0	0	34	26.939	34	26.939	100%	82%	100%	74%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	2	250.000	2	261.189	0	-	0	12.948	0	45.800	2	128.391	2	187.139	100%	75%	100%	72%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (RenjaRKAPK)	Dokumen	2	204.414	2	215.603	0	-	0	-	1	138.570	1	102.439	2	241.009	100%	118%	100%	112%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	2	444.649	2	175.108	0	21.200	0	76.959	2	44.619	0	25.870	2	168.648	100%	38%	100%	96%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			202		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan	%	100	250.000	100	250.000	0	-	0	52.462	0	92.149	100	78.357	100	222.969	100%	89%	100%	89%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah dokumen administrasi kasda	Dokumen	35	130.000	35	130.000	0	-	15	37.847	15	58.038	5	44.850	35	140.735	100%	108%	100%	108%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah dokumen pengeluaran kas	Dokumen	3	120.000	3	120.000	0	-	3	14.616	3	34.111	3	33.507	3	82.234	100%	69%	100%	69%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			203		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintaan laporan keuangan yang terfasilitasi	%	100	1.267.329	100	1.296.629	0	167.552	0	554.465	0	423.521	0	429.697	100	1.575.234	100%	124%	100%	121%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	jumlah produk hukum	Produk Hukum	2	280.000	2	280.000	0	34.102	0	199.015	2	59.237	0	14.250	2	306.604	100%	110%	100%	110%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah laporan semesteran dan prognosis	Buku	2	40.000	2	40.000	0	-	0	-	0	0	2	31.437	2	31.437	100%	79%	100%	79%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen	Dokumen	3	100.000	3	100.000	0	12.950	0	12.950	3	0	0	48.866	3	74.766	100%	75%	100%	75%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	jumlah sosialisasi dan pendampingan OPD	pendampingan	30	847.329	30	876.629	0	120.500	0	342.500	30	364.283	30	335.143	30	1.162.427	100%	137%	100%	133%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
					waban Pemerintah Kabupaten / Kota																						
				2 . 0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Bantuan Tidak Terduga	%	100	1.000.000	100	57.887.427	0	234.900	0	1.110.575	0	3.040.623	100	11.947.589	100	16.333.688	100%	1633%	100%	28%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Presentase Jumlah bantuan tidak terduga	%	100	1.000.000	100	57.887.427	30	234.900	30	1.110.575	30	3.040.623	10	11.947.589	100	16.333.688	100%	1633%	100%	28%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	0 2	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pengelolaan Aset terhadap PAD	%	100	5.244.980	100	3.748.942	0	1.186	0	93.283	0	171.725	100	2.772.827	100	3.039.020	100%	58%	100%	81%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				2 . 0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	5.244.980	100	3.748.942	0	1.186	0	93.283	0	171.725	100	2.772.827	100	3.039.020	100%	58%	100%	81%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				0 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen barang milik daerah	Dokumen	5	250.000	5	157.740	0	-	0	53.128	5	24.412	0	3.041	5	80.580	100%	32%	100%	51%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				0 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	jumlah aset daerah yang diasuransikan	jenis aset	2	4.944.980	2	3.541.202	0	1.186	0	40.155	2	132.856	0	2751169,66 4	2	2.925.367	100%	59%	100%	83%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jenis dan tipe barang yang sudah terstandart	buku	18	50.000	18	50.000	0	-	0	-	9	14.456	9	18616,888	18	33.073	100%	66%	100%	66%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	0 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	%	1,5	980.855	1,5	616.778	0	-	0	16.226	0	212.438	1,5	260.821	1,5	489.484	100%	50%	100%	79%	Badan Pendapatan Daerah	
				2 . 0 1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	1,5	980.855	1,5	616.778	0	-	0	16.226	0	212.438	1,5	260.821	1,5	489.484	100%	50%	100%	79%	Badan Pendapatan Daerah	
				0 1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	60.000	2	4.400	0	-	0	-	0	0	2	4.379	2	4.379	100%	7%	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah	
				0 3	Penyuluhan dan Penyebarluasa n Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah	Dokumen	1	550.000	1	187.723	0	-	0	1.638	1	160.544	0	20.368	1	182.550	100%	33%	100%	97%	Badan Pendapatan Daerah	
				0 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Dokumen	1	36.200	1	16.500	0	-	0	-	0	0	1	12.169	1	12.169	100%	34%	100%	74%	Badan Pendapatan Daerah	
				0 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Paiaak Daerah	Jumlah Dokumen pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data paiaak daerah	Dokumen	1	150.000	1	250.000	0	-	0	-	0	0	1	150.000	1	150.000	100%	100%	100%	60%	Badan Pendapatan Daerah	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen penetapan surat ketetapan dan keputusan pajak daerah	Dokumen	1	46.800	1	42.300	0	-	0	-	0	0	1	28.781	1	28.781	100%	61%	100%	68%	Badan Pendapatan Daerah
				09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen kegiatan pelayanan dan konsultasi wajib pajak	Dokumen	1	10.750	1	10.750	0	-	0	-	0	0	1	9.273	1	9.273	100%	86%	100%	86%	Badan Pendapatan Daerah
				10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP pelaporan pemungutan pajak daerah	WP	150	81.865	150	63.905	0	-	0	14.588	0	48.743	150	-	150	63.330	100%	77%	100%	99%	Badan Pendapatan Daerah
				11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	1	11.040	1	10.600	0	-	0	-	0	3.151	1	5.252	1	8.402	100%	76%	100%	79%	Badan Pendapatan Daerah
				13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen pemeriksaan pajak daerah	Dokumen	1	34.200	1	30.600	0	-	0	-	0	0	1	30.600	1	30.600	100%	89%	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	03				KEPEGAWAIAN																					
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	IKM Perangkat Daerah	Score	75	2.407.707	88		0	32.564	0	185.254	0	221.490	88		88	439.308	117%	18%			
			201		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Formasi	Formasi	400	1.516.529		100	12,64	4.910	0	114.201	0	125.496		12,64	244.608	3%	16%				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
					Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Data	%												18								
				04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	jumlah formasi	Formasi	400	1.104.802	114	747.254	0	-	0	1.188	0	45.858	0	585.513	0	632.559	0%	57%	0%	85%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan	PNS	225	53.940		100	29	410	174	23.100	0	1.820		203	49.730	90%	92%	30%	92%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
					Persentase Realisasi Pemberhentian	%				0	0	0		30												
				11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang di kelola	Dokumen	3036	357.787		90	0	4.500	1793	89.913	264	77.819		2057	521.867	68%	146%	29%	84%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
					Persentase Data Kepegawaian yang Valid	%				0	0	26	26													
			202		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	%	100	363.828		100	14,6	24.770	0	54.090	0	74.723		14,6	440.063	15%	121%				
					Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	%												85								

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Penempatan PNS	PNS	209	309.888	1076	427.200	1	3.770	935	54.090	0	74.373	910	258.770	1846	391.003	883%	126%	172%	92%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
				02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen	Dokumen	2142	53.940	1723	53.940	502	21.000	304	-	0	350	28	27.710	834	49.060	39%	91%	48%	91%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
			203		Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase Realisasi Pengembangan Kompetensi ASN	%	100	457.850	80	58.350	0	2.884	0	16.095	0	15.697	40	22.548	40	57.224	40%	12%				
				01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peserta	Peserta	60	119.600	60	58.350	0	2.884	230	16.095	0	15.697	40	22548	270	57.224	450%	48%	450%	98%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
				02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Peserta	PNS	60	338.250	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
			204		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Terelesaiannya permasalahan kepegawaian	%	100	69.500			0,06	-	0	867	0	5.574			0,06	6.441	0%	9%				
			4			Persentase Pelanggaran Disiplin	%			80										38							
				07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen	Dokumen	591	69.500	591	69.500	77	-	3	867	8	5.574			88	63.162	15%	91%	17%	91%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
							Persentase Hukum Disiplin yang Disesuaikan	%				75								13							
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																						
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi	%	100	5.244.390		2.648.819	35	140.870	0	1.190.986	0	632.376		649.250	35	2.613.482	35%	50%				
						Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%			10								4									
			201		Pengembangan Kompetensi Teknis	Tercukupinya Usulan Diklat Teknis Aparatur	%	100	1.441.015		961.422	35	128.779	0	280.147	0	240.719		361.244	35	1.010.889	35%	70%				
						Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi Teknis	%			80										38							

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
					0 3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta	PNS	144	1.441.015	144	961.422	51	128.779	5	280.147	48	240.719	55	361.244	159	1.010.889	110%	70%	110%	105%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				2 0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase tercukukupinya Usulan Diklat Manajerial dan Fungsional Aparatur	%	90	3.803.375		1.687.397	0	12.091	0	910.839	0	391.657		288.006	0	1.602.593	0%	42%			
						Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi Manajerial		%			100																
					0 7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta	PNS	380	3.803.375	380	1.687.397	0	12.091	282	910.839	0	391.657	0	288.006	282	1.602.593	74%	42%	74%	95%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	0 5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																					
5	0 5	0 2				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100	668.481	100	727.490	0	14.114	0	224.064	0	53.674	100	356.377	100	648.230	100%	97%	100%	89%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 . 0 1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	%	100	489.571	100	546.635	0	14.114	0	194.021	0	31.833	100	262.055	100	502.023	100%	103%	100%	92%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				0 2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen	Dokumen	1	261.204	1	361.204	0	9.803	0	184.432	0	488	1	132.080	1	326.803	100%	125%	100%	90%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				1 2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen	Dokumen	1	228.367	1	185.431	0	4.311	0	9.589	1	31.345	0	129.975	1	175.220	100%	77%	100%	94%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			2 . 0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersusunnya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	%	100	178.910	100	180.854	0	-	0	30.043	0	21.841	100	94.322	100	146.206	100%	82%	100%	81%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				0 1	Penelitian, Pengembangan , dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen	Dokumen	1	178.910	1	180.854	0	-	0	30.043	1	21.841	0	94.322	1	146.206	100%	82%	100%	81%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) Murni		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) Murni		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) PAK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
								I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		5		6		7		10		11		8=6+7		9=8/5 x 100%		9=8/5 x 100%		10								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)									
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
6	0	1			INSPEKTORAT DAERAH																									
		0	2		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	%	25	1.161.539	25	848.332	0	50.438	0	233.065	0	159.900	25	386.592	25	829.995	100%	71%	100%	98%					
			2	0	1	Penyelenggara an Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Dokumen	1	829.441	1	534.197	0	50.438	0	157.692	0	84.597	1	224.929	1	517.656	100%	62%	100%	97%				
				0	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Dokumen	3	50.080	3	21.438	0	-	1	1.800	1	1.664	1	10.055	3	13.519	100%	27%	100%	63%	Inspektorat			
				0	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Dokumen	15	578.147	15	361.708	0	-	29	77.271	0	78.558	0	191.824	29	347.653	193%	60%	193%	96%	Inspektorat			
				0	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen hasil reviu	Dokumen	4	15.794	4	15.780	0	4.158	3	5.457	1	-	0	-	4	9.615	100%	61%	100%	61%	Inspektorat			
				0	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen hasil reviu	Dokumen	3	165.190	3	114.452	0	44.570	2	71.234	0	4.375	1	13.639	3	133.818	100%	81%	100%	117%	Inspektorat			
				0	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil movev	Dokumen	4	20.230	4	20.820	0	1.710	1	1.930	0	-	3	9.411	4	13.051	100%	65%	100%	63%	Inspektorat			
			2	0	2	Penyelenggara an Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Dokumen	1	332.098	1	314.135	0	-	0	75.373	0	75.303	1	161.663	1	312.339	100%	94%	100%	99%				
				0	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Dokumen	1	332.098	1	314.135	0	-	12	75.373	0	75.303	0	161.663	1	312.339	100%	94%	100%	99%	Inspektorat			
6	0	1	0	3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGA	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	%	100	1.359.127	100	1.019.621	0	155.763	0	447.500	0	180.128	100	318.376	100	1.101.767	100%	81%	100%	108%				

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					N DAN ASISTENSI																					
				2 0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Dokumen	6	6.600	6	3.696	0	423	0	423	0	880	6	1.404	6	3.130	100%	47%	100%	85%	
				0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisduur pengawasan yang disusun	Dokumen	2	6.600	2	3.696	0	423	2	423	0	880	0	1.404	2	3.130	100%	47%	100%	85%	Inspektorat
				2 0 2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Dokumen	6	1.352.527	6	1.015.925	0	155.340	0	447.077	0	179.248	6	316.972	6	1.098.637	100%	81%	100%	108%	
				0 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen	Dokumen	4	422.463	4	425.529	0	-	2	133.987	1	79.748	1	197.683	4	411.417	100%	97%	100%	97%	Inspektorat
				0 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen	Dokumen	2	777.664	2	590.396	0	155.340	1	313.090	2	99.500	0	119.289	3	687.219	150%	88%	150%	116%	Inspektorat
				0 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah dokumen	Dokumen	2	152.400	-	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0%	0%			Inspektorat

7. UNSUR KEWILAYAHAN

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan, 	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) Murni		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) Murni		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) PAK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		5		6		7		10		11		8=6+7		9=8/5 x 100%		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)		

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
7	01				KECAMATAN MANGUHARJO																					
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	93	5.839.326	94	7.396.857	0	746.487	0	2.197.210	0	1.509.189		3.274.255	0	7.727.142	0%	132%	0	104%	Kecamatan Manguharjo
			202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	5.777.121	100	7.334.652	0	744.957	0	2.182.960	0	1.495.041	100	3.244.987	100	7.667.944	100%	133%	100%	105%	Kecamatan Manguharjo
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Manguharjo)	persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan manguharjo sesuai ketentuan	%	100	676.435	100	833.000	13,0	90.106	35	293.589	25	193.535	27	305.053	100	882.283	100%	130%	100%	106%	Kecamatan Manguharjo
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sogaten)	Persentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Sogaten	%	100	606.059	100	769.629	14,0	89.285	30	239.030	34	155.117	22	270.435	100	753.866	100%	124%	100%	98%	Kecamatan Manguharjo
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Patihan	%	100	564.647	100	691.569	14,0	65.442	31	226.772	39	151.500	16	250.704	100	694.418	100%	123%	100%	100%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					(Kelurahan Patihan)																					
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngegong)	Persentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Ngegong	%	100	537.925	100	701.615	13,0	68.157	31	225.675	32	148.855	24	251.717	100	694.404	100%	129%	100%	99%	Kecamatan Manguharjo
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Winongo)	Persentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Winongo	%	100	679.919	100	815.603	12,0	85.794	14	300.076	26	170.501	48	242.706,46	100	799.077	100%	118%	100%	98%	Kecamatan Manguharjo
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Madiun Lor)	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan madiun lor sesuai ketentuan	%	100	647.663	100	806.877	13,0	74.716	31	239.934	31	203.910	25	291.907,66	100	810.467	100%	125%	100%	100%	Kecamatan Manguharjo
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pangongangan)	Persentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Pangongangan	%	100	556.910	100	765.308	13,9	77.239	33	261.183	27	161.856	26	259.992	99,98	760.270	100%	137%	100%	99%	Kecamatan Manguharjo
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Nambangan Lor)	Persentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Lor	%	100	792.635	100	1.132.411	12,0	106.705	32	319.467	25	215.323	31	553.831	100	1.195.327	100%	151%	100%	106%	Kecamatan Manguharjo
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Nambangan Kidul)	Persentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Kidul	%	100	714.926	100	818.640	15,0	87.513	34	77.234	29	94.445	22	818.640	100	1.077.832	100%	151%	100%	132%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	62.205	100	62.205	0	1.530	0	14.251	0	14.148	100	29.268	100	59.197	100%	95%	100%		Kecamatan Manguharjo
				0 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Prosentase hasil koordinasi pemeliharaan Saprass pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	62.205	100	62.205	2,5	1.530	22,91	14.251	25	14.148	100	29.268	100,0	59.197	100%	95%	100%	95%	Kecamatan Manguharjo
7	0 2	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Usulan	18	3.468.892		4.743.072	0	202.961	0	1.074.698	0	889.078		2.044.746	0	4.211.484	0%	121%			Kecamatan Manguharjo
			2 0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	3.468.892	100	4.743.072	0	202.961	0	1.074.698	0	889.078	100	2.044.746	100	4.211.484	100%	121%			Kecamatan Manguharjo
				0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase Usulan Musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam Musrenbang Kota	%	10	318.892	64	318.892	63,7	202.961	0	-	0	8.582	0	18.860,69	63,65	230.404	637%	72%	100%	72%	Kecamatan Manguharjo
				0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Manguharjo)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Manguharjo	Paket	3	250.000	3	650.000	0	-	0	76.400	2	114.600	1	453.593	3	644.593	100%	258%	100%	99%	Kecamatan Manguharjo
				0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sogaten)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Sogaten	Paket	3	250.000	3	594.680	0	-	0	90.017	1	64.150	2	244.680	3	398.847	100%	160%	100%	67%	Kecamatan Manguharjo
				0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patihan)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Patihan	Paket	3	150.000	3	420.000	0	-	0	46.490	3	298.447	0	70.000	3	414.937	100%	277%	100%	99%	Kecamatan Manguharjo
				0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngegong)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Ngegong	Paket	3	150.000	3	371.800	0	-	0	-	3	192.705	0	173.800	3	366.505	100%	244%	100%	99%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			0 2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Winongo)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Winongo	Paket	3	250.000	3	425.700	0	-	3	256.280	0	78.327	0	75.149	3	409.756	100%	164%	100%	96%	Kecamatan Manguharjo
			0 2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Madiun Lor)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Madiun Lor	Paket	3	150.000	3	467.000	0	-	3	339.904	0	0	0	119.493	3	459.396	100%	306%	100%	98%	Kecamatan Manguharjo
			0 2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pangongangan)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Pangongangan	Paket	3	110.000	3	370.000		-	3	119.798	0	0	0	250.000	3	369.798	100%	336%	100%	100%	Kecamatan Manguharjo
			0 2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Nambangan Lor)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Nambangan Lor	Paket	3	250.000	3	900.000	0	-	0	90.010	3	128.068	0	474.170	3	692.247	100%	277%	100%	77%	Kecamatan Manguharjo
			0 2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Nambangan Kidul)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Nambangan Kidul	Paket	3	250.000	3	225.000	0	-	0	55.800	1	4.200	2	165.000	3	225.000	100%	90%	100%	100%	Kecamatan Manguharjo
			0 3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Manguharjo)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Manguharjo	%	40	100.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Manguharjo
			0 3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sogaten)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Sogaten	%	35	100.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Manguharjo
			0 3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patihan)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Patihan	%	30	200.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Manguharjo
			0 3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngegong)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Ngegong	%	30	200.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Winongo)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Winongo	%	40	100.000	-	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Manguharjo
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Madiun Lor)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Madiun Lor	%	40	200.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Manguharjo
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pangongangan)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Pangongangan	%	35	240.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Manguharjo
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Nambangan Lor)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Nambangan Lor	%	30	100.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Manguharjo
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Nambangan Kidul)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Nambangan Kidul	%	45	100.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Manguharjo
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	263.986	100	427.877	0	4.800	0	131.449	0	106.186	100	142.836	100	385.271	100%	146%			Kecamatan Manguharjo
				201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	129.180	100	109.875	0	-	0	37.539	0	28.191	100	38.034	100	103.764	100%	80%			Kecamatan Manguharjo
				02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	129.180	100	109.875	0	-	29	37.539	45	28.191	26	38.034,08	100	103.764	100%	80%	100%	94%	Kecamatan Manguharjo
				202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	134.805		318.002	0	4.800	0	93.910	0	77.995	100	104.802	100	281.507	100%	209%			Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					dan Peraturan Kepala Daerah																					
				01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	134.805	100	318.002	3,00	4.800	20	93.910	45	77.995	100	104.802	168	281.507	168%	209%	168%	89%	Kecamatan Manguharjo
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	%	100	181.926	100	181.926	0	3.400	0	39.778	0	39.254	100	88.481	100	170.913	100%	94%			Kecamatan Manguharjo
			201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan kepala daerah yang ditindaklanjuti	%	100	181.926	100	181.926	0	3.400	0	39.778	0	39.254	100	88.481	100	170.913	100%	94%			Kecamatan Manguharjo
				01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	%	100	111.926	100	111.926	0	-	29,46	32.978	24	16.576	46,5	49.222	99,96	98.776	100%	88%	100%	88%	Kecamatan Manguharjo
				05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase penanganan Konflik yang terselesaikan	%	100	55.000	100	55.000	6,18	3.400	12,36	6.800	32	22.678	45,5	24.778	96,04	57.656	96%	105%	96%	105%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				0 7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah buku profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan kelurahan	Dokumen	2	15.000	2	15.000	0	-	0	-	0	0	2	14.482	2	14.482	100%	97%	100%	97%	Kecamatan Manguharjo
7	0 1				KECAMATAN KARTOHARJO																					
7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	5.552.902		7.742.937	0	649.119	0	1.309.933	0	1.725.842		2.781.019	0	6.465.913	0%	116%	#DIV/0!	84%	Kecamatan Kartoharjo
			2 0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Tersesainya Rekomendasi di Kelurahan Sesuai Ketentuan	%	100	5.490.697	100	7.675.929	0	645.819	0	1.309.933	78	1.711.613	100	2.747.804	100	6.415.168	100%	117%	100%	84%	Kecamatan Kartoharjo
				0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	-	100	266.491	0		0	-	0	0	100	27.397	100	27.397	100%	#DIV/0!	100%	10%	Kecamatan Kartoharjo
				0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Oro - Oro Ombo)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	622.625	100	833.228	0	80.726	0	163.167	75	188.508	100	311.685	100	744.085	100%	120%	100%	89%	Kecamatan Kartoharjo
				0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sukosari)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	515.221	100	753.868	0	66.780	0	129.368	75	160.956	100	276.405	100	633.509	100%	123%	100%	84%	Kecamatan Kartoharjo
				0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	688.895	100	985.591	0	69.868	0	187.607	75	219.518	100	370.149	100	847.141	100%	123%	100%	86%	Kecamatan Kartoharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
					(Kelurahan Klegen)																						
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejomulyo)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	675.825	100	791.140	0	77.579	0	129.882	75	157.977	100	280.990	100	646.428	100%	96%	100%	82%	Kecamatan Kartoharjo	
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pilangbango)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	572.565	100	742.148	0	84.320	0	96.049	75	206.058	100	254.230	100	640.656	100%	112%	100%	86%	Kecamatan Kartoharjo	
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangrejo)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	566.797	100	746.505	0	67.031	0	164.195	75	194.091	100	279.350	100	704.667	100%	124%	100%	94%	Kecamatan Kartoharjo	
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kanigoro)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	692.849	100	874.497	0	75.023	32	174.230	75	195.073	100	303.344	100	747.669	100%	108%	100%	85%	Kecamatan Kartoharjo	
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kartoharjo)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	584.775	100	897.944	0	69.686	33	138.876	75	190.994	100	340.277	100	739.833	100%	127%	100%	82%	Kecamatan Kartoharjo	
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kelun)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	571.147	100	784.516	0	54.806	31	126.559	75	198.438	100	303.978	100	683.782	100%	120%	100%	87%	Kecamatan Kartoharjo	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 · 0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Hasil Koordinasi Pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	62.205	100	67.008	0	3.300	0	-	100	14.229	0	33.215	100	50.745	100%	82%			Kecamatan Kartoharjo
				0 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum	Pertemuan	3	62.205	3	67.008	0	3.300	0	0	3	14.229	0	33.215	3	50.745	100%	82%			Kecamatan Kartoharjo
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	%	18	3.432.558			0	254.807	0	1.359.712	0	299.165			0	1.913.684	0%	56%			Kecamatan Kartoharjo
			2 · 0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	3.432.558			0	254.807	0	1.359.712	0	299.165			0	1.913.684	0%	56%			Kecamatan Kartoharjo
				0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	%	100	282.558	100	266.491	0	204.817	0	-	0	14.601	100	27.397	100	246.815	100%	87%			Kecamatan Kartoharjo
				0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	-	-	-	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!			Kecamatan Kartoharjo
				0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Oro - Oro Ombo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	219.200	100	465.829	0	-	70	200.000	30	20.100	0	118.185	100	338.285	100%	154%	100%	73%	Kecamatan Kartoharjo
				0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukosari)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	219.200	100	347.550	0	-	85	181.083	15	68.249	0	-	100	249.332	100%	114%	100%	72%	Kecamatan Kartoharjo
				0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Klegen)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	219.200	100	407.000	0	-	45	111.807	18	58.903	37	56.800	100	227.509	100%	104%	100%	56%	Kecamatan Kartoharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	217.200	100	363.595	0	-	80	170.502	9	33.874	11	56.744	100	261.120	100%	120%	100%	72%	Kecamatan Kartoharjo
			0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pilangbango)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	219.120	100	542.667	0	49.990	50	82.775	8	12.100	42	187.388	100	332.252	100%	152%	100%	61%	Kecamatan Kartoharjo
			0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tawangrejo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	147.200	100	327.295	0	-	77	149.913	13	9.387	10	45.538	100	204.837	100%	139%	100%	63%	Kecamatan Kartoharjo
			0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kanigoro)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	217.200	100	445.750	0	-	87	244.500	8	56.750	5	95.750	100	397.000	100%	183%	100%	89%	Kecamatan Kartoharjo
			0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kartoharjo)	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	100	219.200	100	337.600	0	-	54	139.933	23	10.200	23	130.300	100	280.433	100%	128%	100%	83%	Kecamatan Kartoharjo
			0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kelun)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	219.200	100	524.430	0	-	33	79.200	12	15.000	55	203.000	100	297.200	100%	136%	100%	57%	Kecamatan Kartoharjo
			0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	-			0		0	-	0	-			0	-	0%	#DIV/0!			Kecamatan Kartoharjo
			0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Oro - Oro Ombo)	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	130.800			0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%			Kecamatan Kartoharjo
			0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sukosari)	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	130.800			0		0	-	0	-			0	-	0%	0%			Kecamatan Kartoharjo
			0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Klegen)	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	130.800			0		0	-	0	-			0	-	0%	0%			Kecamatan Kartoharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	132.800			0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%			Kecamatan Kartoharjo
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pilangbango)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	130.880			0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%			Kecamatan Kartoharjo
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangrejo)	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	202.800			0		0	-	0	-			0	-	0%	0%			Kecamatan Kartoharjo
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kanigoro)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	132.800			0		0	-	0	-			0	-	0%	0%			Kecamatan Kartoharjo
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kartoharjo)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	130.800			0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%			Kecamatan Kartoharjo
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kelun)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	130.800			0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%			Kecamatan Kartoharjo
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase hasil pengkoordinasian di kecamatan	%	100	188.126			0	3.440	0	-	0	29.127			0	32.567	0%	17%			Kecamatan Kartoharjo
				201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	79.405	100	75.357	0	3.440	0	-	0	19.392	100	33.998	100	56.830	100%	72%			Kecamatan Kartoharjo
				02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi / pertemuan	Pertemuan	6	79.405	6	75.357	0	3.440		-	2	19.392	4	33.998	6	56.830	100%	72%	100%	75%	Kecamatan Kartoharjo
				202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	108.720	100	96.120	0	-	0	-	0	9.735	100	32.602	100	42.337	100%				Kecamatan Kartoharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi / pertemuan	Pertemuan	9	108.720	9	96.120	0	-	0	-	2	9.735	5	32.602	7	42.337	78%	39%	78%	44%	Kecamatan Kartoharjo
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	172.079	100	136.144	0	12.272	0	-	0	30.935	100	57.507	100	100.714	100%	59%			Kecamatan Kartoharjo
			201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan kepala daerah yang ditindaklanjuti	%	100	172.079	100	136.144	0	12.272	0	-	0	30.935	100	57.507	100	100.714	100%	59%			Kecamatan Kartoharjo
				01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah sosialisasi	Kegiatan	1	60.767	1	24.831	0	-	0	-	1	6.175	0	-	1	6.175	100%	10%	100%	25%	Kecamatan Kartoharjo
				05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah koordinasi	Kegiatan	6	71.481	6	71.481	0	12.272	0	-	2	24.761	4	18.505	6	55.538	100%	78%	100%	78%	Kecamatan Kartoharjo
				07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Dokumen	3	39.831	3	39.831	0	-	0	-	0	0	3	39.002	3	39.002	100%	98%	100%	98%	Kecamatan Kartoharjo

8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia- tan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) Murni		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) Murni		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) PAK	
								I		II		III		IV							
								5		5		6		7		10		11		8=6+7	
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
8	01				KESATUAN BANGSA DAN NEGARA																				
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai Nasionalisme	%	100	389.299	100	265.408	0	-	50	130.720	100	223.336	100%	57%	100%	84%	100	223.336	#DIV/0!	#DIV/0!
				201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	Orang	1100	389.299	150	265.408	0	-	50	130.720	150	223.336	14%	57%	100%	84%	150	223.336	#DIV/0!	#DIV/0!
				04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	Orang	1100	389.299	150	265.408	0	-	50	130.720	150	223.336	14%	57%	100%	84%	150	223.336	#DIV/0!	#DIV/0!
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	%	100	871.058	100	871.058	0	-		88.225	22	851.145	22%	98%	22%	98%	22	851.145	#DIV/0!	#DIV/0!

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
					BUDAYA POLITIK																				
				2 0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik	%	80	871.058	80	871.058	0	-	88.225	22	851.145	28%	98%	28%	98%	22	851.145	#DIV/0!	#DIV/0!	
				0 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta pengelolaan keuangan Parpol	Orang	22	725.062	110	725.062	0	-	22	20.352	44	720.414	200%	99%	40%	99%	44	720.414	#DIV/0!	#DIV/0!
				0 4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah peserta pembinaan	Orang	100	145.996	1000	145.996	0	-	75	67.873	150	130.731	150%	90%	15%	90%	150	130.731	#DIV/0!	#DIV/0!

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																				
8	01	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Orkemas berbadan hukum	%	45	272.985	45	272.985	0	13.370	50	25.062	50	231.629	111%	85%	111%	85%	50	231.629	#DIV/0!	#DIV/0!
			201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orkemas yg aktif	Ormas	100	272.985	500	272.985	0	13.370	0	25.062	100	231.629	100%	85%	20%	85%	100	231.629	#DIV/0!	#DIV/0!
				03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta fasilitasi	Orang	100	272.985	500	272.985	0	13.370	0	25.062	100	231.629	100%	85%	20%	85%	100	231.629	#DIV/0!	#DIV/0!
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan	%	100	484.692	100	536.634	0	29.190	100	251.952	100	508.255	100%	105%	100%	95%	100	508.255	#DIV/0!	#DIV/0!

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
			2 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Koordinasi	Koordinasi	3	484.692	3	536.634	0	29.190	3	251.952	3	508.255	100%	105%	100%	95%	3	508.255	#DIV/0!	#DIV/0!
				0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	100	95.000	500	88.383	0	1.100	116	74.617	170	82.681	170%	87%	34%	94%	170	82.681	#DIV/0!	#DIV/0!
				0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	Orang	200	389.692	1000	448.250	0	28.090	200	177.335	600	425.574	300%	109%	60%	95%	600	425.574	#DIV/0!	#DIV/0!
8	0 1	0 6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Konflik horisontal di dalam masyarakat	Konflik	0	1.453.198	0		0	54.113			0	835.395	100%	57%			0	835.395	#DIV/0!	#DIV/0!
			2 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah koordinasi	Kegiatan	3				0				0						0	835.395	#DIV/0!	#DIV/0!
						Jumlah Konflik	Konflik		1.453.198	0			54.113	0			835.395	0%	57%						

1		2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah konflik	Konflik	0		-		0			0			0						0	1.400.303	#DIV/0!	#DIV/0!
	0 4		Jumlah Peserta Rakor	Orang	-		1.453.198		5275	1.454.340		0	54.113		323	564.907					813	1.400.303	100%	96%

RUTIN																							
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia- tan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) Murni		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) Murni		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) PAK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		5		6		7		10		11		8=6+7		9=8/5 x 100%		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
X	X X	X X			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Nilai SAKIP	Skor	A																		
			2 . 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
				0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok.Perencanaan	Dokumen	8	40.000	8	39.666		-	0	11.991	4	15.511	4	8.644	8	36.146	100%	90%	100%	91%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	20	137.000	20	125.500	0	23.030	3	30.790	6	16.990	11	51.501	20	122.310	100%	89%	100%	97%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/RKA/PK)	Dokumen	6	71.032	6	57.492	0	-	2	4.524	2	2.677	2	48.599	6	55.800	100%	79%	100%	97%	Sekretariat DPRD
				0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	65.000	7	64.996	1	987	2	15.385	3	17.428	1	29.825	7	63.624	100%	98%	100%	98%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	19.928	6	19.332	0	-	2	-	3	0	1	19.050	6	19.050	100%	96%	100%	99%	Kecamatan Kartoharjo
				0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan	%	100	-	100	57.067	0	-	0	9.567	0	0	100	25.527	100	35.094	100%	#DIV/0 !	100%	61%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
						penyusunan dokumen RKA-SKPD																				
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	Dokumen	6	7.653.026	6	6.178.926	0	0	0	18.566	2.683.549	6	266.543	6	2.968.657	100%	39%	100%	48%	Dinas Pendidikan	
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Dokumen	11	218.278		203.788		33.299	0	43.703	38.592		75.559	0	191.153	0%	88%	#DIV/0!	94%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	20	45.000	20	45.000	0	0	0	6.593	8	25.541	12	11.562	20	43.696	100%	97%	100%	97%	Dinas Perumahan Rakyat dan KP
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	Dokumen	12	84.850	12	84.850	2	-	6	63.005	8	10.821	12	10.821	12	84.646	100%	100%	100%	100%	SatPol PP dan PK
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	Dokumen	12	20.000	12	20.000	0	-	2	-	4	4.293	6	4.811	12	9.104	100%	46%	100%	46%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	20	159.278	20	123.104	2	28.450	6	12.719	6	13.000	6	67.850	20	122.019	100%	77%	100%	99%	Dinas Sosial, PPA
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	40.000	6	40.000	0	-	0	1.900	1	5.949	5	28.796	6	36.645	100%	92%	100%	92%	Dinas Tenaga Kerja, KUM
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	Dokumen	6	81.000	6	125.056	0	31.528	5	33.441	0	9.348	1	49.782	6	124.100	100%	153%	100%	99%	Dinas Lingkungan Hidup

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	62.811	100	61.767	0	-	0	12.271	0	15.339	100	30.709	100	58.319	100%	93%	100%	94%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	Dokumen	6	102.089	6	132.017	1	6.170	2	27.210	1	30.589	2	64.005	6	127.975	100%	125%	100%	97%	Dinas Perhubungan
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	20	115.000	20	115.000	0	0	4	28.183	4	28.391	12	56.782	20	113.356	100%	99%	100%	99%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	44.000	6	44.000	0	13.742	2	14.206	2	11.925	2	3.636	6	43.509	100%	99%	100%	99%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Dokumen	6	40.000	6	29.350	0	21.072	2	7.350		-	2	-	6	28.422	100%	71%	100%	97%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	10	30.000	10	30.000	0	-	2	-	0	0	8	29.695	10	29.695	100%	99%	100%	99%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (REnja/RKA/PK)	Dokumen	20	90.000	20	79.150	5	16.238	7	58.933	2	0	6	-	20	75.172	100%	84%	100%	95%	Dinas Perdagangan
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian Perangkat Daerah	Dokumen	21	7.417	21	7.417	0	-	0	-	8	-	13	7.176	21	7.176	100%	97%	100%	97%	Bagian Pemerintahan
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Dokumen	21	38.923	21	38.923	4	-	7	17.305	3	0	7	17.409	21	34.715	100%	89%	100%	89%	Bagian Hukum

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian Perangkat daerah	Dokumen	21	33.252	21	23.706	3	-	7	23.252	4	-	7	-	21	23.252	100%	70%	100%	98%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Dokumen	21	20.000	21	20.000	3	-	7	-	4	500	7	16.416	21	16.916	100%	85%	100%	85%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Dokumen	21	145.008	21	145.008	3	-	7	-	4	-	7	92.419	21	92.419	100%	64%	100%	64%	Bagian Umum
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Dokumen	12	10.000	12	10.319	2	470	4	508	4	1.217	2	8.123	12	10.318	100%	103%	100%	100%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (RenjaRKAPK)	Dokumen	8	21.032	8	21.032	0	-	4	11.189	3	3.730	1	-	8	14.918	100%	71%	100%	71%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	20	10.800	20	5.000	3	-	4	603	3	524	4	2.129	14	3.256	70%	30%	70%	65%	Badan Pendapatan Daerah
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen	Dokumen	5	77.163	5	61.250	0	-	0	14.941	0	14.912	5	30.838	5	60.691	100%	79%	100%	99%	Badan Kepegawaian dan PSDM
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan / pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	10	107.375	10	107.375	2	-	3	23.038	2	25.704	3	57.069	10	105.811	100%	99%	100%	99%	Inspektorat

1					2	3	4	5		6		7		8		9	10		11		12		13		14	
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	30.700	6	30.700	0	-	0	30.700	0	6	-	6	30.700	100%	100%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perengkat daerah	Dokumen	20	59.784	20	59.784	4	1.527	6	11.818	4	14.245	6	28.609	20	56.199	100%	94%		Kecamatan Manguharjo	
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Dokumen	12	19.928	12	19.928	2	-	4	13.770	2	4.898	4	1.037	12	19.704	100%	99%	100%	99%	Kecamatan Kartoharjo
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	20	56.968	20	58.968	4	-	6	12.748	4	13.446	6	29.250	20	55.444	100%	97%		Kecamatan Taman	
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah	%	100	-	100	261.549	0	-	0	33.002	0	13.110	100	161.052	100	207.165	100%	#DIV/0!	100%	79%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Dokumen	2	10.000	2	9.972	0	-	0	-	0	-	2	9.827	2	9.827	100%	98%	100%	99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Dokumen	2	19.928	2	18.743	0	-	0	558	2	8.905	0	9.114	2	18.577	100%	93%	100%	99%	Kecamatan Kartoharjo
			2022		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	186.278.181	100	186.058.358	0	22.916.710	50	57.242.138		36.235.873	50	47.411.139	100	163.805.860	100%	88%	100%	88%	Dinas Pendidikan
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	29.691.891	100	33.581.005	0	5.386.248	50	10.318.126	70	8.708.165	100	6.787.523	100	31.200.061	100%	105%	100%	93%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	20.962.016			0	2.632.880				5.907.911			0	8.540.791	0%	41%		RSUD	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	6.200.000	100	6.398.341	0	1.022.039	50	1.914.392	70	1.117.748	100	1.073.872	100	5.128.050	100%	83%	100%	80%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	5.000.000	100	4.955.194	100	766.361	100	1.441.791	100	858.284	100	824.516	100	3.890.952	100%	78%	100%	79%	Dinas Perumahan Rakyat dan KP
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	6.031.369	100	5.419.000	0	1.007.599	50	1.871.857	70	1.077.896	100	1.068.543	100	5.025.896	100%	83%	100%	93%	SatPol PP dan PK
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	1.287.360	100	1.092.850	23,25	194.531	50	380.830	75	231.380	100	233.629	100	1.040.369	100%	81%	100%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	4.456.930	100	4.185.907	0	703.344	50	1.456.930	0	823.514	100	841.424	100	3.825.211	100%	86%	100%	91%	Dinas Sosial, PPA
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	prosentase pemenuhan kebutuhan gaji asn perangkat daerah	%	100	2.971.504	100	3.569.135	0	607.853	50	1.296.397	0	771.126	50	722.046	100	3.397.423	100%	114%	100%	95%	Dinas Tenaga Kerja, KUM
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan (%)	%	100	3.863.594	100	3.459.330	0	630.055	50	1.215.138	0	738.020	100	716.208	100	3.299.421	100%	85%	100%	95%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	11.122.200	100	9.083.900	0	1.865.486	50	3.288.452	0	1.803.083	100	1.782.529	150	8.739.549	150%	79%	150%	96%	Dinas Lingkungan Hidup
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	4.332.490	100	3.034.000	100	509.566	100	1.054.176	100	640.899	100	640.329	100	2.844.970	100%	66%	100%	94%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	6.686.758	100	5.825.861	0	1.071.808	50	1.817.470	0	1.097.761	100	1.078.006	100	5.065.046	100%	76%	100%	87%	Dinas Perhubungan
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	3.733.400	100	3.759.400	100	667.691	100	1.331.869	100	820.937	100	835.868	100	3.656.365	100%	98%	100%	97%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	4.202.387	100	3.395.387	0	567.483	50	1.136.271	0	117.056	100	651.861	100	2.472.671	100%	59%	100%	73%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	3.184.463	100	3.004.081	0	526.479	50	1.081.007	0	614.523	100	644.777	100	2.866.787	100%	90%	100%	95%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	Bulan	12	2.845.196	12	2.655.961	0	454.222	6	938.525	0	559.399	6	549.917	12	2.502.063	100%	88%	100%	94%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	7.667.000	100	6.854.097	100	1.331.611	100	2.484.804	100	1.431.837	100	1.427.456	100	6.675.708	100%	87%	100%	97%	Dinas Perdagangan
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	499.158	100	499.158		52.466	50	157.563		102.131	50	116.814	100	428.974	100%	86%	100%	86%	Bagian Pemerintahan
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	485.568	100	396.510	0	59.806	50	149.888	80	78.858	100	85.076	100	373.628	100%	77%	100%	94%	Bagian Organisasi
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	1.114.730	100	807.300	0	59.328	50	235.359	0	165.411	100	282.621	100	742.719	100%	67%	100%	92%	Bagian Hukum
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	1.209.235	100	935.368	0	82.998	50	370.281	0	218.822	100	175.746	100	847.847	100%	70%	100%	91%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	712.296	100	505.500	0	75.580	50	190.178	0	112.824	100	114.046	100	492.627	100%	69%	100%	97%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	10.227.985	100	9.985.035	0	1.687.351	50	3.207.646	0	1.825.950	100	1.831.734	100	8.552.681	100%	84%	100%	86%	Bagian Umum
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	2.100.000	100	2.202.118	0	402.258	50	818.871	0	497.511	100	487.146	100	2.205.785	100%	105%	100%	100%	Sekretariat DPRD
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	5.895.000	100	4.950.875	0	783.963	50	1.814.182	0	1.085.530	100	1.045.862	100	4.729.537	100%	80%	100%	96%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	presentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	32.990.765	100	35.367.128	13	3.424.278	50	5.470.561	77	4.185.514	100	5.510.243	100	18.590.597	100%	56%	100%	53%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	8.429.382	100	8.739.846	25	632.799	25	1.238.694	25	1.899.154	25	2.842.575	100	6.613.222	100%	78%	100%	76%	Badan Pendapatan Daerah
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	4.100.000	41	4.063.600	41	734.059	41	1.473.745	41	895.908	41	901.990	41	4.005.702	100%	98%	100%	99%	Badan Kepegawaian dan PSDM
				0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan	%	100	5.828.297	100	6.539.318	0	1.049.317	50	2.493.809	0	1.495.640	50	1.460.102	100	6.498.868	100%	112%	100%	99%	Inspektorat

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
						kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah																				
			0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	2.887.145	100	2.887.145	100	511.733	100	976.433	100	584.833	100	601.763	100	2.674.762	100%	93%	100%	93%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	9.477.113	100	9.852.964	25	1.694.760	50	3.292.841	75	1.959.522	100	1.993.256	100	8.940.378	100%	94%			Kecamatan Manguharjo
			0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	8.815.513	100	8.300.839	20	1.578.487	50	2.935.058	75	1.731.101	100	1.734.544	100	7.979.190	100%	91%	100%	96%	Kecamatan Kartoharjo
			0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	9.225.822	100	9.388.385	0	1.731.363	40	2.227.795	85	2.077.696	100	1.993.392	100	8.030.246	100%	87%			Kecamatan Taman
			0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen	13	61.000	13	61.000	2	-	4	2.069	3	35.171	4	23.448	13	60.688	100%	99%	100%	99%	Dinas Perumahan Rakyat dan KP
			0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	13	132.310	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-							Dinas Perdagangan
			0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen	13	129.927	13	121.705	2	5.569	4	28.632	4	28.432	3	54.789	13	117.423	100%	90%	100%	96%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dukumen laporan keuangan	Dokumen	13	2.000	13	2.000		-	5	450	4	492	4	970	13	1.912	100%	96%			Kecamatan Manguharjo
			0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen	13	2.000	13	2.000	2	600	4	326	3	236	4	839	13	2.000	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kartoharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			2 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
				0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	%	100	105.000	100	105.000	0	-	0	102.890	0	850	100	350	100	104.090	100%	99%	100%	99%	Dinas Perumahan Rakyat dan KP
				0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	%	100	477.000	100	388.000	0	-	0	-	100	353.556	0	1.806	100	355.362	100%	74%	100%	92%	SatPol PP dan PK
				0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya (penghitungan = realisasi/target kebutuhan)	%	100	182.000	100	209.284	0	11.707	35	55.479	0	112.668	100	27.641	135	207.495	135%	114%	135%	99%	Dinas Lingkungan Hidup
				0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	%	100	220.000	100	220.000	0	-	10	4.985	0	199.024	100	14.915	100	218.924	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
				0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	%	100	11.057.592	100	2.581.931	0	5.185	0	9.862	0	-	0	299.269	100	314.316	100%	3%	100%	12%	Bagian Umum
				0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	%	100	94.047	100	29.700	0	-	0	1.770	100	23.513	0	1.880	100	27.163	100%	29%	100%	91%	Sekretariat DPRD
				0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Persentase pemenuhan pakaian khusus hari hari tertentu (penghitungan = realisasi / target kebutuhan)	%	100	88.000	100	88.000	0	-	0	-	100	69.972	0	-	100	69.972	100%	80%	100%	80%	Badan Pendapatan Daerah
				0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase peningkatan kapasitas pegawai	%	100	6.000	100	160.850	0	-	0	39.425	0	433	100	118.994	100	158.852	100%	2648%	100%	99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase peserta yang paham	%	100	10.000	100	10.000	0	1.000	0	2.312	0	2.535	100	3.827	100	9.673	100%	97%	100%	97%	Dinas Perumahan Rakyat dan KP
				1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase peserta yang paham	%	100	23.462	100	23.462	0	-	0	4.875	0	6.600	100	9.279	100	20.754	100%	88%	100%	88%	Dinas Sosial, PPA

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			1 0		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	%	100	-	100	140.760	0	-	0	-	0	0	100	130.100	100	130.100	100%	#DIV/0!	100%	92%	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1 0		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	%	100	100.400	100	100.400	0	-	50	46.029	0	7.000	100	46.562	100	99.591	100%	99%	100%	99%	Dinas Perhubungan
			1 0		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah media Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	media	2	1.076.826	2	1.076.826	0	-	2	128.585	2	0	2	654.535	2	783.120	100%	73%	100%	73%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			1 0		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang paham	%	100	5.000	100	1.986	0	-	0	-	0	0	100	1.377	100	1.377	100%	28%	100%	69%	Sekretariat DPRD
			1 0		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang paham	%	100	3.000	100	2.924	0	-	0	-	0	0	100	2.687	100	2.687	100%	90%	100%	92%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			1 0		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase peserta yang paham	%	100	3.000	100	3.000	25	-	0	-	0	0	100	3.000	100	3.000	100%	100%	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah
			1 0		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	%	100	7.200	100	7.200	25	1.609	0	1.000	0	725	100	3.803	100	7.137	100%	99%			Kecamatan Manguharjo
			1 0		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang paham	%	100	6.500	100	3.879	20	-	40	1.240	70	2.625	100	-	100	3.865	100%	59%	100%	100%	Kecamatan Kartoharjo
			1 0		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	%	100	4.600	100	7.412		2.626	0	-	0	4.786	100	-	100	7.412	100%	161%			Kecamatan Taman
			1 1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peningkatan kapasitas pegawai	%	-	-	0	-	0	-	0	-		0			0	-	#VALUE!	#DIV/0!			Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
			0 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	%	100	250.000	100	250.000	0	4.614	0	10.033		15.481	100	219.324	100	249.452	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
			0 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	%	100	10.896.723	100	6.122.093	0	463.719	10	350.894	50	812.761	100	1.475.917	100	3.103.291	100%	28%	100%	51%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	%	100	1.973.541	100	3.993.282	0	299.623	33	448.717	65	772.332	100	1.281.304	100	2.801.976	100%	142%	100%	70%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	prosentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	708.756	100	818.900	0	32.225	0	238.226	0	178.287	100	360.900	100	809.639	100%	114%	100%	99%	Dinas Tenaga Kerja, KUM
				0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	1.019.450	100	1.077.265	0	84.568	0	237.240	0	251.239	100	413.650	100	986.698	100%	97%	100%	92%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkap an kantor yang representatif	%	100	934.822	100	1.023.146	0	160.699	40	182.210		204.047	100	407.788	100	954.745	100%	102%	100%	93%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	465.912	100	669.467	0	30.994	50	169.783	0	126.522	50	340.402	100	667.702	100%	143%	100%	100%	Inspektorat
				0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	524.116	100	681.498	0	53.072	40	130.465	20	136.493	40	301.493	100	621.522	100%	119%	100%	91%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkap an kantor yang representatif	%	100	887.883	100	1.639.787	20	108.694	40	197.272	85	629.448	100	438.785	100	1.374.198	100%	155%			Kecamatan Taman
				0 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	%	100	276.705	100	276.705	0	10.603	40	79.187	70	12.312	100	157.537	100	259.639	100%	94%	100%	94%	Dinas Pendidikan
				0 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	%	100	300.000	100	463.220	0	30.965	0	67.133	0	66.822	100	238.543	100	403.463	100%	134%	100%	87%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				0 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Kali	60	200.000	60	222.044	0	-	23	72.084	12	24.654	25	105.869	60	202.607	100%	101%	100%	91%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				0 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	183.880	100	183.880		10.711	0	44.254	0	6.427	100	122.387	100	183.779	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan KP

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	%	100	250.000	100	150.000	0	24.204	0	44.916	0	7.155	100	73.082	100	149.355	100%	60%	100%	100%	SatPol PP dan PK
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	50.000	100	65.000	18,45	20.171	40	18.106	78	11.543	100	15.169	100	64.988	100%	130%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	225.000	100	225.000	0	3.455	0	20.450	0	34.191	100	161.490	100	219.586	100%	98%	100%	98%	Dinas Sosial, PPA
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	212.780	100	152.650	0	2.610	25	43.067	65	29.883	100	76.790	100	152.349	100%	72%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja, KUM
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	%	100	186.644	100	135.243	0	6.220	30	36.820	60	40.217	100	50.737	100	133.994	100%	72%	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	%	100	175.000	100	175.000	0	8.066	20	37.432	0	2.586	100	96.200	120	144.285	120%	82%	120%	82%	Dinas Lingkungan Hidup
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	%	100	85.649	100	160.100	0	6.287	0	55.527	0	16.122	100	79.532	100	157.468	100%	184%	100%	98%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	200.000	100	200.000	0	11.808	35	68.101	0	28.011	100	91.971	100	199.890	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	135.172	100	91.447	0	3.877	25	22.590	65	8.348	100	55.906	100	90.721	100%	67%	100%	99%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	%	100	200.000	100	130.000	0	18.000	23	10.520	76	25.517	100	73.977	100	128.014	100%	64%	100%	98%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	299.700	100	149.492	0	9.570	31	58.701	76	11.997	100	68.812	100	149.079	100%	50%	100%	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	60	66.000	60	66.000	0	3.509	10	3.163	20	7.496	30	51.019	60	65.187	100%	99%	100%	99%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	350.000	100	350.000		3.668	0	34.593	0	24.729	100	270.830	100	333.820	100%	95%	100%	95%	Dinas Perdagangan
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	100.000	100	100.000	0	9.770	0	17.495		23.116	100	46.591	100	96.972	100%	97%	100%	97%	Bagian Pemerintahan
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	167.326	100	73.354	0	-	10	9.095	78	19.810	100	44.199	100	73.103	100%	44%	100%	100%	Bagian Organisasi
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase kebutuhan perjalanan dinas	%	100	130.000	100	72.192	10	10.018	15	9.156	70	14.707	100	35.300	100	69.181	100%	53%	100%	96%	Bagian Hukum
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	95.799	100	95.799	0	5.713	20	15.498	60	15.571	100	59.011	100	95.792	100%	100%	100%	100%	Bagian pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	180.000	100	180.000	0	1.975	0	6.362	0	7.988	100	158.655	100	174.980	100%	97%	100%	97%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	2.000.000	100	745.911	0	61.598	23	230.570	78	33.542	100	419.377	100	745.087	100%	37%	100%	100%	Bagian Umum
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas/operasional ASN (penghitungan=realisasi/target perjalanan dinas)	%	100	1.195.646	100	715.563	10	72.801	25	222.830	75	150.156	100	269.322	100	715.108	100%	60%	100%	100%	Sekretariat DPRD

[illegible]

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	%	100	210.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			Dinas Perumahan Rakyat dan KP
			0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas / operasional	%	100	150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	-	100%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Bagian Umum
			0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas jabatan (penghitungan = realisasi / target kebutuhan)	%	100	85.000	0	-					-								#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat DPRD
			0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan	%			100	524.906	0	-	0	-	0	-	100	408.250	100	408.250	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	78%	Dinas Lingkungan Hidup
			0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	%	100	450.000	100	424.516	0	-	0	-	0	-	100	375.803	100	375.803	100%	84%	100%	89%	Bagian Umum
			0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	%	0	-	100	147.622	0	-	0	-	0	-	100	140.271	100	140.271	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	95%	Bagian Hukum
			0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Layak digunakan	%			100	55.377	0	-	0	-	0	-	100	55.045	100	55.045	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	99%	Bagian Organisasi
			0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin	%			100	113.890	0	-	0	-	0	-	100	112.842	100	112.842	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	99%	Bagian Pemerintahan
			0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Peralatan dan Mesin	%			100	357.267	0	-	0	-	0	-	100	355.283	100	355.283	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	99%	Dinas Perdagangan
			0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	%			100	611.518	0	-	0	-	0	-	100	557.568	100	557.568	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	91%	Dinas Tenaga Kerja, KUM
			0	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase gedung yang representatif	%	100	178.000	100	178.000	0	-	10	11.039	30	0	100	165.477	140	176.516	140%	99%	140%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			0	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang representatif	%	100	991.418	100	336.350	0	-	0	6.715	85	-	100	321.459	100	328.174	100%	33%	100%	98%	Kecamatan Kartoharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	%	100	1.000.000	100	537.906	0	-	0	-	0	-	0	-							Dinas Pendidikan
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	%	100								-										RSUD
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Paket	2	250.000	2	235.387	0	-	1	79.253	0	-	1	20.635	2	99.888	100%	40%	100%	42%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya	%	100	91.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			Dinas Perumahan Rakyat dan KP
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor	%	100	196.000	100	419.727	0	-	0	-	0	0	100	414.839	100	414.839	100%	212%	100%	99%	SatPol PP dan PK
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	47.400	100	53.350	0	-	0	-	0	-	100	51.780	100	51.780	100%	109%	100%	97%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	%	100	168.100	100	406.713	0	-	0	-	0	-	100	385.458	100	385.458	100%	229%	100%	95%	Dinas Sosial, PPA
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	%	100	230.000	100	1.151.098	0	-	0	-	0	434.887	100	645.186	100	1.080.072	100%	470%	100%	94%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan	Unit	10	30.000	10	421.603	0	8.345	0	-	0	189.365	8	219.636	8	417.346	80%	1391%	80%	99%	Dinas Perhubungan
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Gedung Kantor	%	-	-	100	96.567	0	-	0	-	0	0	100	96.220	100	96.220	#VALUE!	#VALUE!	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Gedung Kantor	%	0	0	100	201.550	0	-	0	-	0	-	100	194.604	100	194.604	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	97%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Baru	Paket	1	140.971	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	%	0	-	100	356.250	0	-	0	-	0	-	100	355.602	100	355.602	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	%	0	-	100	9.646	0	-	0	-	0	-	100	9.646	100	9.646	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	Bagian Hukum
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	%	0	-	100	63.000	0	-	0	-	0	-	100	59.775	100	59.775	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	95%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	%	0	-	100	199.856	0	-	0	-	0	-	100	197.084	100	197.084	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	99%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	%	100	758.198	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	-	100%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Bagian Umum
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi	%	100	271.927	100	1.140.525	0	335	0	-	0	5.858	100	1.113.543	100	1.119.736	100%	412%	100%	98%	Sekretariat DPRD
				1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	100.000	100	341.706	0	0	0	-	0	0	100	339.531	100	339.531	100%	340%	100%	99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor (penghitungan = realisasi / target kebutuhan)	%	100	557.520	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Pendapatan Daerah
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Barang	Jenis	11	290.000	11	313.900	0	-	0	-	0	-	11	310.380	11	310.380	100%	107%	100%	99%	Badan Kepegawaian dan PSDM
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah	%	100	75.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase pemenuhan Sarana dan Prasarana kantor yang representatif	Paket	1	50.000	-	-						0									Kecamatan Manguharjo
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan gedung kantor yang representatif	%	100	158.818	100	297.783	0	-	50	24.759	85	116.489	100	149.758	100	291.006	100%	183%	100%	98%	Kecamatan Kartoharjo
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor/Bangunan	Paket	2	-	2	651.828	0	-	0	-	0	-	2	649.156	2	649.156	100%	#DIV/0!			Kecamatan Taman
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan barang penunjang urusan pemerintah kantor (penghitungan = realisasi/target kebutuhan)	%	100	300.000	100	353.101	0	-	0	-	0	-	100	343.468	100	343.468	100%	114%	100%	97%	Dinas Lingkungan Hidup
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan barang penunjang urusan pemerintah kantor	%	0	-	100	192.665	0	-	0	-	0	-	100	184.950	100	184.950	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	96%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Persentase pemenuhan peralatan /	Jenis	10	2.874.720	10	3.166.897	0	320.428	3	806.786	2	714.209	5	1.078.126	10	2.919.548	100%	102%	100%	92%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor yg representatif																				
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yg representatif	%	100	1.346.756	100	1.866.821	0	212.189	50	457.747	65	455.904	100	628.516	100	1.754.355	100%	130%	100%	94%	Dinas Perumahan Rakyat dan KP
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pemenuhan Peralatan / Perlengkapan Kantor Yang Representatif	%	100	2.639.468	100	2.888.015	0	435.147	35	783.976	70	652.524	100	954.276	100	2.825.923	100%	107%	100%	98%	SatPol PP dan PK
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	384.212	100	498.790	28,65	83.895	31	121.894	63	87.290	100	179.636	100	472.715	100%	123%	100%	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	1.191.802	100	1.191.802	0	168.296	50	321.353	0	301.551	100	374.207	100	1.165.407	100%	98%	100%	98%	Dinas Sosial, PPA
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	949.126	100	968.061	0	101.548	29	254.999	64	228.434	100	344.931	100	929.912	100%	98%	100%	96%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	1.300.000	100	2.000.530	0	257.424	50	573.689	0	456.402	100	562.716	100	1.850.231	100%	142%	100%	92%	Dinas Lingkungan Hidup
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	2.336.720	100	2.767.889	0	370.030	50	764.267	0	700.783	100	760.504	100	2.595.585	100%	111%	100%	94%	Dinas Perhubungan
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	%	100	2.315.492	100	2.328.292	0	151.526	25	208.491	65	887.187	100	1.014.281	100	2.261.485	100%	98%	100%	97%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	2.124.650	100	2.048.571	0	324.354	50	570.039	0	512.483	100	352.475	100	1.759.350	100%	83%	100%	86%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bahan penunjang	Paket	1	525.278	1	618.259	0	78.850	0	132.220	0	0	1	226.711	1	437.780	100%	83%	100%	71%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	918.916	100	940.612	0	121.335	40	234.080	64	254.088	100	319.769	100	929.272	100%	101%	100%	99%	Dinas Perdagangan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	244.250	100	244.250	0	30.954	0	0	50	52.355	50	100639,714	100	183.949	100%	75%	100%	75%	Bagian Pemerintahan
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	164.727	100	212.847	10	13.127	25	32.161	45	60.185	20	83.758	100	189.231	100%	115%	100%	89%	Bagian Organisasi
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	233.551	100	305.551	0	25.702	40	44.791	75	71.821	100	150.307	100	292.621	100%	125%	100%	96%	Bagian Hukum
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	288.498	100	287.748	23	32.517	42	75.545	64	65.037	100	111.913	100	285.012	100%	99%	100%	99%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	276.960	100	276.960	0	31.763	20	10.982	60	62.696	100	80.015	100	185.456	100%	67%	100%	67%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	4.950.000	100	4.951.372	12	603.386	32	1.207.673	77	1.091.704	100	1.496.581	100	4.399.345	100%	89%	100%	89%	Bagian Umum
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	2.152.023	100	2.826.181	0	379.022	50	634.498	0	707.737	100	943.455	100	2.664.712	100%	124%	100%	94%	Sekretariat DPRD
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkap an kantor yang representatif	%	100	655.000	100	800.369	0	101.744	50	215.869	0	152.398	100	271.963	150	741.975	150%	113%	150%	93%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	presentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	16.557.925	100	14.973.000	0	2.997.178	50	3.614.687	0	3.108.321	100	3.286.270	100	13.006.455	100%	79%	100%	87%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	523.575	100	456.226	25	69.232	25	68.781	25	100.230	25	145.250	100	383.493	100%	73%	100%	84%	Badan Pendapatan Daerah
			03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	18	698.000	18	876.406	0	91.596	50	208.361	0	204.617	0	333.308	50	837.883	278%	120%	278%	96%	Badan Kepegawaian dan PSDM

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan peralatan /perlengkapan kantor yang representatif	%	100	1.178.764	100	1.163.622	10	164.664	23	259.130	56	238.686	100	348.532	100	1.011.012	100%	86%			Kecamatan Manguharjo
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan /perlengkapan kantor yang representatif	%	100	639.679	100	1.518.777	20	216.052	55	280.399	75	426.582	100	531.775	100	1.454.808	100%	227%	100%	96%	Kecamatan Kartoharjo
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN Perangkat Daerah	%	100				100	255.150				345.400			100	600.550	100%	#DIV/0!			RSUD
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor	%	100	-	100	226.809	0	-	0	90.551	0	36.830	100	98.113	100	225.494	100%	#DIV/0!	100%	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	960.000	0	-					-							#DIV/0!	#DIV/0!		Sekretariat DPRD
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan gaji non ASN perangkat daerah	%	100	300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				#DIV/0!	#DIV/0!		Kecamatan Kartoharjo
				209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	136.100	100	146.100		20.901	20	17.472	60	17.272	100	29.818	100	85.464	100%	63%	100%	58%	Dinas Pendidikan
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	201.098	100	237.662	0	28.259	0	34.742	0	45.721	100	90.660	100	199.382	100%	99%	100%	84%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah kendaraan	Buah	59	200.000	59	361.676	13	61.331	12	23.260	12	36.634	22	170.386	59	291.611	100%	146%	100%	81%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan	%	100	1.560.360	100	1.560.360	0	132.360	0	118.178	0	310.824	100	514.751	100	1.076.113	100%	69%	100%	69%	Dinas Perumahan Rakyat dan KP
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Yang Layak Digunakan	%	100	500.000	100	500.000	0	49.495	0	38.886	100	50.469	100	199.402	100	338.251	100%	68%	100%	68%	SatPol PP dan PK
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas / jabatan yang layak digunakan	%	100	170.634	100	168.923	0	8.665	0	22.373	0	27.708	100	63.002	100	121.747	100%	71%	100%	72%	Dinas Sosial, PPA
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	44.159	100	42.243	0	2.464	0	9.928	0	2.908	100	22.988	100	38.287	100%	87%	100%	91%	Dinas Tenaga Kerja, KUM
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan (%)	%	100	55.500	100	55.000	0	10.429	0	11.397	0	10.675	100	15.336	100	47.837	100%	86%	100%	87%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Kendaraan Dinas Jabatan																					
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	1.250.000	100	1.137.886	0	216.518	0	221.300	251.538	100	362.551	100	1.051.908	100%	84%	100%	92%	Dinas Lingkungan Hidup	
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan yang Layak digunakan	%	100	25.000	100	28.100	0	1.692	0	3.692	0	2.370	100	9.268	100	17.021	100%	68%	100%	61%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional (perhitungan = realisasi/targetkebutuhan)	%	100	650.000	100	673.485	0	53.138	30	74.003	0	133.044	100	269.051	100	529.236	100%	81%	100%	79%	Dinas Perhubungan
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	100.000	100	165.000	0	12.137	30	12.510	60	39.089	100	79.970	100	143.706	100%	144%	100%	87%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	%	100	50.000	100	50.000	0	9.928	52	11.604	0	12.190	100	15.827	152	49.548	152%	99%	152%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	Unit	22	51.552	22	51.552	0	3.959	0	5.958	0	6.041	22	31.398	22	47.356	100%	92%	100%	92%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase kendaraan dinas /operasional yang layak digunakan	%	100	325.000	100	279.021	0	33.823	20	19.549	50	71.282	100	90.718	100	215.371	100%	66%	100%	77%	Dinas Perdagangan
				0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan	%	100	20.000	100	20.000	0	4.705	50	4.470	0	2.340	50	7.069	100	18.584	100%	93%	100%	93%	Bagian Pemerintahan
				0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan yang Layak Digunakan	%	100	18.963	100	20.427	10	2.784	19	3.823	59	1.942	100	8.966	100	17.515	100%	92%	100%	86%	Bagian Organisasi
				0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan	%	100	20.548	100	20.548	30	6.486	55	2.617	82	3.976	100	4.473	100	17.553	100%	85%	100%	85%	Bagian Hukum

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas perorangan / Jabatan yang layak digunakan	%	100	14.947	100	14.947	0	3.676	50	4.045	0	1.736	100	5.452	100	14.909	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
			0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan	%	100	22.000	100	22.000	0	1.739	40	5.193	0	4.045	100	6.439	100	17.416	100%	79%	100%	79%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
			0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan yang Layak Digunakan	%	100	1.485.066	100	1.251.255	0	87.935	30	267.371	80	271.916	100	254.753	100	881.974	100%	59%	100%	70%	Bagian Umum
			0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas yang layak digunakan	%	100	374.642	100	319.962	15	56.360	35	62.058	75	57.152	100	71.067	100	246.638	100%	66%	100%	77%	Sekretariat DPRD
			0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	%	100	32.000	100	33.834	0	3.300	40	6.641	0	4.220	100	15.006	140	29.167	140%	91%	140%	86%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	presentase jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	40.000	100	61.120	18	7015,7	27	10.829	43	10.076	100	19.302	100	47.222	100%	118%	100%	77%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
					dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																						
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	44.500	100	38.749	25	2.986	25	7.628	25	6.128	25	12.177	100	28.918	100%	65%	100%	75%	Badan Pendapatan Daerah	
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas	30	13.771	30	15.000	0	475	0	1.677	0	2.481	30	6.692	30	11.326	100%	82%	100%	76%	Badan Kepegawaian dan PSDM	
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas	Unit	1	24.892	1	35.557	1	7.930	1	6.312	1	2.016	1	14.659	1	30.917	100%	124%	100%	87%	Inspektorat	
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	24.892	100	30.892	0	6.565	50	5.425	0	8.118	100	10.132	100	30.240	100%	121%	100%	98%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Presentase Kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	59.559	100	54.154	0	5.118	40	7.975	0	6.876	100	8.839	100	28.808	100%	48%			Kecamatan Manguharjo	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Kendaraan Dinas Jabatan																					
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	25.251	100	25.251	0	3.461	0	6.605	75	5.700	100	8.234	100	24.000	100%	95%	100%	95%	Kecamatan Kartoharjo
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	48.448	100	63.622	0	4.062	10	9.171	40	6.353	100	19.152	100	38.738	100%	80%			Kecamatan Taman
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional / lapangan yang layak digunakan	%	100	157.500	100	170.092	20,35	22.315	25	28.553	82	26.035	100	61.646	100	138.550	100%	88%	100%	81%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	45.000	100	45.000	0	7.761	30	5.220		6.578	100	13.127	100	32.686	100%	73%	100%	73%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak digunakan	%	100	10.000	100	18.756	0	1.600	0	4.300	0	2.250	100	7.650	100	15.800	100%	158%	100%	84%	Kecamatan Kartoharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	75.000	100	100.350	0	26.070	50	13.333	0	18.269	100	39.111	100	96.782	100%	129%	100%	96%	Dinas Lingkungan Hidup
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	315.150	100	315.392	0	13.270	0	5.473	0	46.637	100	134.691	100	200.071	100%	63%	100%	63%	Sekretariat DPRD
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	329.000	100	329.000	0	45.866	30	71.809	70	46.690	100	76.567	100	240.932	100%	73%	100%	73%	Dinas Pendidikan
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	14.126	100	74.116	0	1.990	0	500	0	694	100	55.467	100	58.650	100%	415%	100%	79%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	28.000	100	28.000	0	-	0	7.500	0	2.400	100	18.026	100	27.926	100%	100%			Dinas Perumahan Rakyat dan KP
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Yang Layak Digunakan	%	100	130.000	100	130.000	0	1.067	0	-		0	100	129.320	100	130.387	100%	100%	100%	100%	SatPol PP dan PK
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	35.000	100	25.000	100	22.273	100	2.227		-	0	-	100	24.500	100%	70%	100%	98%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	140.000	100	245.550	0	32.318	50	36.632	0	10.418	100	162.991	100	242.359	100%	173%	100%	99%	Dinas Sosial, PPA
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	prosentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	35.700	100	35.618	0	-	0	518	0	100	100	34.972	100	35.590	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja, KUM
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan (%)	%	100	178.000	100	219.500	0	-	0	10.045	0	0	100	206.563	100	216.608	100%	122%	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	70.000	100	185.000	0	45.526	0	-	0	24.444	100	114.991	100	184.962	100%	264%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung yang Layak Digunakan	%	100	30.000	100	77.172	0	-	0	18.461	0	28.094	100	29.070	100	75.625	100%	252%	100%	98%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	650.000	100	655.800	0	-	0	59.160	0	494.164	100	108.793	100	662.117	100%	102%	100%	101%	Dinas Perhubungan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					dan Bangunan Lainnya																					
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	132.500	100	132.500	0	3.100	15	6.125	55	60.958	100	59.796	100	129.978	100%	98%	100%	98%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	80.000	100	193.000	0	131	100	75.419		3.216	100	113.961	100	192.727	100%	241%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	175.000	100	235.950	0	-	100	172.650	0	-	0	55.302	100	227.952	100%	130%	100%	97%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	Unit	2	49.650	2	79.757	0	22.147	2	24.995		0	0	31.909	2	79.051	100%	159%	100%	99%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	100.000	100	800.700	0	-	20	43.400	70	197.891	100	540.170	100	781.461	100%	781%	100%	98%	Dinas Perdagangan
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	7.500	100	7.500	100	7.500	0	-	0	-	0	-	100	7.500	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	1.680	100	1.680	0	-	50	825		-		825	50	1.650	50%	98%	50%	98%	Bagian Organisasi
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	2.500	100	2.500	0	-	0	-	0	0	100	2.500	100	2.500	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	2.000	100	2.000	0	-	0	600	0	425	100	974	100	1.999	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	%	100	4.000	100	87.500	0	1.870	0	-	0	-	100	78.400	100	80.270	100%	2007%	100%	92%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	persentase gedung yang layak digunakan	%	100	714.677	100	640.283	0	16.989	0	36.489	0	216.583	100	243.250	100	513.310	100%	72%	100%	80%	Bagian Umum

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					dan Bangunan Lainnya																					
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	1.847.523	100	861.643	0	1.367	0	27.872	0	243.435	100	447.038	100	719.711	100%	39%	100%	84%	Sekretariat DPRD
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	%	100	80.000	100	316.016	0	32.626	70	34.036	0	10.947	100	235.134	170	312.744	170%	391%	170%	99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	presentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	50.000	100	120.000	0	-	0	-	0	6.695	100	112.875	100	119.570	100%	239%	100%	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	15.000	100	20.000	25	5.358	25	7.023	0	0	50	6.309	100	18.689	100%	125%	100%	93%	Badan Pendapatan Daerah
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	Gedung	3	1.132.000	3	1.041.488	0	15.092	0	21.851	1	26.369	2	916.853	3	980.165	100%	87%	100%	94%	Badan Kepegawaian dan PSDM
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	Paket	1	5.000	1	4.979	0	-	0	-	0	-	1	4.814	1	4.814	100%	96%	100%	97%	Inspektorat
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	7.500	100	7.500	0	1.215	50	1.950	0	2.000	100	1.870	100	7.035	100%	94%	100%	94%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	71.298	100	111.759	25	19.000	20	13.035	50	17.916	100	32.830	100	82.781	100%	116%			Kecamatan Manguharjo
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	53.000	100	175.677	30	23.504	66	68.264	80	13.761	100	56.163	100	161.692	100%	305%	100%	92%	Kecamatan Kartoharjo
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	50.000	100	100.000	0	-	0	-	0	99.725	100	261	100	99.986	100%	200%			Kecamatan Taman
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	140.800	100	170.800	0	19.578	35	24.949	65	18.264	100	73.813	100	136.603	100%	97%	100%	80%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					atau Bangunan Lainnya																					
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	82.405	100	317.431	0	19.204	50	23.213	60	17.456	100	181.455	210	241.328	210%	293%	210%	76%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	Gedung	1	250.000	1	357.200	0	10.523	0	33.622		35.655	1	70.584	1	150.383	100%	60%	100%	42%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	472.170	100	497.563	0	38.704	0	53.204		66.178	100	138.755	100	296.841	100%	63%			Dinas Perumahan Rakyat dan KP
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	%	100	30.000	100	40.000	0	-	50	14.345	50	8.663	100	14.427	200	37.435	200%	125%	200%	94%	SatPol PP dan PK
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	15.000	100	25.000	25,35	880	66	1.060	85	3.065	100	19.559	100	24.564	100%	164%	100%	98%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	75.800	100	75.800	0	3.373	38	21.323	0	7.114	100	41.034	100	72.844	100%	96%	100%	96%	Dinas Sosial, PPA
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prosentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	25.000	100	30.600	0	-	30	5.809	0	3.960	100	17.979	100	27.748	100%	111%	100%	91%	Dinas Tenaga Kerja, KUM
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana Prasarana gedung yang layak digunakan (%)	%	100	50.000	100	50.000	0	12.136	50	9.355	0	15.259	100	12.911	100	49.660	100%	99%	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Layak Digunakan	%	100	167.650	100	195.719	0	10.660	0	55.895	0	32.560	100	82.058	100	181.173	100%	108%	100%	93%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	150.000	100	198.038	0	20.914	0		0	36.597	100	75.273	100	132.784	100%	89%	100%	67%	Dinas Perhubungan
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung dan kantor yang layak digunakan	%	100	132.500	100	162.500	0	13.114	30	25.977	75	19.511	100	76.640	100	135.241	100%	102%	100%	83%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	55.000	100	55.000	0	6.934	30	7.018		19.892	100	21.157	100	55.000	100%	100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	54.650	100	30.000	0	-	0	1.635	0	8.250	100	19.003	100	28.888	100%	53%	100%	96%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	78	44.650	78	44.650	0	9.026	30	3.625		6.095	48	25.639	78	44.385	100%	99%	100%	99%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	130.000	100	130.000	0	6.685	35	32.540	65	34.670	100	51.013	100	124.908	100%	96%	100%	96%	Dinas Perdagangan
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	10.000	100	10.000	0	1.429	50	2.750	0	1.935	100	3.810	100	9.924	100%	99%	100%	99%	Bagian Pemerintahan
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana / Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	%	100	13.230	100	14.661	0	3.236	31	1.360	74	2.104	100	7.689	100	14.389	100%	109%	100%	98%	Bagian Organisasi

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	18.893	100	18.893	0	2.412	37	3.664	72	1.107	100	11.567	100	18.750	100%	99%	100%	99%	Bagian Hukum
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	12.350	100	12.350	0	1.770	0	1.725	0	230	100	8.621	100	12.346	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	9.200	100	9.200	0	-	0	385	0	2.214	100	1.700	100	4.299	100%	47%	100%	47%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	229.600	100	219.102	0	21.692	20	23.318	50	24.483	100	43.498	100	112.991	100%	49%	100%	52%	Bagian Umum
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	%	100	60.000	100	48.796	0	14.258	40	10.300	0	16.000	100	8.235	140	48.793	140%	81%	140%	100%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	presentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	87.000	100	87.000	16	13.875	65	20.422	85	19.916	100	29.267	100	83.480	100%	96%	100%	96%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	100.000	100	50.964	25	11.948	25	5.896	25	8.854	25	12.122	100	38.820	100%	39%	100%	76%	Badan Pendapatan Daerah
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana	Jenis	9	25.000	9	38.073	0	5.779	0	1.860	5	7.393	4	15.894	9	30.926	100%	124%	100%	81%	Badan Kepegawaian dan PSDM

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana	Jenis	5	35.000	5	35.000	0	500	1	4.308	1	4.800	3	24.075	5	33.683	100%	96%	100%	96%	Inspektorat	
				10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan digunakan	%	100	25.000	100	25.000	0	5.150	50	9.073	0	7.808	100	2.600	100	24.631	100%	99%	100%	99%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	45.300	100	45.300	0	7.395	50	13.274	75	3.712	100	12.087	100	36.468	100%	81%			Kecamatan Manguharjo	
				10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	34.960	100	36.775	20	7.914	50	7.769	75	7.888	100	13.186	245	36.757	245%	105%	245%	100%	Kecamatan Kartoharjo	
				10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	100	36.500	100	36.500	0	6.276	10	533	40	11.260	100	8.896	100	26.964	100%	74%			Kecamatan Taman	
				11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang layak digunakan	%	100	25.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			211		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																						
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	400.000	100	253.576	0	43.882	50	67.609	0	43.882	100	43.882	150	199.255	150%	50%	150%	79%	Bagian Umum	
				04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kepala	%	100	600.000	100	600.000	0	132.435	50	132.435	0	132.435	100	132.435	150	529.740	150%	88%	150%	88%	Bagian Umum	

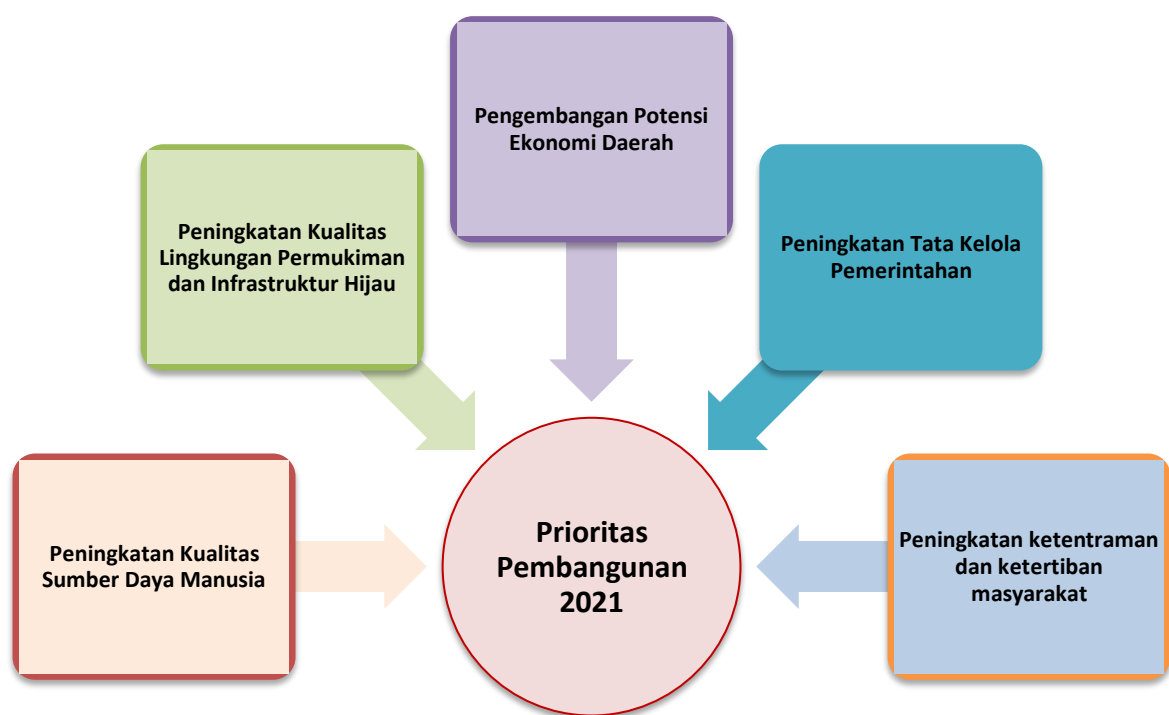
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
					dan Wakil Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah																				
			2 . 1 2		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah																					
				0 1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tercukupi	%	100	874.530	100	918.268	0	117.185	40	199.394	0	192.751	100	269.694	140	779.024	140%	89%	140%	85%	Bagian Umum
				0 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	persentase kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tercukupi	%	100	492.299	100	538.270	0	87.985	44	116.542	0	192.751	100	215.881	144	613.159	144%	125%	144%	114%	Bagian Umum
				0 3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah tercukupi	%	100	302.711	100	313.286	0	19.868	0	28.886	0	29.809	100	36.387	100	114.949	100%	38%	100%	37%	Bagian Umum
			2 . 1 3		Penataan Organisasi																					
				0 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Besaran dan Urusan Kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	414.400	100	348.096	0	3.600	20	138.447	70	71.599	100	128.790	100	342.435	100%	83%	100%	98%	Bagian Organisasi
				0 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks	2,7	799.058	3	671.209	0	6.925	0	31.952	2	134.272	3	477.293	3	650.442	111%	81%	111%	97%	Bagian Organisasi
				0 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya minimal BB	%	100	513.150	100	431.046	0	40.851	0	72.169	0	40.085	100	262.732	100	415.837	100%	81%	100%	96%	Bagian Organisasi
			2 . 1 4		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																					
				0 1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah	Kali	500	3.117.204	500	726.587	132	-	129	125.249	155	185.903	98	194.763	514	505.915	103%	16%	103%	70%	Bagian Umum
			2 . 1 5		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																					
				0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	terpenuhinya hak keuangan DPRD	bulan	12	12.738.095	12	13.388.554	3	2.768.451	3	3.264.706	3	3.071.196	3	4.150.996	12	13.255.349	100%	104%	100%	99%	Sekretariat DPRD

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut yang dicukupi	jenis	5	300.000	5	277.855	0	-	0	1.250	0	-	5	219.932	5	221.182	100%	74%	100%	80%	Sekretariat DPRD
			03		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	terpenuhinya hak layanan kesehatan DPRD	kali	1	150.000	1	81.000	0	-	1	28.421	0	-	0	11.443	1	39.864	100%	27%	100%	49%	Sekretariat DPRD
			2.16		Layanan Administrasi DPRD																					
			02		Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah dokumen pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi	Dokumen	10	369.746	10	38.496	0	-	5	10.888	0	-	5	23.603	10	34.491	100%	9%	100%	90%	Sekretariat DPRD
			03		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas/operasional DPRD (penghitungan=realisasi/target perjalanan dinas)	%	100	5.918.768	100	5.805.759	0	467.495	30	1.243.039	70	318.451	100	1.962.218	100	3.991.202	100%	67%	100%	69%	Sekretariat DPRD

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan tahun 2021, ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Identifikasi permasalahan mengacu pada prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2021. Prioritas pembangunan tahun 2021 dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 2.26
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Madiun tahun 2021

Sesuai dengan lima prioritas pembangunan diatas, identifikasi permasalahan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.77
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Permasalahan
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	- Kualitas mutu pendidikan - Indeks pendidikan	- Pemerataan kualitas sarana dan prasarana sekolah sesuai SPM perlu ditingkatkan - kualifikasi tenaga pendidik perlu ditingkatkan - distribusi tenaga pengajar dan mutu pelayanan pendidikan yang perlu ditingkatkan
		- Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu - Kualitas layanan kesehatan	- Masih terdapatnya angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu - Cakupan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu rendah - Cakupan kesehatan rujukan perlu ditingkatkan

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Permasalahan
			• Perlu ditingkatkannya Pertolongan tenaga kesehatan
		• Pembangunan ekonomi • Kualitas SDM Tenaga Kerja • Rasio Ketergantungan	• Angka kemiskinan mengalami peningkatan akibat pandemic Covid-19 • Penanganan PMKS perlu dioptimalkan • Kualitas SDM tenaga kerja perlu ditingkatkan • Penyediaan lapangan pekerjaan perlu peningkatan jaringan ketenagakerjaan
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau	• Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas untuk masyarakat	• Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik perlu ditingkatkan dan dipelihara • Drainase perkotaan perlu ditingkatkan • Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat perlu pemeliharaan kualitas • Sarana sanitasi masyarakat perlu ditingkatkan • Sarana dan prasarana persampahan perlu di tingkatkan
		• Intensitas Bencana alam • Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Pengelolaan Sumber Daya alam yang berkelanjutan	• Luasan RTH perlu ditingkatkan • Pemanfaatan pengelolaan air tanah perlu ditingkatkan • Mitigasi bencana perlu ditingkatkan
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	• Pengembangan produk unggulan • Iklim investasi • Kinerja BUMD • Daya Saing UMKM	• Iklim investasi / usaha perlu peningkatan daya saing • Belum optimalnya kinerja BUMD • Belum optimalnya daya saing produk dan akses pasar bagi produk UMKM • Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana usaha untuk UMKM
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	• Reformasi Birokrasi • Pelayanan Publik yang Murah, Tepat, Cepat dan Akurat. • Kualitas SDM (aparatur) dalam pelayanan public • Partisipasi public dalam pembangunan	• Reformasi Birokrasi belum optimal sehingga kinerja pemerintah belum dapat terukur dengan jelas • Perijinan satu pintu belum optimal • Kualitas SDM Aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik. • Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
5.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	• Kerukunan dan toleransi antar umat beragama • Pembinaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban • Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya	- Masih perlu ditingkatkannya peran FKUB dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat - Peran tokoh masyarakat dan ulama masih perlu ditingkatkan - Masih terbatasnya keterlibatan dan pelestarian budaya adat masyarakat

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, (2021)

Capaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja nya baik dari sisi target terhadap realisasinya Tahun 2021 maupun perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya. Capain indikator kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.78
Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun 2021

No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
				Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	-	80,92	81,25	100,40
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	-	87,78	89,40	100,42
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	-	6,38	6,87	107,68
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	-	67 (B)	66,26(B)*	98,90
5.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat demi Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Ketentraman	-	76,95	78,74	102,32

Sumber Data: PD dan BPS

Realisasi capaian terget indikator kinerja prioritas pembangunan sebagian besar memiliki nilai diatas 98 persen. Peningkatan kualitas sumber daya alam yang diindikasikan oleh IPM telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100 persen.

Prioritas pembangunan lain yang capaiannya melebihi 100 persen adalah Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat demi Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan, Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Indeks Ketentraman merupakan salah satu alat ukur yang dipakai di kota madiun dengan menggunakan survey mandiri. Pada tahun 2021 capaian indeks ketentraman kota madiun menunjukkan angka 78,74 dengan kriteria Kondusif.

Prioritas pembangunan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan mencapai target sebesar 98,90 persen menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, yang merupakan indikator tertinggi dalam penilaian pemerintahan, Indikator penilaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi didasarkan pada prinsip S M A R T – C yaitu :

- a. Spesific: indikator yang digunakan harus mampu menyatakan sesuatu yang khas/unik dalam menilai kinerja keberhasilan reformasi birokrasi;
- b. Measurable: indikator yang dirancang harus dapat diukur dengan jelas, memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya;
- c. Achievable: indikator yang dipilih harus dapat dicapai oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- d. Relevant: indikator yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi dan misi, serta sasaran reformasi birokrasi;
- e. Timely: indikator yang dipilih harus memiliki batas waktu pencapaian;
- f. Continuity: indikator yang dibangun harus berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan reformasi birokrasi.

untuk Kota Madiun Indikator tersebut mendapatkan nilai 65,55 pada tahun 2020 naik menjadi 66,26 pada tahun 2021 dengan kategori nilai (B).

Capaian Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau mencapai 100,40 persen dengan menggunakan indikator Indeks Kenyamanan Kota (Livable City) merupakan konsep yang digagas oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, indeks ini merupakan istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non fisik (hubungan social, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dasar livable city :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik),
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah),

- 3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi,
- 4. Keamanan, Bebas dari rasa takut,
- 5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya,
- 6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik

Sedangkan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan indikator pembangunan ekonomi inklusif mengalami peningkatan sehingga capaian realisasinya 104,85 persen Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. kota madiun menduduki posisi ke-2 Kabupaten/Kota se Jawa Timur di bawah Kota Kediri untuk nilai indeks pembangunan ekonomi inklusifnya. Pada tahun 2020 nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif di kota madiun mencapai 6,69 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan nilai 6,87.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan daerah di Kota Madiun tidak terlepas dari kondisi nasional, provinsi dan lingkungan eksternal lainnya. Hasil identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel. 2.79
Permasalahan Pembangunan Daerah

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
1	Adanya varian baru Wabah Corona Virus	Adanya varian baru Wabah Corona Virus	Adanya varian baru Wabah Corona Virus
2	Meningkatkan gerakan hidup sehat dengan menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai, mengimbau masyarakat untuk patuh menjalankan protokol kesehatan dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).	Meningkatkan gerakan hidup sehat dengan menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai, mengimbau masyarakat untuk patuh menjalankan protokol kesehatan dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).	Meningkatkan gerakan hidup sehat dengan menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai, mengimbau masyarakat untuk patuh menjalankan protokol kesehatan dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia termasuk permasalahan gizi buruk	Peningkatan Kualitas Pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana	Regionalisasi dari ekonomi global dengan peningkatan keterkaitan antara perdagangan antar regional dan keuangan
4	Mengantisipasi Perekonomian yang bergerak dengan sangat dinamis terkait dengan kebijakan moneter AS maupun fluktuasi harga	Penigkatan Kualitas Kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidk menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih	Meningkatnya ekonomi regional akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja
5	Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan stake holder khususnya dunia usaha	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Ketenagakerjaan serta “ <i>Link and Match</i> ” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja	Negara ASEAN diharapkan akan semakin meluas dan mendalam
6	Penciptaan nilai tambah sektor pertanian, manufaktur dan jasa	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh	Isu-isu HAM dan lingkungan hidup akan meningkat dan akan semakin menarik
7	Peningkatan sektor pariwisata untuk meningkatkan kontribusi penyumbang devisa	Penguatan konektifitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan ekonomi potensial	
8	Perbaikan tenaga kerja yang tidak hanya dengan pendidikan vokasi tapi juga standar kerja dan kompetensi tenaga kerja	Pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika	
9	Peningkatan ketahanan pangan dan energi khususnya energi baru dan terbarukan	Peningkatan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	
10	Kelastarian lingkungan daya sumber daya air	Peningkatan nilai tambah agroindustri, agromaritim dan daya saing koperasi dan UMKM	
11		Optimalisasi Kepariwisataaan	
12		Peningkatan Produktifitas Tenaga	
13		Industrialisasi berbasis ekonomi digital	
14		Peningkatan ketahanan pangan	
15		Peningkatan ketahanan energi	
16		Peningkatan ketentraman dan ketertiban terhadap isu potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba	
17		Kesuksesan Pemi u serentak	

Pada Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 pandemi covid-19 masih terjadi. Pandemi tersebut sangat mempengaruhi pada seluruh sektor kehidupan tidak terkecuali sektor ekonomi. Dengan adanya kontraksi di sektor ekonomi, maka sangat mempengaruhi di sisi pendapatan pemerintahan daerah, yang akhirnya berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pembangunan. Dengan adanya pandemi Covid 19 pemerintah pusat membuat kebijakan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran, dimana 35 % dari kemampuan APBD direalokasi dan difokuskan untuk program dan kegiatan dalam penanganan Covid 19, dimana hasil realokasi tersebut di tempatkan di Belanja Tidak Terduga (BTT), dengan alasan fleksibilitas penggunaan anggaran untuk penanggulangan covid 19, yang tidak bisa direncanakan sebelumnya.

Dengan adanya refocusing dan realokasi tentunya banyak kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran yang optimal sehingga proses pencapaian target kinerja pasti akan sangat terganggu. Di Tahun 2021 perkiraan secara global maupun nasional dampak dari pandemi Covid 19 masih akan dirasakan, sehingga proyeksi pendapatan baik Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tidak bisa diharapkan melampaui atau bahkan sama dengan tahun sebelumnya.

Sehingga rencana belanja di Tahun 2021 juga tidak akan melampaui atau sama dengan tahun sebelumnya. Akhirnya akan berdampak pada belanja program dan kegiatan yang tidak akan bisa maksimal dan akan bermuara pada pencapaian target kinerja yang tidak maksimal juga.

Tabel 2.80
Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
1.	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN a. Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) hanya direalisasikan selama 6 bulan. b. Belanja hibah Dewan Pendidikan, BMPS dan PGPS tidak dapat direalisasikan dikarenakan belum terbentuknya kepengurusan. c. Aplikasi untuk penunjang BOP Pendidikan Kesetaraan dari pusat mengalami keterlambatan dan bermasalah, sehingga mengakibatkan keterlambatan pada pencairan di daerah. d. Aplikasi untuk penunjang BOP Pendidikan Kesetaraan dari pusat mengalami keterlambatan dan bermasalah, sehingga mengakibatkan keterlambatan pada pencairan di daerah.	DINAS PENDIDIKAN a. Mengajukan tambahan anggaran kepada kementerian pendidikan. b. Mengajukan tambahan anggaran kepada kementerian pendidikan. c. Aplikasi-aplikasi penunjang yang berhubungan dengan BOP Pendidikan Kesetaraan ditingkatkan spesifikasi, ketepatan dan kecepatannya, sehingga pencairan dan pelaporan dari daerah dapat secara tepat dan cepat sesuai dengan waktu yang direncanakan. d. Melaksanakan kegiatan pembelajaran via daring atau zoom meeting. e. Dari sisi siswa, mencegah putus sekolah dan mendorong

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		e. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Madiun tahun 2021 adalah sebesar 11.37 tahun, sementara angka Harapan Lama Sekolah 14.41 tahun. Dalam hal ini, ada kesenjangan antara rata-rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah, maka yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, antara lain	masyarakat mengikuti pendidikan kesetaraan, mengintensifkan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat f. Dari sisi guru, meningkatkan kuantitas dan kualitas guru guna keberlanjutan proses dan peningkatan kualitas Pendidikan g. Dari sisi sarana/prasarana pendidikan, melengkapi dan membangun sarana/ prasara pendidikan guna mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat
2.	Kesehatan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA a. Terdapat 5 dari 12 indikator SPM belum mencapai target 100% yaitu: 1. Pelayanan kesehatan balita 2. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 3. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 4. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 5. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis b. Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat belum mencapai target dikarenakan tidak ada verifikasi Kota Sehat dari pusat sehingga kelurahan yang melaksanakan tatanan kelurahan sehat/menjadi titik pantau jumlahnya tetap c. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan belum memenuhi target dikarenakan selama pandemi frekuensi UKBM buka hanya 1-2 kali dalam setahun. Sehingga mempengaruhi penilaian strata dalam hal frekuensi UKBM buka dalam satu tahun. d. Mengacu pada permasalahan secara umum di Jawa Timur terkait urusan kesehatan Masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka dalam rangka menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) dan Penanganan Stunting RSUD a. Survey kepuasan masyarakat dan survey kepuasan karyawan tidak dilaksanakan b. Keterlambatan pembayaran klaim pelayanan dari BPJS dan Kemenkes c. Kebutuhan belanja melebihi anggaran / belanja yang belum direncanakan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA a. Melakukan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor dalam mendukung pencapaian SPM terutama di masa pandemi; melakukan perencanaan yang baik, dari segi penentuan sasaran, biaya, waktu, maupun pelaksanaan sehingga semua sasaran dapat menerima pelayanan kesehatan sesuai Standart Pelayanan Minimal dan Melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan selama masa pandemi; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian SPM secara berkala sehingga kendala dapat teratasi dan tercapai di akhir tahun. b. Koordinasi dengan penyelenggara Kota Sehat untuk teknis pelaksanaan tahun berikutnya, pendampingan di kelurahan sehat, sehingga meskipun tidak ada verifikasi dari pusat, kelurahan tetap melaksanakan tatanan kelurahan sehat c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKBM selama pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan UKBM selama pandemic d. Dalam rangka upaya menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) perlu pembinaan dan penguatan kelembagaan serta program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan meliputi penguatan kapasitas kader dalam rangka penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas untuk diketahui Pada Tahun 2021 Jumlah Angka kematian ibu (ibu hamil) sebanyak 0 dan jumlah kematian bayi (AKB) sebanyak 9 e. Dalam rangka upaya pemerintah untuk menurunkan prevalensi angka di indonesia dari 24 persen menjadi 14 persen perlunya penguatan pelayanan kesehatan

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		d. Kebutuhan belanja melebihi anggaran / belanja yang belum direncanakan e. Pengiriman barang dari luar kota di tanggal akhir kontrak/keterlambatan	dalam Upaya integrasi Posyandu aktif dengan PAUD yang dapat menunjukkan bahwa pola asuh merupakan core dalam pencegahan stunting. Posyandu menjadi garda utama terdepan serta dukungan alat kesehatan dasar dalam rangka penanganan menurunkan Stunting perlu diketahui prevalensi stunting Kota Madiun menurut SSGBI 2021 adalah 12.40. RSUD a. Menggunakan hasil survey kepuasan masyarakat dari bagian organisasi b. Monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan BPJS dan Kemenkes c. Disesuaikan dengan ketentuan BLUD dan melakukan Monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan Inspektorat dan BKAD d. Diklat in house training di RSUD dan secara daring/online e. Komunikasi lebih intensif dengan penyedia barang dan Pemberian denda keterlambatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG a. Bidang Bina Marga pada tahun 2021 untuk Sub Kegiatan Pembangunan Jalan terdapat beberapa paket Pembangunan Jalan yang belum dapat dituntaskan 100% di lapangan akibat adanya reconfusing anggaran, sebagai contoh Jalan Kranggan dalam pengusulan anggaran awal agar bisa tuntas 100% diperlukan anggaran sebesar Rp. 5 milyar namun karena adanya reconfusing menjadi Rp. 1,5 milyar. Sehingga paket tersebut perlu dianggarkan lagi di Tahun Anggaran berikutnya. b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tupoksi menjalankan kegiatan untuk mengurangi potensi banjir/genangan wilayah kota. Wilayah Kota Madiun dilintasi oleh sungai-sungai yang mana menjadi kewenangannya merupakan kewenangan Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo. Serta Pemeliharaan dan pembangunan saluran yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo dikarenakan keterbatasan anggaran dan luasan wilayah maka pemeliharaan dan pembangunan saluran dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, Untuk pemeliharaan dan pembangunan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG a. Mengusulkan lagi penganggaran pada lokasi pekerjaan yang belum tuntas tersebut. b. Pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 2 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari BBWS Bengawan Solo dan Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		saluran ordo 2 perencanaan dan pelaksanaan teknis harus mendapatkan rekomendasi teknis ke BBWS Bengawan Solo. Sementara untuk pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 3 dan 4, perencanaan dan pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota c. Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan Gedung apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Bangunan Gedung milik Pemerintah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut: a. Bidang Cipta Karya belum memiliki data total jumlah bangunan gedung milik Pemerintah Kota Madiun; b. Bidang Cipta Karya tidak hanya mengerjakan pembangunan/rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun saja, akan tetapi juga melaksanakan pembangunan/rehab bangunan milik instansi vertikal yang nantinya akan diserahterimakan melalui mekanisme hibah. Apakah ketika ini dilakukan, maka tidak dianggap sebagai suatu capaian kinerja, mengingat aset yang dibangun/direhab bukan aset milik Pemerintah Kota Madiun. d. Bidang Cipta Karya untuk Sie Pengembangan Jasa Konstruksi, Perkembangan Jasa Konstruksi yang ada di Kota Madiun mengalami kondisi yang dinamis sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan agar keberadaannya tetap memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Madiun., Perkembangan Jasa Konstruksi yang ada di Kota Madiun mengalami kondisi yang dinamis sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan agar keberadaannya tetap memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Madiun. e. Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan dan Lingkungan apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Saluran Lingkungan di wilayah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut 1. Belum adanya database saluran lingkungan di wilayah Kota Madiun sehingga parameter pelaksanaan kegiatan belum ada	c. Target jumlah bangunan gedung tahun ini bersumber dari data realisasi tahun yang kemarin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap melaksanakan pembangunan/rehab bangunan walaupun bukan aset Kota Madiun d. Jumlah tenaga kerja di Bidang Jasa Konstruksi juga menjadi perhatian khusus karena paling tidak harus sebanding dengan Badan Usaha yang bergerak di Bidang Jasa Konstruksi di Wilayah Kota Madiun dalam rangka terwujudnya hasil pembangunan di Kota Madiun secara lebih maksimal e. Dasar penentuan lokasi pembangunan saluran mengakomodir dari usulan masyarakat dan pikir dewan, Penyediaan kebutuhan air minum diampu oleh PDAM untuk Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang hanya melaksanakan monitoring kegiatan dan menyusun kebijakan air minum saja

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		2. Belum adanya database saluran lingkungan di wilayah Kota Madiun sehingga parameter pelaksanaan kegiatan belum ada 3. Belum adanya database saluran lingkungan di wilayah Kota Madiun sehingga parameter pelaksanaan kegiatan belum ada 4. Belum adanya database saluran lingkungan di wilayah Kota Madiun sehingga parameter pelaksanaan kegiatan belum ada	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Dalam subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni masih memerlukan data DTKS yang valid sehingga apabila diverifikasi lapang/validasi kondisi rumah yang diusulkan tidak masuk kriteria b. Kurangnya kompetensi SDM masyarakat dalam pelaksanaan penataan kampung tematik yang bersifat teknis dan swakelola sehingga menghambat progres pelaksanaan kegiatan c. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni di Kota Madiun d. Masih terdapat permukiman kumuh di Kota Madiun (kumuh ringan) e. Terdapat rumah tinggal yang belum bersanitasi f. Masih terdapat kekurangan kebutuhan rumah (backlog kepemilikan) dalam rangka penyediaan perumahan bagi masyarakat didapatkan data pada tahun 2016 mencapai 3.569 unit g. Belum optimalnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman h. Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman i. Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas RTH Kota Madiun hingga 20% dari luas wilayah kota b. Kompetensi SDM masyarakat harus benar-benar menguasai terutama dalam bidang teknis sehingga dari sisi administrasi maupun progress pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana c. Kompetensi SDM masyarakat harus benar-benar menguasai terutama dalam bidang teknis sehingga dari sisi administrasi maupun progress pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana d. Penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas e. Penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas f. - g. Penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas h. Mengoptimalkan legislasi daerah melalui Perda & Perwal tentang tataran operasional urusan perumahan dan kawasan permukiman i. Mengoptimalkan legislasi daerah melalui Perda & Perwal tentang tataran operasional urusan perumahan dan kawasan permukiman j. Mengoptimalkan legislasi daerah melalui Perda & Perwal tentang tataran operasional urusan

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		j. Kecenderungan pertumbuhan investasi di Kota Madiun berdampak pada permintaan izin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi k. Masih adanya tanah terlantar di Kota Madiun yang perlu penanganan l. Adanya potensi konflik pertanahan di Kota Madiun seiring meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum m. Belum optimalnya sarana dan prasarana 83 makam aset Pemerintah Kota Madiun n. Coverage layanan Penerangan Jalan Permukiman yang perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan Perumahan dan Permukiman di Kota Madiun dengan memperhatikan maintenance, penataan iluminasi serta peralatan dan utilitas pendukung lainnya o. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas RTH Kota Madiun hingga 20% dari luas wilayah kota	perumahan dan kawasan permukiman k. Mengoptimalkan legislasi daerah melalui Perda & Perwal tentang tataran operasional urusan perumahan dan kawasan permukiman 1. Memfasilitasi konflik pertanahan yang ada di Kota Madiun m. Mengoptimalkan sarana & prasarana makam melalui peningkatan fasilitas n. - o. -
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a. Meningkatnya jumlah penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat b. Kurang optimalnya kegiatan sosialisasi pelanggaran Perda dan Perwal karena kondisi pandemic c. Masih kurangnya pemahaman warga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH a. Terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana b. Perlu ditingkatkannya kemampuan / pengetahuan penanganan bencana untuk Team Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Madiun khususnya	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan patroli gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Madiun. Dan melaksanakan penertiban sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penertiban b. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan sistem kelompok kecil dengan penerapan prokes c. Pembuatan stiker dan leaflet yang berisi infomasi cara pemadaman api dan cara menggunakan APAR beserta informasi nomor emergency call Damkar. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH a. Pengajuan penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana b. Dilaksanakannya Pelatihan / Mitigasi Penanggulangan Bencana
6.	Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat tertangani	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		b. bertambahnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial lebih dari 100% dikarenakan belum ada mekanisme verifikasi pengajuan DTKS dari Aplikasi Kementerian Sosial. c. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal	b. bertambahnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial lebih dari 100% dikarenakan belum ada mekanisme verifikasi pengajuan DTKS dari Aplikasi Kementerian Sosial. c. Perlunya pelatihan teknis terhadap Aparatur Sipil Negara untuk peningkatan Sumber Daya Manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
7.	Ketenaga kerjaan	DINAS TENAGA KERJA a. Terjadi Perubahan Tentang Penentuan Upah Minimum Kota Sehingga Survey Khl Dan Olah Data Tidak Terlaksana b. SOP (Standar Operating Prosedure) yang harus selalu disesuaikan dengan kondisi disaat pandemi covid 19 c. Masih adanya pandemi covid 19 sehingga masih banyak kegiatan dilaksanakan tidak maksimal ssampai dengan triwulan III d. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, KUKM	DINAS TENAGA KERJA a. Penentuan Umk Kota Madiun Menggunakan Rumus Pp 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan b. menyusun SOP (Standar Operating Prosedure) sesuai dengan situasi dan kondisi disaat pandemi covid 19 c. Kegiatan dilaksanakan dengan online, zoom dan tatap muka dilaksanakan di triwulan IV d. Pengusulan personil kepada BKPSDM dan pengusulan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat teknis
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pangarusutamaan Gender (PUG)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengusulkan Peraturan Daerah dan Atau Peraturan Walikota tentang Pangarusutamaan Gender (PUG) serta menyusun Profil gender kerjasama dengan pihak ketiga
9.	Pangan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN a. Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman b. Masih tingginya angka konsumsi beras per kapita c. Pola Pangan Harapan (PPH) masih rendah d. Cadangan pangan Pemerintah Kota Madiun masih rendah	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN a. Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekerangan dengan konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Karang Kitri b. Kegiatan Lomba cipta menu, Kegiatan Sosialisasi Konsumsi Makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Pemilihan Duta Keamanan Pangan c. Kegiatan Promosi Ketahanan Pangan Kegiatan Survey Pola Pangan Harapan d. Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Kegiatan Survey Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Pedagang Grosir dan Eceran
10.	Pertanahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Memfasilitasi melalui penerbitan rekomendasi izin perubahan penggunaan tanah

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun b. Kecenderungan pertumbuhan investasi di Kota Madiun berdampak pada permintaan ijin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi c. Masih adanya tanah terlantar di Kota Madiun yang perlu penanganan d. Adanya potensi konflik pertanahan di Kota Madiun seiring meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	b. Memfasilitasi melalui penerbitan rekomendasi izin lokasi c. Perlunya penanganan melalui inventarisasi tanah terlantar dan survei lapangan d. Memfasilitasi konflik pertanahan yang ada di Kota Madiun
11.	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP a. Meningkatnya pencemaran baik tanah, air maupun udara yang diakibatkan adanya penambahan jumlah industri dan/atau usaha lainnya; b. Meningkatnya volume harian sampah sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi dimasyarakat (pendatang musiman), industri/kegiatan usaha, dll; c. Kurang optimalnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan sehingga terjadi pencemaran baik air dan udara; d. Adanya usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan wajib usaha; e. Adanya badan usaha/instansi yang belum memenuhi mengelola limbah B3 sesuai prosedur f. Disaat perhitungan nilai tutupan lahan melalui foto udara bersamaan dengan banyaknya pembangunan-pembangunan jalan trotoar sehingga banyak penebangan pohon yang dapat mempengaruhi nilai luasan tutupan lahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP a. Dengan makin banyaknya industri maka Dinas Lingkungan Hidup harus lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap industri-industri tersebut mulai dari awal pendirian sampai dengan pelaksanaan operasional kegiatan; b. Sarana dan prasarana sudah banyak di penuhi dan meningkatnya volume sampah dapat ditekan karena banyak berdiri bank-bank sampah baik yang sudah berbadan hukum atau belum, dengan sarana prasarana yang tersedia kinerja meningkat, kerjasama yang baik dengan satgas kebersihan yang masuk ke TPS serta pekerja profesional di TPA yang memilah sampah. Sehingga sampah dari tahun ke tahun yang masuk ke TPA di Winongo dapat di tekan; c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan/pelestarian lingkungan hidup maka Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sosialisasi dan pendekatan serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, Dinas terkait dan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan yang terbaik berkenaan dengan lingkungan hidup Kota Madiun agar semakin baik dan sehat d. Menghadapi permasalahan adanya badan usaha/instansi yang belum mempunyai dokumen lingkungan maka ditingkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta pendekatan kepada pelaku usaha agar segera memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai prosedur yang berlaku. e. Adanya usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan limbah B3. Tahun 2018 sudah banyak yang melakukan koordinasi pada DLH tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga akan lebih

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			intensif melakukan pembinaan, sosialisasi dan pemantauan f. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas terkait g. Wilayah Perhutani, BBWS, Sempadan Jalan Kereta Api dibuatkan SK ketetapan agar dapat masuk perhitungan tutupan lahan Kota Madiun
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL a. Penyajian Data Kependudukan tidak bisa dipenuhi langsung oleh Daerah dikarenakan Data Kependudukan ditarik kepusat (SIK Terpusat), sehingga membutuhkan waktu jika membutuhkannya b. Kecepatan perubahan kebijakan dalam rangka reformasi birokrasi tidak segera diikuti dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku c. Masih adanya penduduk yang bersatus belum rekam namun tidak dijumlah di tempat domisilinya d. Banyaknya catatan peristiwa penting kependudukan di masa lalu yang belum tercatat dalam database kependudukan e. Banyaknya catatan peristiwa penting kependudukan di masa lalu yang belum tercatat dalam database kependudukan f. Banyaknya catatan peristiwa penting kependudukan di masa lalu yang belum tercatat dalam database kependudukan g. Belum terselesaikannya pemutahiran dan pembersihan data h. Belum terselesaikannya pemutahiran dan pembersihan data i. Belum terselesaikannya pemutahiran dan pembersihan data	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL a. Koordinasi dengan pusat terkait permintaan data Kependudukan untuk instansi pengguna dan menyarankan untuk melakukan kerjasama antara Instansi Pengguna dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. sosialisasi tentang mekanisme dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil setiap ada perubahan prosedur pengurusan sesuai dengan SOP (Standar Operating Prosedure) yang sudah ditetapkan c. memaksimalkan koordinasi pelaksanaan adminduk dengan pejabat dikelurahan dan kecamatan d. melaksanakan kegiatan jemput bola dan e-mobile e. menyusun SOP (Standar Operating Prosedure) sesuai dengan situasi dan kondisi disaat pandemi covid 19 f. melaksanakan restorasi dan digitalisasi arsip registrasi yang rusak dan dimakan usia g. melaksanakan pemutahiran dan pembersihan data h. peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklatdiklat teknis i. melaksanakan koordinasi lintas organisasi melalui rapat komunikasi dengan kantor imigrasi, pengadilan, dan stake holder dalam rangka mencari solusi untuk permasalahan permasalahan adminduk
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA Terdapat penurunan Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (69,8%) & Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (11.90%) dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini disebabkan selama pandemi, dalam mengakses layanan KB peserta harus memenuhi ketentuan baik segi waktu maupun persyaratan kesehatan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA Target Nasional capaian mCPR tahun 2021 adalah 62.16% sehingga capaian Kota Madiun masih di atas target nasional, Meningkatkan peran serta kader KB, Petugas KB, Petugas Kesehatan serta stakeholder dalam edukasi kegiatan KB dan ajakan ber-KB. Koordinasi lintas sektor yang baik, sehingga pelayanan KB yang dilakukan di klinik/BPM/RS dilaporkan dengan baik.
14.	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN Kegiatan sewa angkutan sekolah gratis tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19	DINAS PERHUBUNGAN Dilakukan refocusing anggaran pada P-APBD 2021
15.	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penerapan SPBE pada penyelenggaraan administrasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal;	a. Penguatan kebijakan SPBE yang mengatur kelembagaan SPBE Pemerintah Daerah b. Integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik c. Integrasi layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya;
16.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO a. Kurangnya Sosialisasi tentang Fasilitasi Permodalan bagi UMKM b. Masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah. c. Masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa. d. Masih kurangnya fasilitas kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha besar. e. Belum banyak tersedianya ruang Pamer Produk UMKM. f. SOP (Standar Operating Prosedure) yang harus selalu disesuaikan dengan kondisi disaat pandemi covid 19 g. Masih adanya pandemi covid 19 sehingga masih banyak kegiatan dilaksanakan tidak maksimal ssampai dengan triwulan III h. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, KUKM	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO a. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Madiun terkait dengan fasilitasi permodalan dengan bunga lunak, diantaranya yaitu kredit UMKM dari PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank Pemerintah dan Perguliran Dana Pinjaman PKBL (Program Kerja Bina Lingkungan) dari PT. INKA. b. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menyelenggarakan berbagai macam bimbingan manajemen kepada para pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD maupun bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui berbagai macam pelatihan diantaranya adalah : 1. Pelatihan pembuatan makanan olahan 2. Pelatihan pembuatan <i>handycraft</i> 3. Pelatihan batik tingkat lanjutan 4. Pelatihan internet marketing 5. Pelatihan manajerial 6. Pelatihan kewirausahaan c. Beberapa koperasi sudah bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa perusahaan -perusahaan induknya antara lain, KOPINKA, Kopkar Siyvia Cendikia, Primkopad Yon 501, KPRI RSU Sudono, Kopkar RSI, Kopegtel, Koperasi Cahaya PLN, Koperasi Sejahtera PLN. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus melakukan upaya pembinaan dan pengarahannya pada waktu pelatihan, sosialisasi maupun Rapat Anggota Koperasi untuk memperluas kegiatan usahanya diluar unit simpan pinjam seperti penyediaan barang dan jasa sehingga akan meningkatkan

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			pendapatan dan SHU yang diterima oleh anggota sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan anggota. d. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun telah berupaya untuk memfasilitasi kerjasama antara UMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar, yaitu menjalin kerjasama dengan Toko Modern dan Perhotelan diantaranya Carrefour, PT. INKA, Hotel Aston dan Hotel Merdeka. Disamping itu Pemerintah Kota Madiun telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, yang juga mengatur masalah kemitraan antar KUMKM dengan pelaku usaha besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha. e. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah mengajukan permohonan bantuan CSR ke PT. INKA untuk merenovasi salah satu gedung yang ada di Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun menjadi gedung pameran produk unggulan UMKM. f. menyusun SOP (Standar Operating Prosedure) sesuai dengan situasi dan kondisi disaat pandemi covid 19 g. Kegiatan dilaksanakan dengan online, zoom dan tatap muka dilaksanakan di triwulan IV h. Pengusulan personil kepada BKPSDM dan pengusulan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat teknis
17.	Penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO a. Penyelesaian perizinan yang diterbitkan tidak tepat waktu b. Kesulitan pemenuhan komitmen berusaha yang dievaluasi, yang disebabkan terbitnya PP Nomor 5/2021 dan PP Nomor 6/2021 dengan aplikasi OSS RBA dan PBG pada 2 Agustus 2021 c. Banyaknya regulasi di daerah (terutama di OPD teknis) yang harus disesuaikan d. Banyaknya regulasi di daerah (terutama di OPD teknis) yang harus disesuaikan	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO a. Pembuatan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang sesuai dan Rapat koordinasi inter (bidang pelayanan) dan antar OPD (dinas teknis) b. Bimtek Perizinan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tim pelayanan perizinan, Konsultasi kepada Kementerian terkait dan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Koordinasi dengan stakeholder perizinan (OPD teknis, BPN/ATR) c. Sudah dilakukan beberapa perubahan pada perda dan perwal

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		e. Belum adanya komunikasi yang terintegrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait yang spesifik dan relevan dengan permasalahan pelayanan perizinan yang dihadapi secara menyeluruh f. Kesulitan penggunaan serta pengoperasian OSS RBA, belum adanya integrasi dan migrasi data berbagai sistem yang terkait dengan OSS RBA, mapping KBLI belum sempurna/lengkap, belum ada regulasi yang memungkinkan penyusunan RDTR berbasis KBLI, belum ada NSPK perizinan sektor pendidikan sebagai tindak lanjut Pasal 134 PP Nomor 5 Tahun 2021, belum ada petunjuk teknis terkait dengan pengunggahan dokumen yang diperlukan dalam persetujuan SS atau Izin melalui sistem OSS RBA g. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum paham kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko h. Belum diketahui potensi investasi di berbagai sektor usaha i. Pelaku usaha masih ada yang belum melaporkan LKPM	- oleh OPD teknis dan berkoordinasi dengan DPMPSTP d. Diadakan bimbingan teknis dan sosialisasi e. Koordinasi dengan bidang terkait f. Bimbingan teknis, sosialisasi dan konsultasi g. Dilaksanakan sosialisasi terhadap 1.751 pelaku usaha berbagai sektor sejak bulan September - Desember 2021 h. Sosialisasi dengan membuat video tentang potensi investasi yang disebarluaskan melalui website DPMPSTP i. Sosialisasi dan Workshop pengisian LKPM serta pendampingan kepada pelaku usaha jika ada permasalahan dalam melakukan pelaporan LKPM
18.	Kepemudaan dan Olah Raga	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a. Kota Madiun memiliki banyak atlet yang potensial untuk dikembangkan bakat dan minat olahraganya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi dikarenakan untuk pembinaan dan pelatihan kepada para atlet belum terlalu optimal, maka diperlukan pembinaan dan pelatihan agar lebih mengasah keahliannya agar lebih bisa berprestasi baik tingkat provinsi, regional maupun nasional ; b. Pelaksanaan event festival penyelenggaraan kesenian kebudayaan dan event olahraga terkendala peraturan PPKM pandemi covid 19	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun memfasilitasi para atlet dengan melengkapi sarana prasarana olahraga secara bertahap pada setiap cabang olahraga serta memberikan sarana prasarana akomodasi bagi para atlet yang akan bertanding tingkat provinsi, regional maupun nasional ; b. Beberapa kegiatan berupa penyelenggaraan event kesenian kebudayaan tetap dilaksanakan melalui virtual, dan perlombaan olahraga tetap diikuti dengan tetap menjaga protokol kesehatan covid 19
19.	Statistik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah; 2. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah; 3. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah; 4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan BPS dalam penyediaan data statistik daerah; 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang terstruktur dengan seluruh Perangkat Daerah dalam pengumpulan dan penyusunan data statistik daerah, sehingga tercipta data terbuka pemerintah; 3. Melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan kewenangan urusan statistik.

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
20.	Persandian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun; 2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan; 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi; 4. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Persandian; 2. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam bidang persandian.
21.	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA a. Kota Madiun memiliki kurang lebih ada 146 benda/bangunan yang diduga cagar budaya, namun benda/bangunan tersebut ada kendala dalam pelestarian dan penjagaan nya dikarenakan masih menunggu proses ketetapan Kepala Daerah untuk benda/bangunan tersebut menjadi cagar budaya yang dipelihara dan dirawat oleh Pemerintah Kota Madiun, sehingga belum optimal dalam pemeliharaan cagar budaya yang ada di Kota Madiun yang bisa lebih menarik wisatawan b. Pelaksanaan event festival penyelenggaraan kesenian kebudayaan dan event olahraga terkendala peraturan PPKM pandemi covid 19	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA a. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun Melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama Masjid dan Makam Kuncen serta Masjid dan Makam Taman agar lebih terawat dan menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya serta berusaha untuk melakukan penelitian keabsahan benda/bangunan yang diduga cagar budaya yang masih tersisa untuk ditetapkan sebagai benda/bangunan cagar budaya yang bisa dilestarikan. b. Beberapa kegiatan berupa penyelenggaraan event kesenian kebudayaan tetap dilaksanakan melalui virtual, dan perlombaan olahraga tetap diikuti dengan tetap menjaga protokol kesehatan covid 19
22.	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Ruang layanan Perpustakaan pada Perpustakaan Umum Daerah belum sesuai standart Perpustakaan Nasional	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN a. Tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah membuat DED Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan b. Tahun 2022 akan diajukan dana DAK Pembangunan Gedung Layanan perpustakaan

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
23.	Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Depo Arsip di Lembaga Kearsipan belum sesuai standart kearsipan dan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagian besar belum memiliki Record Center/tempat penyimpanan Arsip In Aktif	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Memanfaatkan ruang kelas eks SMP 2 Kota Madiun untuk Depo Arsip
24.	Kelautan dan Perikanan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN a. Meningkatnya akses layanan permodalan peternakan dan perikanan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN a. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna dan Pembinaan serta pengembangan perikanan budidaya
25.	Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA a. Di Kota Madiun sdh banyak memiliki obyek wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan untuk berkunjung di Kota Madiun, sehingga diperlukan promosi kepariwisataan terutama di dalam Kota Madiun yang mampu menarik minat wisatawan luar kota untuk berkunjung ke Kota Madiun. Sehingga yang harus dilakukan adalah meningkat dan menimbulkan ketertarikan yang besar baik bagi masyarakat Kota Madiun sendiri maupun di luar Kota Madiun dengan menghadirkan destinasi wisata yang baru dan menarik. b. Pelaksanaan event festival penyelenggaraan kesenian kebudayaan dan event olahraga terkendala peraturan PPKM pandemi covid 19	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun menyelenggarakan event promosi di dalam Kota Madiun b. Beberapa kegiatan berupa penyelenggaraan event kesenian kebudayaan tetap dilaksanakan melalui virtual, dan perlombaan olahraga tetap diikuti dengan tetap menjaga protokol kesehatan covid 19
26.	Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Bidang Pertanian a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pertanian c. Meningkatnya akses layanan permodalan pertanian d. Meningkatnya kompetensi sumber daya pertanian	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Bidang Pertanian a. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan, dan Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan b. Pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur pertanian c. Peningkatan kemampuan lembaga petani d. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		e. Meningkatnya kelembagaan dan penerapan teknologi pertanian Bidang Peternakan a. Meningkatnya produksi, pengawasan produk peternakan b. Meningkatnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan c. Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular d. Meningkatnya pengawasan pemotongan ternak sapi betina produktif dan pengeluaran ternak betina produktif keluar daerah e. Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna	e. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Bidang Peternakan a. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna b. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna c. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular hewan peliharaan d. Kesehatan masyarakat veteriner e. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna dan Penyuluhan pemasaran produksi peternakan Penyuluhan kualitas gizi pakan ternak
27.	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN a. Belum optimalnya pengunjung di pasar tradisional akibat kurangnya promosi produk perdagangan b. Belum optimalnya peran PKL dan pedagang dalam menjaga kebersihan, ketertiban, peraturan dan tata tertib tempat jualan c. Belum optimalnya sarana prasarana pasar rakyat	DINAS PERDAGANGAN a. Melakukan pelatihan kepada para pedagang dan melakukan promosi produk perdagangan baik secara offline maupun online di social media b. Melakukan pembinaan kepada PKL dan pedagang pasar c. Melakukan revitalisasi pasar rakyat dan pemeliharaan sarana prasarana pasar rakyat
28.	Perindustrian	DINAS TENAGA KERJA a. Permasalahan yang sampai saat ini dihadapi adalah merubah sebagian mindset pengusaha untuk melakukan inovasi usaha sesuai perkembangan. b. SOP (Standar Operating Prosedure) yang harus selalu disesuaikan dengan kondisi disaat pandemi covid 19 c. Masih adanya pandemi covid 19 sehingga masih banyak kegiatan dilaksanakan tidak maksimal ssampai dengan triwulan III d. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, KUKM	DINAS TENAGA KERJA a. Adapun solusi saat ini memberikan pemberdayaan, pembinaan serta melakukan promosi guna mengembangkan mindset pengusaha. b. menyusun SOP (Standar Operating Prosedure) sesuai dengan situasi dan kondisi disaat pandemi covid 19 c. Kegiatan dilaksanakan dengan online, zoom dan tatap muka dilaksanakan di triwulan IV d. Pengusulan personil kepada BKPSDM dan pengusulan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat teknis
29.	Transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA a. Belum adanya Tenaga Penyuluh/Tenaga SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan terlatih di bidang Transmigrasi b. Adanya Pandemi Covid 19 dan PPKM darurat, sehingga pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Transmigrasi tahun anggaran 2021 kurang maksimal b. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi yang menangani Transmigrasi di tingkat Provinsi	DINAS TENAGA KERJA a. Usul Pengadaan Diklat/pelatihan tentang jabatan Penyuluh/jabatan lain di bidang Transmigrasi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Madiun b. Sosialisasi Transmigrasi tahun anggaran 2021 diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat, peserta sosialisasi dibatasi, dan pengaturan jarak antara meja satu dengan yang lain c. Peningkatan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan instansi yang menangani Transmigrasi di tingkat Propinsi melalui undangan narasumber dan kaji banding

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			terkait penyelenggaraan Transmigrasi
30.	Unsur Staf	BAGIAN HUKUM a. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan daerah dengan peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi, dan keserasian antar peraturan perundang-undangan b. Perlu adanya upaya preventif pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Belum adanya pemenuhan hak bagi masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan dihadapan hukum d. Perlunya meningkatkan pelayanan penyebarluasan produk-produk hukum daerah kepada masyarakat melalui website BAGIAN PEMERINTAHAN a. Kurang akuratnya data dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan b. Kurang tertibnya administrasi kecamatan dan kelurahan c. Belum tersedianya data rupa bumi yang update d. Belum ditindaklanjutnya MoU dengan Perjanjian Kerjasama BAGIAN ORGANISASI Secara umum permasalahan yang ada di Bagian Organisasi adalah dinamisasi dan inkonsistensi regulasi pusat sehingga kesulitan dalam penerapan di Daerah BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN a. Belum optimalnya pelaksanaan operasional APBD b. Kurangnya pengetahuan personil perangkat daerah terkait pengadaan barang/jasa pemerintah c. Masih adanya permasalahan terkait capaian progress fisik pelaksanaan kegiatan BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT a. masih adanya masyarakat yang belum faham dalam hal pengajuan bansos kepada pengelola tempat ibadah b. minimnya peran serta OPD TPID dalam memberikan laporan triwulanan c. peraturan perundang-undangan tentang DBHCHT yang sering berubahubah BAGIAN UMUM	BAGIAN HUKUM a. adanya fasilitasi penyusunan produk-produk hukum daerah b. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, adanya kegiatan Kadarkum c. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin d. Pendokumentasian dan publikasi produk-produk hukum daerah melalui website BAGIAN PEMERINTAHAN a. Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait, dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan b. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam rangka Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan melalui Bimtek Administrasi Kecamatan dan Kelurahan c. Melakukan update data rupa bumi dengan menggandeng konsultan d. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam rangka mengatasi masalah pada penyusunan MoU BAGIAN ORGANISASI a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah lain terkait penyikapan terhadap kebijakan dimaksud sebagai bahan referensi pengambilan keputusan b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penerapan di Pemerintah Kota Madiun BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN a. Menyusun pedoman/petunjuk operasional APBD b. Melibatkan dan mengikutsertakan personil perangkat daerah pada bimbingan teknis dan konseling pengadaan barang/jasa pemerintah c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait teknis administrasi pemberian bansos kepada pengelola tempat ibadah (SOP) b. dilakukan rapat koordinasi secara intensif kepada OPD c. koordinasi secara rutin dengan pemerintah provinsi BAGIAN UMUM

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		a. Masih kurangnya pemahaman tentang tupoksi dan koordinasi di internal Bagian Umum b. Masih kurang optimal dalam melakukan koordinasi surat menyurat dengan instansi terkait c. Kurang optimal memanfaatkan teknologi	a. Menata dan menetapkan standar pelayanan administrasi, Meningkatkan koordinasi di internal Bagian Umum b. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, Memberikan pembinaan personel tentang Tata Naskah Dinas c. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, Pemanfaatan teknologi IT dalam pelayanan administrasi
31.	Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	PELAYANAN LEGISLATIF a. Pandemi Covid -19 dan Pemberlakuan PPKM, sehingga berbagai kegiatan mengalami kendala karena kurang optimalnya koordinasi, dibatasinya rapat dan koordinasi tatap muka, dan pembatasan pengumpulan massa; b. Sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal, dalam memenuhi kebutuhan dalam Peta Jabatan, Analisa Jabatan, dan Analisa beban kerja c. Sarana dan prasarana belum terpelihara dengan baik dan belum dimanfaatkan secara optimal d. Tingginya tuntutan pelayanan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD , dimana tuntutan pelayanan tersebut kadang kala di luar ketentuan; e. Padatnya kegiatan kedewanan sehingga agenda yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana secara optimal f. Jumlah Raperda yang telah dibahas tidak sama dengan jumlah Raperda yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan; g. Aspirasi masyarakat yang dihimpun kurang optimal karena adanya Anggota DPRD yang tidak dapat melaksanakan Reses;	PELAYANAN LEGISLATIF a. Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak agar kegiatan tetap dapat dijalankan sesuai jadwal, Proses ketat dan tracing antigen, Sosialisasi yang mendatangkan massa dilakukan di ruang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik dan pembatasan jarak b. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD, melalui pelatihan formal dan informal yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD maupun Instansi Lainnya, Pemanfaatan teknologi untuk memudahkan aktivitas yang menunjang kinerja Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD, baik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun (aplikasi e-kinerja, M-SKP, SIPKD) maupun Instansi Pemerintah lainnya (SIPD, SIK, SIMDA BMD, e-LHKPN, e-LHK ASN, e-SAKIP, e-Monev) Adapun aplikasi yang disediakan oleh Sekretariat DPRD antara lain e-pengaduan, e-aspirasi Rakyat, e-notulen, dan e-inisiatif c. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana secara optimal. Dilaksanakan pelatihan bagi seluruh operator peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD agar seluruh staff bisa mengoperasikan sarpras dengan baik dan benar; d. Terus memberikan pemahaman kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tentang standart pelayanan yang sesuai aturan melalui Bimbingan Teknis yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD, Mengikuti perubahan peraturan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, kemudian menerapkannya e. Melakukan koordinasi antara Pimpinan dan anggota DPRD serta Eksekutif terkait penjadwalan kegiatan DPRD, Penjadwalan kegiatan DPRD dilakukan lebih cermat dan tepat supaya dapat dilaksanakan secara Optimal; f. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait jadwal evaluasi/fasilitasi raperda Kota Madiun; Perda merupakan produk

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			kebijakan politik Pemerintah Madiun diperlukan komitmen bersama Kepala Daerah dan DPRD g. Optimalisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pemanfaatan TI/ Teknologi Informasi, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi e-aspirasi Rakyat dan aplikasi SIPD (ePokir)
32.	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PENGAWASAN a. Bukti pendukung parameter sub unsur SPIP belum sepenuhnya dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang dimonitoring, sehingga Tim monitoring Pelaksanaan SPIP kesulitan dalam melaksanakan karena kekurangan data dukung; b. Perangkat Daerah belum mendokumentasikan kegiatan yang termasuk dalam sub unsur SPIP dengan baik dan terstruktur; c. Tim Asesor APIP masih perlu peningkatan kualitas untuk persiapan sebagai Tim penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun	PENGAWASAN a. Mengoptimalkan sub unsur yang menjadi bahan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan mendokumentasikan dengan baik terhadap bukti pendukung atas pemenuhan parameter sub unsur SPIP dalam bentuk softcopy dan hardcopy secara rapi dan terstruktur; b. Mengadakan Bimbingan Teknis guna mengoptimalkan kualitas Tim Asesor APIP untuk persiapan sebagai Tim penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
33.	Perencanaan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun OPD. b. Masih belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan c. Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan d. Masih belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. optimalisasi/peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun OPD b. optimalisasi/peningkatan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan c. optimalisasi/peningkatan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan d. optimalisasi/peningkatan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.
34.	Keuangan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH a. Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial b. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah BADAN PENDAPATAN DAERAH a. Kurangnya kuantitas SDM petugas pungut b. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan c. Belum optimalnya penggalan potensi terhadap pajak daerah d. Kurangnya akurasi data pajak daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH a. Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial terhadap pihak terkait sehingga menghasilkan suatu kesepakatan dan pemahaman yang sama b. Sering melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan barang milik daerah sehingga menghasilkan pengelolaan barang milik daerah yang optimal dan tepat sasaran BADAN PENDAPATAN DAERAH a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak b. Mengoptimalkan peran dan fungsi petugas pungut c. Mengoptimalkan penggalan potensi pajak daerah d. Adanya pemutakhiran data terbaru

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
35.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN Untuk Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional tidak dapat tercapai 100% karena untuk Pelaksanaan Pembekalan CPNS Formasi Tahun 2020 Tidak dapat dilaksanakan	KEPEGAWAIAN Kegiatan Pembekalan CPNS, tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 karena pada saat ini Kegiatan Pengadaan CPNS, masih dalam tahap SKB, sehingga menunggu pengumuman hasil SKB tersebut. Kegiatan Pembekalan CPNS akan dilaksanakan ketika CPNS tersebut menerima SK Pengangkatan CPNS yang direncanakan pada Bulan Januari 2022
36.	Penelitian dan Pengembangan	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN e. Belum optimalnya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat f. Belum optimalnya pemanfaatan kajian/hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN a. optimalisasi/peningkatan kualitas inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat b. optimalisasi/peningkatan pemanfaatan kajian/hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah
37.	Kesatuan Bangsa & Politik	Badan Kesatuan Bangsa & Politik a. Menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air di masyarakat khususnya pelajar dan generasi muda. b. Dengan adanya 14 Perguruan Pencak Silat dan 24 suku di Kota Madiun yang rentan menimbulkan konflik sosial di masyarakat c. Mendukung peran Partai Politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif dan Pemilih Kepala Daerah Tahun 2024 d. Mendorong organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan e. Meningkatkan koordinasi dalam penanganan ketahanan ekonomi f. Meningkatkan koordinasi dan peran forum kerukunan umat beragama untuk mencegah timbulnya konflik antar umat beragama g. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dan komunikasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba	Badan Kesatuan Bangsa & Politik a. Diadakannya Sosialisasi Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan b. Diadakannya Pembinaan dan sosialisasi c. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol dan pendidikan politik kepada Masyarakat d. Pembinaan Pengurus dan anggota Orkemas e. Koordinasi dengan instansi terkait f. FKUB g. Pembinaan dan sosialisasi Narkoba
38.	Kecamatan	PENYELENGGARAAN KECAMATAN a. Kualitas SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang masih belum memadai b. Sarana dan Prasarana kantor masih kurang memadai. c. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan perlu lebih ditingkatkan karena semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.	PENYELENGGARAAN KECAMATAN a. Pengadaan tenaga upahan guna mengoperasikan komputer Diklat dan sosialisasi b. Pengadaan BMD secara bertahap c. Memberdayakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan melalui musrenbang dan pembangunan lapak dengan swakelola pokmas d. Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan e. Penyediaan lapak untuk peningkatan ekonomi masyarakat

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		d. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif belum merata e. Pemetaan potensi wilayah kelurahan yang belum terprogram membuat usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan belum optimal f. Tuntutan Masyarakat terhadap pelayanan prima kepada Pemerintah g. Sarana dan prasarana kelurahan kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat h. Terbatasnya kualitas SDM di kecamatan dan kelurahan i. Kurangnya peran serta Masyarakat dalam pembangunan dalam Pengembangan UMKM j. Kurang maksimalnya dalam berkoordinasi dan Komunikasi dalam penyelesaian kasus Makam Bong Cino k. Pelayanan aduan masyarakat masih belum ditindak lanjuti secara maksimal yaitu Jembatan Penghubung Sogaten & Patihan l. Masih terdapat Warga Kelurahan di wilayah kecamatan Manguharjo yang menderita gizi buruk Stanting m. Masih terdapatnya ODGJ yang berkeliaran di wilayah Kecamatan Manguharjo n. Jaringan Internet Belajar sebagai pendukung pembelajaran Daring Anak Sekolah o. Masih terdapat warga yang membutuhkan bantuan pembangunan RTLH di wilayah Kecamatan Manguharjo	f. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada public g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan h. Meningkatkan kualitas pegawai untuk mengikuti diklat dan pelatihan i. Pembangunan Lapak di 9 Kelurahan j. Sudah terselesaikan untuk pembebasan tanah antara Pemerintah Kota madiun dengan ahli waris Pemilik Makam dan selanjutnya akan dibangun Rusunawa k. Sudah dikoordinasikan dg dinas terkait untuk pembaguan jembatan l. Akurasi data dalam pemberian layanan Kesehatan dan bantuan dari Pemerintah sudah tersalurkan m. Koordinasi dengan dinas Sosial dalam Penanganan ODGJ sudah di tingak lanjuti n. Wiffi / Jaringan Internaet sudah terpasang di titik – titik Strategis di wilayah Kecamatan Manguharjo o. Data warga yang membutuhkan bantuan RTLH sudah di sampaikan ke Pemerintah dan bantuan pembangunan RTLH bagi dari Pemerintah maupun dari swasta (CSR) sudah disalurkan
39.	BUMD	PENGELOLAAN BUMD PDAM a. Semakin sulitnya menambah jumlah pelanggan. Hal ini disebabkan karena tingkat pelayanan pada akhir tahun 2019 telah mencapai 96,10 %, hampir mencapai titik jenuh karena telah mendekati 100 %. Kondisi Kota Madiun yang sangat mudah mengambil air tanah membuat sebagian besar masyarakat menggunakan sumur dangkal sebagai alternative dalam mendapatkan air bersih. Sehingga semakin berat untuk mendapatkan pelanggan baru. b. Tingginya koefisien jam puncak (c=2,5). Koefisien jam puncak menunjukkan meningkatnya pemakaian air pada saat jam puncak hingga mencapai 2,5 kali rata-rata pemakaian air. Hal ini	PENGELOLAAN BUMD PDAM a. Solusi untuk mengatasi semakin sulitnya menambah jumlah pelanggan yaitu: b. Bekerjasama dengan pengembang perumahan (developer) untuk pemasangan jaringan perpipaan dan sambungan rumah baru. c. Mengadakan penyuluhan akan pentingnya air bersih bagi kesehatan kepada masyarakat kota Madiun. d. Mengadakan program pasang baru gratis. e. Disamping dengan membangun sumur baru yang diharapkan bisa menambah kapasitas produksi, PDAM Melaksanakan rehabilitasi jaringan pipa distribusi untuk

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		mengakibatkan berkurangnya tekanan air pada saat jam puncak walaupun kedua reservoir sudah dioptimalkan, sehingga pada saat jam puncak akan mengalami sedikit penurunan tekanan air terutama di daerah kritis. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun a. Jaringan kantor seperti Kantor Cabang sangat diperlukan untuk lebih mendekatkan kepada pelayanan, dan memperluas daerah operasional BPR, selama ini kantor Operasional yang dimiliki adalah 1 (Satu) Kantor Pusat, dan 8 (Delapan) Kantor Kas semua di Kota Madiun belum memiliki Kantor Cabang. b. SDM adalah merupakan pilar utama dalam menjaga eksistensi suatu BPR untuk bisa terus tumbuh dan eksis dalam industri perbankan, peran SDM sangat besar dalam rangka pencapaian perusahaan. c. Banyaknya kompetitor sebagai pesaing seperti Bank Umum yang membiayai untuk pangsa pasar BPR, sama-sama BPR, Lembaga Keuangan Non Bank seperti Koperasi, Danamon KSP, Pegadaian dan Lembaga Pembiayaan Keuangan, begitu pula lembaga tidak resmi seperti ijon, rentenir. PD. ANEKA USAHA a. Bidang SDM Perilaku pegawai dalam pelayanan kepada konsumen belum maksimal, kedisiplinan dan ketrampilan pegawai masih rendah b. Bidang Manajemen Sistem pelaporan keuangan belum sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku c. Bidang Sarana dan Prasarana/Peralatan Bangunan bekas cucian mobil belum dimanfaatkan.	meningkatkan debit air sehingga kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi setiap saat. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun a. Meningkatkan kepuasan kepada customer dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan nasabah dengan sistem tangkap bola. b. Meningkatkan pemasaran / promosi BPR baik dengan penyebaran dan pengenalan langsung oleh petugas kepada sasaran masyarakat yang potensial, guna meningkatkan Image/ Citra BPR lebih baik lagi, juga memiliki Edukasi / Literasi Keuangan. c. Memberikan imbalan suku bunga yang memadai sesuai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam produk Tabungan dan Deposito. d. Mengupayakan untuk Ekspansi jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabang baru. e. Inovasi dan pengembangan produk baru. f. Mengupayakan penurunan NPL (Non Performing Loan) dengan berbagai cara seperti melakukan pengeplangan agunan, pelelangan agunan melalui KPKNL dan melakukan gugatan ke pengadilan PD. ANEKA USAHA a. Telah dilakukan pelatihan kedisiplinan pegawai melalui pembinaan, pelatihan akuntansi guna penyempurnaan sistem pelaporan, pelatihan perpajakan dan pelatihan-pelatihan lain yang dapat mendukung peningkatan kedisiplinan pegawai; b. Memotivasi kepada pegawai SPBU untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada konsumen; c. Telah dilakukan penggantian mesin dispenser untuk menjamin kualitas dan ketepatan takaran BBM; d. Segera diupayakan pemanfaatan lokasi bekas cucian mobil dengan menggandeng pihak ketiga agar dapat memberi manfaat dan menambah pendapatan Perumda Aneka Usaha

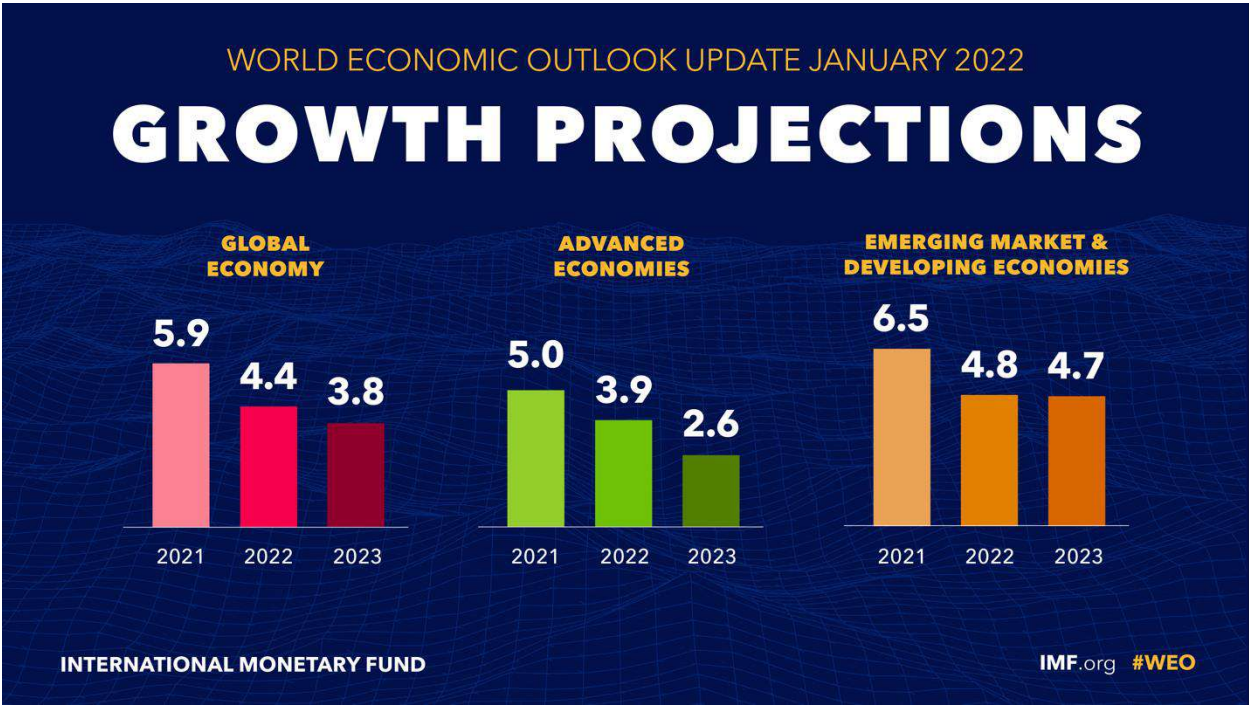
BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi global pada tahun 2023 diprediksikan mengalami penurunan di bandingkan tahun 2022 dan 2021. Perekonomian global memasuki tahun 2022 dalam posisi yang lebih lemah tahun sebelumnya. Ketika varian Omicron COVID-19 baru menyebar, negara-negara telah menerapkan kembali pembatasan mobilitas. Naiknya harga energi dan gangguan pasokan telah mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi dan lebih luas daripada yang diantisipasi, terutama di Amerika Serikat dan banyak pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang. Kondisi tersebut diperparah oleh konflik antar Rusia dan Ukraina diawal bulan Maret 2022. Konflik tersebut menyebabkan harga minyak global meningkat tajam, harga komoditas bahan industri dan makanannya juga meningkat.

Pertumbuhan global diperkirakan akan melambat dari 5,9 pada 2021 menjadi 4,4 persen pada 2022—setengah poin persentase lebih rendah untuk 2022 daripada di World Economic Outlook (WEO) Oktober, sebagian besar mencerminkan penurunan perkiraan di dua ekonomi terbesar. Asumsi yang direvisi menghapus paket kebijakan fiskal Build Back Better dari baseline, penarikan akomodasi moneter lebih awal, dan kekurangan pasokan yang berkelanjutan menghasilkan revisi turun 1,2 poin persentase untuk Amerika Serikat. Di Cina, gangguan yang disebabkan oleh pandemi terkait dengan kebijakan tanpa toleransi COVID-19 dan tekanan keuangan yang berkepanjangan di antara pengembang properti telah menyebabkan penurunan peringkat sebesar 0,8 poin persentase. Pertumbuhan global diperkirakan akan melambat menjadi 3,8 persen pada tahun 2023. Meskipun ini 0,2 poin persentase lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, peningkatan sebagian besar mencerminkan peningkatan mekanis setelah hambatan saat ini pada pertumbuhan menghilang pada paruh kedua tahun 2022. Perkiraan tersebut tergantung pada hasil kesehatan yang merugikan menurun ke tingkat yang rendah di sebagian besar negara pada akhir 2022, dengan asumsi tingkat vaksinasi meningkat di seluruh dunia dan terapi menjadi lebih efektif.



Sumber: IMF (2021)

Gambar 3.1 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2021 – 2023

Seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2021, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi global di prediksi akan tumbuh sebesar 4,4 persen. Pada tahun 2022, negara berkembang di proyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen dan jauh lebih tinggi dari Negara maju yang di proyeksikan hanya sebesar 3,9 persen. Begitupula pada tahun 2023, negara berkembang di proyeksikan tetap lebih tinggi dibandingkan perekonomian maju namun dengan pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih rendah dari tahun 2022 yaitu dari 4,8 persen menjadi 4,7 persen.

Tabel 3.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2023

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2023			
	IMF	WB	OECD
World	3,8	3,2	3,2
Major Economies	2,6	2,3	-
Amerika Serikat	2,6	2,6	2,4
 Euro Area	2,5		2,5
 Jepang	1,8	1,2	1,1
 Emerging Markets	4,7	4,4	-
 China	5,2	5,3	5,1
 Indonesia	6,0	5,1	5,1
 Vietnam	-	6,5	-
 Thailand	4,7	4,3	-
 Malaysia	5,7	4,5	-
 Filipina	6,9		-
 Brazil	1,6	2,7	2,1
 India	7,1	6,8	5,5

Sumber: WEO IMF Jan 2022, GEP WB Jan 2022, OECD Economic Outlook Des 2021, Asian Development Outlook (ADO) ADB Des 2021

Ekonomi Indonesia masih diperkirakan dapat tumbuh tinggi di tahun 2023, walaupun ekonomi global mengalami perlambatan. Proyeksi ekonomi tahun 2023 cenderung direvisi naik untuk negara negara maju, sedangkan untuk negara-negara berkembang beberapa direvisi turun. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 utamanya dipengaruhi oleh penanganan COVID-19 serta keputusan pemerintah dalam mengurangi atau menghentikan stimulus. Perekonomian Indonesia dihadapkan pada tantangan global seperti Gangguan rantai pasok, Krisis Energi, Normalisasi suku bunga, Perkembangan varian baru COVID-19, dan China switching policy.

Berbagai tantangan diatas menyebabkan kondisi perekonomian penuh dengan ketidakpastian namun dengan kecenderungan yang diproyeksikan meningkat . Namun demikian, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian. Berdasarkan fenomena tersebut, maka proyeksi asumsi makro tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2022-2023

Indikator	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>,yoy</i>)	5,2	5,3 – 5,9
Inflasi (% <i>,yoy</i>)	3,0	2,0 – 4,0
Tingkat Bunga SBN 10 Y (%)	6,80	7,34 – 9,16
Nilai Tukar (Rp/ US\$)	14.350	14.300 – 14.800
Harga Minyak/ ICP (USD/barel)	63	80 – 100
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	703	619 – 680
Lifting Gas (BOE/hari)	1.036	1.020 – 1.116

Sumber: Kemenkeu, 2022

Secara umum, indikator makro ekonomi pada *outlook* tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan pada saat coFid19 tahun 2020. Laju inflasi cukup kuat di tahun 2022 dan 2023 namun masih relatif terjaga pada level yang rendah berkisar 2,0-4,0 persen. Kemudian, nilai tukar rupiah bergerak dinamis pada kisaran Rp14.300 hingga Rp14.800 per USD pada tahun 2023. Harga minyak juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 dari sekitar 60 – 70 USD per barel menjadi 80 – 100 USD per barel. Peningkatan ini di proyeksikan sebagai dampak ketidak pastian global yang salah satunya sebagai dampak perang antara Rusai dan Ukraina. Outlook pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan bahwa secara umum indikator makro ekonomi mulai menunjukkan perbaikan setelah covid19.

Tentunya, hal ini tidak lepas dari upaya menggiatkan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama multilateral yang kuat untuk mengatasi dampak pandemi, termasuk membantu negara-negara yang mengalami kendala finansial/pendanaan, dan penyaluran bantuan ke negara-negara dengan kondisi kesehatan yang lemah. Selain kerjasama multilateral, stimulus dalam mitigasi ekonomi Indonesia juga dilakukan dari sisi fiskal maupun moneter.

Peningkatan Produktivitas menjadi kunci penting untuk Tumbuh Dalam Jangka Panjang. Ekonomi Indonesia sudah menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat, tetapi masih ada yang belum pulih akibat dampak luka perekonomian. Efek scars krisis COVID-19 ini sebagian besar mengena sisi produksi seperti penurunan produktivitas perekonomian, penurunan produktivitas tenaga kerja, dan penurunan produktivitas modal/capital. Produktivitas Indonesia menurun selama periode 2010-2019 Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di 5%. Setidaknya terdapat, enam strategi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan peningkatan produktivitas yang mulai di tahun 2023 merupakan titik awal yang penting untuk transformasi ekonomi. Keenam startegi tersebut adalah SDM berdaya saing, Produktivitas Sektor Ekonomi, Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik:(economic powerhouse), dan Pemindahan IKN.



Sumber: Bappenas RI (2022)

Gambar 3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia 2023

Di Jawa Timur, arah kebijakan ekonomi terdapat pada prioritas pertama dari tujuh prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2023. Prioritas pertama Pembangunan Jawa Timur adalah Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.

Secara lebih detail, arah kebijakan ekonomi Jawa Timur diarahkan pada Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM), Standarisasi dan Desain Produk Industri (Sertifikat Halal, SNI), Stabilisasi dan Ketersediaan Bahan Pokok (Siskaperbapo), Sertifikasi Mutu Barang, Perdagangan Antar Pulau, Promosi Investasi (Business Forum & One on one meeting), Pendampingan Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM) bagi PMDN dan UKM, Pekan Pelayanan Perizinan di Sentra Nelayan dan UKM, Milenial Job Center (MJC), Revitalisasi Koperasi, Communal Branding, Pengembangan Koperasi, One Pesantren One Product, Halal Tourism, Integrasi Perpustakaan –Galeri Seni, Inventarisasi Data Kesenian dan Adat Budaya Lokal dan Eco Tourism (Pengembangan Wisata Berbasis Lingkungan Dan Partisipasi Masyarakat).



Sumber: Bappeda Jawa Timur (2022)

Gambar 3. 3 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur 2023

Arah kebijakan ekonomi kota Madiun dapat dilihat dari misi empat dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun dengan tujuan utamanya adalah terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif. Sasaran dari tujuan tersebut adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah Kota Madiun meliputi

1. Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat
2. Peningkatan jaringan tenaga kerja
3. Penyediaan kebijakan ramah investasi
4. Penyederhanaan prosedur pendukung perijinan dan investasi
5. Peningkatan kontribusi sector perdagangan dan jasa terhadap PDRB

6. Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan
7. Peningkatan Pengelolaan Pariwisata
8. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif
9. Pengembangan ekonomi kreatif
10. Pengembangan ekonomi digital masyarakat
11. Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro
12. Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
13. Peningkatan kelembagaan koperasi
14. Peningkatan ketersediaan pangan
15. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
16. Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
17. Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW
18. Peningkatan jejaring sosial
19. Penguatan program pengentasan kemiskinan



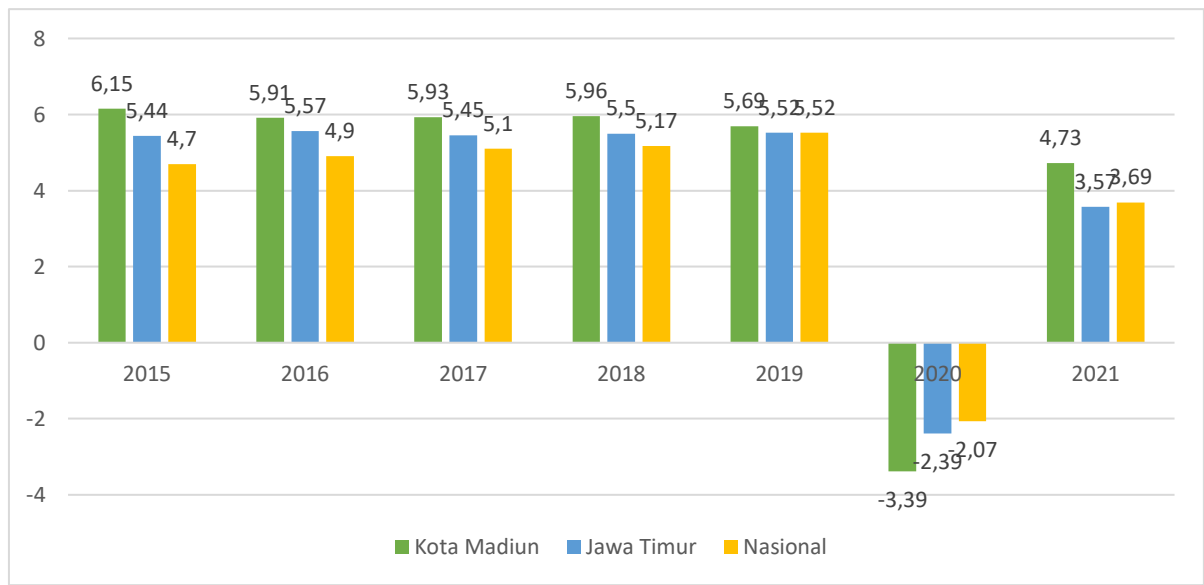
Sumber: Bappeda Kota Madiun(2022)

Gambar 3. 4 Arah Kebijakan Ekonomi Dalam RPJMD Kota Madiun

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 - 2021

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam beberapa periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Untuk Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB (ADHK) Tanpa Migas.

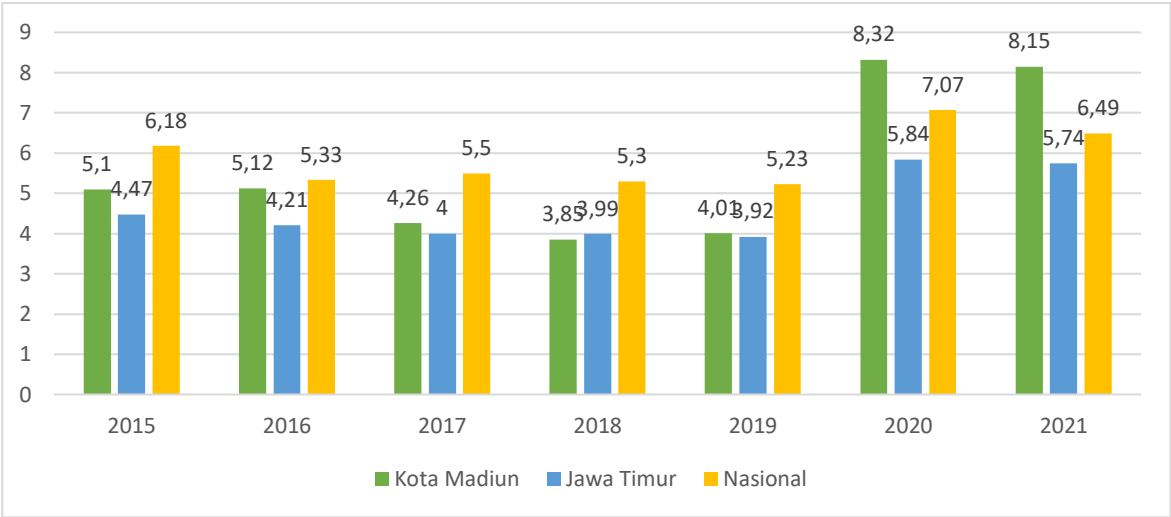
Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami tren yang relatif stabil diangka 5,69 persen. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sebesar 5,93 persen mengalami sedikit peningkatan hingga 5,96 persen tahun 2019. Pada tahun 2020, sebagai dampak COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi sebesar -3,39 persen.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2022

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2021

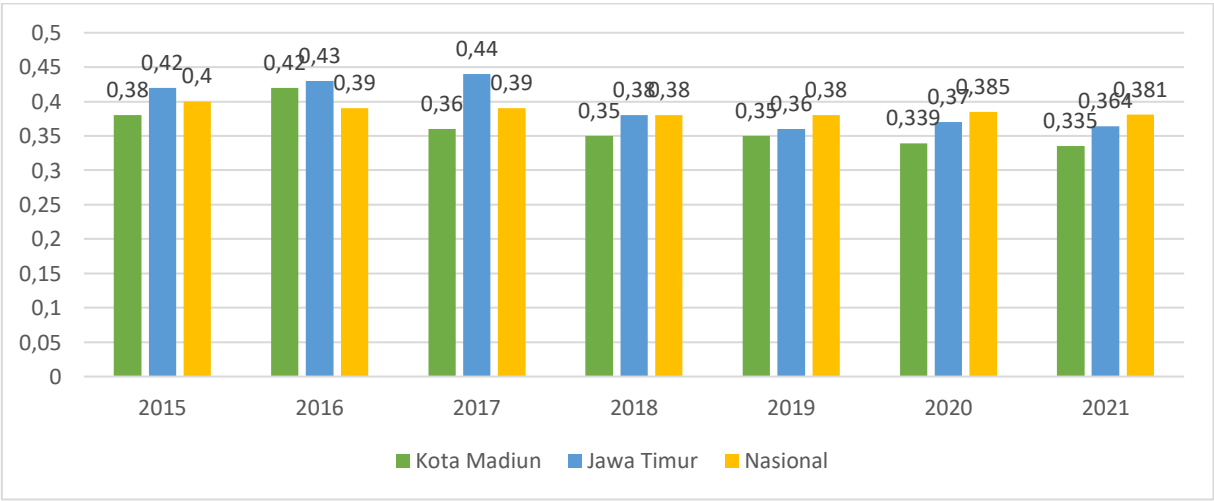
Sebelum terjadinya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2015 sebesar 6,15 persen jauh diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang hanya sebesar 5,44 persen dan 4,7 persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan hingga 5,69 persen namun masih diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Sebagai dampak pandemic Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota madiun mengalami kontraksi yang dalam yaitu sebesar -3,39 persen di bandingkan Jawa Timur dan Nasional dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar -2,39 persen dan -2,07 persen. Penurunan yang sangat drastis pada pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Covid-19, mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makro ekonomi Kota Madiun masih rentan terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,73 persen. Nilai tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur dan melebihi provinsi Jawa Timur dan nasional.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2022

Grafik 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2021

Dalam lima tahun terakhir sebelum terjadinya pandemic covid-19, TPT kota Madiun selalu berada di bawah TPT nasional. Pada tahun 2015 TPT Kota Madiun sebesar 5,10 persen berada di atas TPT Jawa Timur (4,47 persen) namun masih di bawah TPT Nasional (6,18 persen). Pada tahun 2019, TPT Kota Madiun sedikit diatas Jawa Timur tapi jauh di bawah Nasional. Namun, pandemic covid-19 tahun 2020 menyebabkan TPT Kota Madiun mengalami peningkatan sebesar 8,32 persen. Nilai tersebut diatas TPT Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,84 persen dan 7,07 persen. Pada tahun 2021, TPT kota Madiun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,15 persen. Nilai TPT tersebut lebih tinggi dibandingkan pada level provinsi Jawa Timur dan nasional.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2022

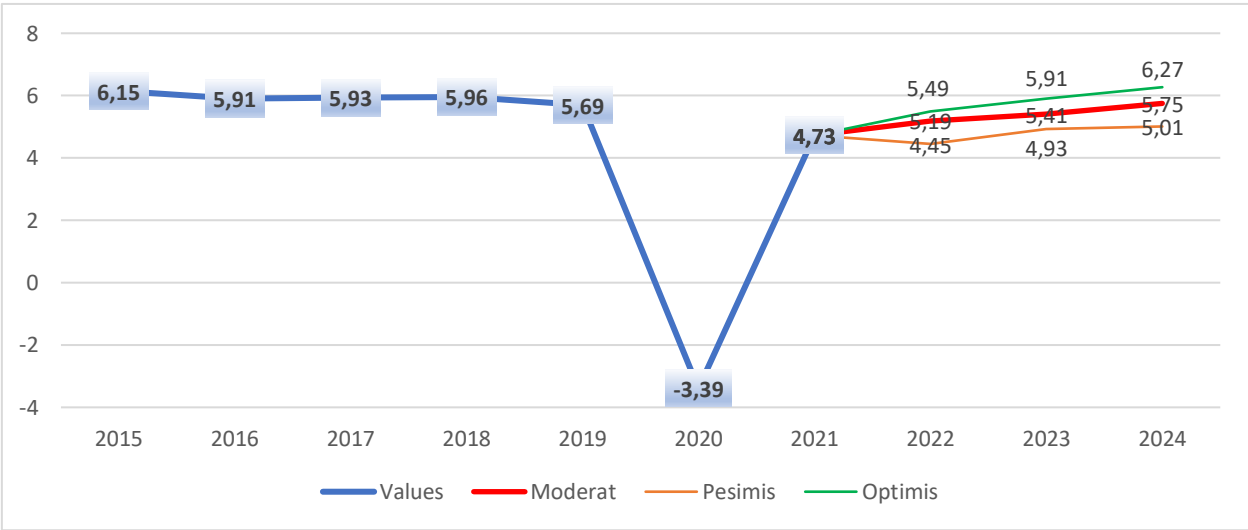
Grafik 3.3 Gini Rasio Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2020

Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi saja namun juga dilihat dari aspek pemertaan pembangunan yang salah satunya di tunjukan oleh gini ratio.

Gini ratio Kota Madiun dalam tiga tahun terakhir selalu di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada Tahun 2017, gini rasio Kota Madiun Sebesar 0,36 lebih rendah dari pada Jawa Timur (0,44) dan Nasional (0,39). Ketika terjadi Pandemi Covid-19, ketimpangan pendapatan Kota Madiun justru mengalami penurunan menjadi sebesar 0,339. Nilai tersebut terendah dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2021, ketimpangan pendapatan mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 0,335. Nilai gini tersebut lebih baik dibandingkan di level provinsi Jawa Timur dan Nasional

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Madiun Tahun 2022 dan Tahun 2023

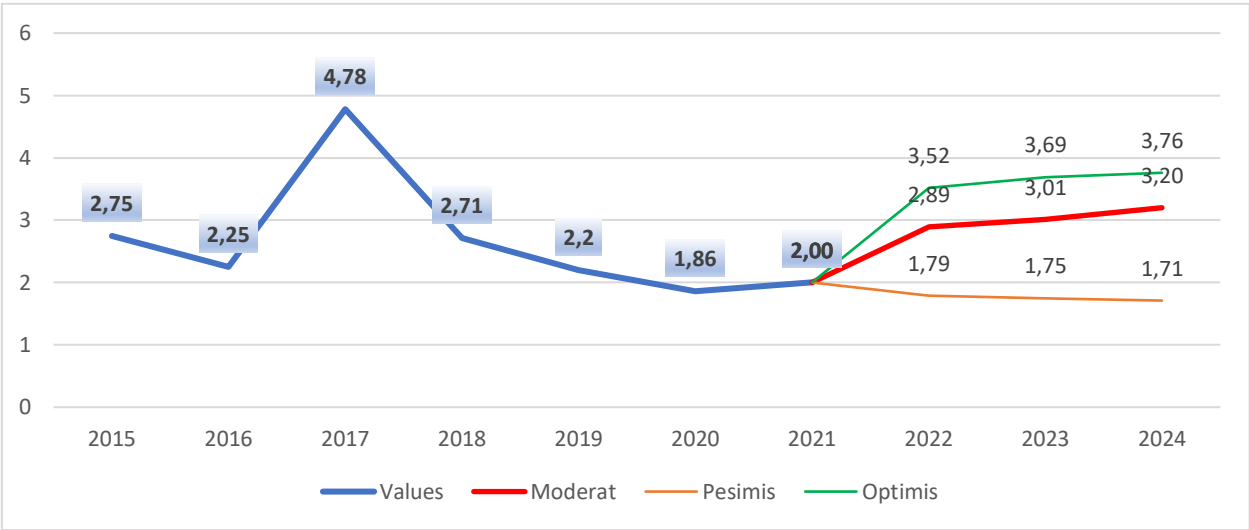
Pada tahun 2020, tantangan utama perekonomian Kota Madiun adalah penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan pada tahun selanjutnya, tantangan terbesar adalah pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak dari pandemi tersebut. Hasil proyeksi dengan berbagai skenario yang digunakan, prospek perekonomian Kota Madiun Pasca COVID-19 menunjukkan proyeksi kondisi ekonomi yang mengalami perbaikan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.



Grafik 3.4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2023

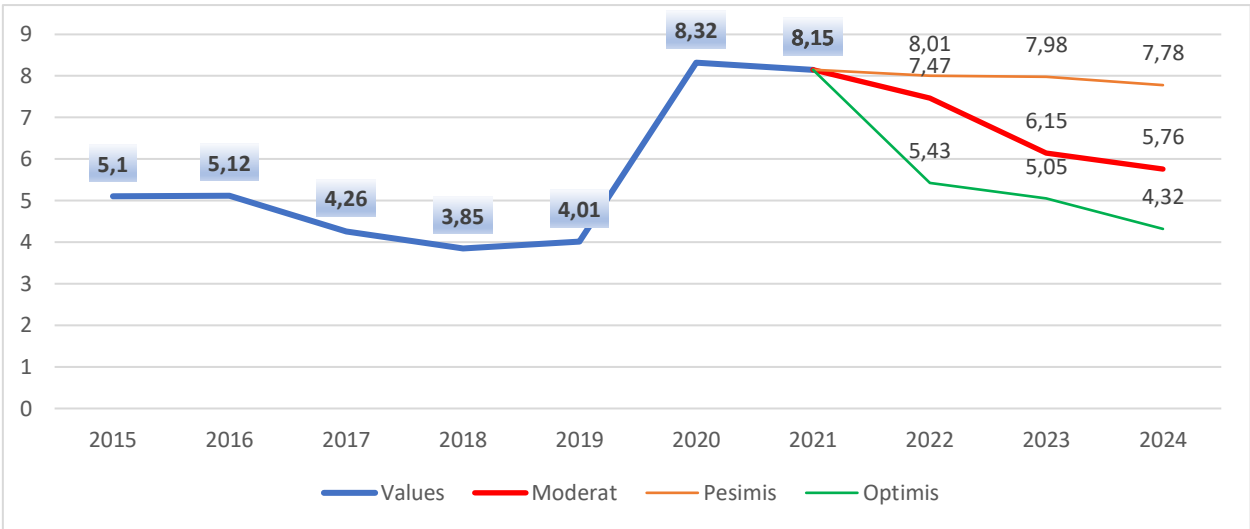
Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan. Pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan ekonomi masih cukup progresif dengan adanya peningkatan yakni dari 5,93 ke 5,96. Namun demikian, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan 5,69 persen dan mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 yaitu menjadi minus 3,39 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,73 persen.

Pada tahun 2022, dengan asumsi program vaksinasi Covid19 telah berhasil menurunkan kasus Covid19, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi 5,19 persen dengan skema moderat. Sedangkan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 5,41 persen.



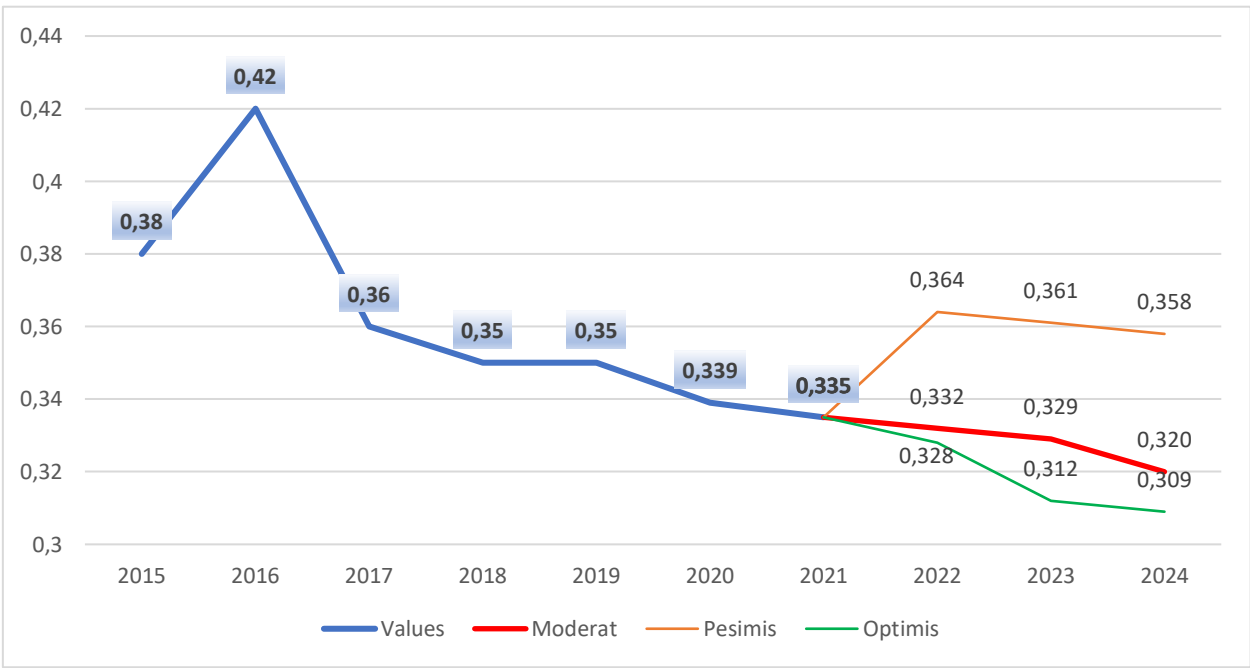
Grafik 3.5 Proyeksi Inflasi Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Inflasi Kota Madiun dalam tiga tahun terakhir mengalami nilai yang fluakuatif. Pada tahun 2015, inflasi sebesar 2,75 persen dan mengalami peningkatan sebesar 4,78 persen tahun 2017. Setelah tahun 2017, nilai inflasi mengalami trend yang semakin menurun. Pada tahun 2019, tingkat inflasi mengalami penurunan sebesar 2,20 persen. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap inflasi tahun 2020 mengalami penurunan hingga 1,86 persen. Penurunan tersebut mengindikasikan kondisi daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak luas COVID-19. Pada tahun 2021, tingkat inflasi mengalami perbaikan dan berada pada angka 2,00 persen. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023, nilai inflasi di proyeksikan sebesar 2,89 persen dan 3,01 persen dengan skema moderat. Nilai inflasi yang stabil dalam perekonomian, jika nilainya berada pada rentang 3 – 5 persen.



Grafik 3.6 Proyeksi TPT Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

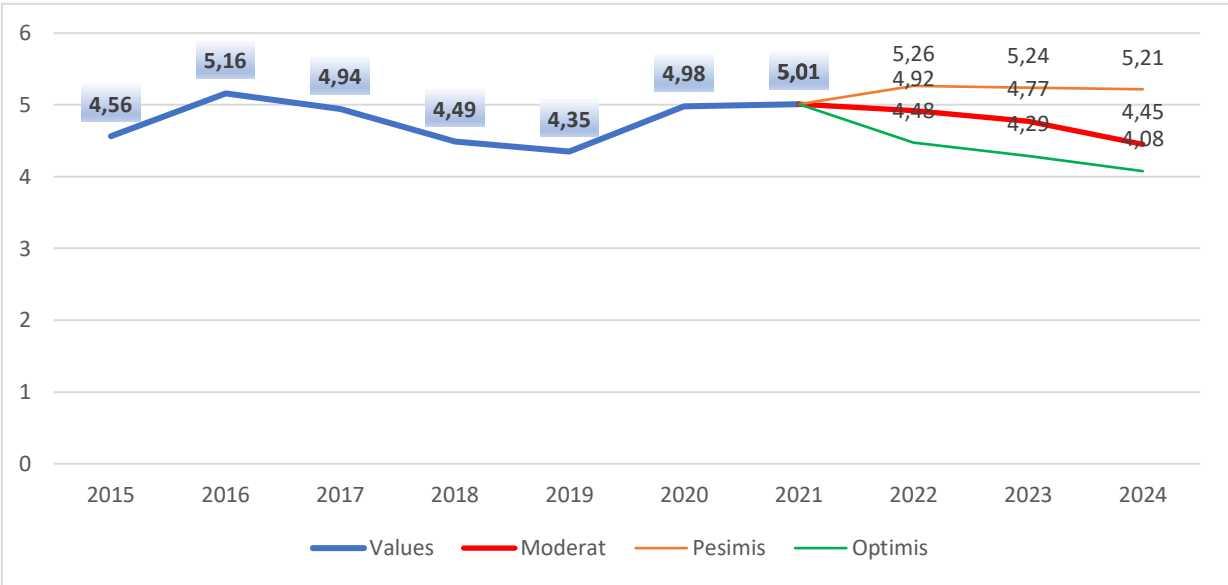
Seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun tahun 2020, TPT mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, TPT Kota Madiun sebesar 4,01 persen. Kemudian, pada tahun 2020, TPT mengalami peningkatan sebesar 8,32 persen. Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, TPT masih sangat tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 8,15 persen. Dengan tren pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, TPT di proyeksikan akan mengalami penurunan masing – masing sebesar 7,47 persen tahun 2022 dan 6,15 persen tahun 2023 dengan skema moderat.



Grafik 3.7 Proyeksi Ketimpangan pendapatan Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Meski terdapat pelemahan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya TPT sebagai dampak COVID-19, ketimpangan pendapatan tahun 2020 justru mengalami penurunan hingga 0,339.

Kemudian di tahun 2021 sampai 2024, rasio gini mengalami sedikit penurunan menjadi 0,335. Pada tahun 2022 dan 2023, indeks gini di proyeksikan mengalami penurunan masing – masing sebesar 0,332 dan 0,329 dengan skema moderat. Nilai indek diatas 0,30 mengindikasikan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat berkategori sedang.



Grafik 3.8 Proyeksi Tingkat kemiskinan Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tingkat kemiskinan di Kota Madiun sejak tahun 2016 – 2019 terus mengalami penurunan. Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang relatif cepat. Namun pada tahun 2019, penurunan kemiskinan mengalami perlambatan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebagai dampak pandemic COVID-19 yaitu sebesar 4,98 persen. Pada tahun 2021, dengan masih terjadinya eskalasi pandemic, tingkat kemiskinan sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,01 persen. Dengan asumsi, perekonomian kota Madiun terus mengalami peningkatan yang didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali maka tingkat kemiskinan pada tahun 2022 dan 2023 di proyeksikan mengalami penurunan dengan nilai masing – masing sebesar 4,92 persen dan 4,77 persen.

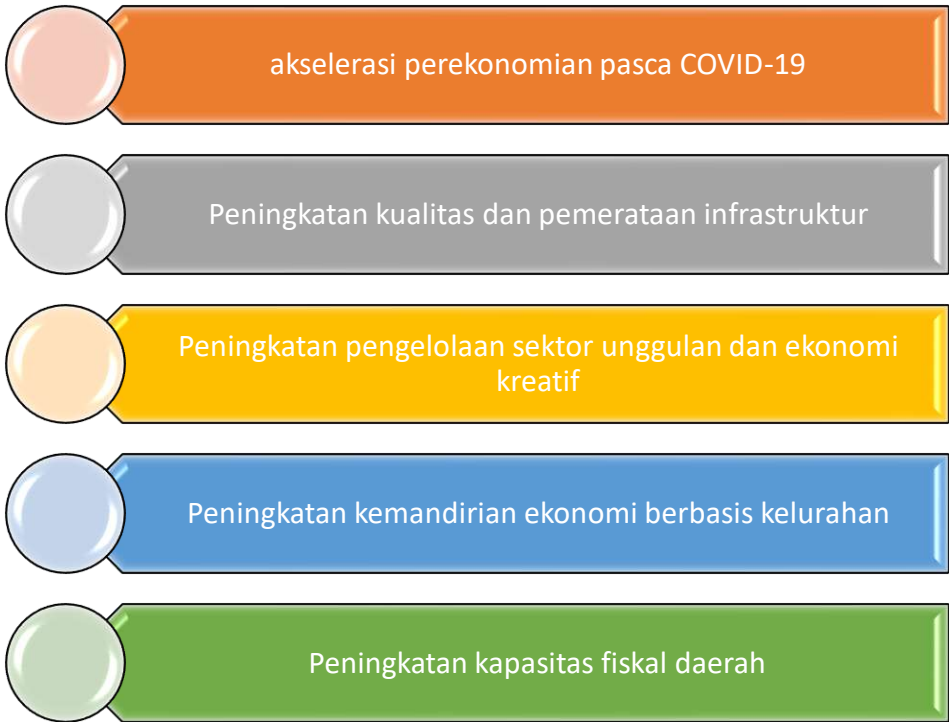
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2023

Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun tahun 2023 mengikuti kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah Pusat, Jawa Timur dan RPJMD Kota Madiun. Tahun 2023, kebijakan ekonomi diarahkan pada pemulihan Covid-19 meliputi tata kelola pemerintahan, penanganan kesehatan, penanganan sosial dan peningkatan infrastruktur untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan kebijakan tersebut, perekonomian kota Maidun diharapkan mengalami peningkatan minimal seperti sebelum Covid.



Gambar 3.5 Arah Kebijakan Penanganan Covid-19 Kota Madiun

Arah kebijakan ekonomi di fokuskan pada penguatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digitlekonomi Kota Madiun sebagai dampak COVID-19. Beberapa kebijakan tersebut fokus pada pemulihan (*recovery*) kondisi perekonomian pasca wabah COVID-19, peningkatan infrastruktur daerah, dan penguatan kondisi ekonomi daerah. Secara rinci, arah kebijakan Kota Madiun Tahun 2023 berdasarkan kondisi ekisting dan permasalahan pembangunan antara lain:



Grafik 3.6 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023

1. Akselerasi ekonomi daerah pasca COVID-19

Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada pemulihan/*recovery* dampak COVID-19 pada semua sektor ekonomi. Dalam rangka percepatan *recovery* perekonomian, maka difokuskan pada sektor unggulan dan potensial, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,19 persen dengan skenario moderat Tahun 2022. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah dijaga pada posisi 3–5 %, inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

2. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan infrastruktur kawasan baik kelurahan maupun kecamatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah

3. Peningkatan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif

Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi *recovery* dari dampak COVID-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, pertanian dan agroindustry.

4. Peningkatan kemandirian ekonomi berbasis kelurahan

Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan kelurahan dengan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal serta mengoptimalkan penggunaan program pengemabngan keluarahn untuk menstimulus perekonomian

5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah

Kebijakan relaksasi dalam rangka *recovery* COVID-19 dapat difokuskan pada stimulus fiskal bagi perekonomian dan dunia usaha, salah satunya dengan kebijakan *sunset policy*. Kebijakan relaksasi ini dapat diikuti dengan peningkatan program pemberdayaan Usaha Mikro dan koperasi

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Madiun mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Madiun dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

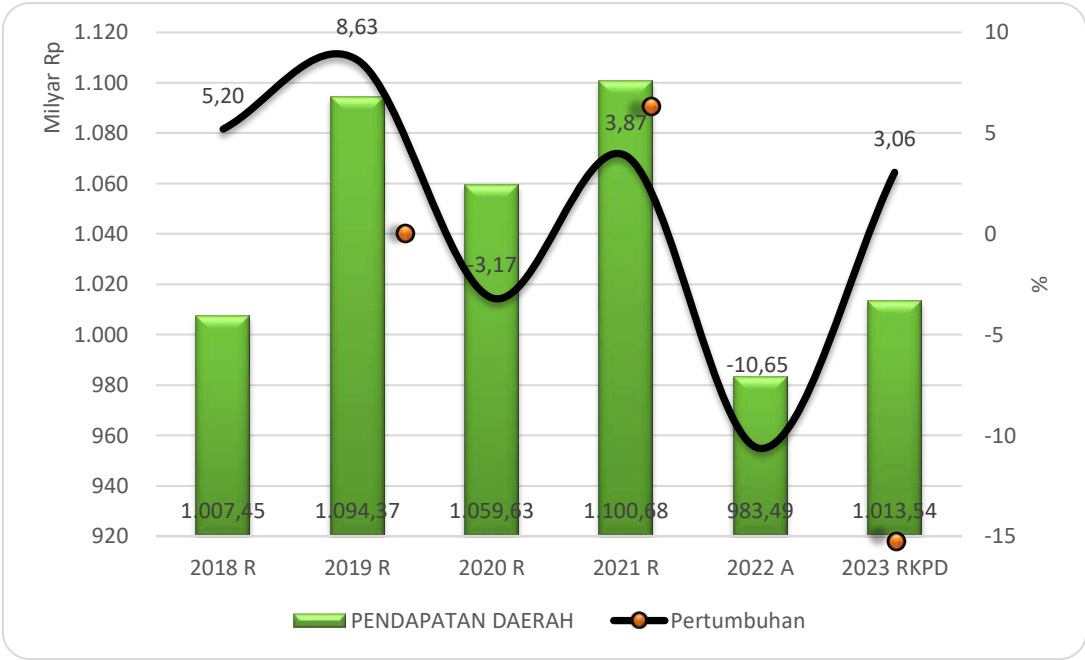
Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan transfer bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selanjutnya pendapatan yang sah terdiri dari Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota. Proyeksi keuangan daerah Kota Madiun Tahun 2023 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Asumsi Makro RKPD Kota Madiun 2023

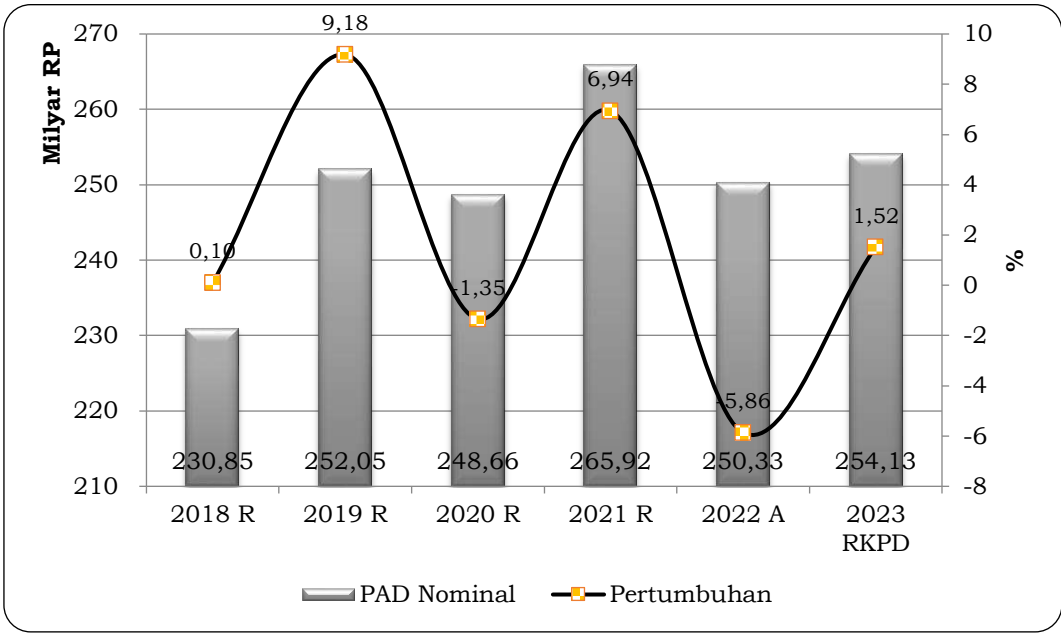
No	Indikator Makro	Satuan	Target RKP 2023	Target RKPD Kota Madiun 2023
1	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,9	5,41
2	Tingkat kemiskinan	%	7,0 – 8,0	4,77
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,3 – 6,0	6,15
4	Indek Pembangunan Manusia	-	73,29 – 73,35	82,15
5	Gini Rasio	-	0,375 – 0,378	0,332

Asumsi diatas, didasarkan pada rentang skenario pesimis ke optimis seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab 3.1.2. Selain asumsi makro diatas, beberapa asumsi lainnya adalah tingkat inflasi kisaran 2 – 3 persen; Pendapatan Transfer diproyeksikan turun sebesar 2,41 persen; dan target anggaran tahun 2023 diproyeksikan memiliki SiLPA Rp 0.



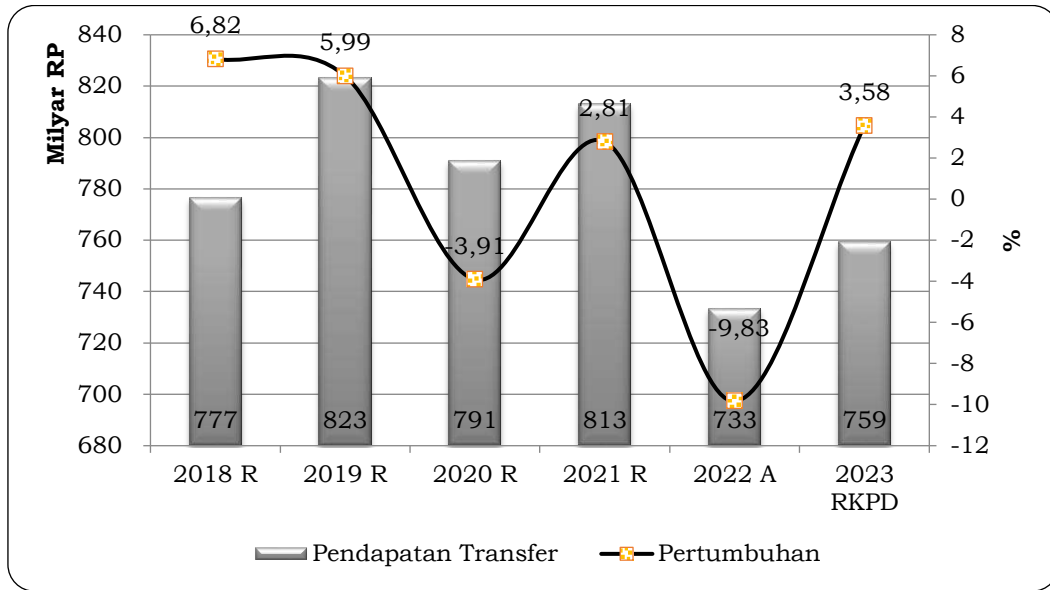
Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022
Grafik 3.9 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2018–2023

Pertumbuhan pendapatan nominal Kota Madiun sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren yang semakin meningkat. Namun pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,63 persen. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah pertumbuhannya menunjukkan penurunan sebesar 3,17 persen dan meningkat kembali menjadi 3,87 persen tahun 2021. Selanjutnya, pada Tahun 2022 anggaran pendapatan daerah mengalami penurunan hingga minus 10,65 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan meningkat sebesar 3,06 persen



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022
Grafik 3.10 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2018–2023

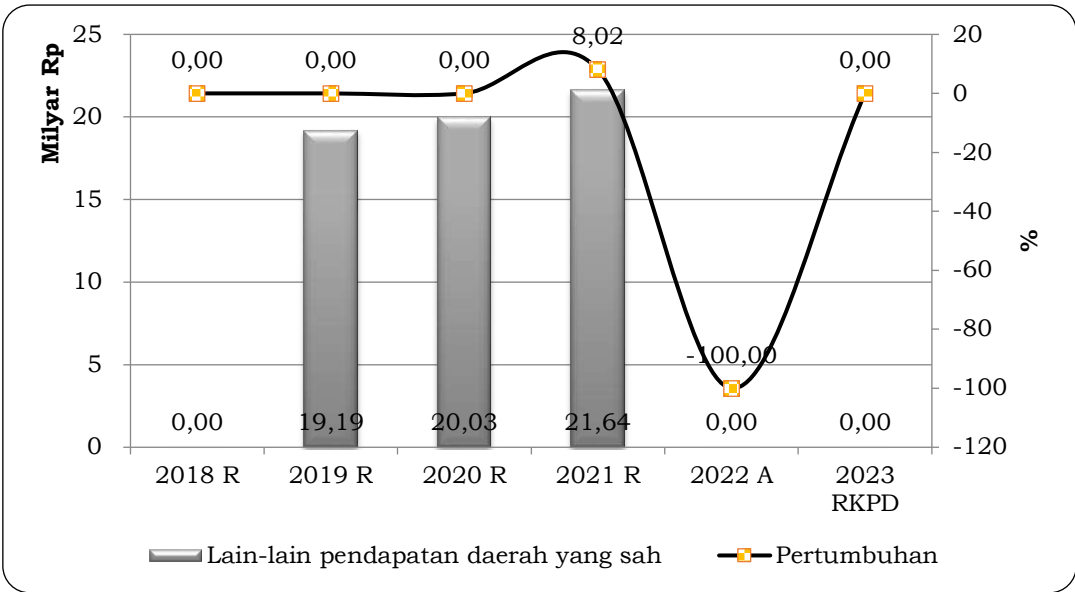
PAD tahun 2021 mengalami pertumbuhan dan nominal tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, pertumbuhan PAD di proyeksikan mengalami penurunan hingga minus 5,86 persen. Sedangkan pada tahun 2023, PAD di proyeksikan mengalami peningkatan baik dari sisi pertumbuhan maupun nominal dibandingkan tahun 2022 dengan nilai masing – masing 1,52 persen dan 254,13 milyar. Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam grafik berikut:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Grafik 3.11 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2018–2023

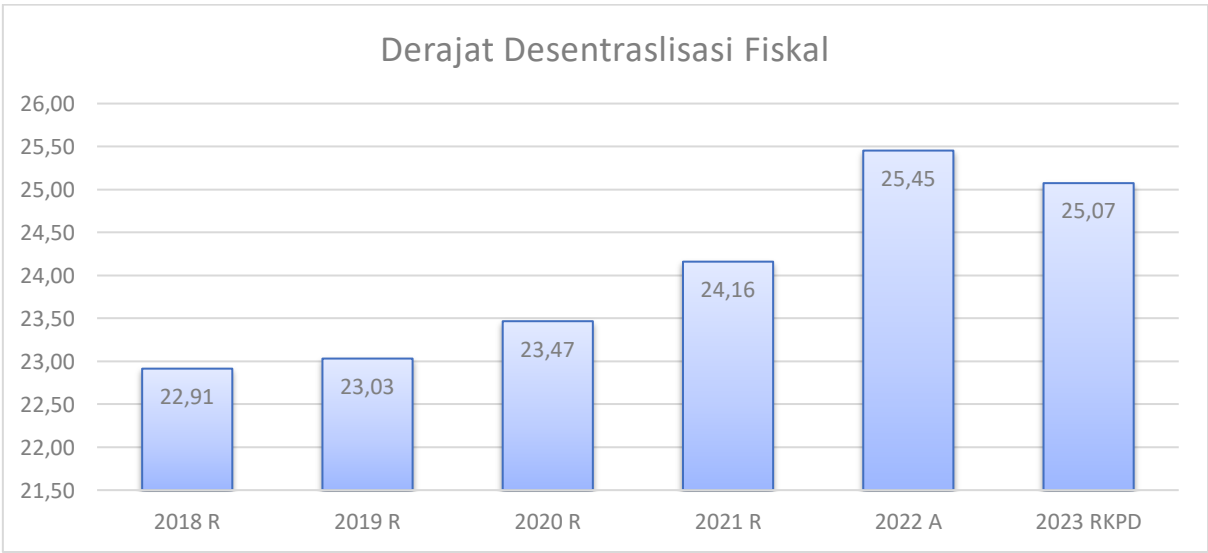
Secara nominal, realisasi pendapatan transfer sampai dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018, persentase peningkatan pendapatan transfer sebesar 6,82 persen dan terus mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan pendapatan transfer mengalami peningkatan hingga 2,8 persen, namun kembali menurun sebesar minus 9,83 persen pada tahun 2022. Tahun 2023 diperkirakan pertumbuhan pendapatan transfer kembali meningkat dibandingkan tahun 2021 dan 2022, menjadi 3,58 persen. Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Grafik 3.12 Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2018-2023

Selama periode 2019 dan 2020, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2019, realisasinya sebesar Rp. 19,19 milyar dan meningkat menjadi Rp. 20,03 Milyar tahun 2020. Pada tahun 2021, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 21,64 Milyar dengan pertumbuhan sebesar 8,02 persen. Sedangkan pada APBD 2022 dan RKPD 2023, nilai komponen pendapatan ini di proyeksikan nol atau tidak terdapat pendapatan daerah dari komponen ini khususnya dari sub komponen hibah. Berdasarkan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, maka perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

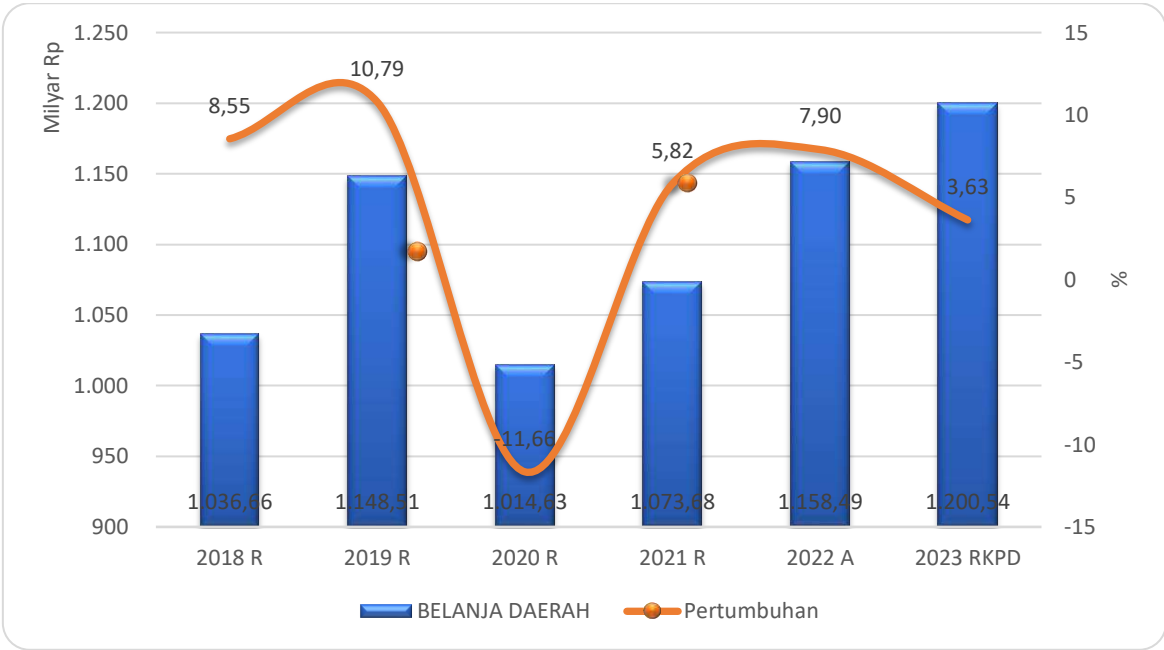
Grafik 3.13 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2018-2023

Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Madiun pada Tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan meningkat signifikan dibandingkan empat tahun sebelumnya. Pada Tahun tersebut, Derajat Desentralisasi Fiskal diproyeksikan sebesar 25,45 dan 25,07. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, yakni sebesar 24,16 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proyeksi yang ditetapkan mengarah pada peningkatan derajat desentralisasi fiskal ditengah pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi covid19. Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun dari 2017 sampai dengan 2020, target 2021 dan proyeksi Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2018 s.d Tahun 2023

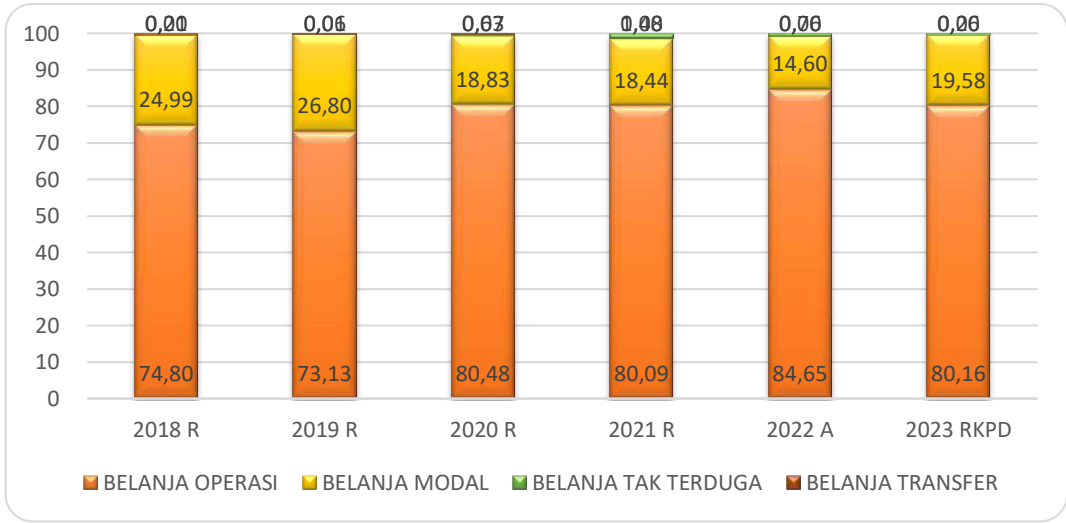
	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	TARGET 2023
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	230.847.977.146,73	252.048.754.413,59	248.656.192.759,32	265.920.295.216,86	250.325.014.082,00	254.132.495.764,95
1.1.1.	Pajak daerah	83.454.704.361,41	91.077.191.655,45	90.286.840.987,07	87.874.777.059,32	86.255.000.000,00	91.066.000.000,00
1.1.2.	Retribusi daerah	19.138.960.648,50	20.301.325.919,00	15.291.324.019,00	17.463.721.195,00	17.841.947.807,00	18.340.236.225,00
1.1.3.	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.365.402.573,59	14.641.711.340,55	15.216.268.562,40	16.199.882.796,95	15.216.268.562,00	15.158.702.323,95
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	114.888.909.563,23	126.028.525.498,59	127.861.759.190,85	144.381.914.165,59	131.011.797.713,00	129.567.557.216,00
1.2.	Pendapatan Transfer	776.598.262.990,91	823.129.463.583,00	790.939.408.652,00	813.126.832.914,00	733.164.313.051,00	759.408.545.410,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	678.417.066.007,00	737.079.907.650,00	705.872.676.797,00	709.162.104.477,00	671.774.862.000,00	673.936.270.000,00
1.2.1.01	<i>Dana Perimbangan</i>	678.417.066.007,00	681.537.181.650,00	705.872.676.797,00	583.142.265.083,00	558.175.629.000,00	653.967.492.000,00
1.2.1.01.01.1	<i>Dana bagi hasil pajak</i>	25.390.798.853,00	16.076.390.385,00	34.444.290.949,20	33.962.127.578,00	24.161.094.000,00	24.161.094.000,00
1.2.1.01.01.2	<i>Dana bagi hasil bukan pajak</i>	67.464.332.495,00	52.685.578.633,00	51.666.436.423,80	63.851.956.219,00	49.596.509.000,00	49.596.509.000,00
1.2.1.01.01.3	<i>Dana Bagi hasil cukai</i>	13.119.146.000,00	13.939.983.813,00	0	19.833.010.286,00	18.922.855.000,00	21.084.263.000,00
1.2.1.01.01.4	<i>Dana Alokasi Umum</i>	501.753.246.649,00	522.596.024.000,00	473.852.439.000,00	465.495.171.000,00	465.495.171.000,00	465.495.171.000,00
1.2.1.01.01.5	<i>Dana Alokasi khusus</i>	70.689.542.010,00	76.239.204.819,00	72.596.481.424,00	72.994.976.394,00	93.630.455.000,00	93.630.455.000,00
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	0	55.542.726.000,00	73.313.029.000,00	53.024.863.000,00	19.968.778.000,00	19.968.778.000,00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.181.196.983,91	86.049.555.933,00	85.066.731.855,00	103.964.728.437,00	61.389.451.051,00	85.472.275.410,00
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	79.153.128.616,00	84.934.976.933,00	84.049.652.855,00	103.062.649.437,00	61.234.672.051,00	84.656.513.410,00
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	19.028.068.367,91	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00	902.079.000,00	154.779.000,00	815.762.000,00
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0.00	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	0,00	0,00
1.3.1.	Hibah	0.00	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	0.00	0.00
1.3.2.	Dana darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.007.446.240.137,64	1.094.367.497.996,59	1.059.625.581.411,32	1.100.682.829.130,86	983.489.327.133,00	1.013.541.041.174,95

Sumber: BPPKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2021



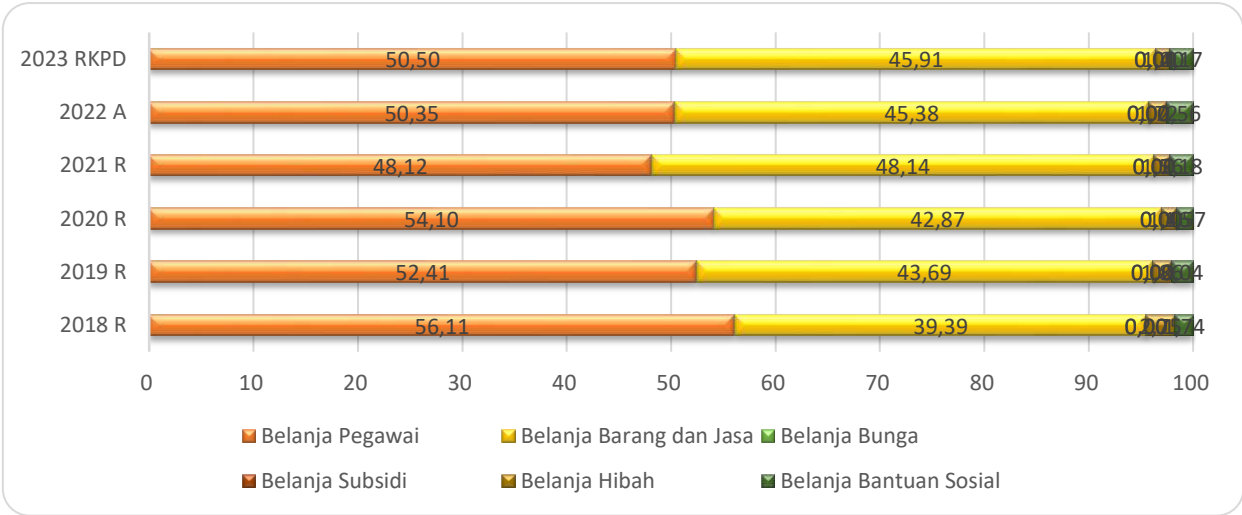
Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022
Grafik 3.14 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2018-2023

Pertumbuhan belanja daerah pada Tahun 2023 diproyeksikan menurun dibandingkan target tahun sebelumnya. Penurunan tersebut sebesar 3,27 persen. Pada tahun 2023, belanja daerah di proyeksikan sebesar Rp 1,2 triliun. Dengan demikian, beberapa pos belanja, baik belanja operasi, modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer akan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022
Grafik 3.15 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2018-2023

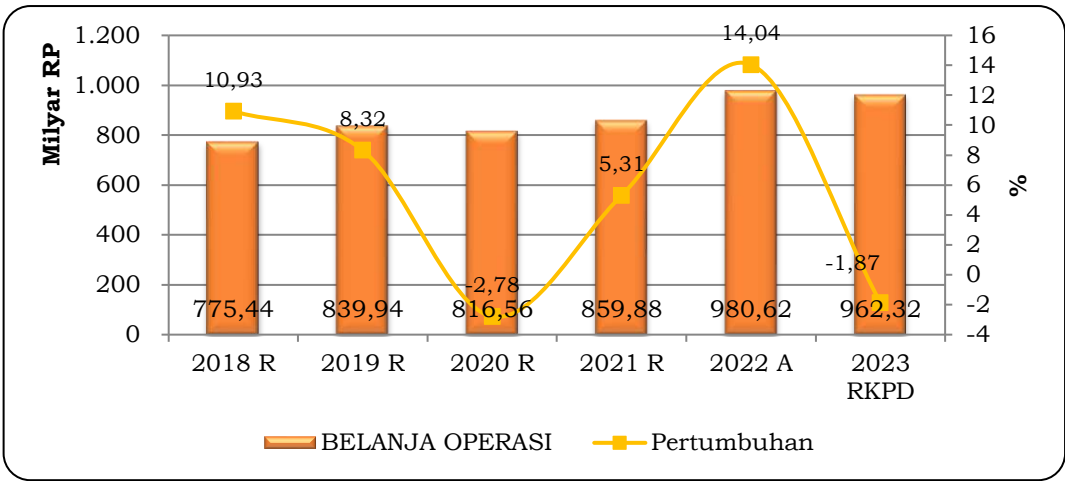
Proyeksi komposisi belanja pemerintah Kota Madiun Tahun 2023, sebagian besar masih dialokasikan pada belanja operasi. Pada Tahun 2023, persentase belanja operasi diproyeksikan sebesar 80,16 persen. Nilai tersebut dapat dikategorikan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 84,65 persen. Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Grafik 3.16 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2018–2023

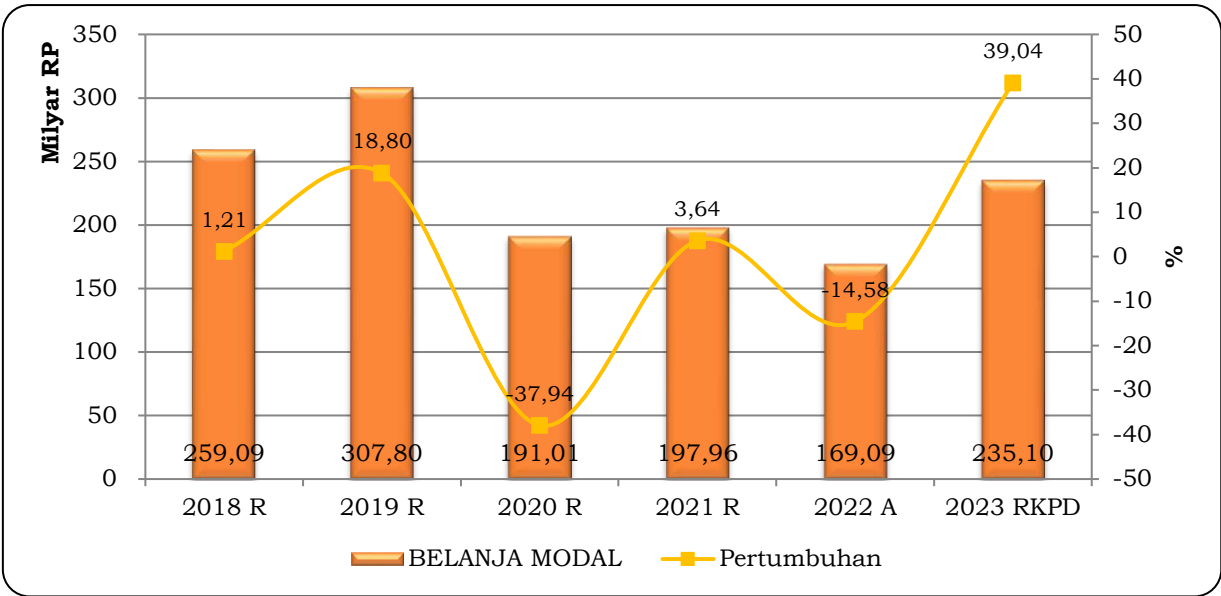
Komposisi Belanja operasi dari tahun ke tahun memiliki komposisi yang relatif sama. Meskipun secara nominal nilainya berubah dari tahun ke tahun, komposisi terbesar masih terdapat pada belanja pegawai. Persentase belanja pegawai pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 50,50 persen. Angka tersebut tergolong sedikit meningkat di bandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 50,35 persen. Keseluruhan kondisi tersebut merupakan proyeksi belanja yang menyesuaikan dengan situasi, kondisi, serta prospek Keuangan Kota Madiun Tahun 2023.



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Grafik 3.17 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2018–2023

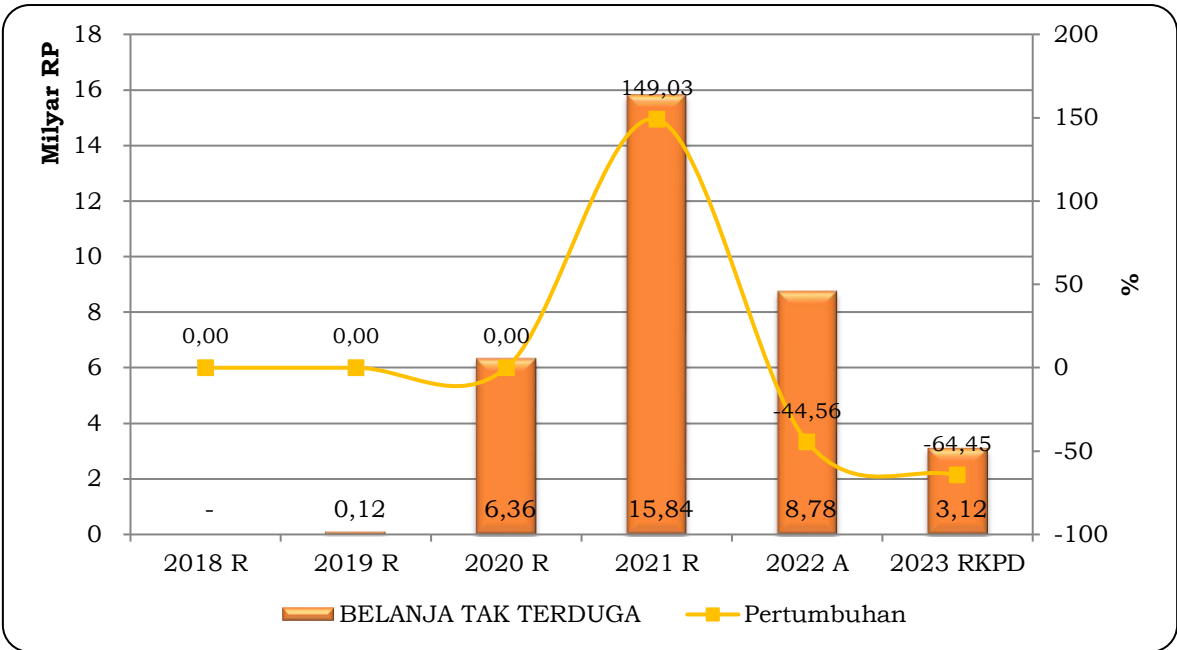
Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir belanja operasi menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 14,04 persen dengan nominal Rp 980,62 Milyar. Pada anggaran RKPD tahun 2023 belanja operasi ditargetkan sebesar Rp 962,23 milyar. Selanjutnya adalah grafik perkembangan pertumbuhan Belanja Modal tahun 2018 hingga 2023:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Grafik 3.18 Perkembangan Belanja modal Kota Madiun Tahun 2018–2023

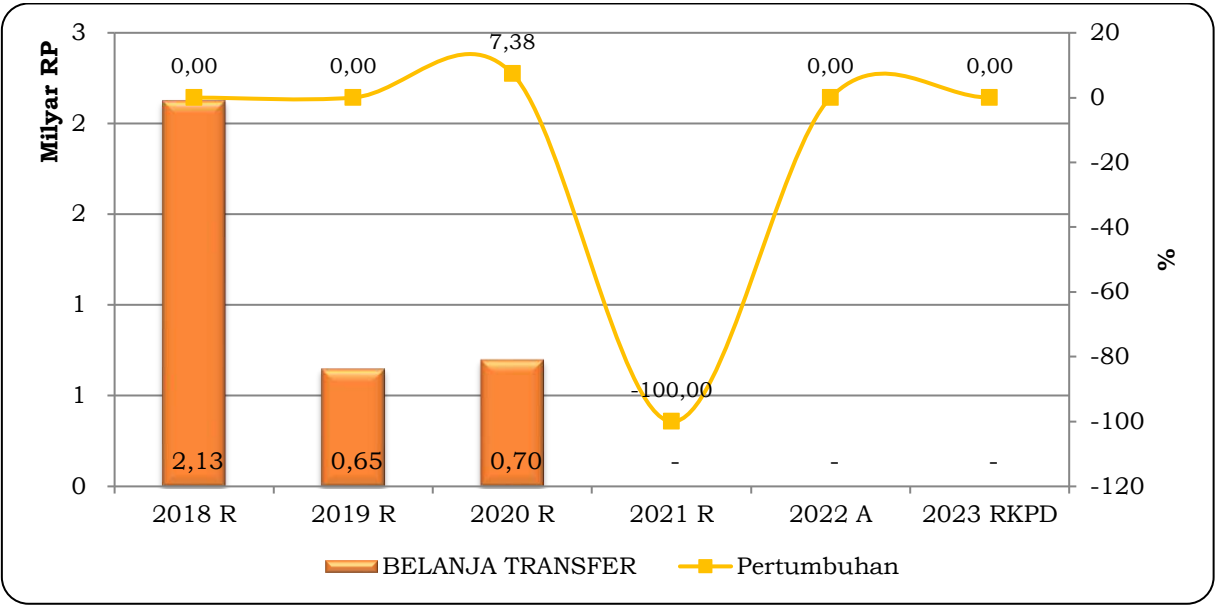
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir belanja modal mengalami tren fluktuatif. Komposisi Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Bangunan Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan terakhir Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Pada tahun 2020, belanja modal mengalami penurunan sebesar minus 37,94 persen sebagai dampak refokusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan dampak Covid19. Pada realisasi tahun 2021, belanja modal di meningkat hingga 3,64 persen atau sebesar Rp 197,96 Milyar. Sedangkan pada tahun 2023, belanja modal di proyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 39,04 persen atau Rp 235,10 Milyar. Perkembangan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Grafik 3.19 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2018–2023

Peningkatan yang signifikan belanja tak terduga terjadi pada tahun 2020 seiring dengan terjadinya pandemic Covid19. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 0,12 Milyar meningkat menjadi 6,36 Milyar pada tahun 2020. Peningkatan terjadi karena penyesuaian anggaran akibat adanya pandemi. Pada tahun anggaran 2022 dan anggaran RKPD tahun 2023 belanja tak terduga mengalami penurunan masing-masing sebesar 8,78 milyar dan 3,12 Milyar. Selanjutnya perkembangan Belanja Transfer dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

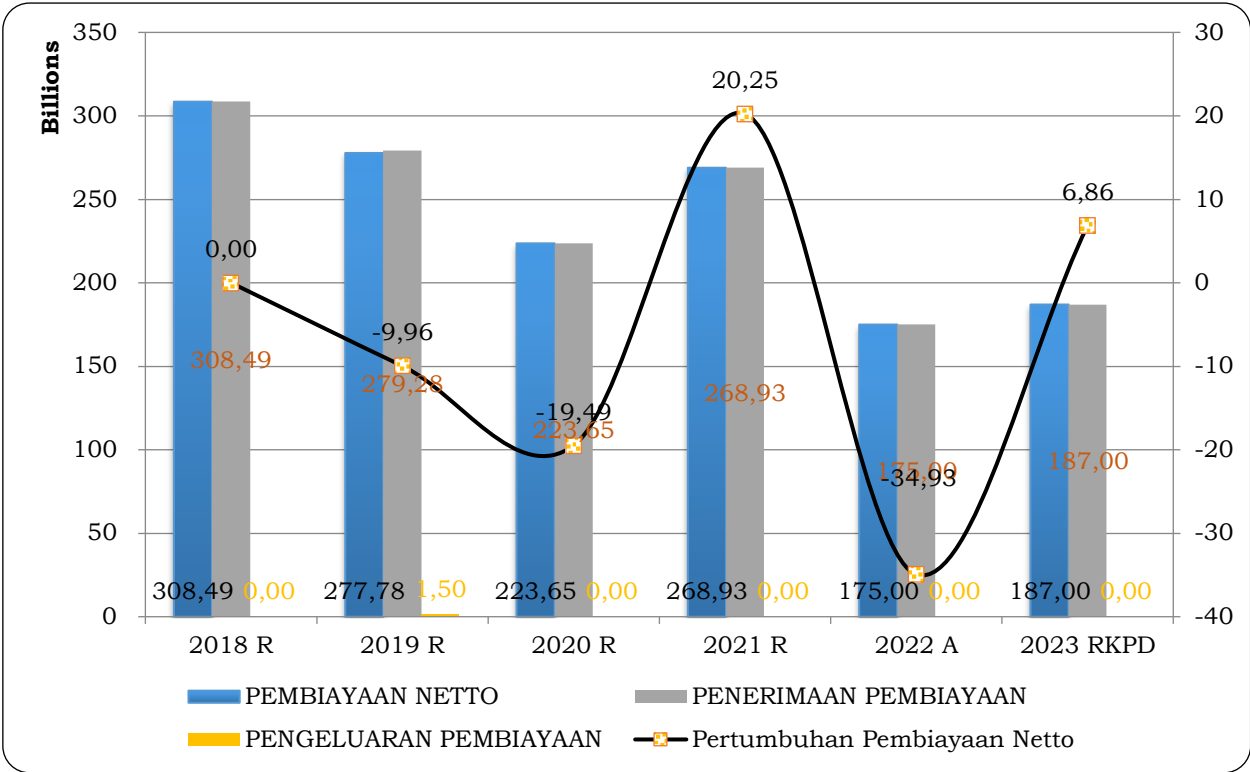
Grafik 3.20 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun Tahun 2018–2023

Belanja transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan keuangan. Perkembangan Belanja Transfer tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 dan dalam RPKPD 2023, belanja transfer tidak dianggarkan. Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun tahun 2017-2021 dan proyeksi anggaran tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2018 s.d Tahun 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	TARGET 2023
5.1	BELANJA OPERASI	777.571.218.337,41	840.591.701.749,69	816.557.831.371,63	859.879.322.395,91	980.616.130.669,00	962.318.889.004,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	435.126.974.606,00	440.222.382.579,38	441.740.830.119,00	413.765.191.395,00	493.730.745.957,00	485.959.400.862,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	305.475.751.519,41	366.995.675.620,23	350.024.036.581,10	413.958.099.347,91	444.965.688.854,00	441.819.946.847,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00	0,00	99.146.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	23.446.391.931,00	16.255.539.810,08	11.938.091.671,53	13.431.646.653,00	16.823.187.778,00	13.514.968.195,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.522.100.281,00	17.118.103.740,00	12.854.873.000,00	18.724.385.000,00	25.096.508.080,00	20.925.427.100,00
5.2	BELANJA MODAL	259.087.612.258,47	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57	197.958.260.924,01	169.091.131.325,00	235.100.295.148,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	1.972.500.000,00	0,00	2.500.000.000,00	3.182.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.310.430.082,75	68.460.669.520,00	68.549.937.238,00	26.304.347.775,00	29.760.942.083,00	60.182.442.891,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.833.894.806,80	48.758.211.485,26	35.326.461.602,57	65.170.777.016,83	49.453.116.310,00	87.268.605.579,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.271.368.268,92	184.022.541.935,80	80.833.932.839,00	103.172.346.821,18	84.822.087.152,00	80.200.363.080,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.542.965.670,00	2.888.082.876,00	1.521.068.895,00	3.310.789.311,00	2.554.985.780,00	4.266.883.598,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.128.953.430,00	3.671.236.527,00	2.807.996.500,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	118.877.262,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	8.782.065.139,00	3.121.857.023,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	118.877.262,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	8.782.065.139,00	3.121.857.023,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	700.062.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0,00	0,00	700.062.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.036.658.830.595,88	1.148.511.321.355,75	1.014.631.224.152,20	1.073.679.343.613,92	1.158.489.327.133,00	1.200.541.041.175,00
	SURPLUS/DEFISIT	(29.212.590.458,24)	(54.143.823.359,16)	44.994.357.259,12	27.003.485.516,94	(175.000.000.000,00)	(187.000.000.000,00)

Sumber: BPPKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2021



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2022

Grafik 3.21 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2018–2023 (Milyar Rupiah)

Dari sisi pembiayaan, pembiayaan netto diproyeksikan meningkat mencapai 6,86 persen pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan hanya dianggarkan dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp 187 Milyar. Selanjutnya, rincian perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan netto Kota Madiun tahun 2017 sampai dengan proyeksi tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	TARGET 2023
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	308.491.416.889,46	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	175.000.000.000,00	187.000.000.000,00
6.1.01	Penggunaan SiLPA	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	175.000.000.000,00	187.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	308.491.416.889,46	277.778.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	175.000.000.000,00	187.000.000.000,00
	SILPA	279.278.826.431,22	223.580.475.124,05	268.933.182.301,20	295.936.667.818,14	0,00	0,00

Sumber: BPPKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi,2021

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kota Madiun. Secara rinci, arah dan kebijakan keuangan Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2023, terdapat beberapa arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;
2. Penguatan kondisi ekonomi daerah sebagai dampak COVID19 membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
3. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah;
4. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
7. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
8. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan

10. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
 1. Meningkatkan dan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.
 2. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja PD penghasil.
 3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.
- c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
- d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Pendapatan transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

- a. Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan.

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
 - c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK dan DBH;
3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kota Madiun;
 - b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah daerah telah menjelaskan beberapa hal penting terkait belanja daerah yaitu sebagai berikut

1. Pengalokasian belanja pegawai agar di perhatikan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang- Undang ini diundangkan;
2. Pengalokasian Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa serta Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik orientasi *output* maupun *outcomenya*. Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2023 disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2023 didasarkan pada tujuh kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
2. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program* prioritas);
3. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kota Madiun pada Tahun 2022
4. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;

5. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah.
6. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja-belanja yang sudah di-*earmark*, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
7. Belanja daerah lainnya dalam rangka *recovery* dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir di tahun 2020, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas tahunan maupun program non prioritas yang telah direncanakan, dapat difocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi COVID 19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah diuraikan pada masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

- a. Alokasi Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar 50,58 persen dari Belanja operasi, dengan mempertimbangkan penerimaan tenaga P3K dan pemberian TPP bagi ASN sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. belanja Barang dan Jasa yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan pelayanan publik.
- c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Namun pada RKPD Kota Madiun 2022, belanja subsidi tidak dianggarkan.
- d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Naumn dalam RKPD 2022, kebutuhan belanja ini tidak dianggarka;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- f. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan dipos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force major*, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

1. Belanja Bantuan Keuangan adalah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
2. Belanja Hibah adalah belanja Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Madiun Tahun 2023 terdiri atas empat kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Pada tahun 2023, tidak dialokasikan untuk penyertaan modal.
4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

3.2.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah yang diambil yaitu dengan Peningkatan pembiayaan kreatif, melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Sehingga, hanya kebutuhan prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa ter-cover oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan ada sinergitas antara peranan swasta dan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Rincian realisasi dan rencana pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Pembiayaan Pembangunan melalui CSR Kota Madiun 2019-2021

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Hotel Merdeka	Penerangan jalan gang Lodayan	100.000		
		Pembangunan Poskamling RT 18 RW 7	250.000		
		Bantuan untuk warga tidak mampu	1.000.000		
		Bantuan untuk warga tidak mampu	500.000		
		Partisipasi HUT RI Gang Lodayan	300.000		
		Partisipasi Bersih Desa Kel Pangongangan	1.800.000		
		Bantuan untuk warga tidak mampu	500.000		
		Partisipasi Peringatan Maulid Nabi SAW	300.000		
		Penerangan Jl. Lodayan		1.200.000	
		Bantuan kepada penyandang Disabilitas		100.000	
		Santunan keluarga pinggir sungai Bantaran		2.500.000	
		Takjil buka Puasa di Masjid Agung Baitul Hakim		1.500.000	
		Bantuan untuk Kampung Tangguh		500.000	
		Partisipasi kegiatan warga gang Lodayan (Kel. Pangongangan)		1.000.000	
2	PT. Nitama Madiun	Sumbangan Sosial	500.000		
		Sumbangan Sosial	500.000		
		Sumbangan Sosial	2.000.000		
		Sumbangan Sosial	500.000		
		Sumbangan Sosial	500.000		
		Iuran sumbangan HUT Satpam ke 38	500.000		
		Sumbangan Hewan Kurban	5.100.000		
		Sumbangan Sosial	500.000		
		Berbagi Takjil bersama Polres	5.000.000		
		Berbagi Takjil	2.500.000		
		Berbagi Takjil	2.500.000		
		Sumbangan Sosial	500.000		

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
		Sumbangan Sosial	500.000		
		Aksi Cepat Tanggap	1.000.000		
		Sumbangan Sosial	500.000		
		TV Kita	1.000.000		
		Sumbangan untuk Masjid Al Fattah	2.401.000		
		Sumbangan HUT RI ke 74	1.000.000		
		Penanaman Pohon Tabebuya	20.000.000		
		Pocari Sweat untuk tenaga medis		3.600.000	
		Masker berlogo Nitama		3.800.000	
		Tanaman buah			
		Pohon Jambu Citra 5 buah		1.125.000	
		Pohon Jambu Camplong 5 buah		1.125.000	
		Pohon Jeruk 5 buah		2.250.000	
		Pohon Leci 2 buah		750.000	
		Pohon Sawo Mentega 3 buah		1.350.000	
		Metan plus ongkos tanaman 20 buah		1.500.000	
		Planter Bag PT. Nitama dan Madiun Kota Pendekar 20 buah		1.800.000	
		Pembersihan sungai sekitar Planter bag		480.000	
		Takjil Ramadhan 1.000 pcs			
		Donasi Persatuan Tuna Netra Indonesia		6.000.000	
		Beras CSR untuk warga sekitar		2.064.000	
		Proses pelapisan hot dip galvanize grating makam		700.000	
		Proses pelapisan hot dip galvanize grating makam		700.000	
		Hut Satpam		750.000	
		Mural dan pengecatan gapura dengan logo Perusahaan dan tulisan (logo) RW.06		6.000.000	
3	PT. INKA	Mural Tangkis di Taman Bantaran	339.600.000		
		Perbaikan Gapura Selamat Datang di Monumen Selamat Datang	80.784.955		
		Pengadaan Pot Bunga	1.400.000		
		Pengedukan saluran air dan pengadaan tempat sampah	231.499.000		
		Bantuan Sarana Pendidikan Pojok Baca	47.500.000		
		Kelas Kreatif	29.102.070		
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	69.816.000		
		Pengedukan sungai	224.999.000		
		Santunan Panti Asuhan	408.000.000		
		Pembagia Sembako Gratis bersama Kodim	15.000.000		
		Bantuan Pinjaman Program Kemitraan	295.000.000		
		Bantuan Sponsorship kampus dan stakeholder	359.132.335		
		Bantuan Bedak Kaca		750.000	
		Bantuan Program kemitraan 5 mitra		250.000.000	
		Rehab Ruang Kelas		2.000.000	
		Bantuan Pembangunan Perpustakaan		1.000.000	
		Paket Hand sanitizer 60.000 ml		7.300.000	

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
		Vitamin		1.000.000	
		Suplemen dan Vitamin		8.255.400	
		Bantuan Masker dan Faceshield 500 bh		5.250.000	
		Masker 1000 bh		6.500.000	
		Sosialisasi Bahaya Narkoba		51.900.700	
		Penyuluhan Pencegahan COVID		53.589.400	
		Bantuan Sarpras Posko Covid		9.170.000	
		Bantuan Bilik Desinfektan		2.200.000	
		Bantuan Bilik Desinfektan		10.000.000	
		Tempat Cuci Tangan , Masker dan Hand sanitizer		2.887.500	
		Rapid tenaga medis		46.500.000	
		Pule dan bungur		184.750.000	
		Pohon Tabebuaya		3.000.000	
		Pot, Media dan Bunga		2.500.000	
		Bibit Tanaman Bunga dan Buah		2.000.000	
		Tempat sampah 3 unit		2.397.000	
		Sarpras Poskamling Kel. Patihan		2.246.000	
		Pembelian Pot Bunga		1.000.000	
		Pembelian Pot Bunga		1.200.000	
		Pemeliharaan mural		20.090.000	
		Bantuan Kebersihan makam		3.000.000	
		Bantuan Paket sembako 200 paket		37.300.000	
		Bantuan Sembako		1.000.000	
		Baksos Sembako		5.000.000	
		Bantuan Sembako 50 paket		10.500.000	
		Bantuan untuk disabilitas 50 paket		8.749.587	
		Bantuan Baju Koko dan Mukena		35.407.990	
		Kegiatan Baksos		1.000.000	
		Santunan Yayasan Panti Asuhan		272.000.000	
		Renovasi Masjid		5.000.000	
		Bantuan Terpal Tenda		5.000.000	
		Bantuan Cover tenda		4.200.000	
		Renovasi masjid		2.000.000	
		Pembangunan Masjid		5.000.000	
		Pembelian Tanah Wakaf		2.000.000	
		Pembuatan Tempat Parkir PHBI		4.000.000	
		RTLH Bp. Firman		86.125.000	
		Ruang Pelayanan Masyarakat		68.186.060	
		Pembelian material pipa besi dan cat		2.000.000	
		Pembelian material Kelas lapangan		29.785.000	
		Bantuan Laptop		35.200.000	
		bantuan Kodim		24.744.000	
		Pembuatan 200 Kaos		10.130.000	
		Bantuan AC Standing 5 PK 2 unit		28.730.000	
		Pengadaan portal		3.950.000	
		Bantuan Sarpras Posko Kampung Tangguh		2.775.200	
		Bantuan Kampung Tangguh di Kel. Sukosari, Manguharjo dan Nambangan Kidul		11.009.000	
		Bantuan Kampung Tangguh di Kel. Banjarejo,		13.250.000	

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
		Mojorejo dan Nambangan Lor			
		Masker			7.500.000
		Ranjang Pasien			121.850.000
4	PT. KAI DAOP 7	Bantuan Bina Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Paket Pangan Murah dalam rangka HUT Kementerian BUMN Ke21	39.375.000		
		Bantuan Bina Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Paket Pangan Murah dalam rangka HUT Kementerian BUMN Ke21	39.375.000		
		Bantuan Bina Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Pasar Murah dalam rangka Memperingati HUT Persit Kartika Chandra Kirana Ke-73 dan HUT Kementerian BUMN Ke21	25.000.000		
		Bantuan Bina Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Memperingati Hari Kartini	9.090.000		
		Bantuan Bina Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Santunan dan Beasiswa LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Madiun	37.150.000		
		Bantuan Bina Lingkungan Pelestarian Alam Pengadaan Kontainer Pengangkut Sampah Kota Madiun	40.018.000		
		Bantuan Bina Lingkungan Sarana Ibadah Pembangunan Masjid Al Fattah	40.000.000		
		Bantuan Bina Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Sembako dan Bingkisan Panti Asuhan Islamiyah Rejomulyo Madiun	15.000.000		
		Alat Peraga Edukasi		25.000.000	
				5.000.000	
		Pule dan Bungur		92.500.000	
5	Hotel Amaris	CSR santunan kepada Anak Yatim Piatu Yayasan Putra-Putra Pahlawan Jl. Kemiri Madiun	3.000.000		
		CSR Pembagian Parcel Sembako di Lingkungan Hotel Amaris Madiun	900.000		
		Sumbangan Anak Yatim		3.000.000	
		Pembelian Hewan Qurban yang diserahkan pada Masjid Nurul Abror Jalan Kalimantan (1 ekor kambing)		2.800.000	
		CSR kepada masyarakat Jalan Kalimantan		2.000.000	
6	ALFAMART	pohon berbunga	200.000.000		
		Alat Pemotong rumput	10.800.000		
		Gerobak untuk UKM	16.500.000		
		Dana Hibah untuk UKM	6.000.000		
		biaya pangkas pule barito		15.000.000	
		tanaman hias sumber wangi (bugenvil varigata, kamboja besar, kelapa gading)		27.875.000	

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
		sulaman pohon sogo		2.400.000	
		Lampu Plenton		29.750.000	
		Lampu Penjor		150.000.000	
7	PT. BRI	Pohon berbunga	47.500.000		
		Masker Non Medis 1250 pcs		12.500.000	
		Paket sembako 100 paket		15.000.000	
		Masker Kain (5000 buah)			5.000.000
		Biskuit (30 dos)			1.440.000
8	PT. TELKOM	Pembinaan Usaha Kecil, Mikro (Bantuan Pinjaman Bergulir)	960.000.000		
		Bantuan Pinjaman Bergulir		820.000.000	
		Booth untuk UMKM		100.000.000	
		300 buah Hazmat untuk Satgas COVID		14.250.000	
		300 psng Sepatu Boots		22.500.000	
		300 bh faceshield		5.850.000	
		320 box Masker medis		48.800.000	
		80 box sarung tangan karet		8.200.000	
		2000 bh masker non medis		13.300.000	
		Bantuan Sembako untuk warga Kota Madiun		15.000.000	
9	Bank Jatim	Bantuan Bulan Dana PMI Tahun 2019	400.000		
		Bantuan Doorprize ke 15	2.340.000		
		Bantuan pekan Panutan PBB tahun 2019	6.250.000		
		Bantuan kaos PPIH dan spanduk	1.875.000		
		Bantuan acara hari Adhyaksa ke 59	735.000		
		Bantuan Pasang Tenda	1.750.000		
		Bantuan acara pemilihan duta wisata	6.000.000		
		Bantuan Acara golf Walikota Madiun Cup	20.000.000		
		Bantuan Gebyar Undian PBB tahun 2019	46.250.000		
		Bantuan seminar nasional NU Kota Madiun	1.000.000		
		Bantuan Acara Hari Kesehatan Nasional ke 55	225.250.000		
		Bantuan Acara Pengukuhan Pengurus	1.700.000		
		Bantuan acara HUT ke 55 Hari Kesehatan	930.000		
		Bantuan Acara Hari Guru Nasional KORPRI	1.600.000		
		Bantuan HUT KORPRI ke 48	14.250.000		
		Bantuan Pengadaan Tanaman Taman Bantaran	195.437.000		
		Bantuan Taman Selamat Datang Kota Madiun	689.725.000		
		Sembako (Beras 4kg, Gula 2 kg, Minyak 1lt, kecap 1, sambel pecel 500gr)		66.896.000	
		Sembako (Beras 4kg, Gula 2 kg, Minyak 1lt, kecap 1, sambel pecel 500gr)		134.329.000	
		Both Container (2 buah)			545.800.000
10	PT. REFINDO INTISELARAS INDONESIA	Bantuan Pembangunan Jembatan ke Makam tawangrejo	200.000.000		
		Tanah Wakaf Makam Umum	227.500.000		
		Bantuan Pohon mangga madu Probolinggo	500.000		
		Bantuan Perlengkapan Ibadah	5.640.000		

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
		Bantuan Peringatan HUT RI ke-74	500.000		
		Bantuan Peringatan HUT RI ke-74	1.000.000		
		bantuan renovasi musholla Al. Muhajirin	1.155.000		
		Bantuan Almari Buku Kaca	750.000		
		Bantuan Peringatan HUT RI ke-74	1.000.000		
		Bantuan Peringatan hari Stroke sedunia	500.000		
		Bantuan Pembuatan Pos Polisi	15.467.000		
		Bantuan Pembuatan Lapak PKL	60.000.000		
		Lapak Joglo Paleraman			2.100.000
		Lapak Kembulsari			18.500.000
		Lapak Sido Dadi			24.500.000
		Lapak Lintang Tawang			16.000.000
11	PT. PPI	Bazar Paket Sembako	60.000.000		
12	INDOMARET	Pohon berbunga	200.000.000		
		gerobak	7.200.000		
13	BPR TUNAS ARTHA	Inklusi Keuangan		1.500.000	
		Sedekah Jumat		4.800.000	
		Sumbangan Kematian		1.000.000	
		Sumbangan Bencana Alam		1.500.000	
		Takjil Ramadhan		1.000.000	
		Parsel Lebaran		1.000.000	
		Sumbangan HUT RI		500.000	
		HUT BPR Tunas Artha		1.000.000	
		Sumbangan lain-lain		1.000.000	
14	PT. INDRACO SUN CITY	Sewa Bazar UMKM dari Dinkop		2.000.000	
		Penerimaan Peserta Didik magang		15.000.000	
		Penanaman Pohon		20.000.000	
		Bukber anak yatim Piat		12.000.000	
		Parsel Lebaran		5.000.000	
		Sumbangan HUT RI		2.000.000	
		Hewan Qurban		20.000.000	
		Takjil Ramadhan		5.000.000	
15	Hotel Aston	Donor Darah Umum		500.000	
		Takjil Ramadhan		1.500.000	
		Berbagi Sahur		1.500.000	
		Bakti Sosial		300.000	
		Natal Bersama Panti Asuhan		2.000.000	
		Hewan Qurban		3.500.000	
16	PD. BPR	Penyaluran tenda pedagang kaki lima		60.000.000	
		Penanaman dan Penghijauan lingkungan serta PD BPR Bank Daerah Kota Madiun		50.000.000	
		Program Bisafari Dhuafa		5.000.000	
17	PT. PNM	Penanaman Pohon		10.000.000	
18	BANK WOORI BERSAUDARA	Penanaman Pohon		5.000.000	
19	PT. BCA	Penghijauan lingkungan kantor		3.000.000	
		Buka bersama anak yatim		3.000.000	
		Takjil Ramadhan		2.000.000	
		Bingkisan lebaran		7.000.000	
		Sumbangan HUT RI		1.000.000	
20	BRI KANCAB MAGETAN	Pule		42.000.000	
		Tiang lampu penjor klasik Badungan		50.000.000	
21	PG. REDJOAGUNG	Bantuan untuk pendidikan		1.400.000	
		Penanganan COVID		231.716.237	

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
		Penanaman Pohon Flamboyan		45.500.000	
		bantuan Sarana Ibadah		3.950.000	
		Khitan massal		25.000.000	
		Bantuan Sosial		25.334.587	
		Bantuan sarana umum		2.550.000	
		Program Kemitraan		1.055.000.000	
		Gula Pasir (2.500 kg)			30.000.000
22	PT. PERTAMINA	Pule dan Bungur		150.040.000	
		Pelatihan			28.394.000
		Alat dan Bahan Pelatihan			33.000.000
		Sarpras Lingkungan			17.000.000
23	BANK BUKOPIN	Buka bersama anak yatim		20.000.000	
24	CV. SOHANTO ADI PERKASA, PT. SARI MELATI KECANA, PT. INUL VIZTA MADIUN.	Gate Videotrone		330.000.000	
25	PT. REZKY ANUGRAH SEJAHTERA	Mobil Golf Yamaha 4 Seat		170.000.000	
26	PDAM	TRAFFIC LIGHT Tempo doeloe dan Lampu Hijr Ismail		85.000.000	
		Balon Gate (2 unit)			20.000.000
27	PT. TASPEN	Bantuan kemitraan		280.000.000	
28	INDOSAT	Lampu Penjor		162.793.000	
29	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	Lampu heritange di madiun		15.000.000	
30	PT. PLN (persero) UP3 MADIUN	RUMAH PINTAR		202.555.000	
31	PT. PENERBIT ERLANGGA CABANG MADIUN	Pompa Elektrik 4 unit		3.000.000	
		Chlorin 7 jerigen @ 20 liter		4.200.000	
		Chlorin 2 jerigen @ 10 liter		700.000	
		Karbol/wipol 2 jerigen @10 liter		700.000	
		Harpic/pembersih lantai 1 jerigen @ 10 liter		700.000	
		Harpic/pembersih lantai 2 jerigen @ 5 liter		700.000	
32	PT. BRI (Persero) CABANG MADIUN	Masker kain 1300 buah		6.500.000	
		Alat Pelindung Diri 75 buah		6.375.000	
		Sarung tangan 10 box/500 psng		1.150.000	
		Hand Sanitizer 20 liter		3.600.000	
		Wastafel aluminium 4 buah		2.800.000	
		Thermogun 4 buah		6.000.000	
33	PT. CIPTA GAGAS LESTARI	Handsanitazer Merk Novo 80 ml (20 dos)			2.880.000
		Masker Protector (20 dos)			7.680.000
		Minuman Serbuk Merk Segar (20 dos)			2.592.000
		Susu Milku (1500 botol)			3.562.500
		Kopi Siap Saji (1000 cup)			2.000.000
34	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)	Healthy Kit Non Medis (2.000 buah)			56.000.000
		Susu (360 buah)			780.000
35	PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI)	Masker Kain (1000 buah)			6.000.000
		Paket Sembako (130 buah)			16.250.000
		Susu (1145 buah)			2.750.000
36	PERUM BULOG	Bantuan Sembako			54.000.000
37	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM, Tbk	Paket Sembako (1500 paket)			210.000.000
		Peket Sembako (1500 paket)			270.000.000
38	PT. KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA	Gerobak/ Booth Kontainer (6 unit)			87.000.000

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
39	PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk	Susu Milku (5.000 botol)			12.250.000
		Masker (2000 buah)			14.000.000
40	PT. INTI DAYA GUNA ANEKAWARNA (INDANA)	Cat Outdoor (100 galon)			20.700.000
41	LARISSA AETHETIC CENTER MADIUN	Tempat Cuci Tangan Injak (6 unit)			9.900.000
		Masker Medis (40 box)			2.640.000
42	PT. CALVARY ABADI	Paket Sembako (2000 paket)			202.000.000
		Masker Medis (100.000 lembar)			40.000.000
43	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PG. PAGOTAN)	Gula Pasir (10 Sack)			5.250.000
44	PT. BAKTI NETRA UTAMA	Mesin Potong Rumput (11 unit)			18.700.000
		Peralatan Gergaji Mesin (6 unit)			21.300.000
45	POLITEKNI PERKERETAAPIAN INDONESIA	Paket Sembako (300 paket)			60.000.000
46	PT. ASTRA INTERNATIONAL, Tbk	Booth Container (10 unit)			75.000.000
47	PT. ULER RAYA INDONESIA	Paket Sembako (100 paket)			10.000.000
48	PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk	Bantuan Sarpras Lingkungan			120.000.000
49	PT. PESTA PORA ABADI	Masker Medis (20 box)			5.000.000
50	PT. PEGADAIAN PERSERO	Vitamin (100 pack)			5.000.000
51	PT. ACE HARDWARE INDONESIA LAWU PLAZA MADIUN	Earloop Face Mask (1440 pack)			47.376.000
JUMLAH			5.639.996.360	6.251.135.661	2.421.662.500

Sumber:Bappelitbangda Kota Madiun, 2021 | Keterangan: *belum termasuk CSR yang nilainya tidak tersedia

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus bersinergi dengan berbagai tujuan dan sasaran di berbagai level khususnya pemerintah provinsi dan Pusat. Keberhasilan pembangunan di berbagai level dapat dilakukan jika prioritas pembangunan dapat bersinergi dengan baik di level pemerintah pusat dan daerah. Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun sejalan dengan prioritas pembangunan di level provinsi Jawa Timur dan pemerintah Pusat. Keterkaitan ini dapat dilihat dari visi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah baik nasional maupun daerah. Keterkaitan visi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 4. 1 Keterkaitan Visi antar Level Pemerintahan

Visi Kepala daerah Kota Madiun tahun 2019 – 2024 memiliki keterkaitan erat dengan visi Gubernur dan Presiden. Selanjutnya, tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Madiun menjelaskan keterkaitan dengan visi dan misi dalam dokumen RPJMD tahun 2019-2024. Visi Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah: **“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**. Terdapat dua pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2019-2024. Pilar pertama adalah mewujudkan Pemerintahan Kota Madiun Bersih dan berwibawa.

Kota Madiun berusaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih berwibawa, profesional dan melayani masyarakat. Dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, proses dan jalannya pembangunan diharapkan akan lebih cepat dan terlaksana serta mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Pilar selanjutnya adalah mewujudkan masyarakat sejahtera. Kota Madiun berusaha untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang sejahtera yang dicirikan oleh terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif, serta masyarakat yang mandiri, maju, berakhlak mulia yang senantiasa berlandaskan taqwa kepada Allah SWT/Tuhan yang maha esa.



Gambar 4. 2 Hubungan antara Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019–2024. Keempat misi tersebut adalah 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*); 2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun; dan 4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Dalam rangka pencapaian misi diatas diperlukan tujuan dan sasaran pembangunan. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD 2019-2024

Tujuan dan Sasaran		
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		
T1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1. Indeks Reformasi Briokrasi
S1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun

Tujuan dan Sasaran		
		IS1.2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		IS1.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
S2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun
		IS2.2. Indeks Inovasi Daerah
2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan		
T2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	IT2.1. livable city
S3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1. Indeks Infrastruktur
S4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun		
T3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT3.1. Indeks Pembangunan Manusia
		IT3.2. Indeks Pembangunan Gender
S5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1. Harapan Lama Sekolah
		IS5.2. Rata-rata Lama Sekolah
S6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1. Angka Harapan Hidup
S7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1. Indeks Pemberdayaan Gender
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun		
T4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	IT4.1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
S8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS8.1. Tingkat Pengangguran Terbuka
S9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS9.1. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
		IS9.2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa
T5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1. Indeks Ketentraman
		IT5.2. Indek Gini
S10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1. Angka Kemiskinan
S11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1. Indeks Kerukunan
		IS11.2. Indeks rasa aman

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 di rumuskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan isu-isu strategis pembangunan; aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan; pokok pikiran DPRD; serta arah kebijakan pembangunan tahunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD. Penyusunan prioritas pembangunan didasarkan pada isu strategis Kota Madiun pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Penentuan prioritas pembangunan Kota Madiun mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut berfungsi untuk menciptakan sinergitas pembangunan di pusat dan daerah. Prioritas pembangunan Kota Madiun diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Proses perencanaan pembangunan daerah Kota Madiun Tahun 2023 memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi yang tertuang dalam RKP Tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa-Timur 2023 serta kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun 2019–2024. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sinkronisasi antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

4.2.1 Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023

Penentuan prioritas pembangunan nasional mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20120 – 2024. terdapat sembilan misi dalam upaya penjabaran dari visi pemerintah yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



Gambar 4. 3 Hubungan antara Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Lima arahan presiden diatas, selanjutnya di transformasikan menjadi tujuh agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan beserta sasarannya. Dalam upaya mencapai 7 agenda pembangunan pemerintah menetapkan proyek dengan daya ungkit tinggi.

Proyek tersebut diantaranya 41 proyek prioritas strategis. Tujuh agenda pembangunan utama pemerintah pusat adalah sebagai berikut

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.



Gambar 4. 4 Tema, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sejalan dengan kondisi terkini khususnya terkait COVID-19, pemerintah menetapkan tema pembangunan dalam RKP 2023 yaitu **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan**. Selanjutnya, prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2023 terdiri dari yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan; 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; 3) Terpenuhinya layanan dasar; 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda; Terwujudnya pengentasan kemiskinan; dan 5) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu 1) menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.; 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

5. Memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; 2) Meningkatnya konektivitas wilayah; 3) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan; 4) Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien; 5) Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;

Ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; 3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik;

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam, ditetapkan sasaran yaitu memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2023, arah kebijakan nasional diarahkan pada

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;

- 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
- 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
- 8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.



Gambar 4. 5 Major Project dalam RKP Tahun 2023

Selain menetapkan prioritas dana rah kebijakan pembangunan nasional, pemerintah pusat juga memberikan informasi beberapa *major project* yang akan menjadi fokus pendanaan di Tahun 2023. beberapa *major project* tersebut linier dengan fokus-fokus pembangunan 2023. *Pertama*, untuk fokus pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, beberapa *major project* yang memperoleh penekanan adalah: 1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; 2) 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter; 3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas (termasuk kimia dan farmasi); 4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan 5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu. *Kedua*, terkait penguatan sistem kesehatan nasional, akan ada *major project* baru untuk penguatan sistem kesehatan nasional. *Ketiga*, terkait jaring pengaman sosial, akan ada *major project* yang akan diprioritaskan, yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh. Dan *keempat*, untuk penguatan sistem peringatan bencana, akan diperluas cakupannya sehingga mencakup juga bencana pandemi.

4.2.2 Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Visi pembangunan Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 adalah **“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi pembangunan Provinsi Jawa Timur, yaitu: 1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah; 2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan; 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan; dan 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.



Gambar 4. 6 Hubungan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019–2024

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Timur, pemerintah provinsi menetapkan 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional seperti terlihat dalam gambar berikut

7 Agenda Pembangunan Nasional	7 Agenda Pembangunan Jatim
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata 2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan, 4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal 5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi 6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup, 7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

Gambar 4. 7 Keselarasan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuh agenda prioritas pembangunan untuk Tahun 2023. Ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah 1) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata; 2) Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;

3) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI); 4). Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal; 5). Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan; 6). Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; 7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.



Gambar 4. 8 Keselarasan Tema dan Arah Kebijakan Nasional dan Jawa Timur

Tema RKP 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sedangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur, arah kebijakannya adalah Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sejalan dengan RKP dan RPJMD tersebut, tema pembangunan Provinsi Jawa Timur 2023 adalah Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro. Dalam upaya mencapai agenda dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur, Pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Timur menerapkan klastering wilayah.

Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran.



Gambar 4. 9 Pembagian Kawasan percepatan Pembangunan di Jawa Timur

Percepatan pembangunan Kawasan di Jawa Timur diatur melalui Peraturan Presiden no 80 Tahun 2019. Perpres ini mengatur tentang percepatan pembangunan ekonomi Kawasan gerbang Kertasusila dan sekitarnya, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Selain itu, pembangunan Kawasan di tujukan di daerah hinterland utama Gerbang kertasusila. Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mempunyai tema peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Terna yang digunakan untuk pembangunan kawasan prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan tersebut melihat dari kondisi ekonomi saat ini yang memberikan kontribusi ekonomi yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan difokuskan pada peningkatan produksi dan prodktivitas pertanian hortikultura, petkebunan dan nilai tarn.bah Agroindustri utamanya pada komoditas perkebunan dan hortikultura, serta biofarmaka dan Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Selain itu Pengembangan Pariwisata berbasis agro dan sumberdaya alam lainnya (geopark dan lainnya) diharapkan dapat mengungkit perkembangan sektor ekonomi lainnya, didukung peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan aksesibilitas infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan.



Gambar 4. 10 Pembagian Klaster Wilayah Pembangunan Jawa Timur

Di Jawa Timur, penetapan klaster dirumuskan atas dasar RPJMD tahun 2019–2024 dan juga arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka. Klaster kewilayahan difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Klaster kewilayahan yang ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Salah satu pengembangan klaster adalah klaster 2 yaitu Wilis Utara.

Klaster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan.

Arahan pengembangan pada Klaster Wilis Utara adalah:

- a. Aspek Sosial: Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratafikasi sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan Patrilineal, dimana laki – laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak dari wanita dalam hak tahta maupun harta.

Berbeda dengan wilayah Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani. Selain itu yang membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di daerah Wilis Utara lebih bersifat Pluralistik atau majemuk. Hal itu disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk menerima hal – hal baru tanpa ada seleksi, sehingga akan merubah kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan terhadap Sumber Daya Manusia ataupun pengelolaan potensi Sumber Daya Alamnya. Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Di daerah klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian khususnya di daerah-daerah pegunungan, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;

- b. Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan enkubator ekonomi (anjungan cerdas); Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.

4.2.3 Prioritas dan Tema Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

Perumusan prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dana rah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019–2024. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta pokok pikiran anggota dewan perwakilan daerah. Telaah terhadap Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019–2024 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4. 2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	• Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian • Program Pengembangan Umkm • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Pengembangan Umkm • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan) • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan Kb) • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
		• Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	• Program Kepegawaian Daerah • Pendidikan Dan Pelatihan • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah) • Program Aplikasi Informatika • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah) • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah • Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pengendalian Dan Evaluasi • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan • Program Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Aplikasi Informatika • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat) • Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan lingkungan, dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	• Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)

Telaah selanjutnya dalam proses perumusan prioritas pembangunan adalah dari hasil Pokok-pokok pikiran DPRD, yang dilaksanakan melalui serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme Reses masa sidang maupun Kunjungan kerja. Kemudian, hasilnya dituangkan dalam POKIR DPRD yang mencakup beberapa aspek yang mendukung pada prioritas pembangunan. Selain itu terdapat berbagai usulan dari anggota dewan berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Beberapa Usulan Anggota Dewan Berdasarkan Serap Aspirasi Masyarakat Per Daerah Pemilihan (Dapil)

JENIS USULAN	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH USULAN POKIR
Perbaikan Jalan	DAPIL 1 KARTOHARJO	34
Saluran		83
Penerangan Jalan Umum		13
Bantuan/Kesosialan		27
Fasilitas Umum		42
Pemulihan Ekonomi		9
Persampahan		7
Jembatan		1
Pavingisasi		7
Pelatihan		4
Perbaikan Jalan	DAPIL 2 TAMAN I	20
Saluran		15
Penerangan Jalan Umum		7
Bantuan/Kesosialan		4
Fasilitas Umum		13
Pemulihan Ekonomi		7
Persampahan		1
Pavingisasi		5
Pelatihan		1
Perbaikan Jalan	DAPIL 3 TAMAN II	9
Saluran		32
Penerangan Jalan Umum		5
Bantuan/Kesosialan		6
Fasilitas Umum		20
Pemulihan Ekonomi		3
Pavingisasi		9
Perbaikan Jalan	DAPIL 4 MANGUHARJO	14
Saluran		28
Penerangan Jalan Umum		9
Bantuan/Kesosialan		22
Fasilitas Umum		14
Pemulihan Ekonomi		5
Persampahan		2
Jembatan		2
Pavingisasi		8
TOTAL USULAN POKIR		488

Penentuan prioritas pembangunan selanjutnya di dasarkan pada hasil penelaahaan permasalahan pembangunan dan perumusan Isu Strategis. Beberapa isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Pembangunan ekonomi inklusif
- 2. Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan
- 3. Kualitas sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing
- 4. Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi



Gambar 4. 11 Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2023

Secara detail, isu strategis serta masalah Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Isu Strategis 1: Pembangunan ekonomi inklusif	Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 meskipun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami ekspansi lebih dari 4 persen. Namun peningkatan tersebut belum diikuti oleh percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
	Kontribusi sektor unggulan belum optimal
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat, namun belum dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja baru
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system
	Masih rendahnya peningkatan PAD
	Masih rendahnya jejaring pasar perdagangan antar produsen
	Kurangnya mutu produk indutri kecil

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Rendahnya keterampilan industri kecil dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
	Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki industri kecil untuk mendapatkan sertifikat SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industry
	Beberapa pelaku usaha setelah mendapatkan izin usaha-nya belum mengurus izin komersial-nya, sehingga izin usahanya belum efektif dan belum dapat melakukan usaha, akibatnya nilai investasinya tidak bisa di masukkan sebagai realisasi investasi
	Masih terbatasnya pemahaman dunia usaha untuk menggunakan OSS
	Masih rendahnya kontribusi BUMD
	Masih terbatasnya kontribusi PAD
	Infrastruktur pendukung investasi belum memadai
	Kurangnya cakupan data perdagangan di Kota Madiun
	Masih terbtasnya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun
	Kurang optimalnya pengelolaan pasar yang menciptakan perbaikan dan pembaruan pasar sebagai wisata pasar rakyat di Kota Madiun
	Masih terbatasnya fasilitas sarana prasarana seni budaya untuk masyarakat seni Kota Madiun
	Masih sedikitnya destinasi wisata yang ada di Kota Madiun
	Skor Pola Pangan Harapan belum tercapai
	Produksi, pengolahan, budaya/regenerasi petani peternak, UPJA/Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian, dan daya saing sektor pertanian (peternakan dan kesehatan hewan) belum optimal
	Produksi, pengolahan, budaya/regenerasi petani pembudidaya ikan, dan daya saing sektor perikanan belum optimal
	Pengangguran yang meningkat.
Isu Strategis 2: sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing	Belum optimalnya SPM dan SNP. Belum terstandarnya SNP sarpras sekolah
	Masih kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga PAUD, lembaga swasta SD dan SMP (khususnya gedung dan bangunan)
	Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (sertifikasi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan)
	Kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran abad 21 khususnya dalam penggunaan teknologi dan informasi
	Kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar, termasuk belum terpenuhinya rasio jumlah lembaga dengan jumlah pengawas sekolah. (kurangnya jumlag guru pendidikan dasar dan pengawas sekolah)

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Jumlah dan kompetensi tenaga pendidik tidak merata di setiap sekolah
	Belum banyaknya prestasi nasional yang diraih oleh peserta didik di bidang sains dan kesenian.
	Akses Internet yang kurang memadai
	Kuarangnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu sarana prasarana, dan guru.
	Belum berkembangnya metode kurikulum daring
	Kegemaran membaca buku belum menjadi kebutuhan utama
	Perlunya penambahan ruang penunjang fungsi perpustakaan
	Jumlah tenaga pengelola perpustakaan belum memenuhi standard nasional perpustakaan
	Belum semua tenaga pengelola perpustakaan yang ada memiliki kompetensi tenaga pengelola perpustakaan sesuai SNP
	Layanan berbasis TIK belum mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan
	Belum optimalnya Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit
	Keterlambatan pembayaran Klaim oleh BPJS namun pelayanan tetap harus optimal
	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisisionis, Dietisien, Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan akuntan
	Implementasi SIMRS belum optimal, yang terkoneksi ke seluruh unit terutama billing system
	Terbatasnya jangkauan pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan
	Meningkatnya kunjungan pasien geriatri menjadi peluang rumah sakit untuk mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut
	Perkembangan tingkat sosial ekonomi, teknologi dan informasi mengakibatkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit
	Kemajuan Teknologi dan Informasi, mengharuskan rumah sakit untuk menuju digitalisasi layanan kesehatan sehingga tidak tertinggal
	Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kota Madiun semakin tinggi
	Tidak semua perempuan mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam kewirausahaan dan menurunnya pendapatan perempuan terutama perempuan sebagai kepala keluarga pada pelaku usaha Mikro akibat pandemi Covid-19

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Masih terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan
	Masih terdapatnya perkawinan anak
	Masih adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
	Kurangnya sosialisasi Perda dan peraturan perundang-undangan
	SDM Satlinmas yang belum memenuhi kualifikasi sesuai Perwal Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
	Kurangnya SDM ASN Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
	Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga faktor kelalaian manusia yang banyak menyebabkan kejadian kebakaran
	Belum adanya manajemen inspeksi peralatan proteksi kebakaran
Isu Strategis 3: Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi	Distribusi dan penempatan pegawai sesuai formasi berdasarkan Anjab dan ABK belum optimal Partisipasi ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi masih kurang Pelayanan kepegawaian berbasis IT belum optimal
	Belum adanya dokumen evaluasi jabatan untuk jabatan administrator, pengawas dan pelaksana
	Evaluasi internal belum berjalan optimal
	Jadwal pelaksanaan Diklat dan jenis Diklat harus menyesuaikan Instansi Vertikal
	Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait kewenangan urusan pada perangkat daerah dalam penyusunan SOTK maupun Tata Kerja Perangkat Daerah
	Kurangnya Pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang kelembagaan
	Kurangnya Informasi tentang Standart Pelayanan dari penyelenggara layanan ke masyarakat
	Belum sinkronnya antar dokumen SAKIP
	Belum terintegrasinya antara aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan
	Penyusunan Anggaran belum berdasarkan Cascading maupun Proses Bisnis
	Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait perencanaan, penganggaran yang berpengaruh terhadap dokumen SAKIP
	Kurangnya pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, dan Kompetensi Jabatan
	Pelaksanaan pemilu 2024 harus bias dinatisipasi secara baik
	Kurang optimalnya penyusunan dokumen kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi,

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Isi Strategis 4: Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan	evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW kota
	Kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan-undangan bidang penataan ruang
	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang
	Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah
	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang
	banyaknya parkir di tepi jalan dan meningkatnya pengguna jalan dengan kendaraan pribadi membuat penurunan kinerja ruas jalan
	Permukiman kumuh di Kota Madiun yang sebelumnya 0% setelah dilakukan konversi ke 16 parameter sebagaimana ditentukan dalam Permen PUPR No.14 Tahun 2018 masih terdapat 64,2 ha yang tersebar di beberapa kelurahan dengan status kumuh ringan dan masih terdapat beberapa area yang mendekati kumuh. Untuk mencegah berkembangnya permukiman kumuh serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman maka terhadap komponen-komponen pembentuk permukiman kumuh perlu penanganan secara terus menerus
	Rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 99,00%. Namun demikian jika diteliti lebih jauh kondisi sanitasi rumah tinggal belum semua kondisinya layak dan memadai sesuai standar bangunan sanitasi yang sehat dan aman bagi lingkungan sekitarnya terutama pada keluarga kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak dan memadai
	Masih terdapat kekurangan kebutuhan rumah baik backlog kepemilikan dan backlog kepemilikan.
	Belum optimalnya penyediaan PSU dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
	Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman
	Belum optimalnya sarana dan prasarana 83 makam aset Pemerintah Kota Madiun
	Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat
	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana
	Pemahaman masyarakat dalam kesiapsiagaan akan risiko bencana masih rendah
	Dokumen atau Kajian yang berhubungan dengan Kebencanaan belum tersusun
	Belum adanya SOP Penanganan Bencana
	Jumlah pegawai penanggulangan bencana yang terbatas

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Sesuai dengan berbagai telaahan RPJMD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 5 Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023
Isu Strategis 1: Pembangunan ekonomi inklusif	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital
Isu Strategis 2: sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing	Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia
Isu Strategis 3: Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi
Isi Strategis 4: Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan	Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 4. 12 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

Empat prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2023 didasari oleh

1. Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital

Pembangunan ekonomi tidak hanya berpusat pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja namun harus mampu memberikan dampak pada pemerataan dan akses yang luas bagi seluruh masyarakat. Dengan kata lain pembangunan harus bisa mencapai kesejahteraan bersama dan inklusif. Kota Madiun dalam beberapa tahun terakhir termasuk kedalam daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi inklusif tertinggi di Jawa Timur. Oleh karena itu, peningkatan pembangunan ekonomi inklusif dapat terus didorong melalui pengembangan sektor unggulan di Kota Madiun, ekonomi kreatif dan pariwisata kota, serta pengembangan ekonomi berbasis digital.

2. Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia

Kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kota Madiun termasuk kedalam daerah dengan peringkat tertinggi di Jawa Timur yang dihitung dari indek pembangunan manusia. Kemajuan kondisi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Human capital menjadi modal penting dalam mencapai kesejahteraan sebuah daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Madiun mendorong

percepatan / akselerasi bukan hanya pada aspek kuantitas namun juga kualitas sumber daya manusianya.

3. Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi

Pembangunan berbasis Smart City telah menjadi tren pembangunan perkotaan. Konsep Smart City yang dinamis dan memfokuskan diri pada inovasi, solusi dan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi secara optimal. Pembangunan berbasis smart city akan bermuara pada pencapaian pelayanan public yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan berbasis smart city harus didukung oleh reformasi birokrasi secara terarah dan berkelanjutan.

4. Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Namun, pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mengadopsi kondisi lingkungan dan budaya lokal, memperhatikan daya dukung lingkungan dan preservasi sumber daya, optimalisasi SDM dan SDA untuk menjaga bio-diverisity, dan optimalisasi partisipasi masyarakat dan mendorong inovasi teknologi.

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2023

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
Prioritas Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1: Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital
Prioritas Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamain pemerataan	Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas Antarwilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Prioritas Pembangunan 4: Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 3:	Prioritas Pembangunan 3:	Prioritas Pembangunan 4:

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas Pembangunan 2: Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital
Prioritas Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 2: Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia
Prioritas Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi

Sumber: Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapelitbangda Kota Madiun, 2021

Berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkronisasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Sejahtera”**. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2023 ini adalah ketahanan ekonomi dan sosial diharapkan meningkat setelah terjadinya penurunan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak COVID19 yang pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, Perkembangan tema pembangunan dalam RKPD Kota Madiun tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Gambar 4. 13 Perkembangan Tema Pembangunan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2018-2023

4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023. Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2023 yang berkorelasi dengan pencapaian pembangunan secara umum.



Gambar 4. 14 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Kota Madiun, Provinsi Tahun 2023



Gambar 4. 15 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

Rincian dari Sasaran Pembangunan Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD di Tahun 2023	Target Penyesuaian Tahun 2023	Alasan
PRIORITAS 1	PENINGKATAN INKLUSIVITAS EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN, EKONOMI KREATIF DAN DIGITAL					
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,15	5,12	6,15	Berdasarkan rilis data BPS provinsi jawa timur tentang realisasi TPT menurut wilayah klasifikasi per february 2022 untuk wilayah kota sebesar 6,69%

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD di Tahun 2023	Target Penyesuaian Tahun 2023	Alasan
	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	10,16	2,91	10,16	Angka dari BPS perhitungan proyeksi sudah dihitung berdasarkan kondisi ekonomi dan perkembangan recovery pasca covid
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	11,32	0,84	11,32	Perhitungan dari BPS. di tahun 2021 per item jasa kisaran ada pada angka 0,47 sd. 5,64. OPD biasanya menggunakan nilai dari rata-rata per item. Namun, dari LKPJ yang muncul angka total per item
PRIORITAS 2	AKSELERASI KUALITAS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA					
	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,09	4,65	4,77	Dari hasil penghitungan proyeksi penyusun target penyesuaian RPJMD
	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,83	72,83	72,83	
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,41	14,42	14,42	
		Rata-rata Lama Sekolah	11,37	11,16	11,39	Perhitungan berdasarkan proyeksi dengan memperhitungkan realisasi 2021
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,18	77,20	77,20	
	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	B skor 74,36 (Harmonis)	B skor 74,46 (Harmonis)	B skor 74,46 (Harmonis)	
		Indeks rasa aman	81,00	76,27	76,27	???????
PRIORITAS 3	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SMART CITY DAN PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI					
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	70,01	BB (79)	BB (71,25)	
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Pada saat penyusunan rpjmd belum menggunakan indikator baru sehingga dikhawatirkan tidak tercapai
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,06	2,87 (BAIK)	3,06	Pada saat penyusunan rpjmd belum menggunakan indikator baru sehingga dikhawatirkan tidak tercapai
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	86,456 (baik)	85 (baik)	86,55	Ada penambahan lokus untuk survey IKM sehingga Perhitungan berdasarkan proyeksi dengan memperhitungk

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD di Tahun 2023	Target Penyesuaian Tahun 2023	Alasan
						kan realisasi 2021
		Indeks Inovasi Daerah	2693 (52,99)	1925	58,4	Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 002.6-5848 tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021, Kota Madiun mendapatkan indeks 52,99 dengan kategori Kota Inovatif.
PRIORITAS 4	PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR BERBASIS LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN					
	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur	97,99	98,42	98,42	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,99	57,85	57,85	

Keterangan: *Target Kinerja RKPD Tahun 2023 merupakan hasil penyesuaian dengan capaian tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi eksisting

4.2.5 Inovasi Daerah dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis, inovasi daerah ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemabangunan.



Gambar 4. 16 Kerangka Inovasi Daerah Kota Madiun Tahun 2023

Selanjutnya beberapa program prioritas dan inovasi yang digagas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dan dikembangkan pada Tahun 2023 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang diampu, antara lain:

Tabel 4. 8 Inovasi Daerah dalam rangka Mempercepat Pencapaian Target Kinerja

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
Prioritas 1 : Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital			
1	Bus Wisata Gratis	• Melayani rute di Kota Madiun pada lokasi-lokasi wisata religi, objek wisata, UMKM, dll	Dishub
	Pembayaan Non Tunai Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	• Sistem pembayaran cashless selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga dapat meningkatkan pengawasan keuangan	DISHUB
	Siaga Kita	• sistem jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal (asuransi kecelakaan kerja dan/ atau kematian)	Dinas Tenaga Kerja
Prioritas 2 : Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia			
1	Aplikasi Trcaking Bus Sekolah	• Untuk memantau dan mengawasi posisi bus secara update	DISHUB
Prioritas 3: Peningatan Pelayanan Publik Berbasis Smart City Dan Percepatan Reformasi Birokrasi			
1	mall pelayanan publik virtual	• sistem layanan perijinan berbasis virtual	DPMPTSP
Prioritas 4: Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan			
1	Marka Lajur Sepeda	• Meningkatkan keselamatan bagi pengguna sepeda	DISHUB

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Madiun. Penyusunan rencana program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program prioritas RKPD Tahun 2023 dirumuskan untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024. Prioritas belanja daerah Kota Madiun mengacu pada prioritas pembangunan daerah Kota Madiun. Prioritas tersebut merupakan hasil sinkronisasi dengan perencanaan daerah berupa: 1) RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024; 2) Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023; 3) Isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah; 4) Evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Madiun Tahun 2021; dan 5) Tema Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023. Adapun komposisi belanja prioritas pembangunan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:



Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2022

Gambar 5. 1 Belanja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Total Belanja prioritas Kota Madiun pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.200.541.041.175. Belanja tersebut dialokasikan untuk mendukung empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 dengan program-program prioritas sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Prioritas pembangunan 2 yaitu Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia memiliki proporsi terbesar, diikuti prioritas 3 dan 4. Gambaran lebih lengkap mengenai proporsi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut

Kerangka pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan beserta program dan indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1 Kerangka Pendanaan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Beserta Program Dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			250,006,967,425							267,144,669,789	
1	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	185,583,777,393						A Skor	206,216,541,788	
1	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	4,927,900,000						16.1 Indeks	8,581,840,000	
1	0 1	0 1	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4,927,900,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Dokumen	6 Laporan	8,581,840,000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Mahasiswa Penerima BBM	1000 Mahasiswa			Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia		1000 Maha siswa		
1	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	175,699,025,000						16.1 Indeks	189,482,568,348	
1	0 1	0 1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1549 Orang/bula n	175,699,025,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Dinas Pendidikan	1549 Orang /bulan	189,482,568,348	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										DAK Non Fisik-TPG PNSD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia				
										DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia				
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	4,179,152,000						16.1 Indeks	7,372,908,340	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	3,898,202,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Dinas Pendidikan	37 Paket	7,091,958,340	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148 Laporan	280,950,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Dinas Pendidikan	148 Lapora n	280,950,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	98,475,293							100,000,000	
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan parasan Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	98,475,293	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Dinas Pendidikan	2 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	679,225,100						16.1 Indeks	679,225,100	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	216 Unit	147,242,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Dinas Pendidikan	216 Unit	147,242,800	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	382,278,000	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Dinas Pendidikan	1 Unit	382,278,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	206 Unit	149,704,300	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Dinas Pendidikan	206 Unit	149,704,300	Dinas Pendidikan
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	57,557,373,126						100 %	53,999,724,739	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	100 %	42,883,547,700						100 %	19,639,142,700	
1	0	0	2.0	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	68 Ruang	1,056,207,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Peserta Didik, Lembaga	68 Ruang	18,481,802,700	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4880 Unit	40,670,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Peserta Didik, Lembaga	4880 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 siswa	449,340,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Peserta Didik, Lembaga	50 siswa	449,340,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	73 Satuan Pendidikan	708,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Peserta Didik, Lembaga	73 Satuan Pendidikan	708,000,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	100 %	5,481,564,426						100 %	21,108,455,719	
1	0	0	2.0	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 unit	200,378,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Peserta Didik, Lembaga	6 unit	15,437,795,400	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	3,975,043,026	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Peserta Didik, Lembaga	1 Paket	4,364,517,319	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	23 Satuan Pendidikan	212,633,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Peserta Didik, Lembaga	23 Satuan Pendidikan	212,633,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	105 Peserta Didik	522,540,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Peserta Didik, Lembaga	105 Pesert a Didik	522,540,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	570,970,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Peserta Didik, Lembaga	23 Satuan Pendidikan	570,970,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	64 %	8,528,461,000						64 %	12,161,159,320	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	175 Peserta Didik	343,425,000	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga Paud	175 Peserta a Didik	343,425,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	3,600,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga Paud	1000 Orang	3,600,000,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	163 Satuan Pendidikan	1,011,796,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga Paud	163 Satuan Pendidikan	4,644,494,320	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	163 Satuan Pendidikan	3,573,240,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga Paud	163 Satuan Pendidikan	3,573,240,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase lembaga non formal yang dikelola dengan baik	100 %	663,800,000						100 %	1,090,967,000	
1	0	0	2.0	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	175 Peserta Didik	178,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga Non Formal/kesetaraan	0 Peserta Didik	578,800,000	Dinas Pendidikan
										DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia		175 Peserta a Didik		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	75 Satuan Pendidikan	85,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga Non Formal/kesetaraan	75 Satuan Pendidikan	111,367,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 Satuan Pendidikan	400,800,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga Non Formal/kesetaraan	4 Satuan Pendidikan	400,800,000	Dinas Pendidikan
1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah berkurikulum SNP	100 %	5,256,616,906						100 %	5,319,203,262	
1	0	0	2.0		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	100 %	3,963,725,003						100 %	4,026,311,359	
1	0	0	2.0	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1,657,533,530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Peserta Didik, Lembaga	1 Dokumen	1,720,210,950	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1,338,312,674	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Peserta Didik, Lembaga	1 Dokumen	1,338,221,610	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	96 Orang	967,878,799	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Peserta Didik, Lembaga	96 Orang	967,878,799	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	100 %	1,292,891,903						100 %	1,292,891,903	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1,292,891,903	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Dokumen	1,292,891,903	Dinas Pendidikan
1	0	0			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	65%	1,609,200,000						66 %	1,609,200,000	
1	0	0	2.0		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan bersertifikasi	66 %	1,609,200,000						66 %	1,609,200,000	
1	0	0	2.0	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Dokumen	750,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Pendidik, Tenaga Kependidikan , Kepala Sekolah dan Pengawas	6 Dokumen	750,000,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	859,200,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Pendidik, Tenaga Kependidikan , Kepala Sekolah dan Pengawas	2 Laporan	859,200,000	Dinas Pendidikan
										Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			615,921,000							615,921,000	

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			238,556,000							238,556,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	238,556,000						100 %	238,556,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	238,556,000						100 %	238,556,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	177,176,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	177,176,000	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 2	2.0 1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	61,380,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	61,380,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			634,126,000							634,126,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	634,126,000						100 %	634,126,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	634,126,000						100 %	634,126,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	293,566,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	293,566,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	340,560,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	340,560,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			317,626,000							317,626,000	
1	0	0	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	317,626,000						100 %	317,626,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	317,626,000						100 %	317,626,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	189,916,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	189,916,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	127,710,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	127,710,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			639,613,000							639,613,000	
1	0	0	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	639,613,000						100 %	639,613,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	639,613,000						100 %	639,613,000	

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		204,655,000								204,654,250	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	204,655,000						100 %	204,654,250	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	204,655,000						100 %	204,654,250	
1	0 1	0 2	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	152,185,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	152,184,250	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 2	2.0 1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	52,470,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	52,470,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		228,732,000								228,732,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	228,732,000						100 %	228,732,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	228,732,000						100 %	228,732,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	158,442,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	158,442,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	70,290,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	70,290,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			405,962,000							405,962,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	405,962,000						100 %	405,962,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	405,962,000						100 %	405,962,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	254,492,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	254,492,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	151,470,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	151,470,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			391,431,000							391,431,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	391,431,000						100 %	391,431,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	391,431,000						100 %	391,431,000	

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			230,770,000							205,770,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	230,770,000						100 %	205,770,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	230,770,000						100 %	205,770,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	141,670,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	116,670,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	89,100,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	89,100,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			368,189,000							368,189,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	368,189,000						100 %	368,189,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	368,189,000						100 %	368,189,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	199,889,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	199,889,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	168,300,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	168,300,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			595,796,000							595,796,000	
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	595,796,000						100 %	595,796,000	
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	595,796,000						100 %	595,796,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	323,546,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	323,546,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	272,250,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	272,250,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			663,960,000							663,960,000	
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	663,960,000						100 %	663,960,000	
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	663,960,000						100 %	663,960,000	

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			951,662,000							951,662,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	951,662,000						100 %	951,662,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	951,662,000						100 %	951,662,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	436,862,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	436,862,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	514,800,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	514,800,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			559,431,000							559,431,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	559,431,000						100 %	559,431,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	559,431,000						100 %	559,431,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	248,571,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	248,571,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	310,860,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	310,860,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			793,034,000							793,034,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	793,034,000						100 %	793,034,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	793,034,000						100 %	793,034,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	333,674,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	333,674,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	459,360,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	459,360,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			346,199,000							346,199,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	346,199,000						100 %	346,199,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	346,199,000						100 %	346,199,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	572,132,000						100 %	572,132,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	572,132,000						100 %	572,132,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	265,232,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	265,232,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	306,900,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	306,900,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			291,092,000							291,092,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	291,092,000						100 %	291,092,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	291,092,000						100 %	291,092,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	173,282,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	173,282,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	117,810,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	117,810,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			598,874,000							598,874,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	598,874,000						100 %	598,874,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	598,874,000						100 %	598,874,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	279,104,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	279,104,000	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 2	2.0 1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	319,770,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	319,770,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			229,810,000							229,810,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	229,810,000						100 %	229,810,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	229,810,000						100 %	229,810,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	176,350,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	176,350,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	53,460,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	53,460,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			321,376,000							321,376,000	
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	321,376,000						100 %	321,376,000	
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	321,376,000						100 %	321,376,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	162,976,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	162,976,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	158,400,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	158,400,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			530,746,000							281,266,000	
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	530,746,000						100 %	281,266,000	
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	530,746,000						100 %	281,266,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	629,272,000						100 %	629,272,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	629,272,000						100 %	629,272,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	350,092,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	350,092,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	279,180,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	279,180,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			359,745,000							359,745,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	359,745,000						100 %	359,745,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	359,745,000						100 %	359,745,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	189,465,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	189,465,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	170,280,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	170,280,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			862,871,000							862,871,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	862,871,000						100 %	862,871,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	862,871,000						100 %	862,871,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	436,181,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	436,181,000	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 2	2.0 1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	426,690,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	426,690,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			208,680,000							208,680,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	208,680,000						100 %	208,680,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	208,680,000						100 %	208,680,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	133,440,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	133,440,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	75,240,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	75,240,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			283,799,000							283,799,000	
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	283,799,000						100 %	283,799,000	
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	283,799,000						100 %	283,799,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	196,679,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	196,679,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	87,120,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	87,120,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			610,026,000							610,026,000	
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	610,026,000						100 %	610,026,000	
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	610,026,000						100 %	610,026,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	660,879,000						100 %	660,879,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	660,879,000						100 %	660,879,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	264,879,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	264,879,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	396,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	396,000,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			333,935,000							333,935,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	333,935,000						100 %	333,935,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	333,935,000						100 %	333,935,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	224,045,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	224,045,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	109,890,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	109,890,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			942,348,000							942,348,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	942,348,000						100 %	942,348,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	942,348,000						100 %	942,348,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	444,378,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	444,378,000	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 2	2.0 1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	497,970,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	497,970,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			647,421,000							647,421,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	647,421,000						100 %	647,421,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	647,421,000						100 %	647,421,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	321,711,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	321,711,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	325,710,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	325,710,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			542,898,000							542,898,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	542,898,000						100 %	542,898,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	542,898,000						100 %	542,898,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	238,968,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	238,968,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	303,930,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	303,930,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			355,797,000							355,797,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	355,797,000						100 %	355,797,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	355,797,000						100 %	355,797,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	248,073,000						100 %	248,073,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	248,073,000						100 %	248,073,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	126,303,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	126,303,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	121,770,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	121,770,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			336,142,000							336,142,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	336,142,000						100 %	336,142,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	336,142,000						100 %	336,142,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	175,762,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	175,762,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	160,380,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	160,380,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			357,420,000							357,420,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	357,420,000						100 %	357,420,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	357,420,000						100 %	357,420,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	187,140,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	187,140,000	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 2	2.0 1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	170,280,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	170,280,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			445,141,000							445,141,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	445,141,000						100 %	445,141,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	445,141,000						100 %	445,141,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	270,901,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	270,901,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	174,240,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	174,240,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			190,489,000							190,489,000	
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	190,489,000						100 %	190,489,000	
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	190,489,000						100 %	190,489,000	
1	0	0	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	116,239,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	116,239,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	74,250,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	74,250,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			196,334,000							196,334,000	
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	196,334,000						100 %	196,334,000	
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	196,334,000						100 %	196,334,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,997,234,000						100 %	1,997,234,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1,997,234,000						100 %	1,997,234,000	
1	0	0	2.0	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	761 Peserta Didik	1,075,214,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	761 Pesert a Didik	1,075,214,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	922,020,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	922,020,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1,571,424,800							1,571,441,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,571,424,800						100 %	1,571,441,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1,571,424,800						100 %	1,571,441,000	
1	0	0	2.0	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	665,151,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	0 Peserta Didik	665,151,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	906,273,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	906,290,000	Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1,278,419,000							1,127,969,000	
1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,278,419,000						100 %	1,127,969,000	
1	0 1	0 2	2.0 2			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1,278,419,000						100 %	1,127,969,000	
1	0 1	0 2	2.0 2	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	606,869,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	0 Peserta Didik	456,419,000	Dinas Pendidikan	
1	0 1	0 2	2.0 2	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	671,550,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	671,550,000	Dinas Pendidikan	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1,677,195,000							1,677,195,000	
1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,677,195,000						100 %	1,677,195,000	
1	0 1	0 2	2.0 2			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1,677,195,000						100 %	1,677,195,000	
1	0 1	0 2	2.0 2	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	636,595,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	0 Peserta Didik	636,595,000	Dinas Pendidikan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,040,600,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	1,040,600,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1,290,903,000							1,290,903,000	
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,290,903,000						100 %	1,290,903,000	
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1,290,903,000						100 %	1,290,903,000	
1	0	0	2.0	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	780,283,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	0 Peserta Didik	780,283,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	510,620,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	510,620,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1,511,432,000							1,511,432,000	
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,511,432,000						100 %	1,511,432,000	
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1,511,432,000						100 %	1,511,432,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	966,882,000						100 %	966,882,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	966,882,000						100 %	966,882,000	
1	0	0	2.0	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	324,372,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	0 Peserta Didik	324,372,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	642,510,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	642,510,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1,226,624,000							1,226,624,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,226,624,000						100 %	1,226,624,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1,226,624,000						100 %	1,226,624,000	
1	0	0	2.0	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	701,484,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	0 Peserta Didik	701,484,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2.0	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	525,140,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	525,140,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1,412,271,200							1,601,280,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,412,271,200						100 %	1,601,280,000	
1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1,412,271,200						100 %	1,601,280,000	
1	0 1	0 2	2.0 2	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	976,920,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	0 Peserta Didik	976,920,000	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 2	2.0 2	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	435,351,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	624,360,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1,499,858,000							1,499,858,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,499,858,000						100 %	1,499,858,000	
1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1,499,858,000						100 %	1,499,858,000	
1	0 1	0 2	2.0 2	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	712,148,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	0 Peserta Didik	712,148,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.0	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	787,710,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	787,710,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1,084,801,000							1,084,801,000	
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,084,801,000						100 %	1,084,801,000	
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1,084,801,000						100 %	1,084,801,000	
1	0	1	0	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	378,161,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	0 Peserta Didik	378,161,000	Dinas Pendidikan
1	0	1	0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	706,640,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Satuan Pendidikan	706,640,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1,379,647,000							1,379,647,000	
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,379,647,000						100 %	1,379,647,000	
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1,379,647,000						100 %	1,379,647,000	

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			97,679,733,644							92,357,352,651	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	55,745,191,817						84.5 skor	35,366,252,106	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	79 dokumen	339,195,400						79 dokume n	326,342,388	
						Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100 %							100 %		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	88,079,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun	8 Dokume n	88,079,900	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	121,618,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun	3 Laporan	326,342,388	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	129,497,100	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun	5 Laporan	129,497,100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	52,675,045,551						100 %	31,684,936,532	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	313 Orang/bulan	52,675,045,551	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	ASN Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	313 Orang /bulan	31,684,936,532	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,247,447,716						1 paket	2,781,934,416	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,784,227,716	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB	1 Paket	2,209,727,392	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	463,220,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB	120 Lapora n	572,207,024	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 unit	483,503,150						80 unit	573,038,770	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 Unit	346,771,300	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB	80 Unit	359,867,889	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,311,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB	1 Unit	16,994,557	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	273 Unit	126,420,450	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB	273 Unit	196,176,324	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	39,157,720,997						75 %	55,378,554,294	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit	5,581,271,780						1 unit	4,989,806,786	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	162 unit							162 unit		
						Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	89.13 %							89.13 %		
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	246,629,080	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB	1 Unit	246,629,080	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	778 Unit	1,976,438,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB	778 Unit	2,400,268,707	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	619 Unit	143,404,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB	619 Unit	112,553,003	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	25 Paket	3,128,867,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB	25 Paket	2,476,985,076	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	162 Unit	85,933,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Dinas Kesehatan PP dan KB	162 Unit	85,933,200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	75 %	33,576,449,217						75 %	50,388,747,508	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2490 Orang	891,908,100	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	2490 Orang	362,032,146	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2377 Orang	67,976,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	2377 Orang	62,594,797	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2264 Orang	110,303,450	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	2264 Orang	24,008,167	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9218 Orang	247,091,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	9218 Orang	216,826,795	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31972 Orang	103,130,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	31972 Orang	28,537,149	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115490 Orang	119,184,408	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	115490 Orang	554,012,059	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28597 Orang	69,678,100	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	28597 Orang	55,796,020	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	13,567,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	0 Orang	10,054,149	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28,788,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	0 Orang	30,787,318	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	338 Orang	64,735,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	338 Orang	182,438,942	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	52,894,750	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	0 Orang	244,661,575	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	163,368,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	0 Orang	347,229,387	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	162,926,250	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	3 Dokume n	17,879,242	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	400,507,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	3 Dokume n	91,263,286	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	109,035,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	5 Dokume n	586,809,824	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	115,061,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	3 Dokumen	140,335,852	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	338 Orang	60,032,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	338 Orang	172,832,227	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	276,645,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	2 Dokumen	226,567,926	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36 Dokumen	27,233,193,164	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	36 Dokumen	42,534,768,390	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	324,124,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	10 Dokumen	165,266,153	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Dokumen	2,279,953,695	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	7 Dokumen	2,948,079,130	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6 Unit	22,939,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	6 Unit	519,096,248	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	659,406,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	1 Unit	866,870,726	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	91 %	198,360,350						91 %	180,290,937	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	500 orang	198,360,350						500 orang	180,290,937	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	500 Orang	198,360,350	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	500 Orang	180,290,937	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	88 %	96,205,700						88 %	240,360,686	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 dokumen	61,684,700						2 dokumen	207,996,871	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	61,684,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	2 Dokume n	207,996,871	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 dokumen	34,521,000						3 dokumen	32,363,815	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 Dokumen	34,521,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	3 Dokume n	32,363,815	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	62,5 %	2,482,254,780						62,5 %	1,191,894,628	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	355,011,920						1 dokumen	376,176,044	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	355,011,920	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	1 Dokume n	376,176,044	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 dokumen	2,127,242,860						3 dokumen	815,718,584	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	2,127,242,860	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	3 Dokume n	815,718,584	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			3,272,406,072							4,468,420,433	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK	8 SSK	439,867,720						8 SSK	707,170,924	
						Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	5 Kampung KB							5 Kampung KB		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	7 dokumen	98,183,000						7 dokumen	22,937,931	
2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	7 Dokumen	98,183,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	0	7 Dokume n	22,937,931	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang telah melakukan updating data keluarga	27 Kelurahan	341,684,720						27 Kelurahan an	684,232,993	
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	289,169,720	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangu n sumber daya manusia	0	27 Laporan	684,232,993	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24 Dokumen	52,515,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangu n sumber daya manusia	0	24 Dokum en	52,515,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	1,922,669,452						7.5 %	2,953,076,682	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27 Organisasi	601,248,212						27 Organis asi	361,013,661	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27 Organisasi	5,450,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	27 Organis asi	5,450,900	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen	256,957,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	2 Dokume n	256,957,200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 unit	41,216,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	4 unit	127,352,558	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	75,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	2 Dokume n	75,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	46,800,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	12 Laporan	46,800,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	72 Laporan	135,823,912	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	72 Laporan	233,661,103	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	40,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	2 Laporan	40,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 unit	748,155,200						3 unit	137,492,640	
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 Unit	740,654,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	3 Unit	740,654,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	150 Orang	7,501,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	150 Orang	137,492,640	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22 Laporan	452,516,040						22 Laporan	2,293,194,760	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22 Laporan	16,200,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	22 Laporan	54,918,549	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	651 Orang	391,017,040	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	651 Orang	1,274,664,985	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	31,499,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	2 Unit	963,611,226	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	13,800,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	4 Laporan	13,800,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	7 dokumen	120,750,000						7 dokumen	161,375,621	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	7 Kampung	120,750,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	7 Kampung	161,375,621	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	82 %	909,868,900						82 %	808,172,827	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	240 Orang	909,868,900						240 Orang	808,172,827	
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	240 Orang	199,354,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	240 Orang	79,991,383	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	225 Orang	421,740,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	225 Orang	421,740,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Laporan	288,774,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	32 Laporan	728,181,444	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			144,980,339,134							160,618,406,790	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	101,587,028,523						A skor	140,290,951,566	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100 %	23,808,447,460						100 %	28,083,558,951	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	228 Orang/bulan	23,808,447,460	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	ASN RSUD Kota Madiun	228 Orang /bulan	28,083,558,951	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	100 %	1,239,700,000						100 %	1,429,435,350	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 Laporan	1,239,700,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Tenaga Kontrak Pemkot RSUD Kota Madiun	14 Laporan	1,429,435,350	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100 %	76,538,881,063						100 %	110,777,957,265	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	76,538,881,063	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Pelanggan/Pa sien RSUD Kota Madiun	1 Unit Kerja	110,777,957,265	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	75 %	43,393,310,611						75 %	20,327,455,224	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator SPM kesehatan rujukan mencapai target	89.13 %	43,393,310,611						89.13 %	20,327,455,224	
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	1 unit	544,352,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Pelanggan/Pa sien RSUD Kota Madiun	1 unit	973,210,500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	3 unit	34,502,467,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Pelanggan/Pa sien RSUD Kota Madiun	3 unit	34,502,467,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	198 unit	1,933,520,134	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Pelanggan/Pa sien RSUD Kota Madiun	198 unit	1,933,520,134	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	17 Unit	1,413,119,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Pelanggan/Pa sien RSUD Kota Madiun	17 Unit	16,354,244,724	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	6 Paket	4,999,852,477	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Pelanggan/Pa sien RSUD Kota Madiun	6 Paket	3,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,439,665,000							3,865,546,163	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,439,665,000						75 %	3,865,546,163	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 dokumen	2,439,665,000						2 dokumen	3,865,546,163	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	210,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	2 Dokume n	544,243,822	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	310,665,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	3 Dokume n	282,252,445	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1,919,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	4 Dokumen	3,039,049,896	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,018,616,600							3,270,110,734	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,018,616,600						75 %	3,270,110,734	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 dokumen	2,018,616,600						2 dokumen	3,270,110,734	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 dokumen							3 dokumen		
						Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	75 %							75 %		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	210,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	2 Dokumen	540,857,429	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	342,402,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	3 Dokumen	225,260,897	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1,466,214,600	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	4 Dokumen	2,503,992,408	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,313,990,000							3,857,386,781	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,313,990,000						75 %	3,857,386,781	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 dokumen	2,313,990,000						2 dokumen	3,857,386,781	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	210,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	0	2 Dokumen	578,232,936	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	469,350,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	0	3 Dokumen	299,067,710	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1,634,640,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	4 Dokume n	2,980,086,135	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,991,095,000							4,422,166,445	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	1,991,095,000						75 %	4,422,166,445	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 dokumen	1,991,095,000						2 dokumen	4,422,166,445	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	210,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	2 Dokume n	598,660,566	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	249,475,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	3 Dokume n	264,668,028	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1,531,620,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	4 Dokume n	3,558,837,851	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,982,959,000							4,542,129,834	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,982,959,000						75 %	4,542,129,834	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 dokumen	2,982,959,000						2 dokumen	4,542,129,834	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	210,000,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	2 Dokume n	615,992,489	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	672,959,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	3 Dokume n	367,299,494	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	2,100,000,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	4 Dokume n	3,558,837,851	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,662,500,000							3,789,216,403	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,662,500,000						75 %	3,789,216,403	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 dokumen	2,662,500,000						2 dokumen	3,789,216,403	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	210,000,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat kota Madiun	2 Dokume n	567,581,500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	536,250,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat kota Madiun	3 Dokume n	345,853,400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1,916,250,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat kota Madiun	4 Dokume n	2,875,781,503	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia				
TOTAL									260,341,304,450							281,190,736,234	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			150,000,416,000							477,436,250,000	
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	13,714,687,105							14,016,400,000	
1	03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000							60,000,000	
1	03	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	50,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan		1 dokumen	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	7,792,677,420						100 %	7,900,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 orang/bulan	7,792,677,420	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Pegawai Dinas PUPR	51 orang/bulan	7,900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	250,000,000						100 %	270,000,000	
1	0	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	250,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	60 Laporan	270,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100 %	993,470,000						100 %	1,505,000,000	
1	0	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	3 unit	987,270,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	3 unit	1,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	6,200,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	11 unit	205,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,791,796,347							3,400,000,000	
1	0	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 laporan	3,791,796,347	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan		10 laporan	3,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	100 %	836,743,338						100 %	881,400,000	
1	0	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59 unit	370,280,838	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	59 unit	411,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	466,462,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 Unit	470,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rawan Banjir/Genangan	18.47 %	12,574,216,000						18.47 %	35,579,850,000	
1	0	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	12,574,216,000						1 Dokume n	35,579,850,000	
						Persentase rawan Genangan	18.47 %							18.47 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	02	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit	235,100,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	2 Unit	249,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	02	2.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan	2 Unit	3,165,339,960	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	2 Unit	12,130,350,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstoras i	0.5 KM	8,075,086,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	0.5 KM	22,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	02	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1,098,690,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	1 Unit	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	21,869,000						100 %	20,000,000	
1	0	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	21,869,000						100 %	20,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	0	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	21,869,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	0	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %	22,188,093,000					80.09 %	41,400,000,000		
1	0	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %	22,188,093,000					80.09 %	41,400,000,000		
1	0	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	20 Dokumen	934,450,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	20 Dokumen	1,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	100 M	19,195,397,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	100 M	37,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 M	2,058,246,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	100 M	2,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	38,642,900,000						100 %	87,240,000,000	
1	0	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100 %	38,642,900,000						100 %	87,240,000,000	
1	0	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5 Dokumen	242,900,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	5 Dokume n	240,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	40 Dokumen	38,400,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	40 Dokum en	87,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	18,964,000,895						100 %	150,650,000,000	
1	0	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan sesuai Ketentuan	100 %	18,964,000,895						100 %	150,650,000,000	
1	0	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	27 Kawasan	18,371,066,895	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	27 Kawasa n	150,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	27 Kawasan	592,934,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	27 Kawasa n	650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	41,965,000,000						95.5 %	146,710,000,000	
1	0	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi mantap	95.5 %	41,965,000,000						95.5 %	146,710,000,000	
1	0	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	258,292,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 Dokume n	760,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	1500 M²	3,015,100,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1500 M²	52,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan dan jembatan	1 dokumen	408,600,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	0	3	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1.5 KM	1,652,330,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1.5 KM	17,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	3	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	2 KM	13,976,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	2 KM	39,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1.5 KM	14,379,050,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1.5 KM	27,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6 KM	5,852,247,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	6 KM	6,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	10 M2	2,195,180,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	10 M2	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 M²	227,990,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	10 M²	230,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	77.98 %	679,650,000						77.98 %	540,000,000	
1	0	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	100 orang	491,250,000						100 orang	270,000,000	
1	0	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	100 Orang	491,250,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	100 Orang	270,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	95 %	188,400,000						95 %	270,000,000	
1	0	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	80 Orang	188,400,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	80 Orang	270,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	1,250,000,000						100 %	1,280,000,000	
1	0	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	950,000,000						1 Dokume n	880,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	200,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	100,000,000						1 Dokumen	150,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional		Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	0	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	200,000,000						1 Dokumen	250,000,000	
1	0	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	200,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL								150,000,416,000							477,436,250,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional		Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			39,744,104,195							51,562,880,000	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.20 skor	11,865,404,195						80.20 skor	12,696,880,000	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan,pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	18,673,400						100 %	48,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	18,673,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembanga n Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	capaian kinerja	20 laporan	48,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	7,288,329,160						100 %	6,135,000,000	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	7,227,329,160	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembanga n Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	administrasi keuangan	34 orang/b ulan	6,074,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	13 Dokumen	61,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembanga n Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	administrasi keuangan	13 Dokume n	61,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	142,950,000						100 %	150,000,000	
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	132,950,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembanga n Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Administrasi kepegawaian	1 Paket	140,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	2,200,700,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	20 Laporan	2,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	2,020,569,850						100 %	2,380,000,000	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 unit	1,500,324,850	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	65 unit	1,800,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	1 unit	100,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 unit	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	106 unit	420,245,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	106 unit	480,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	2,477,810,500						100 %	3,931,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	1 Dokumen	86,150,000						1 Dokumen	100,000,000	
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	86,150,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	3 lokasi	2,295,210,500						3 lokasi	3,731,000,000	
1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3 unit rumah	2,295,210,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	rusunawa	3 unit rumah	3,731,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %	96,450,000						100 %	100,000,000	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	1 laporan	96,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	pengelolaan kelembagaan rusunawa	1 laporan	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99,5 %	5,723,441,600						99,5 %	6,935,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Nasional	Daerah										
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.5 %	95,000,000						0.5 %	220,000,000	
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	95,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	kawasan permukiman kumuh yang ditangani	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.5 %	5,628,441,600						0.5 %	6,715,000,000	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugara n Permukiman Kumuh	3 Dokumen	38,736,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	kawasan permukiman kumuh yang ditangani	3 Dokumen	315,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	160 unit	2,222,940,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	kawasan permukiman kumuh yang ditangani	160 unit	2,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	16.41 ha	3,366,765,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	kawasan permukiman kumuh yang ditangani	16.41 ha	4,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	19,677,447,900						100 %	28,000,000,000	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	100 %	19,677,447,900						100 %	28,000,000,000	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 lokasi	19,677,447,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Penyelenggaran PSU Perumahan	3 lokasi	28,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			131,200,000							131,200,000	
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100 %	15,000,000						100 %	15,000,000	
2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian izin lokasi	100 %	15,000,000						100 %	15,000,000	
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan	100 %	15,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	rekomendasi izin lokasi	100 %	15,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	36,200,000						100 %	36,200,000	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	36,200,000						100 %	36,200,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	36,200,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Bencana dan Perubhan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	fasilitasi sengketa tanah garapan	1 Dokumen	36,200,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	100 %	80,000,000						100 %	80,000,000	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	100 %	80,000,000						100 %	80,000,000	
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 laporan	80,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Bencana dan Perubhan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Penatagunaan tanah	10 laporan	80,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
TOTAL								39,875,304,195							51,694,080,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			22,478,373,000							24,580,908,000	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.10 Indeks	10,273,754,000						80.10 Indeks	14,016,694,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	163,974,000						12 Laporan	163,974,000	
1	0	0	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	163,974,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kantor Satpol PP dan Damkar	12 Laporan	163,974,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang	6,038,083,000						54 Orang	8,000,000,000	
1	0	0	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	6,038,083,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun	54 Orang/bulan	8,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	684,175,000						1 Paket	700,000,000	
1	0	0	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	684,175,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun	1 Paket	700,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	150,000,000						20 Laporan	275,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	150,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kantor Satpol PP dan Damkar	20 Laporan	275,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	359,871,500						1 unit	998,000,000	
1	0	0	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	160,950,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kantor Satpol PP dan Damkar	5 Unit	600,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	195,850,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kantor Satpol PP dan Damkar	1 Unit	198,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3,071,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kantor Satpol PP dan Damkar	1 Unit	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Laporan	2,124,753,500						6 Laporan	3,100,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	2,124,753,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kantor Satpol PP dan Damkar	6 Laporan	3,100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	752,897,000						1 unit	779,720,000	
1	0	0	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	489,677,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kantor Satpol PP dan Damkar	20 Unit	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	183,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kantor Satpol PP dan Damkar	1 Unit	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68 Unit	79,720,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kantor Satpol PP dan Damkar	68 Unit	79,720,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97 %	11,113,091,000						97 %	8,374,344,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aturan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	78 Orang	8,566,566,000						78 Orang	6,929,832,000	
1	0	0	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	40 Kasus	1,525,526,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	40 Kasus	1,640,136,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	275 Kasus	812,347,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	275 Kasus	1,900,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	152,772,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	8 Dokumen	152,772,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	5,763,046,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	6 Dokumen	2,924,049,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	78 Orang	312,875,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	78 Orang	312,875,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	4 Dokumen	2,442,006,000						4 Dokumen	1,161,200,000	
1	0	0	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Dokumen	2,096,102,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	4 Dokumen	304,962,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	345,904,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	12 Laporan	856,238,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	100 %	104,519,000						100 %	283,312,000	
1	0	0	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	104,519,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	12 Laporan	283,312,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	1,091,528,000						100 %	2,189,870,000	
1	0	0	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,074,428,000						100 %	1,989,870,000	
1	0	0	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggul angan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	6 Dokumen	686,635,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatka n Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	6 Dokumen	1,650,492,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	387,793,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	6 Laporan	339,378,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	90 %	17,100,000						90 %	200,000,000	
1	0	0	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Ling kungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	6 Dokumen	17,100,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	6 Dokumen	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
TOTAL								22,478,373,000							24,580,908,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional		Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3,799,700,000							4,875,000,000	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,386,841,000						A Skor	2,760,000,000	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	2,250,000						100 %	5,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai BPBD Kota Madiun	6 Laporan	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	1,823,700,000						100 %	1,750,000,000	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1,823,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai BPBD Kota Madiun	13 Orang/bulan	1,750,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	70,000,000						100 %	150,000,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai BPBD Kota Madiun	24 Laporan	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	13,320,000						100 %	75,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai BPBD Kota Madiun	5 Unit	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	321,693,000						100 %	500,000,000	
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	321,693,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai BPBD Kota Madiun	12 Laporan	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	155,878,000						100 %	280,000,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	138,283,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai BPBD Kota Madiun	8 Unit	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	17,595,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai BPBD Kota Madiun	5 Unit	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	1,412,859,000						100 %	2,115,000,000	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	112,354,000						100 %	345,000,000	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	1 Dokumen	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	62,354,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	300 Orang	270,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1,144,390,000						100 %	1,440,000,000	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	1 Dokumen	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200 Orang	87,155,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	200 Orang	115,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit	19,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	5 Unit	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	50,650,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	6 Kawasan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	37 Orang	888,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	37 Orang	1,050,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 Orang	48,945,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubhan Iklim	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	300 Orang	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			25,473,007,331							24,717,040,486	
1	0 6	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	8,942,179,640						A nilai	7,192,564,397	
1	0 6	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	360,658,619						100 persen	357,990,502	
1	0 6	0 1	2.01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	128,694,300	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	ASN	4 Dokumen	121,595,382	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0 6	0 1	2.01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	170,122,119		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	ASN	14 Laporan	145,608,320	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0 6	0 1	2.01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	61,842,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	ASN	3 Laporan	90,786,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0 6	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenatase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 persen	6,211,496,463						100 persen	4,386,166,760	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	6,088,945,055	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	ASN	35 Orang/ bulan	4,302,781,205	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	13 Laporan	122,551,408	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	ASN	13 Laporan	83,385,555	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 persen	131,073,000						100 persen	137,887,000	
1	0	0	2.05	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59 Orang	104,586,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	ASN	59 Orang	111,400,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.05	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	26,487,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	ASN	60 Orang	26,487,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			325,541,000							307,041,000	
1	0	0	2.06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	142 laporan	325,541,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia		142 laporan	307,041,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100 persen	164,386,500						100 persen	100 persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.09	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	215,702,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia		28 unit	182,591,450	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	152,421,075	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia		2 unit	152,421,075	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	110 unit	91,034,720	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia		110 unit	91,034,720	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	58 persen	3,589,656,050						58 persen	4,278,584,200	
1	0	0	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	58 persen	3,589,656,050						58 persen	4,278,584,200	
1	0	0	2.03	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	214 Orang	396,044,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	PSKS	214 Orang	429,813,230	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.03	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	65,647,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	PSKS	3 Orang	88,377,740	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.03	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga	210,899,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	PSKS	5 Keluarga	255,818,750	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.03	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga	2,917,063,650	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	PSKS	14 Lembaga	3,504,574,480	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	1,635,853,661						100 persen	1,773,690,319	
1	0	0	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	1,088,072,181						100 persen	1,163,173,616	
1	0	0	2.01	0	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	165 orang	204,084,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	PMKS	165 orang	208,987,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.01	0	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	25,768,681		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	PMKS	60 orang	28,318,771	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.01	0	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kot	13 orang	35,457,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	PMKS	13 orang	15,457,200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.01	0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	42,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	PMKS	12 orang	42,300,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.01	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	62 orang	10,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	PMKS	62 orang	20,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.01	0	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	270 orang	666,392,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	PMKS	270 orang	741,535,475	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.01	1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	103,969,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	PMKS	60 orang	106,074,670	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	547,781,480						100 persen	610,516,703	
1	0	0	2.02	0	Pemberian Layanan Kedaruratan	umlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	191,360,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	0	25 orang	210,616,566	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.02	0	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	95,736,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	0	250 orang	110,983,400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02	0	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	20,250,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	0	50 orang	22,356,749	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02	0	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	10,789,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	0	20 orang	11,968,328	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02	0	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	26,051,380		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	0	100 orang	28,742,960	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	135 orang	71,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	0	135 orang	79,530,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02	1	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	117,792,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	0	75 orang	130,808,700	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02	1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14 orang	14,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	0	14 orang	15,510,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66%	10,466,050,900						91 persen	10,667,295,000	
1	0	0	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	95 persen	8,668,000						95 persen	8,668,000	
1	0	0	2.01	0	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	3,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Anak Terlantar	15 Orang	3,960,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.01	0	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	4,488,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Anak Terlantar	8 Orang	4,488,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.01	0	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Anak Terlantar	8 Orang	220,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	10,457,382,900						100 persen	10,667,295,000	
1	0	0	2.02	0	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	24685 Orang	919,803,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Fakir Miskin	24685 Orang	919,803,700	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4000 Keluarga	606,105,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Fakir Miskin	4000 Keluarg a	606,105,400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2.02	0	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	4000 keluarga	8,903,928,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Fakir Miskin	4000 keluarga	10,667,295,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02	0	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	56 Orang	27,545,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Fakir Miskin	56 Orang	27,545,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	657,016,400						100 persen	804,906,570	
1	0	0	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	100 persen	78,209,900						100 persen	134,513,672	
1	0	0	2.01	0	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	39,282,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	korban bencana	300 Orang	52,266,828	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.01	0	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	15,177,300	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	korban bencana	300 Orang	25,471,644	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	0	0	2.01	0	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	23,750,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	korban bencana	15 Orang	56,775,200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	100 persen	578,806,500						100 persen	670,392,898	
1	0	0	2.02	0	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	135,615,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Kelurahan	1 Kampung	153,179,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	2.02	0	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	443,191,300	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Kelurahan	30 Orang	517,213,098	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100 persen	182,250,680						100 persen	182,250,680	
1	0	0	2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	182,250,680						100 persen	182,250,680	
1	0	0	2.01	0	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	966 Makam	182,250,680			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Makam Pahlawan	966 Makam	182,250,680	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	0	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1,823,191,100							1,823,191,100		
2	0	0	2		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	764,802,900						100 persen	764,802,900		
2	0	0	2	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	100 persen	144,341,900						100 persen	144,341,900		
2	0	0	2	2.01	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Dokumen	78,234,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Perangkat Daerah	32 Dokumen	78,234,400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	2	2.01	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen	23,242,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Perangkat Daerah	34 Dokumen	23,242,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	0	0	2.01	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	30,217,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	30,217,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	2.01	0	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	12,648,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	12,648,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	20 persen	34,946,000						20 persen	34,946,000	
2	0	0	2.02	0	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	34,946,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Perempuan pada Lembaga Masyarakat	8 Dokumen	34,946,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	0	0	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	55 persen	585,515,000						55 persen	585,515,000	
2	0	0	2.03	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	580 Orang	562,735,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Lembaga	580 Orang	562,735,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	2.03	0	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	22,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Lembaga	1 Dokumen	22,780,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 persen	240,371,000						100 persen	240,371,000	
2	0	0	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	98 persen	68,287,000						98 persen	68,287,000	
2	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	36,391,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Lembaga	1 Dokumen	36,391,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	0	0	2.01	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	31,896,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Lembaga	27 Perangkat Daerah	31,896,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	85 persen	155,907,000						85 persen	155,907,000	
2	0	0	2.02	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	155,907,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	penyedia layanan	20 Layanan	155,907,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	100 persen	16,177,000						100 persen	16,177,000	
2	0	0	2.03	0	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	12 Orang	7,518,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Lembaga	12 Orang	7,518,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
											Nasional					Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	0	0	2.03	0	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8,659,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Lembaga	1 Dokumen	8,659,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	0	0	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	20 persen	314,350,300					20 persen	314,350,300			
2	0	0	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	85 persen	264,579,300				85 persen	264,579,300			
2	0	0	8	4	2.01	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	83,769,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	masyarakat	34 Perangkat Daerah	83,769,300	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	8	4	2.01	0	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	180,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	masyarakat	1 Dokumen	180,810,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	0	0	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	100 persen	49,771,000						100 persen	49,771,000	
2	0	0	2.02	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	257 Orang	49,771,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Rukun Tetangga atau Kepala Keluarga	257 Orang	49,771,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	1 dokumen	156,292,900						1 dokumen	156,292,900	
2	0	0	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan data gender dan anak	100 persen	156,292,900						100 persen	156,292,900	
2	0	0	2.01	0	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	62,698,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Perangkat Daerah dan instansi terkait	2 Dokumen	62,698,900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	2.01	0	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	93,594,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Perangkat Daerah dan instansi terkait	2 Dokumen	93,594,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	22,43 persen	264,556,000						22,43 persen	264,556,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	0	0	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	22 persen	43,238,000						22 persen	43,238,000	
2	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43,238,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Lembaga	1 Dokumen	43,238,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	22 persen	221,318,000						22 persen	221,318,000	
2	0	0	2.02	0	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	22,584,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Lembaga	100 Orang	22,584,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	2.02	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	84,179,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Lembaga	1 Dokumen	84,179,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	2.02	0	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	76,214,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Lembaga	1 Dokumen	76,214,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Daerah					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	0	0	2.02	0	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	38,341,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Lembaga	1 Dokumen	38,341,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	0	0	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 persen	82,818,000					0,04 persen	82,818,000			
2	0	0	8	7	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			26,312,000						26,312,000			
2	0	0	8	7	2.01	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	26,312,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	sekolah	1 Dokumen	26,312,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	100 persen	34,150,000					100 persen	34,150,000		
2	0	0	8	7	2.02	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Layanan	5,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	anak	12 Layanan	5,750,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			9,055,368,662							10,028,430,182	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	6,809,084,238						80.03 %	5,686,831,000	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	71,280,000						100 %	71,280,000	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	71,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Pegawai Disnaker, KUKM	6 Dokumen	71,280,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5,219,111,176						100 %	3,966,023,000	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5,219,111,176		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Pegawai Disnaker, KUKM	36 Orang/ bulan	3,966,023,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	700,000,000						100 %	1,355,018,000	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Pegawai Disnaker,K UKM	9 Paket	1,071,878,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	200,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Pegawai Disnaker,K UKM	70 Laporan	283,140,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			703,500,000							5,000,000	
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	700,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia		1 Unit	700,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	3,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia		1 unit	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	115,193,062						100 %	139,510,000	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	48,716,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Aset yang ada di Disnaker, KUKM	19 Unit	58,745,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39,097,025		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Aset yang ada di Disnaker, KUKM	1 Unit	47,490,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	27,380,037		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Aset yang ada di Disnaker, KUKM	36 Unit	33,275,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	30 %	643,811,800						30 %	1,345,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	40 orang	621,802,000						45 orang	1,190,000,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 Orang	621,802,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	70 Orang	1,190,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang berijin	20 %	10,054,800						20 %	55,000,000	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	27 Lembaga	10,054,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	LPKS di Kota Madiun	27 Lembaga	55,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30 perusahaan	11,955,000						30 perusahaan	100,000,000	
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	11,955,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangu- nan sumber daya manusia	Perusahaan di Kota Madiun	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	15 %	165,600,000						15 %	722,465,142	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	230 orang	165,600,000						230 orang	722,465,142	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	99,091,575		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	1 Dokumen	275,967,272	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	66,508,425		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	200 Orang	446,497,870	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	1,436,872,624						16 %	2,274,134,040	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	50 perusahaan	9,050,000						50 perusahaan	546,831,240	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan	3,462,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Perusahaan yang ada di Kota Madiun	15 perusahaan	224,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	5,588,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Perusahaan yang ada di Kota Madiun	1 Laporan	322,831,240	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permasalahan HI yang terselesaikan	75 %	1,427,822,624						75 %	1,727,302,800	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	35,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Perusahaan yang ada di Kota Madiun	15 Perkara	120,692,440	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5800 Orang	1,392,362,624		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Perusahaan yang ada di Kota Madiun	5800 Orang	1,606,610,360	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			704,690,406							1,658,058,000	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	75 %	444,620,000						75 %	773,058,000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	35 koperasi	444,620,000						35 koperasi	773,058,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 orang	444,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Koperasi yang ada di Kota Madiun	300 orang	773,058,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital				
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	2.5 %	59,995,000						2.5 %	170,000,000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	5 koperasi	59,995,000						5 koperasi	170,000,000	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	130 unit usaha	59,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Koperasi yang ada di Kota Madiun	130 unit usaha	170,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	7.33 %	200,075,406						7.33 %	715,000,000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik	11 orang	200,075,406						11 orang	715,000,000	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	60 Unit Usaha	200,075,406		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Usaha Mikro yang ada di Kota Madiun	60 Unit Usaha	715,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			300,288,388							1,225,000,000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	89,492,950						5 %	615,000,000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	20 IKM	89,492,950						20 IKM	615,000,000	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	22,906,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	IKM yang ada di Kota Madiun	1 Dokumen	140,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	31	0 2	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 dokumen	23,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	IKM yang ada di Kota Madiun	2 dokumen	111,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	0 2	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	43,586,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	IKM yang ada di Kota Madiun	1 dokumen	364,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	12,83 %	210,795,438						10 %	610,000,000	
3	31	0 4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	40 IKM	210,795,438						40 IKM	610,000,000	
3	31	0 4	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	210,795,438	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	IKM yang ada di Kota Madiun	2 Dokumen	610,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
TOTAL								10,060,347,456							12,911,488,182	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			6,722,846,900							8,300,000,000	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	6,302,859,900						A skor	7,711,000,000	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100 %	102,025,000						100 %	133,000,000	
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	102,025,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	8 dokum en	133,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	4,975,918,000						100 %	5,150,000,000	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 orang/bulan	4,975,918,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	27 orang /bulan	5,150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	44,298,500						100 %	55,000,000	
2	09	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	44,298,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	3 dokumen	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	883,667,400						100 %	1,073,000,000	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19 paket	627,605,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	19 paket	700,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18,541,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	12 Laporan	23,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	237,520,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	12 lapora n	350,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	5,434,000						100 %	300,000,000	
2	09	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5,434,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	2 Unit	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemeliharaan barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	291,517,000						100 %	1,000,000,000	
2	09	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	75,397,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	34 Unit	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	9,497,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	15 unit	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit/tahun	171,952,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	1 unit/tahun	800,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	122 unit	34,670,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	122 unit	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi	100 %	289,962,000						100 %	413,000,000	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	100 %	166,457,000						100 %	225,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Laporan	16,713,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	3 Laporan	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 laporan	117,252,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	1 laporan	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	4 dokumen	32,491,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	4 dokumen	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE	2100 kkal/kapita	123,505,000						2100 kkal /kapita	188,000,000	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	24,855,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi	Kota Madiun	1 Dokumen	38,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												kreatif dan digital				
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 laporan	98,650,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	3 laporan	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan dan rawan pangan	25 %	43,842,500						25 %	45,000,000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	1 dokumen	43,842,500						1 dokum en	45,000,000	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	43,842,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	2 Dokum en	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang teruji	80 %	86,182,500						80 %	131,000,000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	8 lokasi	86,182,500						8 lokasi	131,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	25,139,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	1 Dokum en	70,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	61,043,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	1 Dokum en	61,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			408,932,000							557,500,000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	285 Ton	159,900,000						285 Ton	175,500,000	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	250 RTP	159,900,000						250 RTP	175,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	20,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	3 Unit	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	100 Orang	139,900,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	100 Orang	155,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap	89 Ton	35,000,000						89 Ton	41,000,000	
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	435 orang	35,000,000						435 orang	41,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen	35,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	2 dokumen	41,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi makan ikan	16.1 Kg/Kapita/ Tahun	214,032,000						15.8 Kg/Kapita/ Tahun	341,000,000	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	50 orang	67,141,000						50 orang	75,000,000	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	30 Unit usaha	67,141,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	30 Unit usaha	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	26 ton	146,891,000						26 ton	266,000,000	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 pelaku usaha	146,891,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor	Kota Madiun	12 pelaku usaha	266,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												unggulan, ekonomi kreatif dan digital				
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2,876,652,000							5,860,000,000	
3	27	0 2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektivitas sarana pertanian	60 %	2,000,624,000						60 %	2,871,000,000	
3	27	0 2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	75 %	1,930,184,000						75 %	2,771,000,000	
3	27	0 2	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	23,550,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	1 laporan	26,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	0 2	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	1,906,634,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	1 laporan	2,745,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	0 2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	75 %	70,440,000						75 %	100,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 laporan	70,440,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	12 laporan	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	75 %	233,727,000						75 %	2,200,000,000	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	75 %	16,138,000						75 %	20,000,000	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	1 laporan	16,138,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	1 laporan	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terbangun/rehabilitasi /dipelihara	25 %	217,589,000						25 %	2,180,000,000	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	52,815,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	1 Unit	1,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	8,009,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	1 Unit	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	156,765,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	2 Unit	380,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 %	260,856,000						10 %	310,000,000	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	80 %	155,797,000						80 %	155,000,000	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 laporan	155,797,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	4 laporan	155,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan yang direkomendasikan (izin medik veteriner dan paramedik veteriner)	1 jenis	15,000,000						1 jenis	50,000,000	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veterine	1 laporan	15,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	1 laporan	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	80 %	90,059,000						80 %	105,000,000	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	10 laporan	25,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	10 lapora n	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	10 Laporan	65,059,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	10 Lapora n	80,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan aman bencana pertanian	74 %	112,370,000						74 %	150,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	1900 Ha/Tahun	112,370,000						1900 Ha/ Tahun	150,000,000	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	112,370,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	50 Ha	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	12 %	33,600,000						12 %	70,000,000	
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	2 jenis	33,600,000						2 jenis	70,000,000	
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen	33,600,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	2 Dokum en	70,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah SDM pertanian terlatih	20 %	235,475,000						20 %	259,000,000	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian terlatih	200 orang	235,475,000						200 oran g	259,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	39 kelompok	138,975,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	39 kelompok	158,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit usaha	96,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Kota Madiun	2 Unit usaha	101,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
TOTAL								10,008,430,900							14,717,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			24,949,715,626							85,669,066,370	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	18,197,299,571						A Skor	20,158,366,370	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	67,000,100						100 persen	93,500,000	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	67,000,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	6 Laporan	93,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	10,148,268,592						100 persen	9,656,335,370	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 orang/bulan	10,148,268,592	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	89 orang/bulan	9,656,335,370	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 persen	304,355,825						100 persen	293,500,000	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	154,049,325	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	3 paket	148,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	230 orang	150,306,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan	0	230 orang	145,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												dan berkelanjutan				
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	245,712,000						100 persen	165,000,000	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	245,712,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	12 laporan	165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	5,550,000						100 persen	15,000,000	
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	5,550,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	2 unit	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	5,849,159,932						100 persen	8,272,700,000	
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	696,295,004	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	4 laporan	1,488,300,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	5,152,864,928	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	12 laporan	6,784,400,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen	1,577,253,122						100 persen	1,662,331,000	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	1,318,205,722	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	15 unit	1,430,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	189,050,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	15 unit	111,430,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	69,996,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	3 unit	120,901,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79,49 persen	315,429,000						79,49 persen	625,000,000	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	1 dokumen	152,694,000						1 dokumen	430,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	152,694,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 dokumen	430,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	1 dokumen	162,735,000						1 dokumen	195,000,000	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	162,735,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 dokumen	195,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50 persen	923,491,779						50 persen	1,706,700,000	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	78 kegiatan/usa ha	663,400,063						78 kegiatan/u saha	1,299,700,000	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	276,787,919	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 dokumen	896,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	386,612,144	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 dokumen	403,700,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	17 usaha/kegait an	260,091,716						17 usaha/keg aitan	407,000,000	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 laporan	135,091,916	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	2 laporan	269,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 titik	124,999,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	2 titik	137,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	100 persen	76,700,000						100 persen	225,000,000	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	342 spesies	76,700,000						342 spesies	225,000,000	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	76,700,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 dokumen	225,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	75 persen	75,000,000						75 persen	225,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	17 lokasi	75,000,000						17 lokasi	225,000,000	
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi	5 dokumen	75,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	5 dokumen	225,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	76,47 persen	342,740,000						76,47 persen	585,000,000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17 perusahaan	342,740,000						17 perusahaan	585,000,000	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 dokumen	197,740,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	4 dokumen	393,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah	10 laporan	145,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	10 laporan	192,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100 persen	614,764,500						100 persen	1,040,000,000	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	15 kegiatan	614,764,500						15 kegiatan	1,040,000,000	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	614,764,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	4 dokumen	1,040,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 persen	100,000,000						100 persen	114,000,000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5 kasus	100,000,000						5 kasus	114,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	5 dokumen	45,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	5 dokumen	47,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 dokumen	55,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	1 dokumen	67,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	4,304,290,776						72 persen	60,990,000,000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	43780 ton	4,204,290,776						43780 ton	60,835,000,000	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 lokasi	250,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	43	2 lokasi	235,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	32280 ton	2,239,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	43	32280 ton	7,200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

[illegible][illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6,256,376,777							7,898,533,111	
2	12	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	5,555,385,727						A Skor	6,888,533,111	
2	12	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	22,242,000						100 %	268,255,840	
2	12	0 1	2.01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	9,892,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	20 laporan	40,539,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	0 1	2.01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	12 laporan	227,716,640	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	4,240,561,310						100 %	4,479,073,634	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	4,161,881,310	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Perangkat Daerah	28 Orang/Bulan	4,393,193,634	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	78,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Perangkat Daerah	12 dokumen	85,880,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	29,810,000						100 %	313,363,790	
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	350 orang	29,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	OPD	350 orang	191,792,770	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	377,154,202						100 %	525,255,847	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	224,694,116	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	12 paket	294,994,880	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	19,103,116	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	12 Paket	38,360,967	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	23,356,970	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	12 Paket	61,900,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	40 laporan	130,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	695,374,912						100 %	674,584,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	695,374,912	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	12 laporan	674,584,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	190,243,303						100 %	383,000,000	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit	23,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	25 unit	31,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	18,552,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	3 unit	19,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 unit	14,985,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	5 unit	17,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	31,329,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 unit	213,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	149 unit	102,376,703	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	149 unit	103,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	97%	264,677,400						96 %	355,000,000	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP EL dan KIA	96 %	164,677,400						96 %	235,000,000	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	12 laporan	110,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 dokumen	74,677,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	12 dokumen	125,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	96 %	100,000,000						96 %	120,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	02	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	12 laporan	120,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencataan Sipil	94,50%	160,842,000						94 %	388,500,000	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	91 %	160,842,000						91 %	314,582,500	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	12 dokumen	65,438,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	12 dokumen	105,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 layanan	95,404,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	4 layanan	209,582,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi database kependudukan	99,46 %	275,471,650						99,15 %	266,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			18,539,553,696							23,243,476,634	
2	15	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	11,429,468,520						80.4 skor	13,686,465,164	
2	15	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	97,600,000						100 %	140,200,000	
2	15	0 1	2.01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	97,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	6 Dokumen	140,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	7,072,466,452						100 %	7,352,378,644	
2	15	0 1	2.02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	7,072,466,452		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an	54 Orang/bul an	7,352,378,644	Dinas Perhubungan
2	15	0 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	406,290,000						100 %	300,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	204,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an	1 Paket	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134 Orang	202,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an	134 Orang	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi Umum	100 %	210,043,000						100 %	292,333,000	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	210,043,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an	60 laporan	292,333,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan peralatan kantor	100 %	452,528,373						100 %	1,312,736,000	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	342,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an	15 Unit	1,110,150,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	110,428,373		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an	10 Unit	202,586,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	100 %	2,206,150,695						100 %	2,684,817,520	
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2,206,150,695		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an	2 Laporan	2,684,817,520	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	984,390,000						100 %	1,604,000,000	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 Unit	626,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an	57 Unit	654,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	222,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an	2 Unit	800,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	136,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubungan	10 Unit	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	7,110,085,176						92 %	9,557,011,470	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentasi perlengkapan jalan yang berfungsi baik	85 %	2,852,340,520						85 %	4,484,787,100	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	52,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat kota Madiun	2 Unit	245,750,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit	1,042,174,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat kota Madiun	200 Unit	2,119,648,050	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	1,757,815,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat kota Madiun	5 Unit	2,119,389,050	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	100 %	189,200,000						100 %	201,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	189,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	1 paket	201,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase fasilitas terselenggaranya pelayanan parkir	100 %	1,026,708,000						100 %	808,019,000	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,026,708,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	1 Laporan	808,019,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus uji	100 %	627,634,800						100 %	705,469,270	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 Unit	232,486,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	10 Unit	538,379,270	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	395,148,800			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	0	12 Unit	167,090,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %	59,304,000						100 %	80,000,000	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	59,304,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	6 Laporan	80,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengurusan rekomendasi analalin	100 %	359,616,000						100 %	445,955,000	
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	359,616,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat kota Madiun	12 Laporan	445,955,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kebijakan	100 %	946,667,000						100 %	1,231,281,100	
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang	51,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	4 Orang	52,180,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	775,103,000			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Pembanguna n kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	1 Laporan	1,116,701,100	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			18,921,627,070							18,921,627,070	
2	16	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	7,099,855,190						A Skor	7,099,855,190	
2	16	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	200,000,000						100 %	200,000,000	
2	16	0 1	2.01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	200,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Dinas Kominfo	10 Laporan	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5,155,263,990						100 %	5,155,263,990	
2	16	0 1	2.02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	5,155,263,990	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	masyarakat Kota Madiun	37 orang	5,155,263,990	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	0 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	200,000,000						100 %	200,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	0	2.06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Dinas Kominfo	25 Laporan	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	2,500,000						100%	2,500,000	
2	16	0	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Dinas Kominfo		2,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	1,076,641,200						100 %	1,076,641,200	
2	16	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,076,641,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Dinas Kominfo	1 Laporan	1,076,641,200	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	465,450,000						100 %	465,450,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	157,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Dinas Kominfo	31 Unit	157,650,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Dinas Kominfo	3 Unit	125,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	182,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Dinas Kominfo	50 Unit	182,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	3,019,065,320						80 %	3,019,065,320	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100 %	3,019,065,320						100 %	3,019,065,320	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	0 2	2.01	0 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	1,555,562,323		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	12 Dokumen	1,555,562,323	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	0 2	2.01	0 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	973,923,328		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	12 Dokumen	973,923,328	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	0 2	2.01	0 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	232,964,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	12 Dokumen	232,964,450	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	0 2	2.01	0 8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	135,415,219		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	12 Dokumen	135,415,219	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	0 2	2.01	1 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	121,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan	Masyarakat Kota Madiun	12 Dokumen	121,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	2,776,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pemerintah Kota Madiun	1 dokumen	2,776,480,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen	273,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pemerintah Kota Madiun	1 dokumen	273,700,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 unit	502,848,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pemerintah Kota Madiun	3 unit	502,848,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 layanan	180,778,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pemerintah Kota Madiun	2 layanan	180,778,560	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan	Pemerintah Kota Madiun	1 dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			7,177,911,047							8,312,751,400	
2	18	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	5,486,263,847						80.03 skor	6,434,000,000	
2	18	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	30,491,000						100 persen	63,000,000	
2	18	0 1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,491,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai DPMPTSP	5 Dokumen	63,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	4,173,982,800						100 persen	4,300,000,000	
2	18	0 1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4,173,982,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai DPMPTSP	26 Orang/bulan	4,300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	0 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	274,233,794						100 persen	230,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	274,233,794	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai DPMPTSP	48 Laporan	230,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			58,700,000								
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	58,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai DPMPTSP	2 Unit	58,700,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	823,932,153						100 persen	1,000,000,000	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Laporan	823,932,153	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai DPMPTSP	38 Laporan	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	100 persen	124,924,100						100 persen	841,000,000	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	44,192,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai DPMPTSP	20 Unit	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	1 Unit	26,816,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai DPMPTSP	1 Unit	121,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	6 Unit	53,915,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai DPMPTSP	6 Unit	665,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	100 persen	34,700,000						100 persen	116,587,500	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 buah	34,700,000						1 buah	116,587,500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	0 2	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	34,700,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	OPD/instansi/Investor di Kota Madiun	1 Dokumen	116,587,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	0 3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	32 persen	308,848,200						32 persen	306,663,900	
2	18	0 3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor baru	30 investor	308,848,200						30 investor	306,663,900	
2	18	0 3	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	308,848,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Investor di Kota Madiun	1 Dokumen	306,663,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	0 4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	90 persen	687,175,500						90 persen	756,500,000	
2	18	0 4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Izin	1700 izin	687,175,500						1700 izin	756,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800 Pelaku Usaha	227,314,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat at pemohon izin	1800 Pelaku Usaha	260,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	360 Kegiatan Usaha	222,501,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat at pemohon izin	360 Kegiatan Usaha	246,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	40 Orang	237,360,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat at pemohon izin	40 Orang	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	100 perusahaan	462,675,000						100 perusahaan	489,000,000	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	250 perusahaan	462,675,000						250 perusahaan	489,000,000	

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			4,666,546,361							11,980,000,000	
2	19	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	15 %	475,000,000						10 %	480,000,000	
2	19	0 2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan	2 Event	475,000,000						2 Event	480,000,000	
2	19	0 2	2.01	0 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	100 Orang	475,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembanguna n sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	100 Orang	480,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	0 3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	25 %	4,191,546,361						25 %	11,500,000,000	
2	19	0 3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	3 Sarpras Olahraga	2,115,546,361						3 Sarpras Olahraga	5,000,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	3 sarana prasarana	2,115,546,361		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	3 sarana prasarana	5,000,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 Event	460,000,000						3 Event	1,800,000,000	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 Event	460,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	3 Event	1,800,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10 Cabang Olahraga	1,000,000,000						10 Cabang Olahraga	3,000,000,000	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Hasil Pengembangan Keolahragaan	1 Organisasi	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	1 Organisasi	3,000,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	3 Festival Olahraga	616,000,000						3 Festival Olahraga	1,700,000,000	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	3 Festival Olahraga	616,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	3 Festival Olahraga	1,700,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			7,902,442,292							10,164,700,000	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	6,593,342,292						A skor	8,314,700,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	30,000,000						100 %	40,000,000	
2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai Dinas Budparpora	5 Laporan	40,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	4,142,500,000						100 %	4,500,000,000	
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4,142,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai Dinas Budparpora	25 Orang/bulan	4,500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	32,250,000						100 %	200,000,000	
2	22	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi	Pegawai Dinas Budparpora	1 Paket	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												kreatif dan digital				
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	250,000,000						100 %	299,700,000	
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai Dinas Budparpora	12 bulan	299,700,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	17,800,000						100 %	175,000,000	
2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	17,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai Dinas Budparpora	2 Unit	175,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	1,975,792,292						100 %	2,550,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1,975,792,292		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai Dinas Budparpora	1 Paket	2,550,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	145,000,000						100 %	550,000,000	
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai Dinas Budparpora	30 Unit	165,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai Dinas Budparpora	1 gedung	215,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Pegawai Dinas Budparpora	1 gedung	170,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya yang dilestarikan	100 %	1,209,100,000						100 %	1,500,000,000	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	15 Budaya	1,209,100,000						15 Budaya	1,500,000,000	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek pemajuan budaya yang dimanfaatkan	10 budaya	939,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat Kota Madiun	10 budaya	1,250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Orang/Grou p	270,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat Kota Madiun	20 Orang/Grou p	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina	100 %	50,000,000						100 %	250,000,000	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni budaya yang dibina	3 Jenis	50,000,000						3 Jenis	250,000,000	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	45 Orang/Grou p	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi	Masyarakat Kota Madiun	45 Orang/Grou p	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												kreatif dan digital				
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda/ bangunan cagar budaya yang dilestarikan	100%	50,000,000						2 Obyek	100,000,000	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	20 Obyek	50,000,000						20 Obyek	100,000,000	
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	20 Obyek	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat Kota Madiun	20 Obyek	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1,238,660,866							4,980,000,000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	100 %	317,660,866						25 %	3,200,000,000	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	2 Destinasi	317,660,866						2 Destinasi	3,200,000,000	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	2 Lokasi	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat Kota Madiun	2 Lokasi	2,800,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	12 Lokasi	267,660,866		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022)Penguatan Ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi Sektor unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Masyarakat Kota Madiun	12 Lokasi	400,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	50 %	643,000,000						15 %	1,200,000,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	4 Event	643,000,000						4 Event	1,200,000,000	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	4 Event	643,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat Kota Madiun	4 Event	1,200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	19.5 %	278,000,000						19.5 %	580,000,000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	19.5 %	278,000,000						19.5 %	580,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	24 Orang	278,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat Kota Madiun	24 Orang	580,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
TOTAL								13,807,649,519							27,124,700,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6,078,962,578							7,124,300,000	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	4,832,923,152						82 skor	5,203,000,000	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	58,118,820						100 %	58,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	10 dokumen	58,118,820	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Aparatur Sipil Negara	10 dokumen	58,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	3,766,524,636						100 %	3,900,000,000	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	3,766,524,636	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Aparatur Sipil Negara	100 %	3,900,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	88,407,000						100 %	90,000,000	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	88,407,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Aparatur Sipil Negara	100 %	90,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			61,050,000							350,000,000	
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasoonal atau lapangan	100%	48,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia		100%	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	12,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia		2 unit	250,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	655,822,696						100 %	580,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	655,822,696	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Aparatur Sipil Negara	100 %	580,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	203,000,000						100 %	225,000,000	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	58,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Aparatur Sipil Negara	100 %	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	80,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Aparatur Sipil Negara	100 %	90,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100 %	65,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Aparatur Sipil Negara	100 %	75,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6 %	1,040,301,770						5.95 %	1,641,300,000	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	4.6 %	349,200,000						4.6 %	590,000,000	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM :	74 layanan	282,400,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	74 layanan	340,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Information Technology Service Management)										
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2400 eksemplar	66,800,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	2400 eksemplar	250,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca	20 kali	691,101,770						20 kali	1,051,300,000	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2600 lokus	591,101,770	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	2600 lokus	680,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 perpustakaan	100,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	1 perpustakaan	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	37 %	205,737,656						37 %	280,000,000	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	178 eksemplar	205,737,656						178 eksemplar	280,000,000	
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	2 orang	106,849,718	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	2 orang	120,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah pengadaan/akuisisi naskah kuno	2 Eksemplar	98,887,938	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Masyarakat Kota Madiun	2 Eksemplar	160,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			818,942,100							1,040,000,000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	88 skor	656,180,000						88 skor	840,000,000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	345,182,000						100 %	420,000,000	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	58000 berkas	345,182,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Organisasi Perangkat Daerah di Wilayah Pemerintah Kota Madiun	58000 berkas	420,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip	100 %	310,998,000						100 %	420,000,000	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	260 arsip	310,998,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan	Organisasi Perangkat Daerah di Wilayah Pemerintah Kota Madiun	260 arsip	420,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												reformasi birokrasi				
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	8,6 skor	162,762,100						8,6 skor	200,000,000	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 %	162,762,100						100 %	200,000,000	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 arsip	81,211,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Organisasi Perangkat Daerah di Wilayah Pemerintah Kota Madiun	1000 arsip	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000 berkas	81,550,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Organisasi Perangkat Daerah di Wilayah Pemerintah Kota Madiun	1000 berkas	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TOTAL								6,897,904,678							8,164,300,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			16,339,577,408							18,180,389,000	
3	30	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	11,074,865,806						A skor	10,582,453,560	
3	30	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	894,000						100 %	25,609,950	
3	30	0 1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	894,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	0	6 dokumen	25,609,950	Dinas Perdagangan
3	30	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	9,504,392,000						100 %	8,990,740,000	
3	30	0 1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/bulan	9,504,392,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusiivitas ekonomi melalui pengembang an sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	0	75 orang/bulan	8,990,740,000	Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	61,544,700						100 %	176,915,450	
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	61,544,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat Kota Madiun	1 paket	176,915,450	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	276,443,200						100 %	207,059,200	
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	276,443,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	0	30 laporan	207,059,200	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5,500,000							100,000,000	
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	5,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital		4 unit	100,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan	100 %	842,400,792						100 %	809,523,570	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah										
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	842,400,792	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	0	2 laporan	809,523,570	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	383,691,114						100 %	372,605,390	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 unit	252,701,714	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	0	44 unit	234,060,190	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	50,336,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	0	3 Unit	50,336,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	80,653,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi	0	3 unit	88,209,200	Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												kreatif dan digital				
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100 %	164,204,400						100 %	300,772,500	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100 %	164,204,400						100 %	300,772,500	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	75 dokumen	164,204,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	0	75 dokumen	300,772,500	Dinas Perdagangan
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	4,322,249,628						100 %	6,365,963,990	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 pasar	713,682,428						17 pasar	2,392,878,990	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 unit	11,046,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat Kota Madiun	3 unit	1,620,746,000	Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 unit	702,636,428	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat Kota Madiun	17 unit	772,132,990	Dinas Perdagangan
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	3,900,801,200						100 %	3,973,085,000	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	210,310,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat Kota Madiun	2 dokumen	360,310,000	Dinas Perdagangan
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 dokumen	3,398,257,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Masyarakat Kota Madiun	4 dokumen	3,612,775,000	Dinas Perdagangan
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	254,657,000						100 %	187,300,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	100 %	254,657,000						100 %	169,307,000	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 laporan	100,707,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	0	3 laporan	69,307,000	Dinas Perdagangan
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	135,957,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	100 %	17,993,000						100 %	17,993,000	
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan	17,993,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	0	2 laporan	17,993,000	Dinas Perdagangan
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100 %	214,569,024						100 %	329,724,100	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	12 bulan	214,569,024						12 bulan	329,724,100	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	7000 unit	205,301,024	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	0	7000 unit	320,556,100	Dinas Perdagangan
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	9,268,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	0	150 Orang	9,168,000	Dinas Perdagangan
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100 %	309,031,550						100 %	414,174,850	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.	4 kali	309,031,550						4 kali	414,174,850	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	129,031,550	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Urusan Pemerintah an Bidang Perdaganganan	4 UMKM	203,874,850	Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2 dokumen	180,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	2 dokumen	210,300,000	Dinas Perdagangan
TOTAL								16,339,577,408							18,180,389,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			3,048,644,600							3,902,000,000	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A skor	1,253,696,000						A skor	1,407,000,000	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8,000,000						100 %	10,000,000	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	6 Laporan	8,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan	0	6 Laporan	10,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						reformasi birokrasi				
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	840,696,000						100 %	850,000,000	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	840,696,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bag Pemerintah an	11 Orang/bulan	850,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	150,000,000						100 %	200,000,000	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	150,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	24 Laporan	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah	100 %	210,000,000						100 %	300,000,000	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	210,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	12 Laporan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100 %	45,000,000						100 %	47,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Urusan Pemerintahan Daerah											
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	20,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	4 Unit	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 Unit	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	10,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	17 Unit	12,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	100 %	1,794,948,600						100 %	2,495,000,000	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	1,449,948,600						100 %	2,050,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	02	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	1,214,948,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kecamatan dan Kelurahan	4 Dokumen	1,700,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	235,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kecamatan dan Kelurahan	7 Dokumen	350,000,000	Sekretariat Daerah
										Bantuan Keuangan						
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama yang difasilitasi	100 %	345,000,000						100 %	445,000,000	
4	01	02	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	345,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	OPD	5 Dokumen	445,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			2,566,413,284							3,260,949,736	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SETDA	80,01	2,566,413,284						80,01	3,260,949,736	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	15,000,000						100%	20,000,000	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi		12 Laporan	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	798,134,736						100 %	795,134,736	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	798,134,736		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Negeri Sipil Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	9 Orang/bulan	795,134,736	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	83.15 Indeks	167,326,280						83.15 Indeks	192,500,000	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	167,326,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	192,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang	100%	2,767,050						100%	3,300,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah										
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2,767,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	1 unit	3,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	167,577,108						100 %	235,150,000	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	167,577,108		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	235,150,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100 %	33,873,000						100 %	44,357,000	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	18,963,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	6 Unit	24,832,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	1 Unit	2,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	12,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	21 Unit	17,325,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	28.4 skor	1,381,735,110						28.4 skor	1,973,808,000	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	339,871,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	2 dokumen	500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dokumen	662,366,630	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	2 dokumen	861,808,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	379,497,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	2 Dokumen	612,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			2,509,504,644							100,000,000	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A Skor	1,831,850,384						A Skor	100,000,000	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	1,000,000						100%	1,000,000	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	6 Laporan	1,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	1,438,916,360						100%	1,438,916,360	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	10 Orang/Bulan	1,438,916,360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city	ASN	10 Orang/Bulan	1,438,916,360	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Semua Kelurahan		Transformasi Publik	dan percepatan reformasi birokrasi				
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	83,15 Indeks	100,000,000						100%	100,000,000	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7,500,000						100%	100,000,000	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	2 Unit	7,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penujang urusan Pemerintahan Daerah	100%	242,386,424						100%	242,386,424	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	242,386,424	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	242,386,424	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100%	42,047,600						100%	42,047,600	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	20,547,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	4 Unit	20,547,600	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	1 Unit	2,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	19,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	40 Unit	19,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	677,654,260						100 %	677,654,260	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pesentase Produk Hukum yang disusun	100 %	677,654,260						100 %	677,654,260	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen	266,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	20 Dokumen	266,750,000	Sekretariat Daerah	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus	226,275,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	25 Kasus	226,275,880	Sekretariat Daerah	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	184,628,380	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	400 Dokumen	184,628,380	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			3,102,597,567							2,550,721,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	A skor	2,795,731,667							A Skor	2,230,721,000	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	14,358,960						100 %	15,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	14,358,960	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkat nya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun	12 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	1,596,391,040						100 %	1,600,000,000	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	1,596,391,040	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkat nya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun	15 Orang/Bulan	1,600,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	98,194,000						100 %	100,000,000	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	98,194,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkat nya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun	12 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	42,917,633						100 %	80,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	42,917,633	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun	5 Unit	80,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	297,748,799						100 %	365,721,000	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	297,748,799	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun	12 Laporan	365,721,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	746,121,235						100 %	70,000,000	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	19,321,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun	7 Unit	20,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	707,641,235	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun	1 Unit	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	19,159,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun	40 Unit	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	306,865,900						100 %	320,000,000	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	100 %	107,511,660						100 %	110,000,000	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	31,496,300	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun	1 Dokumen	30,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	76,015,360	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun	12 Laporan	80,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	100 %	199,354,240						100 %	210,000,000	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	92,664,800	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun	12 Dokumen	95,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	106,689,440	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun	12 Dokumen	115,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			11,132,933,734							10,199,643,177	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A skor	1,547,873,205						A Skor	1,546,008,140	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	20,000,000						33 Indeks	20,000,000	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	20,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Bagian Perekonom ian dan Kesejahtera an Rakyat	2 laporan	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	1,025,442,780						100%	1,024,842,780	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1,025,442,780	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Bagian Perekonom ian dan Kesejahtera an Rakyat	0 Orang/bulan	1,024,842,780	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	180,000,000						100%	180,000,000	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	180,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Bagian Perekonom ian dan Kesejahtera an Rakyat	100 %	180,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Tercukupinya pemenuhan	100%	3,265,065						100%	2,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Urusan Pemerintah Daerah	kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah										
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	3,265,065	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	2,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	259,215,360						100%	259,215,360	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	259,215,360	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	0 Laporan	259,215,360	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milikdaerah yang layak digunakan	100%	59,950,000						100%	59,950,000	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	22,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	22,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	28,750,000			Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 unit	28,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	9,200,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	9,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	9,248,290,929						100%	6,998,665,437	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	33 Indeks	9,248,290,929						33 Indeks	6,998,665,437	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	9,248,290,929	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	0 Dokumen	6,998,665,437	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	336,769,600						100%	1,654,969,600	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan	80,98	336,769,600						33 Indeks	336,769,600	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	235,984,960	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	BUMD dan Masyarakat Kota Madiun	0 Laporan	235,984,960	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	100,784,640	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	BUMD dan Masyarakat Kota Madiun	2 Dokumen	100,784,640	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			35,463,703,320							37,705,000,000	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80,01	35,463,703,320						80,01	37,705,000,000	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	5,000,000						100 %	5,000,000	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	5,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	21 Laporan	5,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	12,616,719,810						100 %	11,500,000,000	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	163 Orang/bulan	12,616,719,810	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	163 Orang/bulan	11,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100 %	8,294,786,000						100 %	10,000,000,000	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	8,294,786,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Pemerintah Kota Madiun	3 paket	10,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	2,338,407,600						100 %	2,050,000,000	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Sekretariat Kota Madiun	1 Paket	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324 Laporan	2,088,407,600	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan	Pegawai Sekretariat Kota Madiun	324 Laporan	2,000,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												percepatan reformasi birokrasi				
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	936,055,320						100 %	1,150,000,000	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	829,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pemerintah Kota Madiun	1 unit	500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	15,800,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pemerintah Kota Madiun	3 unit	500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	91,255,320	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pemerintah Kota Madiun	5 unit	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	4,686,554,640						100 %	5,500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18 laporan	4,686,554,640	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Bagian Umum Kota Madiun	18 laporan	5,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	1,657,211,450						100 %	2,275,000,000	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	94 unit	868,174,950	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bagian Umum Kota Madiun	94 unit	1,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	500,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bagian Umum Kota Madiun	1 unit	500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	129 unit	289,036,500	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bagian Umum Kota Madiun	129 unit	275,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala	100 %	1,000,000,000						100 %	1,000,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	400,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	600,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	2,000,000,000						100 %	1,875,000,000	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	20 paket	1,100,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Rumah Dinas dan Sekretariat Daerah	20 paket	925,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	16 paket	575,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Rumah Dinas dan Sekretariat Daerah	16 paket	600,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	15 paket	325,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Rumah Dinas dan Sekretariat Daerah	15 paket	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Keprotokolan	100 %	1,928,968,500						100 %	2,350,000,000	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	500 Laporan	1,928,968,500	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Pemerintah Kota Madiun	500 Laporan	2,350,000,000	Sekretariat Daerah
TOTAL								57,823,797,149							57,721,613,913	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	02				SEKRETARIAT DPRD			38,653,217,556							51,692,880,245	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	26,399,381,136						81 Skor	30,798,319,668	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	75,329,977						100 %	199,434,110	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	75,329,977		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	6 Dokumen	199,434,110	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	3,679,743,078						100 %	3,019,523,753	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	3,679,743,078		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	19 Orang/bulan	3,019,523,753	Sekretariat DPRD
											Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi				
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %	291,087,294						100 %	32,966,464	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	64,818,894		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 Paket	30,899,880	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Orang	226,268,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	19 Orang	2,066,584	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	100 %	937,733,258						100 %	766,415,862	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	937,733,258		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	44 Laporan	766,415,862	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	100 %	348,489,090						100 %	129,789,900	
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	348,489,090		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 Unit	129,789,900	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	100 %	2,536,057,009						100 %	2,585,969,229	
4	02	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	2,536,057,009		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	24 Laporan	2,585,969,229	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan atau Aset Kantor yang Dipelihara	100 %	713,401,390						100 %	872,340,213	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	308,841,290		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	26 Unit	308,452,391	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	179 Unit	330,921,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	179 Unit	262,549,726	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	73,638,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	301,338,096	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	100 %	15,912,152,890			Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi		100 %	19,287,773,987	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	15,553,173,870		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	30 Orang/Bulan	18,865,862,463	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	253,979,020		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	2 Paket	294,861,524	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	105,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Orang	127,050,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	1,905,387,150			Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi		100 %	3,904,106,150	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	37,957,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	8 Laporan	38,835,999	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	1,867,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	3,865,270,151	Sekretariat DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	12,253,836,420						81 Skor	20,894,560,577	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	100 %	4,781,493,140						100 %	6,442,231,851	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	21 Dokumen	3,218,753,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	21 Dokumen	4,516,430,391	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	6 dokumen	1,562,739,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	6 dokumen	1,925,801,460	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	100 %	1,516,935,100						100 %	1,391,589,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	1,516,935,100			Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	5 Dokumen	1,391,589,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	100 %	574,554,900						100 %	1,296,299,875	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	338,831,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 Dokumen	398,977,750	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	235,723,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 Dokumen	897,322,125	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100 %	4,204,257,280						100 %	10,632,402,181	

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	0 1				PERENCANAAN			10,584,033,044							15,752,311,110	
5	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 skor	8,189,057,514						81 skor	13,246,035,900	
5	0 1	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	41,488,787						100 %	23,535,900	
5	0 1	0 1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	20,129,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN BAPELITBA NGDA	7 Dokumen	10,635,900	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0 1	0 1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11,655,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN BAPELITBA NGDA	4 Laporan	10,400,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0 1	0 1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	9,703,287	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan	ASN BAPELITBA NGDA	2 laporan	2,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												reformasi birokrasi				
5	0 1	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrtasi Keungan	100 %	6,268,389,457						100 %	11,130,000,000	
5	0 1	0 1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	6,254,954,457		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Bapelitban gda	31 Orang/bulan	11,000,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0 1	0 1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	2 Laporan	13,435,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Bapelitban gda	2 Laporan	130,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0 1	0 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja/SKP ASN yang tersusun	100 %	470,250,000						100 %	341,000,000	
5	0 1	0 1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang	160,250,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	31 orang	161,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0 1	0 1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	67 orang/keg	310,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	67 orang/keg	180,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	1 dokumen	404,710,800						1 dokumen	405,000,000	
5	0	0	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	404,710,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 Laporan	405,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	6,058,485						100 %	7,500,000	
5	0	0	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	6,058,485	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN BAPELITBA NGDA	1 unit	7,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	837,914,000						100 %	1,176,000,000	
5	0	0	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	837,914,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN BAPELITBA NGDA	1 laporan	1,176,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	160,245,985						100 %	163,000,000	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	33,834,205	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN BAPELITBA NGDA	33 Unit	35,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	77,616,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN BAPELITBA NGDA	1 Unit	78,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	48,795,780	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN BAPELITBA NGDA	1 unit	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100 %	1,417,459,130						100 %	1,354,775,210	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	3 Dokumen	1,197,420,880						3 Dokumen	1,108,206,710	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	138,605,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Stake holder BAPELITBA NGDA Kota Madiun	1 Berita Acara	157,206,710	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	149,241,780	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Stake holder BAPELITBA NGDA Kota Madiun	1 Berita Acara	176,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	318,862,660	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Stake holder BAPELITBA NGDA Kota Madiun	1 Berita Acara	300,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	590,711,040	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Stake holder BAPELITBA NGDA Kota Madiun	2 Dokumen	475,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	2 Dokumen	220,038,250						2 Dokumen	246,568,500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Dokumen	93,060,650	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Stake holder BAPELITBA NGDA Kota Madiun	2 Dokumen	103,918,500	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	2 Dokumen	126,977,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Stake holder BAPELITBA NGDA Kota Madiun	2 Dokumen	142,650,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100 %	977,516,400						92 %	1,151,500,000	
5	0	0	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1 dokumen	343,409,120						1 dokumen	503,500,000	
5	0	0	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	72,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 Dokumen	108,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	53,280,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 Laporan	25,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	211,710,620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 Dokumen	255,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	26 OPD	6,418,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	26 OPD	115,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1 dokumen	230,051,400						1 dokumen	231,000,000	
5	0	0	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	47,237,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 dokumen	48,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 perangkat daerah	182,814,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	5 perangkat daerah	183,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1 dokumen	404,055,880						1 dokumen	417,000,000	
5	0	0	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	138,904,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 dokumen	140,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 OPD	90,151,380	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	6 OPD	102,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	150,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan	6 dokumen	25,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan	Peningatan pelayanan publik berbasis	0	6 dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
											Nasional					Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			Semua Kelurahan		Transformasi Publik	smart city dan percepatan reformasi birokrasi				Pengembangan Daerah		
5	0	5			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1,377,973,164							813,000,000			
5	0	5	0	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100 %	1,377,973,164						100 %	813,000,000			
5	0	5	0	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	2 dokumen	1,114,178,361				2 dokumen	648,000,000			
5	0	5	0	2	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 laporan	938,831,161	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	perangkat daerah	1 laporan	262,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	5	0	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	175,347,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	perangkat daerah	1 Laporan	386,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	5	0	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	1 dokumen	263,794,803					1 dokumen	165,000,000		
5	0	5	0	2	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	263,794,803	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan	0	1 dokumen	165,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												reformasi birokrasi				
TOTAL								11,962,006,208							16,565,311,110	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
											Nasional	Daerah						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	0	2			KEUANGAN			57,989,854,202							62,922,352,625			
5	0	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	50,825,555,179						A skor	53,879,910,625			
5	0	0	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	2,000,000				100 %	2,000,000			
5	0	0	2	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	8 Laporan	2,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	37,000,000,000					100 %	37,000,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3000 Orang	37,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	3000 Orang	37,000,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	400,000,000						100 %	400,000,000	
5	0	0	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	70 Laporan	400,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan BMD Urusan Pemerintah Daerah	100 %	84,000,000						100 %	84,000,000	
5	0	0	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	84,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	0 Unit	84,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13,101,555,179						100 %	16,155,910,625	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13,101,555,179	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 Laporan	16,155,910,625	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	238,000,000						100 %	238,000,000	
5	0	0	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	36 Unit	80,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 Unit	50,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	108,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	8 Unit	108,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	5,224,351,023						100 %	7,102,494,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	100 %	918,685,000						100 %	918,685,000	
5	0	0	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	83,421,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	2 Dokumen	83,421,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	56,819,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	2 Dokumen	56,819,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	16,876,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	28 Dokumen	16,876,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	16,111,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	28 Dokumen	16,111,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	154,679,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	2 Dokumen	154,679,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	154,679,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	2 Dokumen	154,679,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	436,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	3 Dokumen	436,100,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	100 %	45,050,000						100 %	45,050,000	
5	0	0	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	55 Dokumen	39,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	55 Dokumen	39,950,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	0	0	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	3 Dokumen	5,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	3 Dokumen	5,100,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	0	0	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi	100 %	1,138,759,000					100 %	1,138,759,000		
5	0	0	2	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	135,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	2 Laporan	135,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	66,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun		66,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	2 Dokumen	80,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	857,759,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	600 Orang	857,759,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Laporan BTT	100 %	3,121,857,023						100 %	5,000,000,000	
5	0	0	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	3,121,857,023	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	12 Laporan	5,000,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang ber kondisi baik	100 %	1,939,948,000						100 %	1,939,948,000	
5	0	0	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	22 Laporan	1,939,948,000						22 Laporan	1,939,948,000	
5	0	0	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	97,142,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	2 Laporan	97,142,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1,803,206,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	2 Laporan	1,803,206,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	18 Laporan	39,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh OPD Pemerintah Daerah Kota Madiun	18 Laporan	39,600,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
TOTAL								57,989,854,202							62,922,352,625	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	0 2				KEUANGAN			10,376,982,780							10,739,013,100	
5	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	9,074,685,028						A Skor	10,553,774,100	
5	0 2	0 1	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan	100 %	5,000,000						100 %	10,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Evaluasi Perangkat Daerah										
5	0	0	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5,000,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	4 Laporan	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya admisnitrtasi keuangan perangkat daerah	100 %	8,151,715,664						100 %	9,774,536,100	
5	0	0	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	8,151,715,664	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	31 orang/bulan	9,774,536,100	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	81,648,000						100 %	55,000,000	
5	0	0	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 laporan	81,648,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	15 laporan	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	146,946,030						1 Unit	75,613,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	6 unit	146,946,030	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 unit	75,613,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	525,875,334						100 %	466,950,000	
5	0	0	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkap an kantor yang representatif	100 %	525,875,334	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	100 %	466,950,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	163,500,000						100 %	171,675,000	
5	0	0	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	41,725,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	35 unit	43,811,250	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	81,275,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1 Unit	85,338,750	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 %	40,500,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	100 %	42,525,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10%	1,302,297,752						10 %	185,239,000	
						Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	42%									
5	0	0	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	100 %	1,302,297,752						100 %	185,239,000	
5	0	0	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	287,100,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	2 dokumen	10,500,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	185,268,002	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkat nya kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapata n Asli Daerah	1 dokumen	185,268,002	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	1 dokumen	15,059,430	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkat nya kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapata n Asli Daerah	1 dokumen	15,059,430	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	1 dokumen	165,000,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkat nya kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapata n Asli Daerah	1 dokumen	165,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	4303 WP	183,016,800	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkat nya kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapata n Asli Daerah	4303 WP	183,016,800	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	40,000,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	8923 Wajib Pajak	6,993,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	8923 Wajib Pajak	6,993,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	100 %	99,040,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	100 %	103,992,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	100 %	310,550,520	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	100 %	59,962,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	1 dokumen	10,270,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapata n Asli Daerah	1 dokumen	10,785,000	Badan Pendapatan Daerah
TOTAL								10,376,982,780							10,739,013,100	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	0 3				KEPEGAWAIAN			9,534,760,099							10,127,659,120	
5	0 3	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	7,117,062,899						A skor	7,723,663,820	
5	0 3	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen Penganggaran dan Evaluasi	100 persen	19,400,000						100 persen	13,978,400	
5	0 3	0 1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	5 laporan	19,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan	0	5 laporan	13,978,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						reformasi birokrasi				
5	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	6,099,847,949						100 persen	5,697,845,420	
5	0	0	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	6,099,847,949		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	43 Orang/bulan	5,697,845,420	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	323,200,000						100 persen	331,840,000	
5	0	0	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	323,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja	80 Laporan	331,840,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	14,325,950						100 persen	200,000,000	
5	0	0	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14,325,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	2 Unit	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	100 persen	446,318,000						100 persen	950,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	446,318,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	12 laporan	950,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	213,971,000						100 persen	530,000,000	
5	0	0	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	17,336,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	18 Unit	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	2 Unit	148,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	2 Unit	450,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	8 Unit	47,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	8 Unit	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	2,417,697,200						87,7 skor	2,403,995,300	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	100 persen	1,202,560,000						100 persen	1,202,692,300	
5	0	0	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 laporan	1,003,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	2 laporan	993,332,300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	160 Dokumen	89,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	160 Dokumen	99,360,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1000 Dokumen	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	1000 Dokumen	110,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100 persen	461,784,200						100 persen	442,442,000	
5	0	0	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	702 Dokumen	375,626,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	702 Dokumen	356,284,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	455 Dokumen	86,158,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	455 Dokumen	86,158,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi	100 persen	601,710,000						100 persen	600,000,000	
5	0	0	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	150 Dokumen	601,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkat nya manajemen kinerja ASN	150 Dokumen	600,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	100 persen	151,643,000						100 persen	158,861,000	
5	0	0	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	14,391,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kompetensi ASN	1 Dokumen	19,391,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1429 Orang	60,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kompetensi ASN	1429 Orang	60,130,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	0	0	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	77,122,000			Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Kompetensi ASN	60 Orang	79,340,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	4			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2,459,306,900							4,476,825,000	
5	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	20 persen	2,459,306,900						14 persen	4,476,825,000	
5	0	0	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	85 persen	1,590,042,900						85 persen	1,976,825,000	
5	0	0	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	277 orang	1,590,042,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas Pengembangan kompetensi	277 orang	1,976,825,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	80 persen	869,264,000						80 persen	2,500,000,000	
5	0	0	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional,	177 laporan	869,264,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	177 Peserta	2,500,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kepemimpinan, dan Prajabatan										
TOTAL								11,994,066,999							14,604,484,120	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	0 1				INSPEKTORAT DAERAH			10,940,924,464							11,415,462,000	
6	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	A skor	9,760,159,864						A skor	10,583,097,000	
6	0 1	0 1	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentse Pemenuhan Dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi	100 %	1,861,500						100 %	3,500,000	
6	0 1	0 1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	1,861,500	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	20 Laporan	3,500,000	Inspektorat Daerah
6	0 1	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	8,895,736,674						100 %	9,500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	0	0	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	8,895,736,674	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Inspektorat	45 Orang/bulan	9,500,000,000	Inspektorat Daerah
6	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	89 Nilai	764,205,990						89 Nilai	1,004,597,000	
6	0	0	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Jenis	413,842,990	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Inspektorat	9 Jenis	724,597,000	Inspektorat Daerah
6	0	0	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	350,363,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Inspektorat	65 Laporan	280,000,000	Inspektorat Daerah
6	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100 %	98,355,700						100 %	75,000,000	
6	0	0	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	33,355,700	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	INSpektorat	20 Unit	35,000,000	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	0	0	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	INspektorat	1 Unit	20,000,000	Inspektorat Daerah
6	0	0	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	INspektorat	15 Unit	20,000,000	Inspektorat Daerah
6	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	40%	386,115,900						A skor	547,165,000	
6	0	0	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan kegiatan	29 laporan	352,646,300						29 laporan	507,165,000	
6	0	0	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	51,712,800	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	OPD	3 Laporan	143,000,000	Inspektorat Daerah
6	0	0	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	129,926,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	OPD	15 Laporan	160,000,000	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	0	0	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	24,436,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	OPD	4 Laporan	35,000,000	Inspektorat Daerah
6	0	0	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	128,766,400	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	OPD	3 Laporan	150,000,000	Inspektorat Daerah
6	0	0	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	17,805,100	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	OPD	4 Dokumen	19,165,000	Inspektorat Daerah
6	0	0	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	33,469,600						100 %	40,000,000	
6	0	0	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	5,364,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	2 Laporan	15,000,000	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	0	0	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan	28,105,600	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	3 Laporan	25,000,000	Inspektorat Daerah
6	0	0			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	100%	794,648,700						A skor	285,200,000	
6	0	0	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	2 dokumen	6,622,800						2 dokumen	7,700,000	
6	0	0	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	6,622,800	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Inspektorat	2 Rekomendasi	7,700,000	Inspektorat Daerah
6	0	0	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	7 dokumen	788,025,900						7 dokumen	277,500,000	
6	0	0	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 perangkat daerah	129,592,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	OPD	34 perangkat daerah	250,000,000	Inspektorat Daerah
6	0	0	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	4 Kegiatan	658,433,900	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan	Peningatan pelayanan publik berbasis	OPD	4 Kegiatan	27,500,000	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dan Pemberantasan Korupsi	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					Transformasi Publik	smart city dan percepatan reformasi birokrasi				
TOTAL								10,940,924,464							11,865,462,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			13,828,303,562							15,062,460,634	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	13,024,060,432						80.01 skor	13,162,816,056	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	24,507,000						100 %	75,834,360	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	24,507,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kecamatan Manguharjo	20 Dokumen	75,834,360	Kecamatan Manguharjo
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	11,787,398,481						100 %	10,451,208,399	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	11,785,398,481	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kecamatan Manguharjo	70 Orang/bulan	10,449,003,399	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	26 Laporan	2,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kecamatan Manguharjo	26 Laporan	2,205,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %	17,763,750						100 %	82,938,000	
7	0	0	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 orang	1,500,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Se Kecamatan Manguharjo	70 Orang	75,000,000	
7	0	0	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	16,263,750	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Se Kecamatan Manguharjo	100 Orang	7,938,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	119,715,000						100 %	143,751,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	119,715,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kecamatan Manguharjo	12 Laporan	143,751,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	32,883,750						100 %	550,000,000	
7	0	0	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	24,725,250	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kecamatan Manguharjo dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	9 Unit	100,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	8,158,500	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kecamatan Manguharjo dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	10 unit	450,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	843,513,545						100 %	1,640,395,109	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	843,513,545	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kecamatan Manguharjo dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	12 Laporan	1,640,395,109	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	100 %	198,278,906						100 %	218,689,188	
7	0	0	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	63,865,108	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kecamatan Manguharjo dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	15 unit	64,500,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	75,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kecamatan Manguharjo dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	6 Unit	108,889,188	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	59,413,798	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kecamatan Manguharjo dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	60 unit	45,300,000	Kecamatan Manguharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	63,412,400	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi		1 Laporan	200,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	338,346,450						100 %	1,133,254,723	
7	0	0	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100 %	90,176,600						100 %	873,439,573	
7	0	0	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	90,176,600	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Manguharjo	1 Laporan	873,439,573	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100 %	248,169,850						100 %	259,815,150	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	248,169,850	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Manguharjo	1 Laporan	259,815,150	Kecamatan Manguharjo
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	103,577,200						100 %	200,573,960	
7	0	0	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	100 %	103,577,200						100 %	200,573,960	
7	0	0	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang	37,482,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	350 Orang	123,398,960	Kecamatan Manguharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	1 Laporan	51,076,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	1 Laporan	60,637,500	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	15,019,200	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	2 Dokumen	16,537,500	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0				KECAMATAN			826,683,680							1,138,485,499	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	593,449,399						90.03 Skor	788,485,499	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	593,449,399						100 %	788,485,499	
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	593,449,399	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kelurahan Manguharjo dan Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	12 Laporan	788,485,499	Kecamatan Manguharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	233,234,281						100 %	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	233,234,281						100 %	350,000,000	
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	150,800,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo				Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	2 Unit	200,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	82,434,281	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	5 Pokmas/Ormas	150,000,000	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0				KECAMATAN			527,330,775							1,026,361,217	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	424,953,987						90.03 skor	676,361,217	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	424,953,987						100 %	676,361,217	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	424,953,987	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kelurahan Sogaten dan Masyarakat di Kelurahan Sogaten	12 Laporan	676,361,217	Kecamatan Manguharjo
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	102,376,788						100 %	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	102,376,788						100 %	350,000,000	
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	47,919,500	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Sogaten	2 unit	200,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Orma s	54,457,288	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Sogaten	5 Pokmas/Orma s	150,000,000	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0	1			KECAMATAN			549,980,000							1,013,327,438	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	447,580,000						90.03 skor	663,327,438	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	447,580,000						100 %	663,327,438	
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	447,580,000	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kelurahan Patihan dan Masyarakat di Kelurahan Patihan	12 Laporan	663,327,438	Kecamatan Manguharjo
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	102,400,000						100 %	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	102,400,000						100 %	350,000,000	
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	50,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Patihan	2 unit	200,000,000	Kecamatan Manguharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	52,400,000	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Patihan	5 Pokmas/Ormas	150,000,000	Kecamatan Manguharjo	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	0	1			KECAMATAN			553,101,600							980,945,249		
7	0	1	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	376,301,600						90.03 skor	630,945,249		
7	0	1	0	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	376,301,600						100 %	630,945,249		
7	0	1	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	376,301,600	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN Di Kelurahan Ngegong dan Masyarakat di Kelurahan Ngegong	12 Laporan	630,945,249	Kecamatan Manguharjo
7	0	1	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	176,800,000						100 %	350,000,000		
7	0	1	0	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	176,800,000						100 %	350,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	101,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Ngegong	2 Unit	200,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	75,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Ngegong	5 Pokmas/Ormas	150,000,000	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0				KECAMATAN			948,028,212							1,149,419,310	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	472,146,352						90.03 skor	799,419,310	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	472,146,352						100 %	799,419,310	
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	472,146,352	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kelurahan Winongo dan Masyarakat di Kelurahan Winongo	12 Laporan	799,419,310	Kecamatan Manguharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	475,881,860						100 %	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	475,881,860						100 %	350,000,000	
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	406,806,750	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	2 unit	200,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	69,075,110	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	5 Pokmas/Ormas	150,000,000	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0				KECAMATAN			665,881,444							1,116,036,294	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	470,394,344						90.03 skor	766,036,294	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	470,394,344						100 %	766,036,294	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	470,394,344	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kelurahan Madiun Lor dan Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor	12 Laporan	766,036,294	Kecamatan Manguharjo
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	195,487,100						100 %	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	195,487,100						100 %	350,000,000	
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	120,487,100	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor	2 unit	200,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	75,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor	5 Pokmas/Ormas	150,000,000	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0				KECAMATAN			596,804,394							1,005,633,267	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	422,765,484						90.03 skor	655,633,267	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	422,765,484						100 %	655,633,267	
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	422,765,484	Kota Madiun, Manguharjo, Pangonganga n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kelurahan Pangongang ang dan Masyarakat di Kelurahan Pangongang an	12 Laporan	655,633,267	Kecamatan Manguharjo
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	174,038,910						100 %	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	174,038,910						100 %	350,000,000	
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	99,251,000	Kota Madiun, Manguharjo, Pangonganga n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Pangongang an	2 unit	200,000,000	Kecamatan Manguharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	74,787,910	Kota Madiun, Manguharjo, Pangongangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Pangongangan	5 Pokmas/Ormas	150,000,000	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0	1			KECAMATAN			831,758,000							1,315,713,023	
7	0	1	0	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	725,758,000						90.03 skor	965,713,023	
7	0	1	0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	725,758,000						100 %	965,713,023	
7	0	1	0	2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	725,758,000	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN DI Kelurahan Nambangan Lor dan Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor	12 Laporan	965,713,023	Kecamatan Manguharjo
7	0	1	0	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	106,000,000						100 %	350,000,000	
7	0	1	0	3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	106,000,000						100 %	350,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	31,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor	2 unit	200,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	75,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor	5 Pokmas/Ormas	150,000,000	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0				KECAMATAN			1,004,781,931							1,182,952,300	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	438,671,431						90.03 skor	832,952,300	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	438,671,431						100 %	832,952,300	
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	438,671,431	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	ASN di Kelurahan Nambangan Kidul dan Masyarakat di Kelurahan Nambangan Kidul	12 Laporan	832,952,300	Kecamatan Manguharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0				KECAMATAN			14,442,923,487							14,352,582,813	
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	13,552,588,037						A Skor	13,046,209,514	
7	0	0	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	15,083,568						100 %	17,556,498	
7	0	0	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	15,083,568	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai Kecamatan Kartoharjo	18 Dokumen	17,556,498	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	12,176,001,118						100 %	11,002,000,000	
7	0	0	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	12,174,001,118	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	pegawai kecamatan kartoharjo	70 Orang/bulan	11,000,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	13 Laporan	2,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	pegawai kecamatan kartoharjo	13 Laporan	2,000,000	Kecamatan Kartoharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	14,644,320						100 %	14,644,320	
7	0 1	0 1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	70 orang	14,644,320	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pegawai kecamatan Kartoharjo	70 orang	14,644,320	Kecamatan Kartoharjo
7	0 1	0 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	87.75 indeks	136,064,000						87.75 indeks	138,900,000	
7	0 1	0 1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	136,064,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Karyawan/k aryawati Kecamatan Kartoharjo	12 laporan	138,900,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0 1	0 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	58,865,146						100 %	400,000,000	
7	0 1	0 1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Karyawan/k aryawati Kecamatan Kartoharjo	1 unit	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	58,865,046	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Karyawan/k aryawati Kecamatan Kartoharjo	10 unit	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	1,014,168,490						100 %	1,359,794,008	
7	0	0	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,014,168,490	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Karyawan/k aryawati Kecamatan Kartoharjo	12 laporan	1,359,794,008	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	137,761,395						100 %	127,959,000	
7	0	0	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	27,029,066	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	pegawai kecamatan kartoharjo	14 unit	25,251,000	Kecamatan Kartoharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	23,157,329	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	pegawai kecamatan kartoharjo	1 unit	10,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	52,693,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	pegawai kecamatan kartoharjo	1 unit	56,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	34,882,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	pegawai kecamatan kartoharjo	60 unit	36,708,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	38,656,000						87.8 indeks	21,000,000	
7	0	0	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100 persen	38,656,000						100 persen	21,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dokumen	38,656,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	4 dokumen	21,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	353,186,800						100 persen	371,153,899	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	269,452,000						55 persen	294,844,699	
7	0	0	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga	269,452,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	7 lembaga	294,844,699	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			83,734,800							76,309,200	
7	0	0	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	83,734,800	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi		12 Laporan	76,309,200	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan	100 persen	312,260,650						100 persen	715,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						ketertiban umum di kecamatan										
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	200,338,600						100 persen	412,500,000	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 laporan	200,338,600	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	16 laporan	412,500,000	Kecamatan Kartoharjo
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	111,922,050						100 persen	302,500,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatananjuti	6 laporan	111,922,050	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	6 laporan	302,500,000	Kecamatan Kartoharjo
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 persen	186,232,000						100 persen	199,219,400	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	186,232,000						100 persen	199,219,400	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	537,265,700						87.8 indeks	620,235,000	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	537,265,700						2.96 indeks	620,235,000	
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	537,265,700	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	karyawan/k aryawati dan masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo	12 laporan	620,235,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	41,503,794						100 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	41,503,794						55 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	594	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	2 unit	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	41,503,200	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	5 pokmas	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0	1			KECAMATAN			490,293,731							883,400,000	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	463,782,228						87.8 indeks	533,400,000	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	463,782,228						2.96 indeks	533,400,000	
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	463,782,228	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	12 laporan	533,400,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	26,511,503						100 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	26,511,503						55 persen	350,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	50	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Sukosari	2 unit	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	26,511,453	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Sukosari	5 pokmas	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0				KECAMATAN			906,421,989							1,021,790,000	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	556,783,020						87.8 indeks	671,790,000	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	556,783,020						2.96 indeks	671,790,000	
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	556,783,020	Kota Madiun, Kartoharjo, Klegan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Klegan	12 laporan	671,790,000	Kecamatan Kartoharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	349,638,969						100 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	349,638,969						55 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	305,879,969	Kota Madiun, Kartoharjo, Kleglen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Kleglen	2 unit	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	43,759,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kleglen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Kleglen	5 pokmas	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0				KECAMATAN			544,932,143							980,000,000	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	505,787,293						87.8 indeks	630,000,000	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	505,787,293						2.96 indeks	630,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	483,760,059						87.8 indeks	564,900,000	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	483,760,059						2.96 indeks	564,900,000	
						Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 persen							100 persen		
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	483,760,059	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Pilangbang o	12 laporan	564,900,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	30,080,050						100 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	30,080,050						55 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	50	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Pilangbang o	2 unit	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	30,080,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Pilangbang o	5 pokmas	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0	1			KECAMATAN			461,308,950							872,900,000	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	425,042,900						87.8 indeks	522,900,000	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	425,042,900						2.96 indeks	522,900,000	
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	425,042,900	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Karyawan/k aryawati dan masyarakat Kelurahan Tawangrejo	12 laporan	522,900,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	36,266,050						100 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	36,266,050						55 persen	350,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	50	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	2 unit	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	36,266,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	5 pokmas	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0				KECAMATAN			561,327,180							970,235,000	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	506,945,530						87.8 indeks	620,235,000	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	506,945,530						2.96 indeks	620,235,000	
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	506,945,530	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Karyawan/k aryawan dan masyarakat kelurahan Kanigoro	12 laporan	620,235,000	Kecamatan Kartoharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	54,381,650						100 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	54,381,650						55 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	50	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Kanigoro	2 unit	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	54,381,600	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Kanigoro	5 pokmas	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0				KECAMATAN			506,217,055							910,910,000	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	467,384,605						87.8 indeks	560,910,000	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	467,384,605						2.96 indeks	560,910,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	467,384,605	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	12 laporan	560,910,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	38,832,450						100 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	38,832,450						55 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	50	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	2 unit	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	38,832,400	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	5 pokmas	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0				KECAMATAN			727,043,630							906,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	474,324,030						87.8 indeks	556,500,000	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	474,324,030						2.96 indeks	556,500,000	
7	0	0	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	474,324,030	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	0	12 laporan	556,500,000	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	252,719,600						100 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	252,719,600						55 persen	350,000,000	
7	0	0	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	221,200,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Kelun	2 unit	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	31,519,600	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Kelun	5 pokmas	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo
TOTAL								19,733,077,768							22,783,452,813	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			14,385,717,542							16,511,106,603	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.76 Skor	13,573,184,392						80.76 Skor	15,357,548,642	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	10,086,000						100 %	9,731,281	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	10,086,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan	Seluruh Pegawai Kecamatan Taman	18 Dokumen	9,731,281	Kecamatan Taman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												reformasi birokrasi				
7	0	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	12,381,426,184						100 %	13,009,582,009	
7	0	01	2.02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	12,381,426,184	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh Pegawai Kecamatan Taman	76 Orang/bulan	13,009,582,009	Kecamatan Taman
7	0	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	14,854,000						100 %	19,141,500	
7	0	01	2.05	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Orang	14,854,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh Pegawai Kecamatan Taman	100 Orang	19,141,500	Kecamatan Taman
7	0	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	98,572,000						100 %	1,081,780,146	
7	0	01	2.06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	98,572,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh Pegawai Kecamatan Taman	10 Laporan	103,500,600	Kecamatan Taman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak	100 %	1,832,000						100 %	2,304,855	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	342,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh Pegawai Kecamatan Taman	1 Unit	375,48	Kecamatan Taman
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1,490,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh Pegawai Kecamatan Taman	1 Unit	1,929,375	Kecamatan Taman
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			876,420,108							978,279,546	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	876,420,108	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi		12 Laporan	978,279,546	Kecamatan Taman
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	189,994,100						100 %	256,729,305	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 Unit	52,522,300	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh Pegawai Kecamatan Taman	16 Unit	55,148,415	Kecamatan Taman
7	0	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	100,000,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh Pegawai Kecamatan Taman	2 Unit	157,500,000	Kecamatan Taman
7	0	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	6 Unit	37,471,800	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Seluruh Pegawai Kecamatan Taman	6 Unit	44,080,890	Kecamatan Taman
7	0	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	21,998,400						88.78 Indeks	27,513,556	
7	0	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100 %	21,998,400						100 %	27,513,556	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	02	2.03	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	21,998,400	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Taman	4 Dokumen	27,513,556	Kecamatan Taman
7	0	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	343,215,750						100 %	454,245,374	
7	0	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	305,620,750						100 %	354,644,063	
7	0	03	2.02	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	305,620,750	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Taman	7 Lembaga	354,644,063	Kecamatan Taman
7	0	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			37,595,000							99,601,311	
7	0	03	2.03	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	37,595,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi		1 Laporan	99,601,311	Kecamatan Taman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	338,399,400						100 %	564,464,135	
7	0	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %	138,376,000						100 %	243,847,275	
7	0	04	2.01	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	138,376,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Taman	12 Laporan	243,847,275	Kecamatan Taman
7	0	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	200,023,400						100 %	320,616,860	
7	0	04	2.02	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10 Laporan	200,023,400	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Taman	10 Laporan	320,616,860	Kecamatan Taman
7	0	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	100 %	108,919,600						100 %	107,334,896	
7	0	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	100 %	108,919,600						100 %	107,334,896	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Penugasan Kepala Daerah											
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang	35,140,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Taman	120 Orang	75,588,975	Kecamatan Taman
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	52,594,400	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Taman	4 Laporan	29,685,600	Kecamatan Taman
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	21,185,200	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Taman	3 Dokumen	2,060,321	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			665,756,765							1,523,520,472	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	546,493,765						88.78 Indeks	693,545,472	
7	0	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	546,493,765						100 %	693,545,472	
7	0	02	2.02	0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	546,493,765	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Mojorejo	12 Laporan	693,545,472	Kecamatan Taman
7	0	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	119,263,000						100 %	829,975,000	
7	0	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	119,263,000						100 %	829,975,000	
7	0	03	2.02	0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	40,000,000	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Mojorejo	3 Unit	709,750,000	Kecamatan Taman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	03	2.02	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	79,263,000	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Mojorejo	3 Pokmas/Ormas	120,225,000	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0	1			KECAMATAN			635,476,272							1,010,432,580	
7	0	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	514,902,000						88.78 Indeks	662,083,035	
7	0	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	514,902,000						100 %	662,083,035	
7	0	02	2.02	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	514,902,000	Kota Madiun, Taman, Pandean	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Pandean	12 Laporan	662,083,035	Kecamatan Taman
7	0	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	120,574,272						100 %	348,349,545	
7	0	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	100 %	120,574,272						100 %	348,349,545	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						pemberdayaan masyarakat										
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	44,531,000	Kota Madiun, Taman, Pandean	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Pandean	3 Unit	268,504,109	Kecamatan Taman
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/ Ormas	76,043,272	Kota Madiun, Taman, Pandean	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Pandean	2 Pokmas/ Ormas	79,845,436	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			667,240,721							1,436,287,233	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	537,454,321						88.78 Indeks	631,340,464	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	537,454,321						100 %	631,340,464	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	537,454,321	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Banjarejo	12 Laporan	631,340,464	Kecamatan Taman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	129,786,400						100 %	804,946,769	
7	0	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	129,786,400						100 %	804,946,769	
7	0	03	2.02	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	83,300,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Banjarejo	3 Unit	733,153,019	Kecamatan Taman
7	0	03	2.02	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ Ormas	46,486,400	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Banjarejo	3 Pokmas/ Ormas	71,793,750	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0	1			KECAMATAN			442,941,932							1,005,482,459	
7	0	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	321,833,320						88.78 Indeks	372,985,559	
7	0	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	321,833,320						100 %	372,985,559	

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	0	1			KECAMATAN			716,116,804							1,262,276,105		
7	0	1	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	673,116,804						88.78 Indeks	793,978,887		
7	0	1	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	673,116,804						100 %	793,978,887		
7	0	1	02	2.02	0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	673,116,804	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Manisrejo	12 Laporan	793,978,887	Kecamatan Taman
7	0	1	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	43,000,000						100 %	468,297,218		
7	0	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	43,000,000						100 %	468,297,218	
7	0	1	03	2.02	0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	6,500,000	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Manisrejo	3 Unit	389,547,218	Kecamatan Taman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	36,500,000	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Manisrejo	4 Pokmas/Ormas	78,750,000	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0	1			KECAMATAN			606,316,226							1,125,196,417	
7	0	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	551,971,326						88.78 Indeks	664,501,147	
7	0	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	551,971,326						100 %	664,501,147	
7	0	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	551,971,326	Kota Madiun, Taman, Kejuron	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Kejuron	12 Laporan	664,501,147	Kecamatan Taman
7	0	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	54,344,900						100 %	460,695,270	
7	0	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	100 %	54,344,900						100 %	460,695,270	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						pemberdayaan masyarakat										
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,047,200	Kota Madiun, Taman, Kejuron	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Kejuron	3 Unit	388,947,300	Kecamatan Taman
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	51,297,700	Kota Madiun, Taman, Kejuron	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Kejuron	2 Pokmas/Ormas	71,747,970	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			753,233,297							1,150,330,407	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	491,145,017						88.78 Indeks	587,640,237	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	491,145,017						100 %	587,640,237	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	491,145,017	Kota Madiun, Taman, Josenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Josenan	12 Laporan	587,640,237	Kecamatan Taman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	262,088,280						100 %	562,690,170	
7	0	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	262,088,280						100 %	562,690,170	
7	0	03	2.02	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	217,187,240	Kota Madiun, Taman, Josenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Josenan	4 Unit	462,415,170	Kecamatan Taman
7	0	03	2.02	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	44,901,040	Kota Madiun, Taman, Josenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Josenan	2 Pokmas/Ormas	100,275,000	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0	1			KECAMATAN			603,734,296							1,165,026,604	
7	0	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	523,445,596						88.78 Indeks	625,956,604	
7	0	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	523,445,596						100 %	625,956,604	

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	0	1			KECAMATAN			842,017,097							1,939,957,693		
7	0	1	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	605,582,116						88.78 Indeks	721,836,816		
7	0	1	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	605,582,116						100 %	721,836,816		
7	0	1	02	2.02	0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	605,582,116	Kota Madiun, Taman, Taman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Taman	12 Laporan	721,836,816	Kecamatan Taman
7	0	1	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	236,434,981						100 %	1,218,120,877		
7	0	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	236,434,981						100 %	1,218,120,877	
7	0	1	03	2.02	0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	190,171,781	Kota Madiun, Taman, Taman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Taman	4 Unit	1,127,104,567	Kecamatan Taman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	03	2.02	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	46,263,200	Kota Madiun, Taman, Taman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kelurahan Taman	3 Pokmas/Ormas	91,016,310	Kecamatan Taman
TOTAL								20,318,550,952							28,129,616,573	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	0 1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9,797,724,321							53,948,947,314	
8	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	5,093,015,274						80.50 Nilai	5,414,592,347	
8	0 1	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	57,837,000						100 %	65,000,000	
8	0 1	0 1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12,837,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bakesbang pol	10 Dokumen	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	0	0	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bakesbang pol	1 Laporan	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	3,861,088,819						100 %	4,088,008,819	
8	0	0	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3,861,088,819		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Karyawan/k aryawati Bakesbang pol	23 Orang/bulan	4,088,008,819	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	62,815,812						100 %	62,819,945	
8	0	0	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	30 orang	62,815,812	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bakesbang pol	30 orang	62,819,945	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	793,150,940						100 %	962,263,583	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	0	0	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	593,150,940	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bakesbang pol	1 paket	712,263,583	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan	200,000,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bakesbang pol	80 laporan	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	243,122,703						100 %	156,500,000	
8	0	0	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 unit	173,150,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bakesbang pol	7 unit	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	69,972,703	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bakesbang pol	5 unit	56,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakann	100 %	75,000,000						100 %	80,000,000	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30,000,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bakesbang pol	1 Unit	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	10,000,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bakesbang pol	1 unit	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	14 unit	35,000,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Bakesbang pol	14 unit	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	314,049,297						100 %	344,152,347	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	6 jenis	314,049,297						6 jenis	344,152,347	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	0	0	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	125 Orang	314,049,297		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	125 Orang	344,152,347	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	100 %	1,900,062,030						100 %	45,327,964,250	
8	0	0	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	100 %	1,900,062,030						100 %	45,327,964,250	
8	0	0	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan Pemerintah, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah.	33 orang	980,581,030	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	33 orang	995,005,150	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						serta Pemantauan situasi Politik di Daerah										
8	0 1	0 3	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etikan Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	125 orang	34,353,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	125 orang	149,746,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0 1	0 3	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	1 laporan	885,128,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	1 laporan	44,183,213,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0 1	0 4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	68 %	185,337,000						68 %	185,337,000	
8	0 1	0 4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan	75 %	185,337,000						75 %	185,337,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	0	0	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	75 orang	185,337,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Pengurus dan anggota Ormas	75 orang	185,337,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	593,661,370						100 %	553,661,370	
8	0	0	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	3 kali	593,661,370						3 kali	553,661,370	
8	0	0	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	100 orang	60,000,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	100 orang	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	533,661,370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	400 Orang	493,661,370	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

[illegible]

5.2 Rencana Pendanaan Daerah

Rencana pendanaan daerah dapat dilihat berdasarkan urusan, dan perangkat daerah. Berdasarkan urusan pemerintahan, Terdapat (3) tiga urusan pemerintahan yang memiliki proporsi pendanaan lebih dari 10 persen pada Tahun 2023. Yaitu Urusan Pendidikan menempati urutan pertama dengan proporsi pendanaan sebesar 24 persen, Urusan Kesehatan dengan urutan posisi kedua dengan proporsi pendanaan sebesar 21 persen dan urutan ketiga ditempati Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan proporsi pendanaan sebesar 12 persen.

Tabel 5. 2 Pagu Indikatif Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah tahun 2023

PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	RANWAL RENJA OPD 2023	RANCANGAN RENJA OPD 2023	RKPD KOTA MADIUN TAHUN 2023	PROPORSI
Dinas Pendidikan	4	11	167	310.006.748.462	355.126.353.283	293.410.821.925	24,44
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	23	95	248.790.428.486	248.790.428.486	260.341.304.450	21,69
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	17	39	258.005.507.127	262.842.808.381	150.000.416.000	12,49
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	16	23	52.311.230.000	52.311.230.000	39.875.304.195	3,32
Satuan Polisi Pamong Praja	3	12	23	29.864.878.000	29.864.878.000	22.478.373.000	1,87
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	19	3.876.000.000	3.876.000.000	3.799.700.000	0,32
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	29	76	29.441.230.059	29.441.230.059	27.296.198.431	2,27
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9	16	24	11.144.827.267	11.144.827.267	10.060.347.456	0,84
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13	24	43	15.455.350.000	15.455.350.000	10.008.430.900	0,83
Dinas Lingkungan Hidup	9	18	29	29.237.852.700	29.237.852.700	24.949.715.626	2,08
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	13	26	7.022.933.111	7.022.933.111	6.256.376.777	0,52
Dinas Perhubungan	2	15	24	20.616.266.112	20.616.266.112	18.539.553.696	1,54
Dinas Komunikasi dan Informatika	5	11	28	22.942.633.230	22.942.633.230	19.339.499.070	1,61
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	11	17	7.362.223.473	7.362.223.473	7.217.012.047	0,60
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	9	18	23	24.405.599.361	24.405.599.361	13.807.649.519	1,15
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	11	18	7.183.924.616	7.183.924.616	6.897.904.678	0,57
Dinas Perdagangan	6	13	20	17.646.789.000	17.746.789.000	16.339.577.408	1,36
Sekretariat Daerah	11	48	74	58.407.381.636	59.430.581.636	57.823.797.149	4,82
Sekretariat DPRD	2	14	24	42.227.374.309	42.227.374.309	38.653.217.556	3,22
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	14	32	11.088.211.481	11.088.211.481	11.962.006.208	1,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	11	25	62.922.352.625	62.922.352.625	57.989.854.202	4,83
Badan Pendapatan Daerah	2	7	18	11.334.619.440	11.334.619.440	10.376.982.780	0,86
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	3	12	19	13.509.357.120	13.509.357.120	11.994.066.999	1,00
Inspektorat	3	9	19	11.538.176.760	11.538.176.760	10.940.924.464	0,91

PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	RANWAL RENJA OPD 2023	RANCANGAN RENJA OPD 2023	RKPD KOTA MADIUN TAHUN 2023	PROPORSI
Kecamatan Kartoharjo	5	13	46	22.567.676.121	22.567.676.121	19.733.077.768	1,64
Kecamatan Manguharjo	5	13	46	22.723.538.040	22.723.538.040	20.332.653.598	1,69
Kecamatan Taman	5	12	44	22.780.295.871	22.780.295.871	20.318.550.952	1,69
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	19	10.437.039.044	10.990.589.044	9.797.724.321	0,82
TOTAL	165	432	1060	1.384.850.443.451	1.416.484.369.526	1.200.541.041.175	100,00

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2022

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan target indikator kinerja daerah dapat mengindikasikan aspek keberhasilan pembangunan daerah yang ingin di capai. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Indikator kinerja tersebut meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator Kinerja Utama menjadi salah satu tolak ukur penilaian kinerja Walikota dan wakil walikota. IKU pemerintah Kota Madiun memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Madiun. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran pembangunan. Penetapan IKU Kota Madiun dalam RKPD 2023 mengacu pada penetapan IKU RPJMD tahun ketiga dengan memperhatikan kondisi capaian tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. 1 Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama Kota Madiun

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Realisasi	Target		Target Penyesuaian	Alasan
			2021	2022	2023	2023*	
1	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,87	6,40	6,42	6,89	Perhitungan berdasarkan proyeksi dengan memperhitungkan realisasi 2021
		Indeks Gini	0,345	0,37	0,36	0,332	Perhitungan berdasarkan proyeksi dengan memperhitungkan realisasi 2021
2	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,25	81,70	82,15	82,15	
		Indeks Pembangunan Gender	94,38	94,44	94,49	94,49	
		Indeks Ketentraman	78,74	77,05	77,15	77,15	
3	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	(B) 66,26	(B) 68	(B) 69	(B) 69	
4	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Livable City	89,40	88,19	88,60	89,40	Perhitungan berdasarkan proyeksi dengan memperhitungkan realisasi 2021

2023* merupakan target penyesuaian pada dokumen RKPD karena melihat Realisasi Tahun 2021

Sumber: Bappelitbangda, 2022 dan BPS Kota Madiun, 2022

RKPD Kota Madiun tahun 2023 memuat empat prioritas pembangunan dengan tujuh indikator kinerja utama. Prioritas pertama yaitu Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital terdiri dari dua IKU yaitu Pertumbuhan Ekonomi / ekonomi inklusif, dan Indeks Gini. Capaian Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,73 persen, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 5,16 persen dan 5,32 persen. Tingkat ketimpangan pendapatan yang diindikasikan oleh Indeks Gini, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sebesar 0,38 dan ditargetkan sebesar 0,37 dan 0,36 pada tahun 2022 dan 2023.

Prioritas pembangunan daerah kedua yaitu Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia. Indikator kinerja utama pada prioritas pembangunan tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan indeks ketentraman. Capaian kedua IKU terkait pembangunan manusia dan gender tahun 2021 adalah sebesar 81,25 dan 94,40. Target indikator kinerja pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 81,70 dan 82,15 untuk IPM dan 94,44 dan 94,49 untuk IPG.

Prioritas pembangunan daerah ketiga menekankan pada Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi. Terdapat satu indikator kinerja dalam mengukur keberhasilan prioritas ini yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Capaian IRB pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022 dan 2023 target IRB masing – masing B (68) dan B (69).

Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan merupakan prioritas pembangunan daerah kedua. Prioritas tersebut memiliki satu indikator kinerja utama yaitu Livable City. Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 sebesar 87,78 dan pada tahun 2022 dan 2023 ditargetkan masing-masing sebesar 88,19 dan 88,60.

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan menunjukkan indikator keberhasilan pembangunan di lihat dari sisi urusan baik wajib maupun pilihan. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan lain sebagainya. Aspek Pelayanan Umum meliputi empat fokus yaitu Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Aspek Daya Saing Daerah meliputi empat fokus yaitu Kemampuan Ekonomi Daerah, Iklim Berinvestasi, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia. Rincian mengenai indikator dan target capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		13	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		14	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		15	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	layanan	3 layanan	3	3	3	3	Lppd
		16	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	orang	1512 orang	820	830	820	1512	Lppd
		17	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	tim	2 tim	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2	Lppd
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	1512 orang	820	830	820	1512	Lppd
		19	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	4 unit	4	4	4	4	Lppd
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	orang	1512 orang	160	165	820	830	Lppd
		21	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	unit	2 unit	2	2	2	2	Lppd
		22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	orang	245 orang	50	55	245	245	Lppd
		23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	orang	1 orang	9	12	9	12	Lppd
		24	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	unit	18 peralatan	7	9	18	18	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		25	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket	1 paket	1	1	1	1	Lppd
		26	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	orang	51 orang	165	170	165	170	Lppd
		27	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	orang	1 orang	1	1	1	1	Lppd
		28	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	orang	177 orang	176 (Peksos Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	177	177	Lppd
		29	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	orang	120 orang	60	65	120	122	Lppd
		30	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	kali	2 kegiatan	2	2	2	2	Lppd
		31	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang	6 orang	5	5	5	5	Lppd
		32	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	107 orang	107	109	107	109	Lppd
		33	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	orang	245 orang	222	224	222	224	Lppd
		34	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang	245 orang	15	17	15	224	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		35	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	orang	10 orang	62	64	64	64	Lppd
		36	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	orang	5734 orang	3.300	3.300	3300	3300	Lppd
		37	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	orang	0	1.000	1.000	1.000	3.300	Lppd
		38	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	tempat	-	0	0	0	0	Lppd
		39	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		5734 paket	0	0	3300	3300	Lppd
		40	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		4 orang	300	300	300	300	Lppd
		41	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		177 orang	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	177	177	Lppd
		42	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		107,53%	95	97	97	97	Spm
		43	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		137,42%	460	465	465	465	Spm
		44	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		204,44%	137	139	139	139	Spm
		45	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		100%	92	94	94	94	Spm
		46	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		173,76%	36	36	36	36	Spm
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
		1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,38	94,44	94,49	94,44	94,49	Indikator tujuan kota
		2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,18	77,18	77,2	77,18	77,2	Lanjutan indikator sasaran kota dan Indikator Tujuan PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		4	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	7,83%	13%	13%	13%	13%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	%	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	persentase keluarga yang berkualitas	%	3%	6%	12%	6%	12%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Prevalensi kekerasan terhadap anak	nilai	-	0,003 nilai	0,002 nilai	0,003	0,002	Indikator Sasaran PD
		10	persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	%	14,25%	15%	100%	15%	100%	Indikator Program PD
		11	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	5%	10%	20%	10%	20%	Indikator Program PD
		12	Jumlah dokumen Data terpilah gender dan anak	Do kumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Indikator Program PD
		13	persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		14	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak		-	0,003	0,003	0,003	0,003	Indikator Program PD
		15	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	-	12,50%	22,43%	12,50%	22,43%	Indikator Program PD
		16	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	-	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	Indikator Program PD
		17	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	14,25%	15%	20%	15%	20%	Lppd
		18	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,002%	0,00%	0,00%	0.03	0.03	Lppd
		19	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)		8,7402%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
		20	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		36 lembaga	63	65	63	65	Lppd
		21	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		34 program	96	123	96	123	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		22	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		2 media massa	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Lppd
		23	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		15 lembaga	15	15	15	15	Lppd
		24	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		25	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		15 lembaga	15	15	15	15	Lppd
		26	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		14 lembaga	15	15	15	15	Lppd
		27	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		1 organisasi	20	25	25	25	Lppd
		28	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		45 orang	45	45	45	45	Lppd
		29	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		1 lembaga	10	15	15	15	Lppd
		30	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		20 lembaga	20	20	20	20	Lppd
		31	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		3 kebijakan	2	2	2	2	Lppd
		32	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi		1 lembaga	1	1	1	1	Lppd
		33	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
c.			Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
	I		Urusan Pemerintahan							

1			2	3	4	5	6	7	8	9
			Bidang Kepemudaan dan Olahraga							
		2	Jumlah prestasi pemuda	Prestasi	171 prestasi	16 prestasi	17 prestasi	171	171	Indikator Tujuan PD
		4	Jumlah pemuda/ group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	Pemuda/ group	-	30 pemuda/ group	31 pemuda/ group	30 pemuda/ group	31 pemuda/ group	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Kualitas Sarpras	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	%	-	20%	25%	20%	25%	Indikator Program PD
		8	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	-	10%	15%	10%	15%	Indikator Program PD
		9	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	43,10%	40,81%	40,81%	43,10%	43,10%	Lppd
		10	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	47,19%	45,49%	45,49%	47,19%	47,19%	Lppd
		11	Peningkatan prestasi olahraga	medali	97	33	35	70	70	Lppd
		12	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	orang	135 orang	100	100	135	135	Lppd
		13	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	orang	135 orang	0	0	135	135	Lppd
		14	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kaderpengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	orang	100 orang	100	100	100	100	Lppd
		15	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Lppd
		16	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	orang	158 orang	158	158	158	158	Lppd
		17	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	event	2 event	3	3	3	3	Lppd
		18	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	orang	6 orang	7	7	7	7	Indikator Lama
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
		2	Jumlah kesenian dan kebudayaan yang terlestarikan	-	32 objek	63	65	63	65	Indikator Tujuan PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		4	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	Orang / group	27 group/ 510 orang	42 orang/gro up	44 orang/gro up	42 orang/gro up	44 orang/gro up	Indikator Sasaran PD
		5	jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata		5 objek	5	6	5	6	Indikator Sasaran PD
		6	persentase seni budaya yang dilestarikan	%	6,8%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		7	persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	25%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		9	Persentase SDM, Lembaga dan pranata kesenian yang dibina	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		10	Terlestarikannya Cagar Budaya	obyek	20	20	20	20	20	Lppd
		11	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	obyek	32 obyek	366	366	366	366	Lppd
		12	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	obyek	32 obyek	366	366	366	366	Lppd
		13	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	obyek	32 obyek	366	366	366	366	Lppd
		14	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	orang	65 orang	100	100	100	100	Lppd
		15	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	obyek	148 cagar budaya	148	148	148	148	Lppd
		16	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	obyek	20 cagar budaya	20	20	20	20	Lppd
		17	Layanan perijinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar provinsi dengan dukungan data		0 cagar budaya	0	0	0	0	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		18	Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	obyek	2 cagar budaya	2	2	2	2	Lppd
		19	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	obyek	20 cagar budaya	20	20	20	20	Lppd
		20	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	0	0	0	0	Lppd
		21	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		0	0	0	0	0	Lppd
		22	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota		0	0	0	0	0	Lppd
		23	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	orang	0	6	6	6	6	Lppd
		24	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota		11 tim	0	0	11	11	Lppd
		25	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		0	0	0	0	0	Lppd
		26	Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman		0	0	0	0	0	Lppd
		27	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota		0	0	0	0	0	Lppd
		28	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		0	0	0	0	0	Lppd
		29	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		0	0	0	0	0	Lppd
II			ASPEK PELAYANAN UMUM							
a			Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib							
	1		Terkait Pelayanan Dasar							
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
		1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,39	11,15	11,16	11,39	11,39	Indikator sasaran kota
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,41	14,41	14,42	14,41	14,42	Indikator sasaran kota
		3	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	%	65%	65%	66%	65%	66%	Indikator Tujuan PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		4	Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
		5	APM Paud, SD, dan SMP	%	130%	100%	100%	97,50%	98,00%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompetensi	%	65%	65%	66%	65%	66%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	%	85%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		8	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	84%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Wajib belajar 9 tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		10	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	84%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		11	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	%	65%	20%	25%	65	65	Indikator Program PD
		12	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		2.483	4.210	4.000	4.210	4.000	Lppd
		13	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		13.908	16.750	16.500	16.750	16.500	Lppd
		14	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		5.977	7.750	7.500	7.750	7.500	Lppd
		15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		176	195	180	195	180	Lppd
		16	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	lembag a	100	16	16	99	99	Lppd
		17	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Anak	130	50	50	130	130	Lppd
		18	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Anak	130	90	90	130	130	Lppd
		19	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Rasio	01:15	01.14	01.13	1,15	1,15	Lppd
		20	Jumlah pendidik pada PAUD	Orang	543	470	465	550	550	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		21	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	482	465	460	480	482	Lppd
		22	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Orang	30	10	10	30	30	Lppd
		23	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	lembag a	70	70	70	70	70	Lppd
		24	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	2.767	2.658	2.658	2352	2980	Lppd
		25	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	2.886	3.284	3.284	3.284	3.284	Lppd
		26	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	13.336	11.400	11.000	13.336	13.336	Lppd
		27	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	9.648	10.500	10.000	10.500	10.000	Lppd
		28	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	rasio	01:17	01.23	01.22	01.23	01.22	Lppd
		29	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01:14	01.28	01.27	01.28	01.27	Lppd
		30	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	1208	760	715	1208	1208	Lppd
		31	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	813	371	538	813	813	Lppd
		32	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	rasio	01:61	01.04	01.04	01.04	01:04	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		33	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01:39	0105	01.05	0105	01:39	Lppd
		34	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	332	171	165	171	332	Lppd
		35	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	119	80	72	80	119	Lppd
		36	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	1233	648	658	1233	1233	Lppd
		37	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	723	666	681	723	723	Lppd
		38	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	67	70	73	70	73	Lppd
		39	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	22	20	23	20	23	Lppd
		40	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	148	175	170	175	170	Lppd
		41	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazahSMA/ sederajat	orang	128	78	75	128	128	Lppd
		42	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	lembag a	3	1	1	3	3	Lppd
		43	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		44	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan		0	0	0	0	0	Lppd
		45	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	01:04	01.27	01.29	01.27	01.29	Lppd
		46	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	43	37	35	42	43	Lppd
		47	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	43	37	35	42	43	Lppd
		48	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	67	70	73	70	73	Lppd
		49	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	7	6	6	7	7	Lppd
		50	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	Orang	94,04%	26.450	26.311	26.450	26.311	spm
		51	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	12,74%	210	225	210	26.311	spm
		52	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	96,17%	4.250	4.000	4.250	26.311	spm
		53	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional	%	-	1	1	1	1	spm
II			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
		1	Angka Harapan Hidup	Skor	72,83	72,83	72,83	72,83	72,83	Indikator sasaran kota
		2	Persentase Keluarga Sehat	%	52%	52%	54%	52%	54%	Indikator tujuan PD
		5	Persentase rumah tangga sehat	%	69,43%	70,00%	71,00%	70,00%	71,00%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase rumah sehat	%	94,41%	88,00%	89,00%	88,00%	89,00%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase rata-rata upaya kesehatan	%	59,67%	62,00%	62,50%	62,00%	62,50%	Indikator Sasaran PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
			bersumber masyarakat berstrata puri							
		8	Indeks Keluarga Sehat	%	0,51 indek	0,52	0,54	0,52	0,54	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi	%	85,00%	90,00%	91,00%	90,00%	91,00%	Indikator Sasaran PD
		10	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas	%	84,32%	84,60%	84,80%	84,60%	84,80%	Indikator Sasaran PD
		11	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart	%	85,00%	74,00%	76,00%	86,00%	87,00%	Indikator Sasaran PD
		12	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	%	93,63%	98,00%	99,00%	98,00%	99,00%	Indikator Sasaran PD
		13	Persentase rata-rata IKM puskesmas se-Kota Madiun	%	84,92%	86,20%	86,40%	86,20%	86,40%	Indikator Sasaran PD
		14	Rata - rata nilai PKP Puskesmas	%	86,63%	86,92%	87,53%	86,92%	87,53%	Indikator Sasaran PD
		15	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	58,33%	66,67%	75,00%	66,67%	75,00%	Indikator Program PD
		16	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	85%	90%	91%	85%	91%	Indikator Program PD
		17	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	87,88%	87%	88%	87,88%	88%	Indikator Program PD
		18	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	59,67%	62%	62,50%	62%	62,50%	Indikator Program PD
		19	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	skor	0,48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	Lppd
		20	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		21	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		22	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		24	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	99,78%	100%	100%	100%	100%	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		25	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	89,26%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		26	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		27	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,33%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		28	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	54,99%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		29	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		30	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		31	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	52,68%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		32	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		33	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	tempat	8	8	8	8	8	Lppd
		34	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	tempat	8	8	8	8	8	Lppd
		35	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5 jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd
		36	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	347	330	330	347	347	Lppd
		37	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
		38	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	305	291	291	305	305	Lppd
		39	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6 jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	Lppd
		40	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	305	289	289	305	305	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		41	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	9 jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	Lppd
		42	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	1068	571	571	1068	1068	Lppd
		43	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	2 jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd
		44	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	380	371	371	380	380	Lppd
		45	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
		46	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	590	578	578	590	590	Lppd
		47	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
		48	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1050	1286	1286	1286	1286	Lppd
		49	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
		50	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	164	156	156	164	164	Lppd
		51	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
		52	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	178	169	169	178	178	Lppd
		53	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4 jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
		54	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	30	30	30	30	30	Lppd
		55	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6 jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	Lppd
		56	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	300	748	748	748	748	Lppd
		57	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	jenis	4 jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
		58	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	377	376	376	377	377	Lppd
		59	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
		60	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,29%	100%	100%	100%	100%	Spm

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		61	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	101,19%	100%	100%	Penyesuaian Target	100%	Spm
		62	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	99,78%	100%	100%	100%	100%	Spm
		63	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	89,26%	100%	100%	100%	100%	Spm
		64	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	118,04%	100%	100%	100%	100%	Spm
		65	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	99,33%	100%	100%	100%	100%	Spm
		66	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	54,99%	100%	100%	100%	100%	Spm
		67	Persentase Penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	118,04%	100%	100%	100%	100%	Spm
		68	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	115,09%	100%	100%	100%	100%	Spm
		69	Persentase orang terduga Tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	52,68%	100%	100%	100%	100%	Spm
		70	Persentase orang dengan resiko terinfeksi (<i>human immunodeficiency virus</i>) HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	102,10%	100%	100%	100%	100%	Spm
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
		1	Indeks Ketentraman	Indeks	78,74	77,05	77,15	77,15	77,15	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
		2	Indeks Rasa Aman	Indeks	81,00	76,2	76,27	76,2	76,27	Lanjutan Indikator sasaran kota
		4	Nilai Keamanan dan Ketertiban	Skor	72,45	76,1	76,2	76,1	76,2	Indikator Tujuan PD
		5	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	%	98,57%	97%	97%	97%	97%	Indikator Sasaran PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		6	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	97%	97%	97%	97%	Indikator Program PD
		8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		9	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	97%	97%	97%	97%	Lppd
		10	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		12	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	Lppd
		13	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		2.876	2.000	2.000	2.000	2	Lppd
		14	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	1.348 orang	1.300 orang	1.300 orang	1.300	1300	Lppd
		15	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		93 perda dan perwal	76	76	76	76	Lppd
		16	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Lppd
		17	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Ada	35 SOP	35 SOP	35 SOP	35 SOP	Lppd
		18	Tersedianya sarana prasarana minimal		Ada	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	Lppd
		19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jenis	5 layanan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	Lppd
		20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Lokasi	Ada	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	Lppd

[illegible]

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		36	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		37	Jumlah Destana yang terbentuk	%	4 desa/ kelurahan	5 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	5 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	Indikator Sasaran PD
		39	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		40	Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	%	100%	0%	0%	0%	0%	Indikator Program PD
		41	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	2.575 orang	845 orang	845 orang	3.350	3.420 orang	Lppd
		42	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1.101 orang	50 orang	50 orang	1.125	1.151 orang	Lppd
		43	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	12 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	Lppd
		44	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0	100%	100%	100%	100%	Lppd
		45	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		46	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0	100%	0	100%	Lppd
		47	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0	0%	0	0%	Lppd
		48	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	44,50%	5%	5%	47%	50%	Lppd
		49	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	42,76%	5%	5%	45%	47%	Lppd
		50	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		51	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		0	0	0	0	0	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		52	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		0	0	0	0	0	Lppd
		53	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		54	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		55	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		56	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
		57	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
		58	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
2			Tidak Terkait Pelayanan Dasar							
I			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
		1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	skor	8,15	5,74	5,12	7,47	6,15	Lanjutan Indikator sasaran kota
		2	persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan	%	79,15%	20%	30%	60%	60% (2021: 79%)	Indikator Tujuan PD
		3	persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
		7	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	%	40%	40%	50%	40%	50%	Indikator Sasaran PD
		8	persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja	%	10%	15%	20%	15%	20%	Indikator Sasaran PD
		9	persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		10	persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	%	10%	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
		14	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	20%	25%	30%	25%	30%	Indikator Program PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		15	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	10%	10%	15%	10%	15%	Indikator Program PD
		16	persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	%	16%	16%	16%	16%	16%	Indikator Program PD
		17	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	84,62%	76,92%	76,92%	80%	84,62%	Lppd
		18	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	69,17%	68%	68%	68,50%	69,17%	Lppd
		19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		10.748.101.000	12.500.000.000	12.750.000.000	12.500.000.000	12.750.000.000	Lppd
		20	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100%	71,50%	72,50%	85%	90%	Lppd
		21	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	71,61%	51%	52%	71,50%	71,61%	Lppd
		22	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Do kumen	Ada	1	1	1	1	Lppd
		23	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.		0	0	0	0	0	Lppd
		24	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.		0	10	12	10	12	Lppd
		25	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%	44%	30%	30%	40%	44%	Lppd
		26	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	100%	30%	30%	64%	64%	Lppd
		27	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	100%	50%	50%	85%	90%	Lppd
		28	Persentase LPK yang terakreditasi	%	36%	38%	40%	38%	40%	Lppd
		29	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	92,86%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		30	Jumlah penganggur yang dilatih	%	90 orang	230	230	230	230	Lppd
		31	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		32	Persentase penyerapan lulusan	%	100%	20%	20%	86%	90%	Lppd
		33	Lulusan bersertifikat kompetensi	%	44,44%	20%	20%	40,50%	44,50%	Lppd
		34	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	%	0%	25%	25%	25%	25%	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		35	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	%	0%	25%	25%	25%	25%	Lppd
		36	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	0%	1%	1,50%	1%	1,50%	Lppd
		37	Data tingkat produktivitas total	%	tidak ada	63%	64%	63%	64%	Lppd
		38	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	20,25%	25%	27%	25%	27%	Lppd
		39	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	61,90%	30%	30%	60%	62%	Lppd
		40	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		21 SP/SB	23	23	23	23	Lppd
		41	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	%	8,96%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		42	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100%	70%	73%	95%	100%	Lppd
		43	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	2,52%	5%	4%	5%	4%	Lppd
		44	Jumlah mogok kerja		0	5	4	5	4	Lppd
		45	Jumlah penutupan perusahaan		3 perusahaan	10	9	10	9	Lppd
		46	Jumlah perselisihan kepentingan		0	15	14	15	14	Lppd
		47	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	1	1	1	1	Lppd
		48	Jumlah perselisihan PHK		8	15	14	8	8	Lppd
		49	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		14 orang	60	50	14	14	Lppd
		50	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		0	50	50	50	50	Lppd
		51	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		tidak ada	1	1	1	1	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		52	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	100%	70%	70%	85%	90%	Lppd
		53	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		173	115	120	168	173	Lppd
		54	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	orang	546 orang	325	350	540	540	Lppd
		55	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		19 BKK	19	19	19	19	Lppd
		56	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		0	0	0	0	0	Lppd
		57	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		0	1	1	1	1	Lppd
		58	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		0	0	0	0	0	Lppd
		59	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.		46 perjanjian	50	50	50	50	Lppd
		60	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		0	0	0	0	0	Lppd
		61	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	%	78,26%	10%	10%	78%	78,28%	Lppd
		62	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		46 orang	50	50	50	50	Lppd
		63	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan		0	0	0	0	0	Lppd
		64	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		0	0	0	0	0	Lppd
		65	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya		0	0	0	0	0	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		66	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		0	0	0	0	0	Lppd
	II		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
		1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	A-87,44	A-85	A-86	87,50	88.00	Indikator Tujuan PD
		2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95,47%	92,45%	92,72%	95,50	96.00	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	%	100%	70,00%	70,50%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	96,48%	84,00%	84,50%	96,50	97.00	Indikator Program PD
		5	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	%	94,45%	94,25%	94,50%	94,25%	94,50%	Indikator Program PD
		6	Akurasi database kependudukan	%	99,44%	99,10%	99,15%	99,45	99.46	Indikator Program PD
		7	Perekaman KTP elektronik	%	93,19%	98,50%	98,75%	98,50%	98,75%	Lppd
		8	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	84,68%	90,00%	92,00%	90,00%	92,00%	Lppd
		9	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,50%	99,00%	99,10%	99,00%	99,10%	Lppd
		10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		37,50%	39,39%	63,63%	39,39%	63,63%	Lppd
		11	Penerbitan akta perkawinan	%	100%	99,10%	99,20%	100.00	100.00	Lppd
		12	Penerbitan akta perceraian	%	100%	99,10%	99,20%	100.00	100.00	Lppd
		13	Penerbitan akta kematian	%	100%	98,75%	99,00%	100.00	100.00	Lppd
		14	Penyajian data kependudukan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							
		1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80,84	80,84	80,94	80,84	80,94	Indikator Tujuan PD
		2	Skor Pola Pangan Harapan	skor	95,8 indeks	95,6	95,7	95,6	95.8 (2021: 95,5)	Indikator Sasaran PD
		3	persentase Angka Kecukupan Energi (%)	%	102,9%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		4	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	%	94%	80	80	80	80	Indikator Program PD
		5	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	%	-	-	25%	-	25%	Indikator Program PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		6	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	181,01%	100	100	100	100	Lppd
		7	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/ tidak	Ada	tidak	tidak	Ada/ 1	Ada/ 1	Lppd
		8	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/ tidak	Tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		9	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/ tidak	Tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		10	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
		11	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	unit	Ada	1	1	1	1	Lppd
		12	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/ tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
		13	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/ tidak	Tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		14	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/ tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
IV			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
		1	<i>Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional</i>	%	69,80%	62,54%	63,00%	62,54%	63,00%	Indikator Sasaran PD
		3	Menurunnya Unmet Need	%	< 8 %	8,00%	7,50%	8,00%	7,50%	Indikator Program PD
		4	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	70%	81,00%	82,00%	81,00%	82,00%	Indikator Program PD
		5	Meningkatnya Jumlah SSK	SSK	4 SSK	7 SSK	8 SSK	7 SSK	8 SSK	Indikator Program PD
		6	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	3 KAMPUNG KB	4 KAMPUNG KB	5 KAMPUNG KB	4 KAMPUNG KB	5 KAMPUNG KB	Indikator Program PD
		7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	69,84%	72,78%	72,79%	72,78%	72,79%	Lppd
		8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,90%	<7.9%	<7.8%	8,00%	7,50%	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		9	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan		tidak	-	-	-	-	Lppd
		10	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		27 tahun	Wanita >21 tahun	Wanita >21 tahun	24,8	24,8	Lppd
		11	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	skor	0,75	0,53	0,52	1,56	1,15	Lppd
		12	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		13	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stake holder s	24	16	16	24	24	Lppd
		14	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	97,73%	97,78%	97,78%	97,78%	97,78%	Lppd
		15	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	30,13%	51,00%	52,00%	51,00%	52,00%	Lppd
		16	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		56 KKBPK	56	56	56	56	Lppd
		17	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	48,46%	45,01%	45,02%	48,48%	48,48%	Lppd
		18	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	69,84%	64,96%	64,96%	18,51%	18,51%	Lppd
		19	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							
		1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,06	2,85 (BAIK)	2,87 (BAIK)	2,85	2,87	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
		2	Indeks Domain Layanan SPBE	indeks	3,95	2,87	2,95	2,87	2,95	Indikator Tujuan PD
		3	Indeks Domain Manajemen SPBE		2,30	1,93	1,97	2,81	2,23	Indikator Tujuan PD
		4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	97,33	91	92	91	92	Indikator Sasaran PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%	83%	77%	80%	77%	83%	Indikator Program PD
			Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		10	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100%	73,00%	74%	100%	100%	Lppd
		11	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	81,71%	81,90%	81,92%	81,90%	81,92%	Lppd
		12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		13	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		14	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		15	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		16	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		17	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuaidengan PM Kominfo No.5/2015	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		18	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		19	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		20	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yangtelah diimplementasikan secara elektronik	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		21	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	18,75%	15%	20%	15%	20%	Lppd
		22	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		23	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	100%	82%	84%	100%	100%	Lppd
		24	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		25	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		26	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		27	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		28	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		29	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		30	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		31	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		32	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		33	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
		1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1	1	1	1	1	Indikator Program PD
		3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		4	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		5	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali	1 survey	1	1	1	1	Lppd

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
VII		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							
I	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	2,6	2,42	2,44	2,42	2,6	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks	10,61	8,9	90	8,9	90	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	6%	5,95%	5,95%	5,95%	6%	Indikator Program PD
	4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	37%	37%	37%	37%	37%	Indikator Program PD
	5	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		379,01%	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	Lppd
	6	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	4,70%	4,30%	4,60%	4,30%	4,70%	Lppd
	7	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0,37%	3 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	4 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	3 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	4 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	Lppd
	8	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	%	51,93%	57%	58%	57%	58%	Lppd
	9	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	eksemplar	56 naskah kuno	10 eksemplar	10 eksemplar	0	0	Lppd
	10	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		56 naskah kuno	NIHIL	NIHIL	0	0	Lppd
	11	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		0	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Lppd
IX		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan							
	1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks	59	57	58	57	59	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	%	9%	9%	9%	9%	9%	Indikator Sasaran PD
	3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja (alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Skor	100 skor	86%	88%	86%	100 skor	Indikator Program PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Skor	83,33%	8,4	8,6	8,4	8,6	Indikator Program PD
		5	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100%	9%	9%	100%	100%	Lppd
		6	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100%	9%	9%	100%	100%	Lppd
		7	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100%	6%	6%	100%	100%	Lppd
		8	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		belum dilaksanakan pemusnahan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
		9	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	kali	belum dilaksanakan pemusnahan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
		10	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Daftar arsip	22 arsip	28 daftar arsip yang diselamatkan	31 daftar arsip yang diselamatkan	28 daftar arsip yang diselamatkan	31 daftar arsip yang diselamatkan	Lppd
		11	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi		1 arsip	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
		12	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	arsip	1 arsip	24 arsip hasil alih media	27 arsip hasil alih media	24 arsip hasil alih media	27 arsip hasil alih media	Lppd
		13	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Daftar arsip	1 arsip	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
		14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		1 arsip	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
	3		Fokus Pelayanan Urusan Pilihan							
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi							
		1	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	%	3%	3%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		14	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
			Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	17,71%	21,60%	21,65%	21,60%	21,65%	Lppd
		17	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	32,66%	87,60%	87,70%	87,60%	87,70%	Lppd
II			Sekretariat DPRD							
		2	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	90,297	80	85		85	Indikator Tujuan PD
		4	Persentase Tertib Administrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase Fasilitasi Penganggaran APBD yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Indeks	90,297	80	81		85	Indikator Program PD
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
III			Perencanaan							
		2	Indeks Perencanaan	Indeks	34	34	35	34	35	Indikator Tujuan PD
		5	Indeks Kualitas RPJMD	Indeks	35	33	34	35	36	Indikator Sasaran PD
		6	Indeks Kualitas RKPD	Indeks	35	33	34	35	36	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase capaian kinerja program RKPD	%	100%	92%	93%	96%	96%	Indikator Sasaran PD
		8	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan	Skor	23,65	24,5	25	24,5	25	Indikator Sasaran PD
		9	persentase program penanganan covid-19 yang dilaksanakan	%	0	0	0	0	0	Indikator Sasaran PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		10	persentase sasaran Perangkat Daerah yang berbasis outcome	%	92%	92%	93%	92%	93%	Indikator Sasaran PD
		11	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		12	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	IV		Keuangan							
		1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Lanjutan Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
		3	Persentase pemanfaatan aset daerah	%	58,3%	96%	96%	96%	96%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase tersusunnya Laporan BTT	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase bidang tanah pemerintah kota yang bersertifikat	%	86,9%	80%	80%	88%	89%	Indikator Sasaran PD
		10	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		11	Pengelolaan Aset yang ber kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		12	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	22,66%	21,20%	21,20%	22.66%	22.40%	Lppd
		13	Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas	%	1,81%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Lppd
		14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures)	%	78,03	60,90%	62,20%	78,03%	77.29%	Lppd
		15	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,79%	80%	80%	80%	80%	Lppd
		16	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	1,06%	95,50%	102%	95,50%	102%	Lppd
		17	Manajemen Aset	Ya/ tidak	ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Lppd
		18	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja	%	0,23%	20,10%	19%	20,10%	19%	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
			dalam APBD tahun sebelumnya							
		20	Capaian Target Pajak Daerah	%	107%	100%	100%	86.255.00 0.000	100% (Rp. 91.066.00 0.000)	Indikator Tujuan PD
		21	Persentase peningkatan target pajak daerah	%	7%	5%	5%	7%	7%	Indikator Tujuan PD
		23	persentase peningkatan objek pajak yang dipantau dengan IT	%	5%	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
		24	persentase peningkatan pembayaran pajak melalui transaksi elektronik	%	5%	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
		25	persentase Pencapaian Target Pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	%	7%	100%	100%	7%	100%	Indikator Sasaran PD
		26	persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	7%	10%	10%	7%	10%	Indikator Program PD
		27	Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	%	16%	41%	42%	16%	42%	Indikator Program PD
	IV		Kepegawaian							
		2	Indeks Sistem Merit	Indeks	238	190	220	243	250	Indikator Tujuan PD
		4	Prosentase Penempatan Pegawai dalam Jabatan sesuai dengan SKJ	%	71%	50%	60%	62,53%	63,18%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase kesesuaian usulan pengadaan sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase perencanaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase SKP ASN yang bernilai baik (lebih dari 75)	%	100%	90%	90%	99%	99.73%	Indikator Sasaran PD
		10	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,09%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Indikator Sasaran PD
		11	Persentase terpenuhinya penggajian, penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		12	Persentase data kepegawaian yang mutakhir	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		13	Persentase Pemberhentian ASN tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		14	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Indeks	87,51 skor	87,6	87,7	87,6	87,7	Indikator Program PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		9	Persentase tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan yang bersertifikat dan profesional	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		10	Persentase Laporan BMD yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		11	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan yang disusun sesuai dengan Etika dan Profesionalisme	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		12	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Administrasi Pengawasan yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		13	Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ketaatan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja perangkat daerah	%	-	60%	65%	60%	65%	Indikator Sasaran PD
		15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	60%	65%	60%	65%	Indikator Sasaran PD
		16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	60%	65%	60%	65%	Indikator Sasaran PD
		17	Persentase rekomendasi hasil reviu rencana keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja keuangan daerah	%	-	60%	65%	60%	65%	Indikator Sasaran PD
		18	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun	Nilai	-	71 nilai	75 nilai	71 nilai	75 nilai	Indikator Sasaran PD
		19	Nilai rata - rata evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal dalam kategori Baik pada perangkat daerah Kota Madiun	Nilai	-	76,01	79,01	76,01	79,01	Indikator Sasaran PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		20	Penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	-	2.00	2.50	2.00	2.50	Indikator Sasaran PD
		21	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Indeks	3.0	2.0	2.50	3.52	3,60	Indikator Sasaran PD
		22	Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan untuk mendapatkan predikat menuju WBK	Unit	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Indikator Sasaran PD
		23	Persentase rekomendasi rencana aksi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	60%	65%	60%	65%	Indikator Sasaran PD
		24	Persentase rekomendasi hasil reuiu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	60%	65%	60%	65%	Indikator Sasaran PD
		25	Indeks persepsi pegawai Inspektorat atas Kepuasan Kinerja Inspektorat Kota Madiun	Indeks	-	3.50	3.75	3.50	3.75	Indikator Sasaran PD
		26	Persentase realisasi dukungan layanan manajemen pengawasan internal	%	-	60%	70%	60%	70%	Indikator Sasaran PD
		27	Persentase realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Madiun	%	-	60%	70%	60%	70%	Indikator Sasaran PD
		28	persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	%	30%	35%	40%	35%	40%	Indikator Program PD
		29	persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		30	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	skor	3	3	3	3	3	Lppd
		31	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Skor	2+	2+	3	2+	3	Lppd
	7		Unsur Kewilayahan							
	VII I		Kecamatan							
		2	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	%	44%	44%	55%	44%	55%	Indikator Sasaran PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		3	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	33%	44%	55%	44%	55%	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	%	11%	33%	44%	33%	44%	Indikator Sasaran PD
		5	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	Indeks	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	Indikator Sasaran PD
		6	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo	Indeks	2,90	2,93	2,96	2,93	2,96	Indikator Sasaran PD
		7	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Indeks	3,25	3,3	3,5	3,3	3,5	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		10	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		12	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
		13	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
		14	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	Indeks	90,490 skor	90,03	90,03	90.50	90.50	Indikator Program

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		7	persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		8	persentase Status Kelembagaan Orkemas	%	69%	69%	69%	69%	69%	Indikator Program PD
		9	persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		13	Persentase konflik yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
III			ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	A		Kemampuan Ekonomi							
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
		3	persentase Usaha Mikro yang beromset naik	%	0,05%	0,08%	0,09%	0,08%	0,09%	Indikator Tujuan PD
		4	persentase koperasi yang bersertifikat NIK	%	80%	83%	85%	83%	85%	Indikator Tujuan PD
		7	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat Nik	%	3%	3%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah	%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Beromset Naik Setelah Dipromosikan	%	15%	15%	15%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
		10	Persentase peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan	%	10%	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
		14	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	7%	7%	7,33%	7%	7,33%	Indikator Program PD
		15	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	Indikator Program PD
		16	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Indikator Program PD
		17	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	83,33%	80,65%	80,65%	83,00%	83,33% (2021: 79%)	Lppd
		18	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	100%	0,43%	0,44%	100%	100% (2021: 0,42)	Lppd
		19	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0,64%	80%	80%	80%	80%	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		20	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%	0	0	0	0	Lppd
		21	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	19,23%	16,13%	16,13%	19%	19% (2021: 16,13%)	Lppd
		22	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	25,64%	19,35%	19,35%	25.5%	25.5% (2021: 19,35%)	Lppd
		23	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	96,15%	96,77%	96,77%	96,77%	96,77%	Lppd
		24	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	2,80%	2,35%	2,35%	2,60	2,80% (2021: 2,35%)	Lppd
		25	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	22,44%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	Lppd
		26	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	0,00%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd
		27	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	80,77%	81,29%	81,29%	81,29%	81,29%	Lppd
		28	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Hasil sama dengan no.17			83,00%	83,33% (2021: 79%)	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		29	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,28%	1,29%	1,29%	1,15%	1.29% (2021: 1,29%)	Lppd
		30	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	89,74%	78,71%	78,71%	89,00%	89,74% (2021: 78,71%)	Lppd
		31	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,28%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd
		32	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	0,34%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	Lppd
		33	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		34	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	0,16%	0,14%	0,14%	0,15	0.16% (2021: 0,14%)	Lppd
		35	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0,02%	0,04%	0,06%	0,04%	0,06%	Lppd
		36	Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	0,14%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	Lppd
		37	Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,76%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	Lppd
		38	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	0,19%	0,12%	0,12%	0,17%	0.19% (2021: 0,12%)	Lppd
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
		1	ICOR	Poin	0,42	4,79	4,58	4,79	4,58	Indikator Tujuan PD
		2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	M	202 M	193 M	194 M	193	194 (2021: 191)	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase penerbitan ijin sesuai SP	%	99,86%	80%	82%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		4	Jumlah Rekomendasi Terhadap peraturan daerah/peraturan walikota yang terkait dengan investasi	rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase terpenuhinya informasi yang dibutuhkan investor	%	-	80%	100%	80%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	%	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		7	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	19%	26%	32%	26%	32%	Indikator Program PD
		8	Persentase Pelayanan Perizinan Terselenggarakan	%	99,86%	85%	90%	85%	90 % (2021: 80%)	Indikator Program PD
		9	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	Indikator Program PD
		10	persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		11	Persentase peningkatan investasi kabupaten/ kota	%	-38,30%	1,05%	0,52%	1,05%	0,52%	Lppd
		12	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Dokumen	tidak ada insentif	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
		13	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Dokumen	tidak ada insentif	0	1 dokumen	0	1 dokumen	Lppd
		14	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Dokumen	0	0	0	0	0	Lppd
		15	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kali	1 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
		16	Kegiatan pameran penanaman modal	Kali	0	0	1 kali	0	1 kali	Lppd
		17	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kali	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
		18	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Orang	206 konsultasi	275	280	275	280	Lppd
		19	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Buah	2861	1600	1700	3000	3000	Lppd
		20	Laporan realisasi penanaman modal	M	202.144.39 2.038,81	193 M	194 M	193	194 (2021: 191)	Lppd
		21	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Orang	21 aparatur	15 orang	15 orang	21	21	Lppd
		22	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Perusahaan	498 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	300	300 (2021: 100 2022: 300)	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		23	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Buah	1	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	Lppd
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan							
		1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	skor	1,43%	1,25	1,3	1,25	1,3	Indikator Sasaran PD
		2	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	277 ton	280	285	280	285	Indikator Program PD
		3	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	kg/kapita/tahun	16,1 kg/kapital/tahun	15,7	15,8	16	16.1 (2021: 15,6)	Indikator Program PD
		4	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	ton	-	89	89	89	89	Indikator Program PD
		5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	367 ton	369	375	369	375	Lppd
		6	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	Lppd
		7	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Ada/tidak	0	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
		8	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Ada/tidak	0	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
		9	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	180	245	250	245	250	Lppd
		10	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	ekor	450314 ekor	497,400 ekor	517.400 ekor	497,400 ekor	517.400 ekor	Lppd
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
		2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	351.554 orang	400.000	425.000	400.000	425.000	Indikator Tujuan PD

[illegible]

1			2	3	4	5	6	7	8	9
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
		2	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1,4%	1,214	1,216	1,214	1,216	Indikator Sasaran PD
		3	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	rasio	1,05	1,12	1,14	1,12	1,14	Indikator Sasaran PD
		4	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	50%	55	60	60	60	Indikator Program PD
		5	persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	%	50%	50	75	75	75	Indikator Program PD
			persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	%	10%	10	10	10	10	Indikator Program PD
		8	persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	89,5%	72	74	74	74	Indikator Program PD
		9	persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	%	-	10	12	10	12	Indikator Program PD
			persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	%	15%	20	20	20	20	Indikator Program PD
		11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		17.776	7,22 ton/Ha	-	7	7,12 (2021: 7,21)	Lppd
		12	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis	1	2	2	2	2	Lppd
		13	Prasarana pertanian yang digunakan	Jenis	1 unit	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	Lppd
		14	Penerbitan izin usaha pertanian	Kali	-	2	2	2	2	Lppd
		15	Persentase prasarana yang digunakan	%	66,70%	75	75	75	75	Lppd
		16	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	%	-	50	50	50	50	Lppd
		17	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (%)	%	70,29%	50	50	50	50	Lppd
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
		1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	10,16	2,44	2,91	10.16	10.16 (2021: 2,16)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
		2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	%	11,32	0,76	0,84	11.32	11.32 (2021: 0,58)	Indikator Sasaran Kota
		5	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		25,25	24,05	24,05	25.25	25.25 (2021: 24,05)	Indikator Tujuan PD
		6	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	%	1,3%	0,6	0,7	0,6	0,7	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase Layanan UTPP dan pengawasan BDKT yang terealisasi		-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		8	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat		-	14,59%	5%	14,59%	5%	Indikator Sasaran PD
		9	persentase perusahaan yang memperbarui perijinan	%	114%	100%	100%	100%	100% (2021: 100%)	Indikator Program PD
		11	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		12	persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		14	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		15	persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		16	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	23,89%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		17	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	53,09%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		18	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	116,94%	100%	100%	100%	100% (2021: 100%)	Lppd
		19	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :							
			a. Pusat perbelanjaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
			b. Toko swalayan	%	75%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		20	Persentase penerbitan TDG	%	33,33%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		21	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	%	56,33%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		22	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		23	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	%	tidak ada	100%	100%	100%	100%	Lppd
		24	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Ada/ tidak	tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
		25	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	100%	50%	50%	100%	100% (2021: 100%)	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		26	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Ada/ tidak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
		27	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan	%	79,44%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		38	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
VII			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
		2	persentase IKM yang berstandarisasi	%	40%	42%	44%	42%	44%	Indikator Tujuan PD
		4	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	%	70%	75%	80%	75%	80%	Indikator Sasaran PD
		5	persentase pengajuan rekomendasi permodalan yang disetujui	%	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Sasaran PD
		6	persentase pengajuan perijinan NIB yang direkomendasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	persentase peningkatan IKM terpublikasikan	%	9%	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
		10	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	12,83%	10,00%	10,00%	12,50	12.83% (2021: 10%)	Indikator Program PD
		11	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	2,50%	5%	5%	5%	5%	Indikator Program PD
		12	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	3,85%	0,02%	0,02%	3,75%	3.8% (2021: 0,02%)	Lppd
		13	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	Lppd
		14	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	25%	25%	85%	90% (2021: 25%)	Lppd
		15	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0%	0%	0%	0%	0%	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		16	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	%	0%	0%	0%	0%	0%	Lppd
		17	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	810%	45%	45%	832	864 (2021: 45%)	Lppd
		18	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	%	0%	0%	0%	0%	0%	Lppd
		19	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	%	75%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		20	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	14,29%	50%	50%	50%	50%	Lppd
		21	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	%	tidak ada	0%	0%	0%	0%	Lppd
		22	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	2,47%	1%	1,20%	4,20%	4.32% (2021: 1%)	Lppd
	B		Fasilitas Wilayah Infrastruktur							
		1	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	Indeks	89,40	88,19	88,6	89,40	89,40	Indikator Tujuan Kota
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
		1	Indeks Infrastruktur	Indeks	97,99	98,25	98,42	98,25	98,42	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
		2	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	%	80,70%	80,89%	81,58%	80,89%	81,58%	Indikator Sasaran PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		3	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran dan Indikator Program PD
		4	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	%	94,03%	95,00%	95,50%	95,00%	95,50%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase jalan dalam kondisi mantab	%	94,50%	95,00%	95,50%	95,00%	95,50%	Indikator Program PD
		8	Persentase rawan banjir/genangan	%	19,30%	19,09	18,47	19,09	18,47	Indikator Program PD
		9	Persentase pelaku jasa kontruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	95%	62,83%	77,98%	62,83%	77.98%	Indikator Program PD
		10	Persentase Rumah Tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	98,14%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		11	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	80,03%	80,06%	80,09%	80,06%	80,09%	Indikator Program PD
		12	Ketaatan terhadap RTRW	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		13	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		14	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100%	79.47%	79.47%	80,06%	80.09 %	Lppd
		15	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		0	0	0	0	0	Lppd
		16	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		0	0	0	0	0	Lppd
		17	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	98,14%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		18	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,02%	99%	99%	99%	99%	Lppd
		19	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	99,52%	72,68	72,69	72,68	72,69	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		20	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	%	99,06%	94,05%	94,06%	95%	95.5 %	Lppd
		21	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	95%	59.4%	67.8%	62,83%	77.98 %	Lppd
		22	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Km	6,7	3,5 Km	3,3Km	6,35	6.12	Lppd
		23	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	M	72.776	19.334 M	19.334 M	58.720	58.290	Lppd
		24	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)		0	0	0	0	0	Lppd
		25	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)		0	0	0	0	0	Lppd
		26	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/ tidak	ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		27	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/ tidak	ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		28	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota		ada 6 pintu air, 4 pompa banjir, 9 kolam retensi	0	0	2	0	Lppd
		29	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik		0	0	0	0	0	Lppd
		30	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		0	0	0	0	0	Lppd
		31	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		0	0	0	0	0	Lppd
		32	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		33	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		34	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)		1 BUMD	1	1	1	1	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		35	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM		0	0	0	0	0	Lppd
		36	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.		0	0	0	0	0	Lppd
		37	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		0	0	0	0	0	Lppd
		38	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		0	0	0	0	0	Lppd
		39	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		0	0	0	0	0	Lppd
		40	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		0	0	0	0	0	Lppd
		41	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		0	0	0	0	0	Lppd
		42	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		0	0	0	0	0	Lppd
		43	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	%	98,02	100	100	100	100	Lppd
		44	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		0	0	0	0	0	Lppd
		45	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		0	0	0	0	0	Lppd
		46	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		0	0	0	0	0	Lppd
		47	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		0	0	0	0	0	Lppd
		48	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		0	0	0	0	0	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		49	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD		0	0	0	0	0	Lppd
		50	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		0	0	0	0	0	Lppd
		51	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	19,13%	98%	98%	98%	98%	Lppd
		52	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Buah	171	415	420	415	420	Lppd
		53	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		54	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		55	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	unit	20 unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
		56	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	unit	20 unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
		57	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	unit	230	230	230	230	230	Lppd
		58	Jumlah bangunan gedung negara milik peerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	unit	23 unit	5 Unit	5 Unit	12	26	Lppd
		59	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	km	433,485 Km	433,095 Km	433,095 Km	433.095	433.095	Lppd
		60	Panjang jalan yang dibangun	km	1,888 Km	0,45 km	0,45 km	3,7	0.45	Lppd
		61	Panjang jembatan yang dibangun	m	31,8 m	20 m	20 m	30	20	Lppd
		62	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	km	2,391 km	3,5 km	3,5 km	3,5 km	3,5 km	Lppd
		63	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		0	0	0	0	0	Lppd
		64	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	km	8,563 km	5 km	5 km	6,2	5	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		65	Panjang jembatan yang direhabilitasi		0	0	0	0	0	Lppd
		66	Panjang jalan yang dipelihara	km	51 km	40 km	40 km	52	40	Lppd
		67	Panjang jembatan yang dipelihara	Km	3,9 km	3,8 km	3,8 km	3,9	3.8	Lppd
		68	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	Kali	2 orang	3	3	3	3	Lppd
		69	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang	495 orang	125	125	75	125	Lppd
		70	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Orang	236 orang	30	30	10	30	Lppd
		71	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		72	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	Ada/tidak	tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		73	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	Ada/tidak	tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		74	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/tidak	tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		75	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		76	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	data	1	1	1	1	1	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		77	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada/tidak	ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Lppd
		78	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada/tidak	ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Lppd
		79	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada/tidak	ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		80	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		81	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/tidak	tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		82	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		83	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

[illegible]

1			2	3	4	5	6	7	8	9
II			Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
		1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	Indeks	89,22	90,14	91,17	90,14	91,17	Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Perumahan Permukiman	Indeks	99,74%	99,68	99,8	99,68	99,8	Lanjutan Indikator Sasaran PD
		3	Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman	Indeks	76,47%	78,48	80,62	78,48	80,62	Lanjutan Indikator Sasaran PD
		4	persentase Pengembangan Perumahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		5	persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	99,39%	99,00%	99,50%	99,00%	99,50%	Indikator Program PD
		6	persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		0	0	0	0	0	lppd
		8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Kk	65	105 KK	105 KK	105 KK	105 KK	lppd
		9	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	68,32%	55,95%	74,55%	55,95%	74,55%	lppd
		10	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	133	60 unit	100 unit	100	100	lppd
		11	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	41	40	45	40	45	lppd
		12	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		0	0	0	0	0	lppd
		13	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		0	0	0	0	0	lppd
		14	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	0	0	0	0	lppd
		15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		0	0	0	0	0	lppd
		16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		0	0	0	0	0	lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		0	0	0	0	0	lppd
		18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		0	0	0	0	0	lppd
		19	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		0	0	0	0	0	lppd
		20	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	0	0	lppd
		21	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	0	0	lppd
		22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	0	0	lppd
		23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	KK	65 rumah tangga	105 KK	105 KK	105 KK	105 KK	lppd
		24	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	0	0	lppd
		25	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		0	0	0	0	0	lppd
		26	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	64,49 Ha	28,41 ha	16,41 ha	28,41 ha	16,41 ha	lppd
		27	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	133 unit	60 unit	100 unit	100	100	lppd
		28	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	ha	31,98 Ha	12,08 ha	12,08 ha	8,35	12,08	lppd
		29	Jumlah rumah di kab/kota	unit	41.409 rumah	42.379	42.429	42.379	42.429	lppd
		30	Jumlah unit PK RTLH	unit	133 rumah	60 unit	100 unit	100	100	lppd
		31	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	133 rumah	240 unit	140 unit	240 unit	140 unit	lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		32	Jumlah rumah yang tidak dihuni	unit	0	0	0	0	0	lppd
		33	Rasio rumah dan KK	%	125,98%	170%	170%	170%	170%	lppd
		34	Jumlah rumah pembangunan baru	unit	120 rumah	50	50	50	50	lppd
		35	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	unit	41 rumah	40	45	40	45	lppd
		36	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	unit	6096 rumah	5948 unit	5948 unit	6245	6245	lppd
		37	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	unit	6096 rumah	5948 unit	5948 unit	6245	6245	lppd
		38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	unit	6096 rumah	5948 unit	5948 unit	6245	6245	lppd
		39	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	unit	41 pengembang g	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
		40	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit	6096 rumah	5948 unit	5948 unit	6245	5948 unit	lppd
		41	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	orang	41 pengembang	40	45	40	45	lppd
		42	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Orang	41 pengembang	40	45	40	45	lppd
		43	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	orang	41 pengembang	40	45	40	45	lppd
		44	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
		45	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100%	100%	100%	100%	100%	spm
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan							
		1	persentase Pengelolaan Izin Lokasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		2	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		3	persentase Penatagunaan Tanah	%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ha	30,52	30,52 ha	30,52 ha	30,52 ha	30,52 ha	Lppd
		6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.		100%	0	0	100	100	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		0	0	0	0	0	Lppd
		8	Tersedianya tanah untuk masyarakat.		0	0	0	0	0	Lppd
		9	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	kali	1	1	1	1	1	Lppd
		10	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Do kumen	100	1	1	100	100	Lppd
		11	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		tidak ada	0	0	0	0	Lppd
		12	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.		tidak ada	0	0	0	0	Lppd
		13	Dokumen Izin membuka tanah		tidak ada	0	0	0	0	Lppd
		14	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		tidak ada	0	0	0	0	Lppd
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,99%	57,77	57,85	57,77	57,85	Lanjutan indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,61	51,3	51,31	51,3	51.31	Indikator sasaran PD
		3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,78	82,9	83,09	82,9	83.09	Indikator sasaran PD
		4	persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	98,04%	98,50%	99,00%	98,50%	99,00%	Indikator sasaran PD
		5	persentase data Perencanaan LH yang tersedia	%	69,23%	71,79%	79,49%	71,79%	79,49%	Indikator Program PD
		6	persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	55,90%	49%	50%	49%	50%	Indikator Program PD
		7	persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	%	94,32%	94,32%	97,20%	94,32%	97,20%	Indikator Program PD

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		8	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	%	72,5%	71,5	75%	71,5	75%	Indikator Program PD
		9	persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	54,65%	64,70%	76,47%	64,70%	76,47%	Indikator Program PD
		10	persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	90%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		11	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	140%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		12	persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	73,98%	73%	72%	73%	72%	Indikator Program PD
		13	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	98,04%	98,50%	99,00%	98,50%	99,00%	Lppd
		14	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		15	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
		16	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	%	1,576	1,6035	1,603	1,6035	1,603	Lppd
		17	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	%	5,99	5,983	5,982	5,983	5,982	Lppd
		18	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing - masing lingkungan		belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	Lppd
		19	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100,00%	64,70%	76,47%	100%	100%	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		20	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		tidak ada	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	Lppd
		21	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota		tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
		22	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
		23	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		24	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
		1	Kinerja ruas jalan	%	0,34	0,42	0,41	0,42	0,41	Indikator Tujuan PD
		2	Kecepatan lalu lintas	Km/ jam	38,05 kam/ jam	39 km/jam	40 km/jam	39 km/jam	40 km/jam	Indikator Sasaran PD
		3	Kinerja Angkutan Umum	%	40%	41%	42%	41%	42%	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	%	84%	88%	92%	88%	92%	Indikator Program PD
		5	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0	-	-	-	-	Lppd
		6	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,34%	0,42	0,41	0,42	0,41	Lppd
		7	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		8	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	106,63%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		9	Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd

2022* dan 2023* merupakan target penyesuaian pada dokumen RKPD karena melihat Realisasi Tahun 2021

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021 dan BPS Kota Madiun, 2021

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan tahunan ini memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaannya.

Tahapan dalam penyusunan RKPD tahun 2023 dilakukan mulai dari konsultasi publik, Forum Perangkat Daerah sampai dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diikuti oleh berbagai profesi mulai dari perwakilan organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan dunia usaha, serta masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Pelaksanaan forum Musrenbang dimaksud dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Seluruh masukan/saran, aspirasinya berupa tanggapan serta pertimbangan-pertimbangan yang rill terhadap kebijakan pemerintah daerah, telah menjadi masukan untuk menyempurnakan dokumen RKPD tahun 2022 ini.

Penyusunan RKPD 2023 telah mengikuti berbagai pendekatan yaitu : pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas - bawah dan bawah - atas (*top down* dan *bottom up*). Hal ini menunjukkan, bahwa semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2023. Dalam penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 ini senantiasa memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dalam upaya untuk menjamin adanya keselarasan, sinergi dan harmonisasi antar dan antara dokumen perencanaan pembangunan tingkatan pemerintahan. Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2023 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam dokumen RKPD ini memuat dan mengintegrasikan pula program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Madiun dalam rangka mendukung program prioritas Kota Madiun.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023 yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2023. Dengan ditetapkannya dokumen RKPD Tahun 2023 ini diharapkan nantinya dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan, dan sebagai media evaluasi bagi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah dapat terwujud dan terukur hasil kinerjanya sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19750117 199602 1 001